PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2022

I. PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan

2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang telah disepakati bersama dengan DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan; dan
8. Arus kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2021tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 151);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 77);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 159);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 46);
24. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
25. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
26. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. Ekonomi Makro;
2.2. Kebijakan Keuangan;
2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD;

III. Kebijakan Akuntansi

3.1. Entitas Akuntansi;
3.2. Entitas Pelaporan;
3.3. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
3.4. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
3.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP;
3.5.1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3.5.2. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan;
3.5.3. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3.5.4. Kebijakan Akuntansi Neraca;
3.5.5. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA;
3.5.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO;
3.5.7. Kebijakan Akuntansi Beban;
3.5.8. Kebijakan Akuntansi Belanja;
3.5.9. Kebijakan Akuntansi Transfer;
3.5.10. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
3.5.11. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
3.5.12. Kebijakan Akuntansi Investasi;
3.5.13. Kebijakan Akuntansi Piutang;
3.5.14. Kebijakan Akuntansi Persediaan;
3.5.15. Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar;
3.5.16. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
3.5.17. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan;
3.5.18. Kebijakan Akuntansi Dibayar Dimuka;
3.5.19. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
3.5.20. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;
3.5.21. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana.

IV. Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan

V. Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
5.1.1 Pendapatan – LRA;
5.1.2 Belanja;
5.1.3 Pembiayaan;
5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
5.3. Penjelasan Pos -pos Neraca;Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
5.3.1 Aset;
5.3.2 Kewajiban;
5.3.3 Ekuitas;
5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO);
5.4.1 Pendapatan – LO
5.4.2 Beban
5.4.3 Kegiatan Non Operasional
5.4.4 Pos Luar Biasa;
5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)
5.6.1 Arus Kas dari Operasi;
5.6.2 Arus Kas dari Invenstasi Aset Non Keuangan;
5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan;
5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris;

VI. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

6.1. Administrasi Pemerintahan;
6.2. Organisasi Perangkat Daerah;
6.3. Kepegawaian Daerah;

VII.Penutup

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu daerah otonomi yang baru terbentuk pada tahun 2008. Kabupaten Tulang Bawang Barat telah berupaya dan bekerja keras guna meningkatkan pembangunan disetiap sektor ekonomi, khususnya sektor penunjang perkonomian. Upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan.

Periode kepemimpinan Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 Kabupaten Tulang Bawang Barat memulai pembangunan diberbagai sektor, khususnya sektor pembangunan dimulai dengan pembangunan gedung, pembuatan jembatan, perbaikan dan pelebaran jalan. Begitu pula sektor-sektor lainnya seperti komunikasi, angkutan dan lain-lain.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total keseluruhan dari nilai tambah (*value added*) yang timbul akibat adanya aktivitas ekonomi. PDRB merupakan data statistik yang dapat dijadikan ukuran kuantitatif guna mengevaluasi dan memonitor hasil pembangunan yang telah diprogramkan oleh pemerintah daerah. Perkembangan PDRB sangat ditentukan oleh potensi ekonomi yang ada serta kondisi sosial dan politik yang kondusif. Dalam prakteknya PDRB terdiri dari PDRB atas harga berlaku yang memiliki kaitan erat dengan analisis pendapatan perkapita dan PDRB atas harga konstan yang dapat digunakan sebagai analisis tingkat pertumbuhan ekonomi.

PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 sebesar 13.233.014,81 juta rupiah, sedangkan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat atas dasar harga konstan menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 sebesar 8.328.392,06 juta rupiah. Laju

pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada Tahun 2022 mengalami kenaikan dari Tahun 2021. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha pada Tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 1,2 triliun rupiah jika dibandingkan Tahun 2021. Dari 9 sektor, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan penyumbang terbesar dengan nilai tambah sebesar 500 juta rupiah, disusul sektor perdagangan besar dan eceran dengan nilai tambah sebesar 353 juta rupiah, sektor industri pengolahan dengan nilai tambah sebesar 175 juta rupiah dan konstruksi sebesar 113 milyar rupiah. Sedangkan sektor terkecil sumbangannya adalah sektor pengadaan listrik dan gas. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai tahun 2022 mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat dari sumbangsih nilai tambah di tiap sektornya.

Tabel 2.1. PDRB ADHB dan ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018–2022

Tahun	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	PDRB ADHK (Juta Rupiah)
2018	10.654.951,42	7.451.021,82
2019	11.455.302,94	7.850.702,10
2020	11.420.341,01	7.747.240,45
2021*	11.960.549,91	7.970.780,97
2022**	13.233.014,81	8.328.392,07

**: Angka Sementara*

***: Angka Sangat Sementara*

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 2.1. PDRB ADHB dan ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017–2021

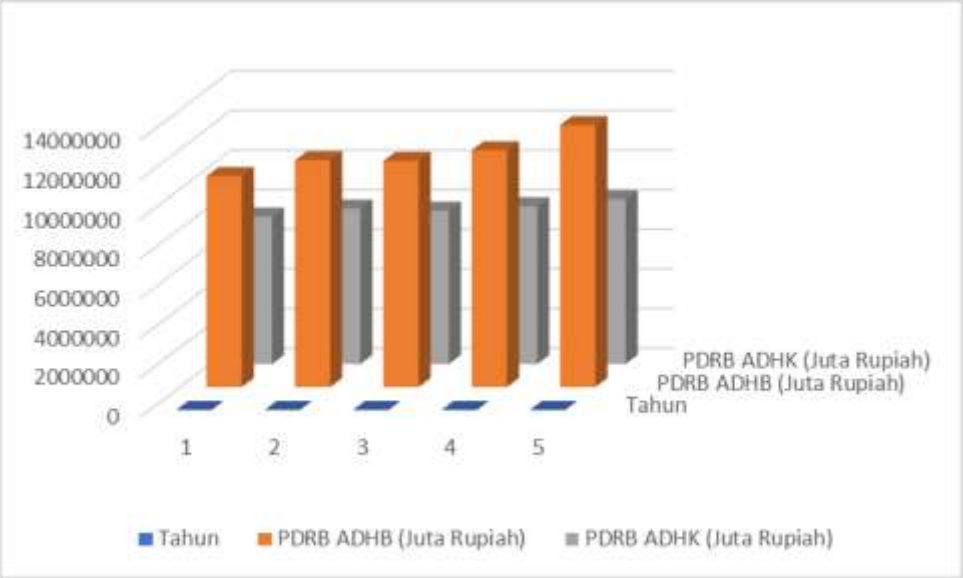

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Struktur perekonomian daerah ditentukan oleh besarnya sumbangan masing-masing sektor pembentuk perekonomian daerah. Berikut persentase sumbangan sektor-sektor perekonomian yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat:

Tabel 2.2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2018-2022

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.787.651,93	3.899.848,39	4.013.529,97	4.129.182,82	4.629.468,84
B	Pertambangan dan Penggalian	54.384,11	56.738,56	56.415,84	54.020,03	57.632,03
C	Industri Pengolahan	3.122.541,92	3.445.366,82	3.244.844,95	3.491.056,69	3.666.330,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.966,08	4.322,62	4.701,01	5.026,12	5.261,58
E	Pengadaan Air, PeGngelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.833,63	10.363,25	10.919,39	11.526,51	12.086,77
F	Konstruksi	910.963,96	1.001.684,66	969.007,96	1.042.022,90	1.155.329,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.101.120,61	1.214.071,59	1.230.148,09	1.294.818,32	1.648.556,49

H	Transportasi dan Pergudangan	90.050,31	96.975,55	96.059,45	101.082,94	128.413,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	98.679,38	108.396,42	105.128,26	107.266,94	122.621,51
J	Informasi dan Komunikasi	539.803,00	588.850,26	632.889,57	640.017,78	650.576,61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	58.730,79	60.720,22	62.469,52	67.564,70	71.278,03
L	Real Estate	207.278,91	231.004,66	228.586,08	232.859,06	251.292,77
M,N	Jasa Perusahaan	7.326,00	7.665,62	7.638,85	7.922,66	9.060,79
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	312.015,75	333.089,59	353.074,61	357.415,15	372.010,74
P	Jasa Pendidikan	256.316,78	282.175,56	298.081,06	307.981,65	331.747,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	45.798,58	49.950,16	55.684,69	58.732,55	60.383,34
R,S,T,U	Jasa lainnya	48.489,68	54.079,00	51.161,70	52.053,07	60.963,60
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**10.654.951,42**	**11.445.302,94**	**11.420.341,01**	**11.960.549,91**	**13.233.014,81**

**: Angka Sementara*
***: Angka Sangat Sementara*
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, struktur perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi oleh sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Selama kurun waktu 2017-2021, lebih dari 35 persen struktur perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat berasal dari sumbangan sektor pertanian. Kemudian sektor industri pengolahan lebih dari 27 persen, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor lebih dari 12 persen, sektor konstruksi lebih dari 8 persen dan transportasi dan informasi dan komunikasi lebih dari 5 persen. Sedangkan untuk sektor Pengadaan Listrik dan Gas menyumbang kontribusi terkecil sebesar 0,03 persen. Dari tabel di atas terlihat bahwa di Tahun 2022 seluruh sektor mengalami kenaikan.

Tabel 2.3. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2017-2021

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.592.076,2	2.613.177,54	2.646.191,24	2.671.802,99	2.793.200,36
B	Pertambangan dan Penggalian	37.857,5	39.284,53	38.678,17	36.577,95	37.586,87
C	Industri Pengolahan	2.138.815,6	2.330.898,29	2.172.215,59	2.298.177,76	2.312.432,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.291,5	3.508,62	3.838,33	3.964,99	4.109,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.801,1	7.135,19	7.509,84	7.773,43	8.064,12
F	Konstruksi	670.126,5	722.975,62	702.009,33	716.470,72	751.205,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	861.251,6	912.398,25	907.029,24	936.310,69	1.077.173,71
H	Transportasi dan Pergudangan	62.964,6	67.440,68	65.423,72	66.814,18	75.859,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	63.437,2	68.952,33	66.361,01	66.477,57	74.483,94
J	Informasi dan Komunikasi	372.477,7	403.742,72	436.849,62	450.610,38	454.509,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	39.896,4	40.647,31	41.884,78	43.059,32	41.717,99
L	Real Estate	163.561,2	172.988,07	169.987,00	172.791,79	181.116,57
M,N	Jasa Perusahaan	5.247,7	5.393,18	5.315,87	5.427,50	5.980,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	189.895,6	201.199,97	211.139,25	216.417,73	220.291,60
P	Jasa Pendidikan	176.695,9	189.266,24	198.939,98	202.142,92	210.231,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	32.855,1	35.208,76	39.055,63	40.766,26	40.714,52
R,S,T,U	Jasa lainnya	33.770,6	36.484,80	34.811,86	35.194,79	39.713,71
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**7.451.021,8**	**7.850.702,1**	**7.747.240,45**	**7.970.780,97**	**8.328.392,07**

**: Angka Sementara*
***: Angka Sangat Sementara*
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir (2018–2022) terlihat bahwa sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dan industri pengolahan masih mendominasi perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat, hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut masih menjadi sektor basis atau sektor unggulan yang menjadi tulang punggung sebagian besar masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Analisa pertumbuhan ekonomi adalah suatu bentuk analisis terhadap parameter PDRB yang menggambarkan perkembangan suatu sektor secara riil dan objektif. Riil dalam arti bahwa angka pertumbuhan diperoleh dengan mengeliminir pengaruh kenaikan harga (inflasi). Sedangkan yang dimaksud dengan objektif adalah bahwa kenaikan/penurunan nilai tambah tersebut pembandingnya adalah nilai tambah sektor yang bersangkutan pada tahun sebelumnya berdasarkan harga konstan.

Dengan demikian angka pertumbuhan ini merupakan suatu indikator yang cukup relevan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Sehingga dapat diambil langkah–langkah yang strategis untuk meningkatkan pembangunan daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi. Adapun langkah yang diambil tidak terlepas dari seberapa besar peran sektor terhadap pertumbuhan, kondisi fundamental ekonomi dan bagaimana tingkat urgensi dari suatu kebijakan terhadap kepentingan masyarakat pada umumnya.

Sektor pengeluaran konsumsi rumah tangga masih mendominasi perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat, hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut menjadi basis perekonomian pada Konsumsi Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Tabel 2.4. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (%) di Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2018-2022

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35,55	34,07	35,14	34,52	34,98
B	Pertambangan dan Penggalian	0,51	0,50	0,49	0,45	0,44
C	Industri Pengolahan	29,31	30,10	28,41	29,19	27,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,10	0,10	0,09
F	Konstruksi	8,55	8,75	8,48	8,71	8,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,33	10,61	10,77	10,83	12,46
H	Transportasi dan Pergudangan	0,85	0,85	0,84	0,85	0,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,93	0,95	0,92	0,90	0,93
J	Informasi dan Komunikasi	5,07	5,14	5,54	5,35	4,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,55	0,53	0,55	0,56	0,54
L	Real Estate	1,95	2,02	2,00	1,95	1,90
M,N	Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,93	2,91	3,09	2,99	2,81
P	Jasa Pendidikan	2,41	2,47	2,61	2,57	2,51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,43	0,44	0,49	0,49	0,46
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,46	0,47	0,45	0,44	0,46
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir (2018–2022) terlihat bahwa sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dan industri pengolahan masih mendominasi perekonomian Kabupaten

Tulang Bawang Barat, hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut masih menjadi sektor basis atau sektor unggulan yang menjadi tulang punggung sebagian besar masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat Regional Bruto Per Kapita menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 sebesar 45.690.956,48 juta rupiah, sedangkan penduduk pertengahan tahun Kabupaten Tulang Bawang Barat atas sebesar 289.620 juta. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Rupiah) di Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2018-2022

Tahun	PDRB (Miliar Rupiah)	Penduduk Pertengahan Tahun	PDRB Perkapita (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	10.654.951,42	271.206	39.287.299,78
2019	11.445.302,94	273.420	41.859.786,93
2020	11.420.341,01	285.712	39.971.513,30
2021*	11.960.549,91	287.707	41.571.980,92
2022**	13.233.014,81	289.620	45.690.956,48

**: Angka Sementara*
***: Angka Sangat Sementara*
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

2.1.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dan berkesinambungan. Dalam kerangka pembangunan, penduduk merupakan sumber utama modal pembangunan. Penduduk berperan dan berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam semua proses kegiatan pembangunan. Peranan dan partisipasi penduduk sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas penduduk itu sendiri. Kuantitas penduduk dengan tingkat pertumbuhan yang terkendali menjadi pendorong kelangsungan pembangunan. Sedangkan kualitas penduduk yang tinggi menjadi modal dasar peningkatan kemajuan pembangunan. Salah satu Indikator lainnya yang digunakan untuk melihat kuantitas dan kualitas penduduk ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH); pendidikan diukur dari dua komponen yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata Lama Sekolah; dan

komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah). Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2018-2022

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia	
	Tulang Bawang Barat	Provinsi Lampung
(1)	(2)	(3)
2018	65,30	69,02
2019	65,93	69,57
2020	65,97	69,69
2021	66,22	69,90
2022	67,13	70,45

Berdasarkan rata-rata ketiga komponen tersebut, pada Tahun 2022 diperoleh IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 67,13 poin, lebih rendah dari rata-rata Provinsi Lampung yang mencapai 70,45 poin. IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya namun masih berada di bawah IPM Provinsi Lampung yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2022, IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat menempati posisi ke-12 dari 15 Kabupaten/ kota di Provinsi Lampung.

Gambar 2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tulang Bawang Barat Terhadap Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

Gambar 2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung Tahun 2022

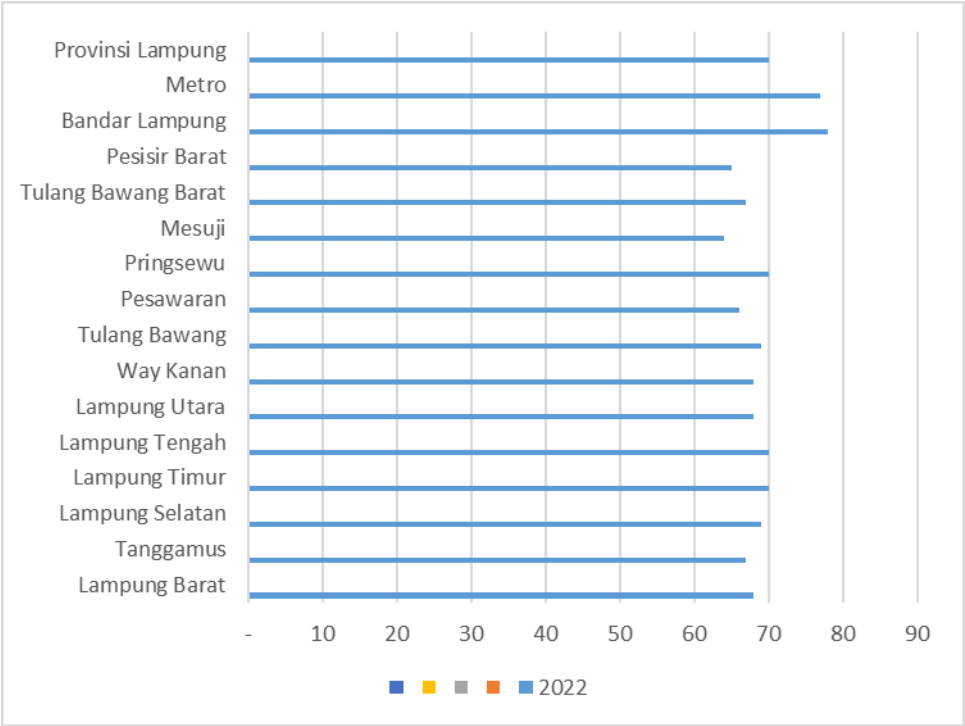

**: Angka Sementara*
***: Angka Sangat Sementara*
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

2.1.3. Garis Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan adalah gabungan dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan untuk hidup layak. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin, hal ini merupakan konsep pengukuran kemiskinan berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuan dasar.

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-

kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 20,72 (Ribu Jiwa).

Gambar 2.3 Garis Kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019-2021

**: Angka Sementara*

***: Angka Sangat Sementara*

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 adalah sebesar 20.072 jiwa atau turun dari Tahun 2021 adalah sebesar 23.030 jiwa.

Tabel 2.7 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tulang Bawang Barat Terhadap Provinsi Lampung Tahun 2021

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin 2021
Lampung Barat	11,71
Tanggamus	10,98
Lampung Selatan	13,14
Lampung Timur	13,98
Lampung Tengah	10,96
Lampung Utara	18,41
Way Kanan	11,76
Tulang Bawang	8,42
Pesawaran	13,85
Pringsewu	9,34
Mesuji	6,84
Tulang Bawang Barat	7,44
Pesisir Barat	13,84
Bandar Lampung	8,21
Metro	7,87
Provinsi Lampung	11,57

2.1.4. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tulang Bawang Barat terlihat fluktuatif setiap tahunnya. Pada Tahun 2022, TPT mengalami kenaikan yaitu menjadi 4.120 dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 3.350.

Tabel 2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tulang Bawang Barat Terhadap Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

Tahun	TPT
2018	2,95
2019	3,57
2020	3,46
2021	3,35
2022	4,12

Gambar 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 – 2022

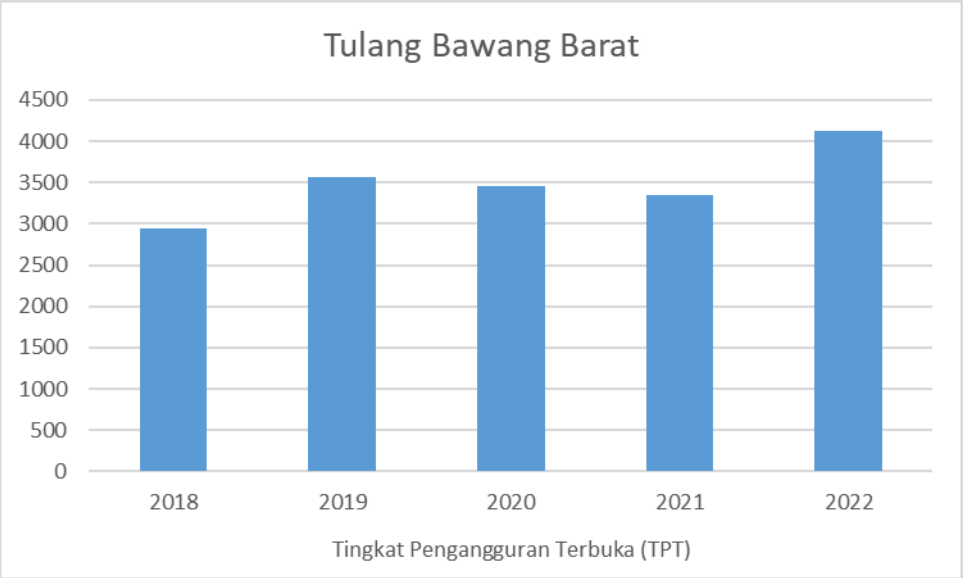

**: Angka Sementara*
***: Angka Sangat Sementara*
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

2.1.5 Ketimpangan Pendapatan Penduduk (Indeks Gini)

Ukuran Indeks Gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidak merataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Skala nilai Indeks Gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Angka nol menunjukkan pendapatan yang sangat merata, sementara angka satu menunjukkan tingkat pendapatan yang sangat tidak merata (sangat timpang). Pada periode tahun 2018 – 2022, Indeks Gini Provinsi Lampung secara umum menunjukkan tren yang menurun dari tahun ke tahun. Di sisi teori, Indeks Gini Provinsi Lampung yang tercatat sebesar 0,31 di tahun 2022. Membandingkan dengan nilai Indeks Gini Nasional, maka Indeks Gini Provinsi Lampung masih berada dibawah nilai Indeks Gini secara Nasional yang tercatat sebesar 0,38.

Meskipun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kesenjangan pendapatan sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti: peningkatan kriminalitas atau konflik sosial. Oleh karenanya, upaya melakukan redistribusi pendapatan antar kelompok pendapatan akan tetap menjadi fokus perhatian, sehingga mampu mendorong redistribusi perekonomian daerah.

Tabel 2.9 Gini Ratio Kabupaten Tulang Bawang Barat Terhadap Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

Tahun	Gini Ratio
2018	0,316
2019	0,316
2020	0,272
2021	0,282
2022	0,261

Grafik 2.5
Indeks Gini Provinsi Lampung dan IndonesiaTahun 2018 – 2022

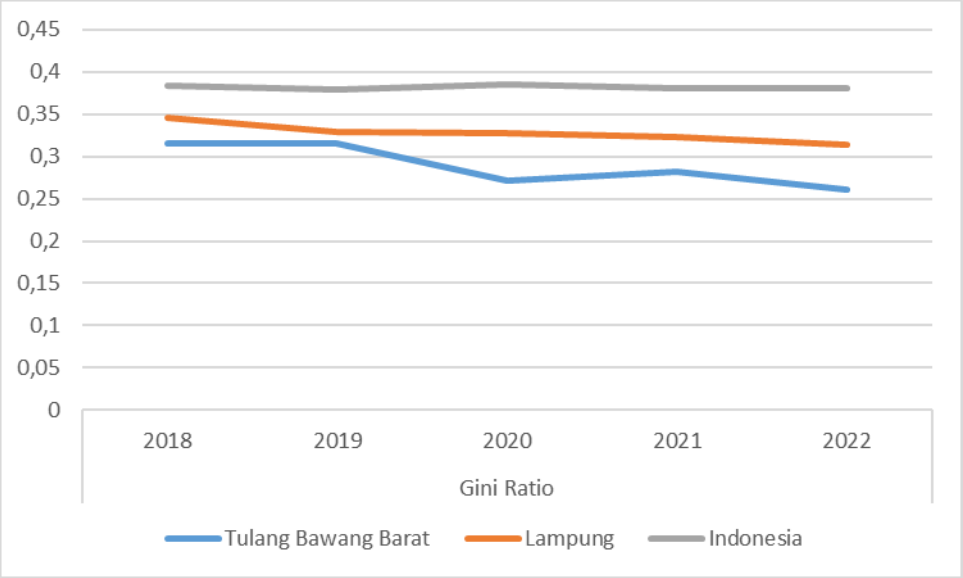

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022)

2.1.6 Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022

NO	OPD	JUMLAH
1.	**Sekretariat Daerah** • Bagian Kesejahteraan Rakyat • Bagian Tata Pemerintahan • Bagian Perekonomian • Bagian Administrasi Pembangunan • Bagian Pengadaan Barang dan Jasa • Bagian Organisasi • Bagian Hukum • Bagian Umum • Bagian Perencanaan dan Keuangan • Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**10**
2.	**Sekretariat DPRD**	**1**
3.	**Inspektorat**	**1**
4.	**Satuan Polisi Pamong Praja**	**1**
5.	**Dinas** • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Kesehatan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan • Dinas Sosial • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Dinas Ketahanan Pangan • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil • Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh	**22**

	• Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana • Dinas Perhubungan • Dinas Komunikasi dan Informatika • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata • Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah • Dinas Perikanan • Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan • Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan • Dinas Pemadam Kebakaran	
6.	**Badan** • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah • Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah • Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah • Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**6**
7.	**Kecamatan** • Kecamatan Tulang Bawang Tengah • Kecamatan Tulang Bawang udik • Kecamatan Tumijajar • Kecamatan Pagardewa • Kecamatan Gunung Terang • Kecamatan Gunung Agung	**9**

	• Kecamatan Lambu Kibang • Kecamatan Way Kenanga • Kecamatan Batu Putih	
8.	**Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** • Puskesmas Kartaraharja • Puskesmas Dayamurni • Puskesmas Panaragan Jaya • Puskesmas Mulya Asri	**17**
	• Puskesmas Candra Mukti • Puskesmas Pagar Dewa • Puskesmas Kibang Budi Jaya • Puskesmas Toto Mulyo • Puskesmas Sukajaya • Puskesmas Mercu Buana • Puskesmas Toto Katon • Puskesmas Dwikora • Puskesmas Margodadi • Puskesmas Marga Kencana • Puskesmas Gilang Tunggal Makarta • Puskesmas Indraloka Jaya • Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat	
J u m l a h		**67**

2.2.1.1 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan atau penambahan dari Tahun Anggaran 2021 baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.

1. Proyeksi Pendapatan

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2022 untuk mendanai seluruh pengeluaran daerah, Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp908.722.369.146,62 yang diproyeksikan dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp55.868.943.931,62 terdiri dari:
   - Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp21.073.500.000,00;
   - Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp2.590.080.000,00;
   - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp2.551.893.890,33; dan
   - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menjadi sebesar Rp29.653.470.041,29;

b. Pendapatan Transfer dalam APBD Tahun Anggaran 2022 diperkirakan naik menjadi sebesar Rp847.300.063.074,00 dari yang dianggarkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp823.350.605.950,00 terdiri dari:
   1. Dana Perimbangan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp682.872.784.528,00 atau turun dari yang dianggarkan tahun 2021 sebesar Rp624.006.237.177,00 dana Perimbangan tersebut berasal dari :
      - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) ebesar Rp36.990.377.528,00;
      - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp437.174.360.000,00;
      - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar RP89.409.492.000,00;

- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp119.298.555.000,00;

2. Dana Desa sebesar 82.600.289.000,00.
3. Pendapatan Transfer Antar Daerah diperkirakan sebesar Rp81.826.989.546,00;

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp5.553.362.141,00 atau mengalami penurunan dari Tahun 2021 yang dianggarkan sebesar Penurunan Rp41.310.000.000,00.

2. Proyeksi Belanja

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2022 proyeksi Belanja Daerah adalah sebesar Rp888.011.329.931,07 dengan rincian belanja sebagai berikut :

a. Belanja Operasi diproyeksikan sebesar Rp600.595.734.976,07;
b. Belanja Modal diproyeksikan sebesar Rp153.241.749.284,00;
c. Belanja Tak Terduga diproyeksikan sebesar Rp1.500.000.000,00;
d. Transfer diproyeksikan sebesar Rp132.673.845.671,00.

3. Proyeksi Pembiayaan

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2022, diproyeksikan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp20.239.640.217,45 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp40.950.679.433,00 yang diperuntukkan untuk pembayaran pokok hutang sebesar Rp39.950.679.433,00 dan Penyertaan Modal pada BUMD Rp1.000.000.000,00.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator memiliki peran penting sebagai alat pengelolaan kebijakan mulai tahap penyusunan kebijakan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Suatu indikator memiliki peranan dalam memberikan suatu pendekatan yang murah, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan baik bagi para pengelola kegiatan, pengambil keputusan dan pihak lainnya dalam mengambil keputusan.

Indikator dapat membantu dalam mengevaluasi kebijakan yang ada, program dan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Selain itu suatu indikator juga bermanfaat dan memegang peranan penting dalam berbagai tahap pembangunan yaitu penilaian situasi, memfasilitasi pengambilan keputusan diantara berbagai alternatif strategi, mengindetifikasi permasalahan operasional, merekomendasikan modifikasi dan memberikan feedback bagi masukan kebijakan, program dan kegiatan baru yang akan disusun.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, bahwa APBD disusun berbasis kinerja, artinya penggunaan sumber keuangan daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dapat dinilai kinerjanya yang terdiri dari input (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak). Dengan demikian setiap anggaran belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya, sehingga setiap belanja yang dikeluarkan harus berdasarkan pada usaha untuk mewujudkan tercapainya Tujuan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran perangkat daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan yang dimiliki.

Mengedepankan prinsip taat azas dan berorientasi pada pencapaian prestasi kerja dalam penganggaran, bahwa setiap pengganggaran harus didasarkan atas landasan hukum dan kejelasan sumber dana serta manfaatnya. Anggaran Pendapatan merupakan rencana yang terukur dan secara rasional dapat dicapai. Anggaran Belanja harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis. Oleh karena itu pengganggaran berbasis kinerja harus dimaknai bahwa penganggaran APBD mengutamakan pencapaian hasil dari suatu input yang ditetapkan sesuai dengan Tupoksi Perangkat Daerah (PD).

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

3.1 Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah Perangkat Daerah (PD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah PD dan PPKD.

3.2 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Suatu entitas pelaporan ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan :

a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD,
b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat,
d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

3.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

3.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Central yang berlaku pada tanggal transaksi.

3.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

3.5.1 Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kerangka konseptual ini membahas :

a. Tujuan Kerangka Konseptual;
b. Lingkungan Akuntansi Pemerintah daerah;
c. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
d. Pengguna dan kebutuhan informasi;
e. Karakteristik kualitatif laporan keuangan;
f. Unsur / elemen laporan keuangan;
g. Pengakuan unsur laporan keuangan;
h. Pengukuran unsur laporan keuangan;
i. Asumsi dasar;
j. Prinsip-prinsip;
k. Kendala informasi akuntansi; dan

l. Dasar hukum.

Ciri-ciri Utama Struktur Pemerintah Daerah dan Pelayanan yang Diberikan

Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah daerah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Ciri utama struktur pemerintah daerah dan pelayanan yang diberikan :
   1) Bentuk umum pemerintah daerah dan pemisahan kekuasaan:
   2) Sistem pemerintahan otonomi;
   3) Adanya pengaruh proses politik;
   4) Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah daerah.
b. Ciri keuangan pemerintah daerah yang penting bagi pengendalian :
   1) Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian;
   2) Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan.
   3) Penyusunan nilai aset tetap sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.

Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas
b. Manajemen
c. Transparansi
d. Keseimbangan antar generasi (*Intergenerational equity*)
e. Evaluasi kinerja

Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keungan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a. Relevan;
b. Andal;
c. Dapat dibandingkan; dan

d. Dapat dipahami.

Unsur/Elemen Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari :

a. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:
   - Laporan Realisasi Anggaran PD;
   - Neraca PD;
   - Laporan Operasional;
   - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   - Catatan Atas Laporan Keuangan PD.
b. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi berupa:
   - Laporan Realisasi Anggaran PPKD;
   - Neraca PPKD;
   - Laporan Arus Kas;
   - Laporan Operasional;
   - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   - Catatan Atas Laporan Keuangan PPKD;
c. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan berupa:
   - Laporan Realisasi Anggaran;
   - Laporan Perubahan SAL/SAK;
   - Neraca;
   - Laporan Operasional;
   - Laporan Perubahan Ekuitas;
   - Laporan Arus Kas; dan
   - Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keungan pemerintah daerah dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;

a. Basis akuntansi;

b. Prinsip nilai perolehan;
c. Prinsip realisasi;
d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
e. Prinsip perioderitas;
f. Prinsip konsistensi;
g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
h. Prinsip penyajian wajar.

3.5.2 Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang member atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi .

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Tujuan

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengembalian keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah;
b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah;
c. Menyediakan informasi mengenai sumber, aloksi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

- Aset;
- Kewajiban;
- Ekuitas;
- Pendapatan;
- Belanja;
- Pembiayaan; dan
- Arus kas.

Tanggung jawab pelaporan keuangan penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

Komponen-komponen laporan keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional (LO);
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen tersebut disajikan oleh setiap entitas, *kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum dan Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh*

bendahara umum daerah dan entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.

Periode pelaporan

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi berikut:

a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait dapat diperbandingkan.

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi pada catatan atas laporan keuangan menjelaskan hal-hal berikut

a. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
b. Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transaksi kebijakan akuntansi / entitas pelaporan; dan
c. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Pengungkapan

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
c. Ketentuan perundang-undang yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

3.5.3 Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Saldo anggaran lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Isi laporan realisasi anggaran berbasis kas dan saldo anggaran lebih

Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dengan anggarannya.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut :

a. Pendapatan –LRA;
b. Belanja:
c. Transfer:
d. Surplus atau defisit;
e. Penerimaan Pembiayaan;
f. Pengeluaran pembiayaan;
g. Pembiayaan neto; dan
h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

Laporan saldo anggaran lebih mencakup pos-pos sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih tahun yang lalu
b. Penggunaan Saldo Anggaran

c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)
d. Koreksi/kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
e. Saldo Anggaran Lebih tahun berjalan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan entitas akuntansi/pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran dalam format sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai laporan keuangan pokok dan format sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai lampiran.

3.5.4 Kebijakan Akuntansi Neraca

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Apabila suatu entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

a. Kas dan setara kas;
b. Investasi jangka pendek;
c. Piutang;
d. Persediaan;
e. Investasi jangka panjang;
f. Aset tetap;
g. Kewajiban jangka pendek;
h. Kewajiban jangka panjang;
i. Ekuitas.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

a. Sifat, likuiditas dan materialitas aset;
b. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;
c. Jumlah, sifat dan jangka waktu kewajiban.

Penyajian neraca

Ketentuan peraturan Perundang-undangan mengharuskan entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan menyajikan neraca dalam format sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

3.5.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:
a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
b. Kas ataspendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/PD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam / luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima,dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritasasi yang diberikan oleh BUD dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA brutto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.6 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LO adalah semua hak pemerintah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah (basis akrual).

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pendapatan-LO Diakui Bersamaan Dengan Penerimaan Kas (untuk hak timbul bersamaan dengan penerimaan kas).

   Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah.
b. Pendapatan-LO Diakui Pada Saat Penyusunan Laporan Keuangan
   1) Pendapatan-LO Diakui Sebelum Penerimaan Kas

      Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
   2) Pendapatan-LO Diakui Setelah Penerimaan Kas

      Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Pada saat diterima diakui sebagai pendapatan diterima dimuka dan Pendapatan-LO diakui pada saat hak pemerintah daerah timbul yaitu pajak reklame dan lainnya.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.7 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

a. Saat timbulnya kewajiban
b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

a. **Beban diakui sebelum pengeluaran kas** dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat

terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan

b. **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

c. **Beban diakui setelah pengeluaran kas,** dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

a. Beban Operasional, terdiri dari:

   Beban Pegawai,Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Lain-lain.

b. Beban Transfer

c. Beban Non Operasional, misalnya surplus/defisit penjualan aset

d. Beban Luar Biasa, dalam keadaan bencana

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

a. Pengeluaran beban tahun berkenaan

b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode

akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.

c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

3.5.8 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban.
c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah.Apabila pengeluaran kas atas belanja

dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.9 Kebijakan Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan dan pengungkapannya.

Pengakuan

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dana bantuan keuangan dan dana bagi hasil dan dibagi menjadi:

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakuisebelumpenerimaankas apabila terdapat penetapanhak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D.Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakankewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengukuran dan Penilaian

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

1) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

   Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada

pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Transfer keluar dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan penerimaan).

Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.10 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

a. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
b. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah

Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

3.5.11 KebijakanAkuntansi Kas dan Setara Kas

Mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transitoris selama periode akuntansi.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas Pemerintah Daerah yang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

Kas dan Setara Kas

Setara Kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada resiko perubahan nilai signifikan. Oleh karena itu,

suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Entitas Pelaporan Arus Kas

Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau satuan organisasi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk Kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh antara lain :

a. Penerimaan Perpajakan
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
c. Penerimaan Hibah
d. Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan investasi lainnya
e. Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan luar biasa
f. Penerimaan Transfer.

Arus keluar Kas dari aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran antara lain :

a. Belanja pegawai
b. Belanja Barang
c. Bunga
d. Subsidi
e. Hibah
f. Bantuan Sosial
g. Belanja lain-lain/tak terduga
h. Transfer keluar

Komponen Kas dan Setara Kas

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

Pengungkapan Lainnya

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

3.5.12 Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

a. investasi jangka pendek; dan

b. investasi jangka panjang.

a. Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar.Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

   Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

   Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

Pengakuan

Suatu transaksi pengeluaran uang dan / atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah kemungkinan akanmemperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup.Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yangtersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

Pengukuran dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengukuran investasi jangka pendek

1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
   a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatatberdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
   b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

b. Pengukuran investasi jangka panjang:

1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
2) Investasi jangka panjang non permanen:
   a) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
   b) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

c) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahan ke pihak ketiga.

c. **Dalam hal investasi jangka panjang** diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

d. **Harga perolehan investasi** dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut:

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perhitungan Penyisihan Piutang

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	0,5 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	10 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode diatas 4 Tahun	100 %

Penggunaan metode-metode tersebut diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*)

atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
f. Perubahan pos investasi.

3.5.13 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi.
b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
b. jumlah piutang dapat diukur;

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;

b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat

persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Piutang TP-TGR, peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP-TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan /SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP-TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/ SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP-TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

a. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
   1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
   2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
   3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding dan atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi
b. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

c. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
2) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

d. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan diatas, dilakukan sebagai berikut:

1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Kualitas Piutang Lancar;
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
c. Kualitas Piutang Diragukan;
d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari :

a. Pajak Dibayar Sendir oleh Wajib Pajak (WP) *Self Asessment* dan
b. Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*Official assessment*)

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

Tabel 3.2 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak *Self Assesement*

No.	Kualitas	Kriteria
a.	Lancar	1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau 5) WajibPajak tidak mengajukan keberatan /banding.
b.	Kurang Lancar	1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding;
c.	Diragukan	1) Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d.	Macet	1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak ditemukan;dan/atau 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

Tabel 3.3 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak *official assessment*

No.	Kualitas	Kriteria
a.	Lancar	1. Umur piutang kurang dari 1 tahun;dan/atau 2. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 3. Wajib Pajak likuid; dan/atau 4. WajibPajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b.	Kurang Lancar	1. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau 2. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau 3. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
c.	Diragukan	1. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau 3. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d.	Macet	1. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 2. Wajib Pajak tidak ditemukan;dan/atau 3. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 4. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

Tabel 3.4 Penggolongan KualitasPiutang Bukan Pajak Khusus Retribusi

No.	Kualitas	Kriteria
a.	Lancar	umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
b.	Kurang Lancar	umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan
c.	Diragukan	umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan
d.	Macet	umur piutang lebih dari 12 bulan

Penggolongan piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Penggolongan Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi

No	Kualitas Piutang	Kriteria
a	Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
b	Kurang Lancar	Jangka 1 bulan sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
c	Diragukan	Jangka 1 bulan sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan;
d	Macet	Jangka 1 bulan sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan :

Tabel 3.6 Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a	Lancar	0,5 %
b	Kurang Lancar	10 %
c	Diragukan	50 %
d	Macet	100 %

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

Tabel 3.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Pajak

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a	Lancar	0,5 %;
b	Kurang Lancar	10 % dari kurang lancar setelah dikurangi

		nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c	Diragukan	50 % dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan atau barang sitaan (jika ada); dan
d	Macet	100 % dari piutang macet setelah dikurangi nilai agunan atau barang sitaan (jika ada)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Objek Retribusi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Retribusi

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a	Lancar	0,5 %;
b	Kurang Lancar	10 % dari piutang kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan atau barang sitaan (jika ada);
c	Diragukan	50 % dari piutang diragukan setelah dikurangi nilai agunan atau barang sitaan (jika ada); dan
d	Macet	100 % dari piutang macet setelah dikurangi nilai agunan atau barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Objek Bukan Pajak selain Retribusi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bukan Pajak selain Retribusi

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a	Lancar	0,5 %;
b	Kurang Lancar	10 % dari piutang kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c	Diragukan	50 % dari piutang diragukan setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d	Macet	100 % dari piutang macet setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
   1. Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
   2. Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
   3. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak

berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara,untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi takmungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit.

Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan,dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.

Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.

Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut mungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

3.5.14 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

   Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dengan pendekatan beban yaitu pada saat pembelian atau berita acara serah terima barang dibukukan sebagai beban. Dasar pencatatan persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*).

Persediaan disajikan sebesar:

a. **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan

persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

b. **Harga pokok produksi** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yangterkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
c. **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

d. Dalam rangka penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional (LO), beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use goods*)

e. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventaris fisik, yaitu dengan cara memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembebanan atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan, yang hasilnya dikalikan nilai per unit satuan dengan metode penilaian yang digunakan.

   Persediaan disajikan sebagian bagian dari Aset Lancar.

Penyajian dan Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

a. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
b. Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

3.5.15 Akuntansi Non Lancar

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah :

a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Pengakuan Aset Tetap

Perolehan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti

pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :

a. Biaya perencanaan dan pengawasan;

b. Biaya lelang;
c. Biaya persiapan tempat;
d. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
e. Biaya pemasangan (*installation cost*);
f. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
g. Biaya konstruksi.

3.5.16 Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada samapi saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari :

a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transaction*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan.
c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Utang perhitungan fihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

Bagian lancar hutang jangka panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam bagian lancar hutang jangka panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat :
1. barang yang dibeli sudah diterima, atau
2. jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian,atau
3. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan

sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar.Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri.Perhitungan utang bunga dihitung secara bulanan, disajikan sebesar nilai yang telah menjadi kewajiban/beban mulai setelah bulan pembayaran terakhir sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada.Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
    1. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:

a) Pengurangan pinjaman;
b) Modifikasi persyaratan utang;
c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman;dan
f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

2. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
3. Biaya pinjaman:
   a) Perlakuan biaya pinjaman;
   b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
   c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

3.5.17 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak dilanjutkan

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembentukan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan seharusnya.

Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban dan operasi dapat dihentikan tanpa menganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru,

pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Koreksi kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interprestasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiaannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan yang tidak berulang;
b. Kesalahan yang berulang dan sistematik;

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;

Perubahan kebijakan akuntansi

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perubahan estimasi akuntansi

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Operasi yang tidak dilanjutkan

Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/ alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
b. Fungsi tersebut tetap ada.
c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

Peristiwa luar biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktifitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas pemerintah daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang.

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/ kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/ kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut :

a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/ kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.5.18 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah beban yang telah dibayar oleh pemerintah daerah yang belum menjadi kewajiban per tanggal pelaporan.

Beban dibayar dimuka diakui ketika menyusun laporan keuangan yaitu atas beban yang telah dibayar tetapi belum menjadi kewajiban per tanggal penyusunan laporan.

Pengukuran beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi dan sewa tanah/ gedung/ peralatan dihitung secara bulanan, adalah sebagai berikut: Disajikan sebesar nilai yang belum menjadi kewajiban/beban mulai bulan setelah tanggal pelaporan sampai dengan bulan akhir masa pembayaran.

Pemberhentian pengakuan beban dibayar dimuka pada saat kewajiban timbul atau pada saat penyusunan laporan keuangan.

Beban dibayar dimuka disajikan dan diungkapkan secara memadai.Informasi mengenai akun beban dibayar dimuka diungkapkan secara cukup dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa :

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
b. Rincian jenis-jenis.

3.5.19 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
c. Kemitraan dengan pihak ketiga;
d. Aset Tidak Berwujud;
e. Aset Lain-lain;

Pengakuan

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat :

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal
b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaanya berpindah.

Pengukuran dan Penilaian

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dengan surat keputusan pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan ganti kerugian dinilai sebesar nilai nominal dalam surat keterangan tanggungjawab mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Bangun, Kelola Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.

Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :

a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.

Aset tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 20 tahun.

Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. Rincian aset lainnya;
b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO)
d. Informasi lainnya yang penting.

3.5.20 Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah (BUD).

Dana cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS pembentukan dana cadangan.

Pencairan dana cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas dana cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Dana cadangan diukur sesuai dengan niali nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.

Penyajian dan pengungkapan

Dana cadangan disajikan dalam neraca pada kelompok aset non lancar.

Pengungkapan dana cadangan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Peraturan daerah pembentukan dana cadangan;
b. Tujuan pembentukan dana cadangan;
c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan
e. Sumber dana cadangan; dan
f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan

3.5.21 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuirtas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

IV. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam TA 2022 adalah sebagai berikut:

a. Realisasi Pendapatan Daerah hanya sebesar Rp866.042.392.192,69 dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp908.722.369.146,62 atau hanya sebesar 95,30% namun jika dbandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp13.723.760.387,74 atau sebesar 1,58%.
b. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp840.783.581.155,10 hanya mencapai 94,68% dari anggaran sebesar Rp888.011.329.931,07 dan mengalami penurunan realisasi dari Tahun Anggaran 2021 Rp936.932.957.645,40;
c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2022 sebesar (Rp2.908.736.002,73)

Pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2022 menurut urusan pemerintahan daerah, serta faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan (efektifitas dan efisiensi) atau faktor penghambat tidak tercapainya indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (*force majeur*) disajikan pada Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Untuk menilai pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022, diperlukan suatu analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Analisis tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai yang diharapkan, apakah perkembangan posisi keuangan mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan metode analisis yang lazim digunakan untuk melakukan analisis terhadap Laporan Keuangan, diantaranya sebagai berikut:

a. Rasio Antar Pos Neraca

1). Rasio Cair (*Quick Ratio*)

2). Rasio Hutang terhadap Total Aset (*Debt Ratio*)

3). Rasio Ekuitas Dana terhadap Total Aset

b Rasio Antar Pos Laporan Realisasi Anggaran

1). Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

2). Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

3). Rasio PAD terhadap Total Pendapatan

4). Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan

1) Rasio Cair (*Quick Ratio*)

$$\text{Rasio Cair (\textit{Quick Ratio})} = \frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Jangka Pendek}}$$

$$= \frac{57.292.228.693,26 - 10.157.788.035,94}{81.431.037.820,81}$$

$$= 57,88\ \%$$

Rasio Cair (*Quick Ratio*) dihitung dengan mengurangkan persediaan dari aset lancar dan hasilnya dibagi dengan hutang jangka pendek. Aset lancar terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Pemegang Kas, Piutang Pajak, Piutang Lain-lain, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan. Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan.

Berdasarkan Analisis *quick ratio* ini Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 57,88% dengan demikian Hutang jangka Pendek sebesar Rp81.431.037.820,81 dapat dijamin dengan aset lancar dikurangi persediaan sebesar Rp47.134.440.657,32 menunjukkan hasil yang baik, dengan demikian Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat menjamin kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar non persediaan yang ada.

2) Rasio Hutang Terhadap Aset (*Debt Ratio*)

$$\text{Rasio Hutang Terhadap Aset (\textit{Debt Ratio})} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$$

$$= \frac{144.135.118.259,14}{1.864.050.263.046,69}$$

$$= 7,73\%$$

Rasio Hutang terhadap Total Aset dihitung dengan membandingkan total hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan total Aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Analisis rasio ini bertujuan mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga diluar pemerintahan yang dipakai untuk pembiayaan aset-aset milik pemerintah daerah.

Angka rasio yang semakin kecil (mendekati nol) menunjukkan tingkat rasio yang sangat baik artinya angka rasio sebesar 7,73% (mendekati 0) menunjukkan tingkat rasio yang sangat baik dimana semakin sedikit dana yang berasal dari hutang untuk pembiayaan aset-aset milik pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah tidak terbebani dengan kewajiban kepada pihak ketiga yang memberatkan.

3) Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset

$$\text{Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset} = \frac{\text{Total Ekuitas Dana}}{\text{Total Aset}}$$

$$= \frac{1.719.915.144.787,54}{1.864.050.263.046,69}$$

$$= 92,27$$

Rasio ekuitas dana terhadap Total Aset dihitung dengan membandingkan total ekuitas dana dengan total aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ekuitas dana tersebut terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikandan Ekuitas Dana Cadangan.

Rasio ini dipakai untuk mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari pemerintahan yang dipakai untuk pembiayaan aset-aset milik pemerintah daerah.

Dalam kondisi angka ratio mendekati 100% berarti baik, artinya pembiayaan aset pemerintah daerah sebagian besar ditanggung oleh pemerintahan sendiri. Capaian rasio sebesar 92,27% menunjukkan kinerja keuangan yang baik, artinya pembiayaan aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagian besar berasal dari pemerintahan sendiri.

4) Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}}$$

$$= \frac{563.899.096.735,10}{840.783.581.155,10}$$

$$= 67,07\%$$

Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja operasi dengan total realisasi belanja. Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja yang bersifat rutin lainnya.

Rasio ini mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin dibandingkan seluruh realisasi belanja. Para pemakai laporan keuangan akan menilai kecenderungan, apakah realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin, atau untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik. Bila persentase tersebut menghasilkan angka di atas 50% maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak untuk membiayai kegiatan rutin.

Dalam rasio belanja operasi terhadap total belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 67,07% didalamnya termasuk belanja gaji dan personalia sebagai komponen belanja rutin yang tidak bisa dihindari sebesar Rp326.272.576.092,00 atau sebesar 38,81% dari total belanja sebesar Rp839.850.826.494,1.

5) Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

$$= \frac{148.356.337.176,00}{840.783.581.155,10}$$

$$= 17,65\ \%$$

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja modal dengan total realisasi belanja. Belanja modal terdiri dari Belanja Modal Aset Tetap dan Belanja Modal Aset Lainnya.

Rasio ini mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik dibandingkan seluruh realisasi belanja. Bila rasio di atas 50% dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik infrastruktur yang membawa ke arah perkembangan pembangunan yang lebih baik. Sebagai kebalikan dari rasio belanja operasi terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 17,65% adalah sebagai konsekuensi dari besarnya porsi anggaran belanja modal berarti tersisa 82,35% anggaran belanja sebelum dialokasikan untuk belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal.

6) Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan

$$\text{Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan} = \frac{\text{P A D}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$= \frac{51.532.994.618,69}{866.042.392.192,69}$$

$$= 5,95\%$$

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PAD dan total realisasi pendapatan. Yang termasuk di dalam PAD antara lain: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

Rasio ini dipakai untuk mengukur besarnya sumbangan PAD dalam menyediakan dana pembangunan. Rasio tersebut berguna untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dana pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Semakin besar rasio (mendekati 100%) berarti pembiayaan pembangunan di daerah sebagian besar ditanggung oleh usaha pemerintah daerah sendiri. Semakin kecil angka rasio berarti semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat/pihak lain.

Rasio yang dicapai sebesar 5,95% menunjukkan masih rendahnya kemampuan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan di wilayahnya.

7) Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan

$$\text{Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan} = \frac{\text{Total Pendapatan Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$= \frac{655.580.039.516,00}{866.042.392.192,69}$$

$$= 75,70\%$$

Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan, perimbangan dan total realisasi pendapatan. Yang termasuk didalam dana perimbangan antara lain : Pendapatan Bagian Daerah dari PBB, PPh, SDA dan DAU dan DAK. Rasio ini mengukur sumbangan dana perimbangan dalam menyediakaan dana pembangunan.

Standar ideal, porsi terbesar dalam unsur pendapatan adalah PAD. Sisanya diperoleh dari dana perimbangan dan dana pinjaman yang bersifat menutup defisit anggaran. Makin kecil rasio yang dihasilkan maka makin baik kemampuan Pemda dalam membiayai pembangunan sendiri. Rasio di atas 50% berarti tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat masih sangat

tinggi.

Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan yang dicapai sebesar 75,70% menunjukkan tingginya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada Pemerintah Pusat dalam pembiayaan pembangunan. Sebagian besar dana pembangunan masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat, terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp436.040.756.350,00 dari total pendapatan sebesar Rp866.042.392.192,69.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat pada Laporan keuangan. Pos pendapatan, belanja, pembiayaan terdapat dalam laporan realisasi anggaran. Pos aset, kewajiban dan ekuitas dana terdapat dalam Neraca sedangkan pos pendapatan-Lo dan beban terdapat pada Laporan Operasional. Pada laporan perubahan saldo anggaran lebih terdapat pos saldo anggaran lebih awal dan penggunaan saldo anggaran lebih untuk mendapatkan saldo anggaran lebih akhir. Sedangkan pada laporan perubahan ekuitas menyajikan pos ekuitas awal, surplus/defisit – LO pada tahun bersangkutan, koreksi yang menambah atau mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir. Di samping itu, terdapat penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang tercantum dalam laporan arus kas.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam Tahun Anggaran 2022.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun 2022 dibandingkan tahun 2021.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Laporan Operasional menggambarkan tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dalam tahun anggaran 2022.

Laporan Perubahan Ekuitas memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya.

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2022 dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2022.

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENDAPATAN

Pada Tahun Anggaran 2022, pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp908.722.369.146,62,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp866.042.392.192,69 atau 95,30 dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2022 yang telah diterima di kas daerah, pada Tabel 5.1.1 berikut:

Tabel 5.1.1 Rincian Pendapatan Daerah TA 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Realisasi 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	55.868.943.931,62	51.532.994.618,69	92,24	46.579.011.595,43
2	Pendapatan Transfer	847.300.063.074,00	811.977.397.574,00	95,83	796.929.767.985,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.553.362.141,00	2.532.000.000,00	45,59	36.257.373.000,00
Jumlah		**908.722.369.146,62**	**866.042.392.192,69**	**95,30**	**879.766.152.580,43**

Berdasarkan Tabel 5.1.1 tersebut, diketahui bahwa realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022 tidak mencapai target yaitu hanya sebesar 95,30%. Bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah pada Tahun 2021, terjadi penurunan sebesar Rp13.723.760.387,74 atau sebesar 1,58%.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pada Tahun Anggaran 2022, pendapatan asli daerah telah dianggarkan sebesar Rp55.868.943.931,62 dan dapat direalisasikan sebesar Rp51.532.994.618,69 atau 92,24 % dari target yang telah ditetapkan.

Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun Anggaran 2022 yang telah diterima oleh kas daerah, pada Tabel 5.1.2 berikut:

Tabel 5.1.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah TA 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Realisasi 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pajak Daerah	21.073.500.000,00	22.564.039.994,63	107,07	19.874.450.791,65
2	Retribusi Daerah	2.590.080.000,00	1.862.050.812,00	71,89	1.650.159.759,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.551.893.890,33	2.551.893.890,58	100,00	2.630.507.797,43
4	Lain-lain PAD Yang Sah	29.653.470.041,29	24.555.009.921,48	82,81	22.423.893.247,35
Jumlah		**55.868.943.931,62**	**51.532.994.618,69**	**92,24**	**46.579.011.595,43**

Berdasarkan Tabel 5.1.2 di atas, diketahui bahwa dua jenis pendapatan asli daerah pada Tahun Anggaran 2022 belum melampaui target pendapatan yaitu retribusi daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah dimana pendapatan Retribusi Daerah hanya mencapai 71,89% dan Lain-lain PAD Yang Sah hanya mencapai 82,81%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah pada Tahun Anggaran 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp4.953.983.023,26 atau 9,61%. Perbandingan realisasi pendapatan asli daerah TA 2022 dan 2021 (dalam Milyar Rupiah), pada grafik berikut:

A. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang petunjuk pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Metode pembayaran pajak daerah menggunakan metode *self assessment* dan *official assessment* kepada wajib pajak. Metode *self assessment* digunakan untuk pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak BPHTB. Sedangkan Metode *Official Assessment* berlaku pada Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).

Pada Tahun Anggaran 2022, pajak daerah dianggarkan sebesar Rp21.073.500.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp22.564.039.994,63 atau 107,07% dari target yang telah ditetapkan. Jumlah pajak daerah yang dapat dipungut dan disetorkan ke kas daerah selama Tahun Anggaran 2022 disajikan, pada Tabel 5.1.3 berikut:

Tabel 5.1.3 Rincian Pajak Daerah TA 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Realisasi 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pajak Hotel	23.000.000,00	51.947.754,00	225,86	87.763.704,00
2	Pajak Restoran	800.000.000,00	1.068.795.251,08	133,60	840.903.729,89
3	Pajak Hiburan	15.500.000,00	2.800.000,00	18,06	1.606.090,00
4	Pajak Reklame	195.000.000,00	241.871.250,00	124,04	230.850.020,00
5	Pajak Penerangan Jalan	10.700.000.000,00	11.759.761.296,00	109,90	10.180.424.589,00
6	Pajak Parkir	100.000.000,00	107.200.000,00	107,20	91.389.000,00
7	Pajak Air Tanah	140.000.000,00	116.128.539,69	82,95	113.749.924,76
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	8.500.000.000,00	8.581.439.596,86	100,96	7.900.469.242,00
9	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	600.000.000,00	634.096.307,00	105,68	427.294.492,00
J u m l a h		**21.073.500.000,00**	**22.564.039.994,63**	**107,07**	**19.874.450.791,65**

Berdasarkan Tabel 5.1.3 di atas, diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu terealisasi sebesar 107,07%. Dari sembilan jenis pajak daerah yang terealisasi, terdapat tujuh jenis pajak daerah yang mencapai/melampaui target yang ditetapkan yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan capaian tertinggi pada penerimaan pajak hotel yaitu sebesar 225,86% atau melebihi target sebesar Rp28.947.754,00. Sedangkan capaian penerimaan pajak daerah terendah terdapat pada pajak hiburan dengan realisasi sebesar Rp2.800.000,00 atau 18,06% dari target yang ditetapkan sebesar Rp15.500.000,00. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya fasilitas hiburan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

B. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaan bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

Pendapatan retribusi daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah, yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pada Tahun Anggaran 2022, retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp2.590.080.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.862.050.812,00 atau 71,89% dari target yang telah ditetapkan. Jumlah retribusi daerah yang dapat dipungut dan disetorkan ke kas daerah selama Tahun Anggaran 2022 disajikan pada Tabel 5.1.4 berikut:

Tabel 5.1.4 Rincian Pendapatan Retribusi TA 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Realisasi 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
I.	**Retribusi Jasa Umum**	**1.174.076.000,00**	**1.137.745.364,00**	**96,91**	**898.140.940,00**
1	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	314.856.000,00	389.779.382,00	123,80	240.190.000,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	150.000.000,00	115.830.000,00	77,22	126.479.040,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	442.220.000,00	412.544.382,00	93,29	367.200.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	2.584.500,00	5,17	0,00
5	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	217.000.000,00	217.007.100,00	100,00	164.271.900,00
II.	**Retribusi Jasa Usaha**	**766.004.000,00**	**476.268.764,00**	**62,18**	**561.126.280,00**
7.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	50.000.000,00	50.300.000,00	100,60	200.665.000,00
8.	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	674.029.000,00	393.944.382,00	58,45	352.800.000,00
9.	Retribusi Terminal	8.250.000,00	8.280.000,00	100,36	7.661.280,00
10.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	33.725.000,00	23.744.382,00	70,41	0,00
III.	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**650.000.000,00**	**248.036.684,00**	38,16	**190.892.539,00**
11.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	650.000.000,00	248.036.684,00	38,16	190.892.539,00
	J u m l a h	**2.590.080.000,00**	**1.862.050.812,00**	**71,89**	**1.650.159.759,00**

Berdasarkan Tabel 5.1.4 di atas, diketahui bahwa dari 11 jenis retribusi daerah yang dikelola pada Tahun Anggaran 2022, hanya 4 jenis retribusi daerah yang melampaui target dan terdapat 7 jenis retribusi daerah yang tidak mencapai target.

Dari 4 jenis retribusi daerah yang melampaui target, capaian persentase tertinggi diperoleh dari retribusi Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yakni sebesar 123,80% dari target penerimaan yang ditetapkan.

Sedangkan capaian persentase realisasi penerimaan retribusi terendah yakni Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yakni sebesar 5,17% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena belum siapnya Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam pengelolaan mandiri pengujian Kendaraan Bermotor dan sehingga kembali lagi ke Kabupetan Tulang Bawang.

Realisasi penerimaan retribusi tertinggi berasal dari Retribusi Pelayanan Pasar yaitu sebesar Rp412.544.382,00 meski tidak mencapai target dari

anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar 93,29% dari target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2021, realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp211.891.053,00 atau 11,38%.

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari dividen/bagian laba atas penyertaan modal atau investasi Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/perusahaan milik daerah yang merupakan keuntungan bersih perusahaan daerah yang disetor ke kas daerah.

Sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian daerah. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 5.1.5 berikut:

Tabel 5.1.5 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022&2021

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Realisasi 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
I.	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**2.551.893.890,33**	**2.551.893.890,58**	**100,00**	**2.630.507.797,43**
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.551.893.890,33	2.551.893.890,58	100,00	2.630.507.797,43
J u m l a h		**2.551.893.890,33**	**2.551.893.890,58**	**100,00**	**2.630.507.797,43**

Pada Tahun 2022, pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berasal dari penerimaan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) yang terealisasi sebesar Rp2.551.893.890,58 dari anggaran sebesar Rp2.551.893.890,33 atau sebesar 100%. Rincian Bagian Laba yang Dibagikan

kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 5.1.6 berikut:

Tabel 5.1.6 Rincian Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) TA 2022

No.	Tanggal	No Bukti	Uraian	Nilai (Rp)
1	26/04/2022	144/BP/BPKAD/TUBABA/2022	268PB DEVIDEN SHM TH 2021	1.843.636.698,33
2	22/06/2022	179/BP/BPKAD/TUBABA/2022	SET DEVIDEN TH BU 2021.NOPI RI	558.257.192,25
3	27/12/2022	05/BP/DEVIDEN/KOP.RSMW/TUBABA/2022	BAGI HASIL KEUNTUNGAN DARI KOPERASI RAGEM SAI MANGI WAWAI TAHUN ANGGARAN 2022	150.000.000,00
JUMLAH				**2.551.893.890,58**

D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada Tahun Anggaran 2022, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp29.653.470.041,29 dan dapat direalisasikan sebesar Rp24.555.009.921,48 atau 82,81% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 5.1.7 berikut:

Tabel 5.1.7 Rincian Lain-lain PAD Yang Sah TA 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Realisasi 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %	
1.	**Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**185.522.400,00**	**185.522.400,00**	**100,00**	**0,00**
	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	185.522.400,00	185.522.400,00	100,00	0,00
2.	**Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan**	**32.372.350,00**	**32.372.350,00**	**100,00**	**0,00**
	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah	32.372.350,00	32.372.350,00	100,00	0,00
3.	**Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**100,00**	**0,00**
	Hasil Sewa BMD	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
4.	**Penerimaan Jasa Giro**	**2.035.000.000,00**	**572.743.416,49**	**28,14**	**828.551.716,22**
	Jasa Giro Kas Daerah	2.000.000.000,00	569.108.361,97	28,46	821.087.734,25
	Jasa Giro Bendahara	35.000.000,00	3.635.054,52	10,39	7.463.981,97
5.	**Pendapatan Bunga**	**1.000.000.000,00**	**724.431.055,93**	**72,44**	**1.510.343.616,86**

	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	724.431.055,93	72,44	1.510.343.616,86
6.	**Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**	**8.400.000,00**	**4.900.002,00**	**58,33**	**196.610.885,00**
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	0,00	0,00	196.610.885,00
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	8.400.000,00	4.900.002,00	58,33	0,00
7.	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**1.695.854.348,29**	**2.933.430.394,26**	**172,98**	**5.137.271.935,98**
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.695.854.348,29	2.933.430.394,26	172,98	5.137.271.935,98
8.	**Pendapatan dari Pengembalian**	**286.320.943,00**	**414.203.257,00**	**144,66**	**300.754.021,00**
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	286.320.943,00	414.203.257,00	144,66	300.754.021,00
9.	**Pendapatan BLUD**	**24.400.000.000,00**	**19.043.731.749,86**	**78,05**	**14.435.085.016,41**
	Pendapatan BLUD	24.400.000.000,00	19.043.731.749,86	78,05	14.435.085.016,41
10.	**Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.276.055,88**
	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	15.276.055,88
11.	**Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA**	**0,00**	**633.675.295,94**	**0,00**	**0,00**
	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	633.675.295,94	0,00	0,00
	J u m l a h	**29.653.470.041,29**	**24.555.009.921,48**	**82,81**	**22.423.893.247,35**

a) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan adalah penerimaan penjualan aset yang telah dihapus secara tunai atau angsuran. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp185.522.400,00 dan terealisasi sebesar Rp185.522.400,51 atau 100%.

b) Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan

Penerimaan Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar 100% dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar

Rp32.372.350,00. Realisasi Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 5.1.8 berikut:

Tabel 5.1.8 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan

No.	Tanggal	No Bukti	Uraian	Nilai (Rp)
1	02/03/2022	02/BP/BPKAD/ TUBABA/2022	Pengembalian Atas Kelebihan Pembelian Tanah An. Zam Zam Kausar Surat Tanah Nomor : 594/050/Skt/Gkt/Tbu/X/2004 Tahun 2020	300.000,00
2	02/03/2022	03/BP/BPKAD/ TUBABA/2022	Pengembalian Atas Kelebihan Pembelian Tanah An. Abdul Roni No. Sertifikat 00957 Tahun 2020	580.000,00
3	02/03/2022	04/BP/BPKAD/ TUBABA/2022	Pengembalian Atas Kelebihan Pembelian Tanah An. Sukri No. Sertifikat 00779 Tahun 2020	2.462.850,00
4	02/03/2022	20/BP/BPKAD/ TUBABA/2022	Pengembalian Atas Kelebihan Pembelian Tanah An. Komaro Syamsi No. Surat Keterangan Tanah Nomor : 003/Skt/Gkm/Xii/2004 Tahun 2020 (Rp5.466.039,82 Pembulatan Menjadi Rp5.466.050,00)	5.466.050,00
5	02/03/2022	21/BP/BPKAD/ TUBABA/2022	Pengembalian Atas Kelebihan Pembelian Tanah An. Komaro Syamsi Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/14/Skt/Tbu/2004 Tahun 2020 (Rp385.937,50 Pembulatan Menjadi Rp385.950,00)	385.950,00
6	02/03/2022	22/BP/BPKAD/ TUBABA/2022	Pengembalian Atas Kelebihan Pembelian Tanah An. Abdul Rozak No. Sertifikat /Skjb/Ty-Gkt/Tbu/Vii/2017 Tahun 2020	4.040.000,00
7	02/03/2022	23/BP/BPKAD/ TUBABA/2022	Pengembalian Atas Kelebihan Pembelian Tanah An. Nopri Maroba Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Tahun 2020 (Rp1.978.051,18 Pembulatan Menjadi Rp1.978.100,00)	1.978.100,00
8	02/03/2022	24/BP/BPKAD/ TUBABA/2022	Pengembalian Atas Kelebihan Pembelian Tanah An. Yuresman Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Tahun 2020 (Rp1.795.327,13 Pembulatan Menjadi Rp1.795.350,00)	1.795.350,00
9	02/03/2022	25/BP/BPKAD/ TUBABA/2022	Pengembalian Atas Kelebihan Pembelian Tanah An. Daud M. Arif Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 00991 Tahun 2020 (Rp1.905.657,88 Pembulatan Menjadi Rp1.905.700,00)	1.905.700,00
10	02/03/2022	26/BP/BPKAD/ TUBABA/2022	Pengembalian Atas Kelebihan Pembelian Tanah An. Komaro Tahun 2020 (Rp1.140.367,27 Pembulatan Menjadi Rp1.140.400,00)	1.140.400,00
11	02/03/2022	27/BP/BPKAD/ TUBABA/2022	Pengembalian Atas Kelebihan Pembelian Tanah An. Komaro Dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 004/Skt/Gkm/Xii/2004 Tahun 2020	4.580.000,00
12	02/03/2022	28/BP/BPKAD/ TUBABA/2022	Pengembalian Atas Kelebihan Pembelian Tanah An. Julian Putra Dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 004/Skt/Gkm/Xii/2004 Tahun 2020 (Rp5.737.902,05 Pembulatan Menjadi Rp5.737.950,00)	5.737.950,00
13	02/03/2022	29/BP/BPKAD/	Pengembalian Atas Kelebihan Pembelian	2.000.000,00

		TUBABA/2022	Tanah An. Kamistar Tahun 2020	
JUMLAH				**32.372.350,00**

c) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Penerimaan hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan hasil sewa BMD yang terealisasi sebesar 100% dari anggaran yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00. . Realisasi 5.1.1.4.3 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 5.1.9 berikut:

Tabel 5.1.9 Rincian hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

No.	Tanggal	No Bukti	Uraian	Nilai (Rp)
1	03-11-2022	519/BP/BPKAD /TUBABA/2022	PEMB BY SW RMH ATM OFFSEAT TBB 1 SD 30SE	10.000.000,00
JUMLAH				**10.000.000,00**

d) Jasa Giro

Penerimaan Jasa Giro adalah penerimaan dari Lain-lain PAD yang sah yang berasal dari hasil penempatan dana pemerintah daerah dalam bentuk rekening, baik yang dilakukan oleh dan atas nama pemerintah daerah dan atau bendaharawan daerah pada Bank Lampung dan atau bank pemerintah lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Realisasi penerimaan Jasa Giro Kas Daerah TA 2022 sebesar Rp572.743.416,49 atau terealisasi sebesar 28,14% dari anggaran jasa Giro Kas Daerah yang ditetapkan sebesar Rp2.035.000.000,00, yang terdiri atas penerimaan jasa giro kas daerah dan jasa giro bendahara masing-masing sebesar Rp569.108.361,97 dan Rp3.635.054,52.

e) Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga adalah jumlah yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari penempatan dana yang ditempatkan dalam bentuk invenstasi. Realisasi sebesar Rp724.431.055,93 dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp1.000.000.000,- atau sebesar 72,44%.

f) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Penerimaan atas tuntutan temuan pemeriksaan inspektorat dan pengembalian atas gaji dan tunjangan tahun sebelumnya. Penerimaan dapat terealisasi sebesar Rp4.900.002,00 atau sebesar 58,33% dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp8.400.000,00.

g) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan diperoleh dari temuan BPK Tahun Anggaran 2021. Pendapatan terealisasi sebesar Rp2.933.430.394,26 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.695.854.348,29 atau sebesar 172,98%. Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 5.1.10 berikut:

Tabel 5.1.10 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2022

No.	Tanggal	No Bukti	Uraian	Nilai (Rp)
1	20/04/2022	900/01573/SP2D/TUBABA/2022	Pengembalian Atas Temuan BPK-RI MSR Tahun 2021	311.641.803,80
2	20/04/2022	900/01574/BP/TUBABA/2023	Pengembalian Atas Temuan BPK-RI AKP Tahun 2021	192.608.779,88
			Koreksi Pengembalian Atas Temuan BPK-RI AKP Tahun 2021	(60.022.403,34)
3	20/04/2022	900/01576/BP/TUBABA/2024	Pengembalian Atas Temuan BPK-RI AAK Tahun 2021	84.242.326,26
4	20/04/2022	900/01589/BP/TUBABA/2025	Pengembalian Atas Temuan BPK-RI DGS Tahun 2021	94.514.391,42
5	20/04/2022	900/01590/BP/TUBABA/2026	Pengembalian Atas Temuan BPK-RI RAJ Tahun 2021	112.714.530,40
6	20/04/2022	900/01594/BP/TUBABA/2027	Pengembalian Atas Temuan BPK-RI PAR Tahun 2021	55.667.674,97
7	20/04/2022	900/01595/BP/TUBABA/2028	Pengembalian Atas Temuan BPK-RI MSP Tahun 2021	15.440.242,54
8	22/04/2022	900/01791/BP/TUBABA/2029	Pengembalian Atas Temuan BPK-RI PK Tahun 2021	124.771.083,40
9	17/05/2022	520/BP/BPKAD/TUBABA/2022	900/125/STS/BPKAD/2022	20.664.667,85
10	23/05/2022	521/BP/BPKAD/TUBABA/2022	75/STS/BPKAD/TUBABA/2022	8.477.895,30
11	09/06/2022	522/BP/BPKAD/TUBABA/2022	900/133/STS/BPKAD/2022	146.557.549,73
12	14/06/2022	900/04025/BP/TUBABA/2030	Pengembalian Atas Temuan BPK-RI MSR Tahun 2021	75.709.623,01
13	14/07/2022	900/04841/BP/TUBABA/2031	Pengembalian Atas Temuan BPK-RI DLH Tahun 2021	135.000,00
14	28/12/2022	900/10647/BP/TUBABA/2032	Pengembalian Atas Temuan BPK-RI BA Tahun 2022 8102613	8.102.613,00
15	28/12/2022	900/10685/BP/TUBABA/2033	Pengembalian Atas Temuan BPK-RI KAP Tahun 2022	73.375.636,00
16	28/12/2022	900/10689/BP/TUBABA/2022	Pengembalian Atas Temuan BPK-RI BG Tahun 2022	285.161.795,00

17	28/12/2022	900/10690/BP/TUBABA/2022	Pengembalian Atas Temuan BPK-RI DAG Tahun 2022	510.690.770,00
18	28/12/2022	900/10691/BP/TUBABA/2022	Pengembalian Atas Temuan BPK-RI SK Tahun 2023	237.408.169,00
19	29/12/2022	900/10728/BP/TUBABA/2022	Pengembalian Atas Temuan BPK-RI RAJ Tahun 2023	269.422.673,00
20	29/12/2022	900/10733/BP/TUBABA/2022	Pengembalian Atas Temuan BPK-RI LP Tahun 2024	41.426.686,00
21	29/12/2022	900/10734/BP/TUBABA/2022	Pengembalian Atas Temuan BPK-RI DPP Tahun 2024	38.455.790,00
22	29/12/2022	900/10735/BP/TUBABA/2022	Pengembalian Atas Temuan BPK-RI PB Tahun 2025	30.941.183,00
23	29/12/2022	900/10780/BP/TUBABA/2022	Pengembalian Atas Temuan BPK-RI DGS Tahun 2025	255.321.914,00
JUMLAH				**2.933.430.394,26**

h) Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan. Pendapatan sebesar Rp414.203.257,00 dari pengembalian kelebihan gaji dan tunjangan. Rincian Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 5.1.11 berikut:

Tabel 5.1.11 Rincian Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2022

No.	Tanggal	No Bukti	Uraian	Nilai (Rp)
1	05/01/2022	32/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PGMBLN TJ GJ AN EKO BUDI SUPRA	2.008.680,00
2	05/01/2022	33/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PGMBLN KLBHN TJ GJ SUGENG DARY	2.355.425,00
3	05/01/2022	34/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGBLN TJ ANK AN ADE SUNARYA	2.296.924,00
4	05/01/2022	35/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJ ANK AN REKAYANTI	999.472,00
5	10/01/2022	38/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJ ANK AN SITI AISYAH	5.926.314,00
6	11/01/2022	39/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJ ANK AN IDA LAILA	2.531.794,00
7	11/01/2022	41/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJ ANK AN MARGARITA	6.568.120,00
8	12/01/2022	43/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJ ANK AN ZAINAB	883.250,00
9	17/01/2022	52/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJ ANK AN PUSNAWATI	537.480,00
10	17/01/2022	53/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJ ANK AN ROKAYAH	270.416,00
11	17/01/2022	54/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJ ANK AN SURENI	3.629.210,00
12	18/01/2022	30/BP/BPKAD/TUBABA/2022	900/011/STS/SKPKD/TBB/2022	16.852.718,00
13	18/01/2022	31/BP/BPKAD/TUBABA/2022	900/012/STS/SKPKD/TBB/2022	3.907.250,00
14	18/01/2022	60/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJ ANK AN RADIO	6.203.890,00
15	20/01/2022	67/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJ ANK AN DWI ASTUTI	279.852,00
16	20/01/2022	68/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJ ANK AN SURESMIYANTI	10.368.342,00

17	20/01/2022	69/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJ ANK AN SURESMIYANTI	2.558.814,00
18	24/01/2022	70/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJ ANK AN SERI DEWI	1.414.530,00
19	24/01/2022	71/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJ ANK AN SUWARNO	1.214.262,00
20	03/02/2022	63/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJ ANK AN SUGENG PRIYA	669.560,00
21	08/02/2022	64/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJNGN AN DAHLIAWATI	4.448.706,00
22	08/02/2022	66/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJ ISTRI AN SUDARMAN	44.218.620,00
23	09/02/2022	72/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJ AN AN SYAMSIDAR	3.620.820,00
24	10/02/2022	73/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJ ANK AN HABIBI	785.850,00
25	10/02/2022	74/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJ ANK AN SARJONO	15.129.226,00
26	10/02/2022	75/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJ ANK AN SARJONO	2.920.682,00
27	14/02/2022	76/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJ ISTRI AN ZAINUDDIN	532.770,00
28	16/02/2022	77/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJ ANK AN MUNTOHO	11.061.558,00
29	16/02/2022	78/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJ ANK AN SUHARYATINI	1.940.160,00
30	21/02/2022	79/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJ AN SAKIDAH	1.598.380,00
31	02/03/2022	97/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLAN TJ SUAMI AN SUARNI	325.184,00
32	02/03/2022	98/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJ SUAMI AN SUARNI	17.029.730,00
33	10/03/2022	99/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN KLBHN GJ AN SOLIHIN	11.954.000,00
34	14/03/2022	100/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJ ANK/SM AN JUWITA WA	3.730.452,00
35	14/03/2022	101/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJ ANK/SM AN MULIA SAR	2.828.902,00
36	16/03/2022	102/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJ ANK SMI AN KURNIA S	953.724,00
37	17/03/2022	103/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJN ANK AN UNTUNG	7.604.800,00
38	24/03/2022	104/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PNGMBLN TJN ANK AN SAMSODIN	11.458.800,00
39	31/03/2022	900/033/BP/BPKAD/TUBABA/2022	PENGEMBALIAN GAJI AN. DAHLIAWATI TUNJANGAN ANAK DAN BERAS SEBESAR RP. 5.956.876,- DENGAN RINCIAN PENDAPATAN LAINNYA : 5.705.624 DAN PENGEMBALIAN GAJI TAHUN 2022 :251.252.00	5.956.876,00
40	05/04/2022	358/BP/BPKAD/TUBABA/2022	900/033/SKPKD/TBB/2022	6.598.284,00
41	13/04/2022	359/BP/BPKAD/TUBABA/2022	900/034/STS/SKPKD/TBB/2022	25.974.500,00
42	14/04/2022	360/BP/BPKAD/TUBABA/2022	900/035/STS/SKPKD/TBB/2022	8.899.070,00
43	14/04/2022	361/BP/BPKAD/TUBABA/2022	900/036/STS/SKPKD/TBB/2022	4.536.948,00
44	19/04/2022	362/BP/BPKAD/TUBABA/2022	900/037/STS/SKPKD/TBB/2022	1.420.000,00
45	25/04/2022	363/BP/BPKAD/TUBA	900/037/STS/SKPKD/TBB/2022	5.500.000,00

		BA/2022		
46	26/04/2022	364/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/038/STS/SKPKD/TBB/2022	9.829.014,00
47	09/05/2022	365/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/039/STS/SKPKD/TBB/2022	9.908.420,00
48	06/06/2022	366/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/040/STS/SKPKD/TBB/2022	11.406.800,00
49	08/06/2022	367/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/041/STS/SKPKD/TBB/2022	496.368,00
50	06/07/2022	368/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/042/STS/SKPKD/TBB/2022	1.830.466,00
51	06/07/2022	369/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/043/STS/SKPKD/TBB/2022	7.919.780,00
52	13/07/2022	370/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/044/STS/SKPKD/TBB/2022	137.186,00
53	13/07/2022	371/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/045/STS/SKPKD/TBB/2022	142.782,00
54	28/07/2022	372/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/046/STS/SKPKD/TBB/2022	9.234.578,00
55	02/08/2022	373/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/047/STS/SKPKD/TBB/2022	4.758.728,00
56	02/08/2022	374/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/048/STS/SKPKD/TBB/2022	170.382,00
57	10/08/2022	375/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/049/STS/SKPKD/TBB/2022	948.336,00
58	11/08/2022	376/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/050/STS/SKPKD/TBB/2022	3.768.600,00
59	15/08/2022	377/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	SE TU,900/051/STS/SKPKD/TBB/22	1.973.880,00
60	24/08/2022	345/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/052/STS/SKPKD/TBB/2022	932.532,00
61	25/08/2022	342/BP/PENG.GAJI/BP KAD/TUBABA/2022	900/053/STS/SKPKD/TBB/2022	13.513.782,00
62	29/08/2022	343/BP/PENG.GAJI/BP KAD/TUBABA/2022	900/054/STS/SKPKD/TBB/2022	2.333.088,00
63	05/09/2022	333/BP/PENG.GAJI/BP KAD/TUBABA/2022	900//STS/SKPKD/TBB/	659.008,00
64	05/09/2022	334/BP/PENG.GAJI/BP KAD/TUBABA/2022	900/056/STS/SKPKD/TBB/2022	9.555.616,00
65	19/09/2022	335/BP/PENG.GAJI/BP KAD/TUBABA/2022	900/057/STS/SKPKD/TBB/2022	1.112.678,00
66	10/10/2022	331/BP/PENG.GAJI/BP KAD/TUBABA/2022	900/058/STS/SKPKD/TBB/2022	6.358.204,00
67	27/10/2022	332/BP/PENG.GAJI/BP KAD/TUBABA/2022	900/059/STS/SKPKD/TBB/2022	3.514.992,00
68	07/11/2022	248/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/060/STS/SKPKD/TBB/2022	779.300,00
69	14/11/2022	273/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/061/STS/SKPKD/TBB/2022	458.658,00
70	14/11/2022	274/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/062/STS/SKPKD/TBB/2022	369.070,00
71	14/11/2022	336/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/063/STS/SKPKD/TBB/2022	369.070,00
72	14/11/2022	337/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/064/STS/SKPKD/TBB/2022	369.070,00
73	15/11/2022	338/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/065/STS/SKPKD/TBB/2022	131.750,00
74	15/11/2022	463/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/066/STS/SKPKD/TBB/2022	632.570,00
75	15/11/2022	464/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/067/STS/SKPKD/TBB/2022	500.820,00
76	15/11/2022	465/BP/BPKAD/TUBA	900/068/STS/SKPKD/TBB/2022	369.070,00

		BA/2022		
77	16/11/2022	466/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/069/STS/SKPKD/TBB/2022	632.570,00
78	16/11/2022	467/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/070/STS/SKPKD/TBB/2022	131.750,00
79	16/11/2022	468/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/071/STS/SKPKD/TBB/2022	632.570,00
80	16/11/2022	469/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/072/STS/SKPKD/TBB/2022	500.820,00
81	17/11/2022	470/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/073/STS/SKPKD/TBB/2022	2.293.620,00
82	21/11/2022	471/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/074/STS/SKPKD/TBB/2022	26.513.200,00
83	07/12/2022	457/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/075/STS/SKPKD/TBB/2022	706.600,00
84	14/12/2022	494/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/076/STS/SKPKD/TBB/2022	1.420.000,00
85	21/12/2022	498/BP/BPKAD/TUBA BA/2022	900/078/STS/SKPKD/TBB/2022	4.383.184,00
JUMLAH				**414.203.257,00**

i) Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD didapat dari seluruh Puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Rincian Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 5.1.12 berikut:

Tabel 5.1.12 Rincian Penerimaan atas Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Puskesmas Kartaraharja	402.414.368,20
2	Puskesmas Dayamurni	806.393.091,49
3	Puskesmas Panaragan Jaya	1.048.016.181,17
4	Puskesmas Mulya Asri	1.162.733.648,03
5	Puskesmas Candra Mukti	732.444.947,57
6	Puskesmas Pagar Dewa	237.070.869,84
7	Puskesmas Kibang Budi Jaya	579.969.579,11
8	Puskesmas Toto Mulyo	635.896.123,58
9	Puskesmas Sukajaya	590.818.820,12
10	Puskesmas Mercu Buana	406.732.370,19
11	Puskesmas Toto Katon	326.930.333,59
12	Puskesmas Dwikora	317.578.178,94
13	Puskesmas Margodadi	336.001.190,81
14	Puskesmas Marga Kencana	233.337.409,95
15	Puskesmas Gilang Tunggal Makarta	188.458.113,99
16	Puskesmas Indraloka Jaya	176.637.887,28
17	Rumah Sakit Umum Daerah TUBABA	10.740.174.636,00
18	Pasar Pulung Kencana	122.124.000,00
	Jumlah	**19.043.731.749,86**

Pendapatan BLUD terendah diperoleh dari Pasar Pulung Kencana yaitu sebesar Rp122.124.000,00 dan tertinggi pada Rumah Sakit Umum Daerah TUBABA yaitu sebesar Rp10.740.174.636,00.

j) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA

Penerimaan lain-lain PAD yang Sah Lainnya dicapai sebesar Rp633.223.289,17. Rincian Lain-lain PAD yang Sah Lainnya Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 5.1.13 berikut:

Tabel 5.1.13 Rincian Penerimaan lain-lain PAD yang Sah Lainnya TA 2022

No.	Tanggal	No Bukti	Uraian	Nilai (Rp)
1	08/02/2022	01/BP/BPKAD/ TUBABA/2022	Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Belanja Makan Dan Minum Aktifitas Lapangan Keg. Pengadaan Obat Vaksin Tahun 2021	720.000,00
2	07/03/2022	900/132/LRA/BPKAD/TBB/2022	Set Pengembalian Dinas Sosial	33.031.750,00
3	26/04/2022	359/K.PENDAPATAN/APR/LRA/BPKAD/TUBABA/2022	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Ke Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Bulan April 2022 - LRA Rp 40.206.108	40.206.108,33
4	31/05/2022	357/K.PENDAPATAN/MEI/LRA/BPKAD/TUBABA/2022	Hasil Penjualan Alat Angkutan Ke Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya - LRA = 15.815.826	15.815.826,33
5	23/06/2022	360/K.PENDAPATAN/JUNI/LRA/BPKAD/TUBABA/2022	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Ke Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya Bulan Juni 2022 - LRA Rp 868.000	868.000,00
6	30/06/2022	355/K.PENDAPATAN/JUNI/LRA/BPKAD/TUBABA/202	Hasil Penjualan Alat Angkutan Ke Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya - LRA = 23.946.000	23.946.000,00
7	13/07/2022	361/K.PENDAPATAN/JULI/LRA/BPKAD/TUBABA/2022	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Ke Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya Bulan Juli 2022 - LRA Rp 214.071.777,00	214.071.777,00
8	31/07/2022	354/K.PENDAPATAN/LRA/JULI/BPKAD/TUBABA/202	Hasil Penjualan Alat Angkutan Ke Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya - LRA = 48.998.054,24	48.998.054,24
9	31/08/2022	353/K.PENDAPATAN/AUG/LRA/BPKAD/TUBABA/2022	Hasil Penjualan Alat Angkutan Ke Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya - LRA = 5.881.471,27	5.881.471,27
10	01/09/2022	362/K.PENDAPATAN/SEPT/LRA/BPKAD/TUBABA/2022	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Ke Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya Bulan September 2022 - LRA Rp	2.200.000,00

			2.200.000,00	
11	30/09/2022	352/K.PENDAPATAN/SEP/LRA/BPKAD/TUBABA/2022	Hasil Penjualan Alat Angkutan Ke Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya - LRA = 1.034.000	1.034.000,00
12	20/10/2022	363/K.PENDAPATAN/OKT/LRA/BPKAD/TUBABA/2022	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Ke Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya Bulan Oktober 2022 - LRA Rp 204.649.302,00	204.649.302,00
13	15/11/2022	364/K.PENDAPATAN/NOV/LRA/BPKAD/TUBABA/2022	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Ke Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya Bulan November 2022 - LRA Rp 40.000.000,00	40.000.000,00
14	22/11/2022	358/K.PENDAPATAN/NOV/LRA/BPKAD/TUBABA/2022	Hasil Penjualan Alat Angkutan Ke Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya - LRA = 2.811.000	1.801.000,00
15	31/12/2022	03/JK/BPK/BKAD/2022	Koreksi Atas Kesalahan Dan Selisih Uang Kecil - LRA	6,77
16	31/12/2022	26/JK/BPK/BKAD/2022	Koreksi Atas Pendapatan Kelebihan RTGS Tahun 2021 - LRA	452.000,00
Jumlah				**633.675.295,94**

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat, dalam bentuk dana perimbangan dan transfer dana lainnya, serta transfer dari Pemerintah Provinsi. Pada Tahun anggaran 2022, pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp847.300.063.074,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp812.720.256.142,00 atau 95,92% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan transfer yang telah diterima di Kas Daerah Tahun Anggaran 2022 disajikan pada Tabel 5.1.14 berikut:

Tabel 5.1.14 Rincian Pendapatan Transfer TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Realisasi 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	765.473.073.528,00	738.180.328.516,00	96,43	740.085.017.984,00
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.826.989.546,00	73.797.069.058,00	90,19	56.844.750.001,00
J u m l a h		**847.300.063.074,00**	**811.977.397.574,00**	**95,83**	**796.929.767.985,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2022 terdapat Pendapatan Dana Insentif Daerah dan Dana Desa, sedangkan di Tahun

Anggaran 2021 pendapatan Dana Insentif Daerah terdapat pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Pendapatan Dana Desa terdapat pada Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah.

A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan.

Pada Tahun Anggaran 2022, pendapatan transfer pemerintah pusat dianggarkan sebesar Rp765.473.073.528,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp738.180.328.516,00 atau 96,43% dari target yang telah ditetapkan.

a) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari dari Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Realisasi secara rinci dana perimbangan disajikan pada Tabel 5.1.15 berikut:

Tabel 5.1.15 Rincian Dana Perimbangan TA 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
I.	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)**	**36.990.377.528,00**	**30.104.376.388,00**	**81,38**	**28.074.423.464,00**
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	13.077.708.075,00	9.628.517.203,00	73,63	14.791.514.470,00
2.	DBH PPh Pasal 21	5.467.082.341,00	4.251.670.901,00	77,77	5.465.415.389,00
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	317.093.325,00	241.622.053,00	76,20	211.092.146,00
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	127.959.643,00	61.286.979,00	47,90	116.436.788,00
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	11.145.681.255,00	9.618.877.214,00	86,30	3.322.393.130,00
6.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	24.876.490,00	0,00	0,00	262.211.090,00
7.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	3.784.619.099,00	3.405.138.586,00	89,97	1.471.687.791,00
8.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	00,00	26.867.050,00
9.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-	974.455.392,00	842.900.452,00	86,50	516.662.392,00

	Royalty				
10.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	112.590.908,00	96.052.000,00	85,31	224.807.547,00
11.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.665.335.671,00
II.	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)**	**437.174.360.000,00**	**436.040.756.350,00**	**99,74**	**436.265.639.071,00**
1.	DAU	437.174.360.000,00	436.040.756.350,00	99,74	436.265.639.071,00
III.	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**	**89.409.492.000,00**	**87.680.822.078,00**	**98,07**	**79.200.603.677,00**
1.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	240.080.000,00	239.675.986,00	99,83	0,00
2.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	17.490.521.000,00	17.479.611.750,00	99,94	19.701.881.600,00
3.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	9.791.327.000,00	9.784.443.050,00	99,93	1.181.884.300,00
4.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.000.000.000,00	9.069.969.000,00	90,70	00,00
5.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	4.694.961.000,00	4.650.795.997,00	99,06	4.367.139.627,00
6.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	539.488.000,00	538.251.245,00	99,77	0,00
7.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.516.253.000,00	1.491.771.200,00	98,39	0,00
8.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	332.664.000,00	314.990.000,00	94,69	0,00
9.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	138.332.000,00	123.482.000,00	89,26	0,00
10.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	34.267.295.000,00	33.698.721.850,00	98,34	0,00
11.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	5.083.169.000,00	4.974.020.000,00	97,85	0,00
12.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.715.090.000,00	4.715.090.000,00	100,00	0,00
13.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	600.312.000,00	600.000.000,00	99,95	00,00
14.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	2.433.329.600,00
15.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-	0,00	0,00	0,00	1.240.272.650,00

	Reguler-KB				
16.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	2.329.770.000,00
17.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	38.065.033.000,00
18.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	5.530.944.900,00
19.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.444.581.000,00
20.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.905.767.000,00
IV.	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**	**119.298.555.000,00**	**101.754.084.700,00**	**85,29**	**79.486.417.772,00**
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	41.899.400.000,00	35.863.746.500,00	85,59	0,00
2.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	53.100.745.000,00	46.850.026.400,00	88,23	54.747.613.000,00
3.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.589.000.000,00	1.564.250.000,00	60,42	835.250.000,00
4.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.811.200.000,00	3.797.175.000,00	99,63	4.081.200.000,00
5.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	540.300.000,00	540.300.000,00	100,00	1.733.300.000,00
6.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	12.082.386.000,00	8.428.593.700,00	69,76	13.309.268.400,00
7.	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	186.331.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.097.217.000,00	2.920.823.100,00	94,30	2.365.149.000,00
9.	DAK Non Fisik-PK2UKM	400.800.000,00	400.800.000,00	100,00	0,00
10.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	355.476.000,00	355.466.000,00	100,00	163.061.000,00
11.	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	249.004.000,00	55,11	191.067.000,00
12.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	783.900.000,00	783.900.000,00	100,00	291.125.000,00
13.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.024.132.372,00
14.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
15.	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	0,00	0,00	0,00	645.252.000,00
Jumlah		**682.872.784.528,00**	**655.580.039.516,00**	**96,00**	**623.027.083.984,00**

1.a Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Realisasi penerimaan DBH sebesar Rp30.104.376.388,00 untuk tahun 2022 atau sebesar 81,38% dari anggaran yang ditetapkan Rp36.990.377.528,00.

1.b Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Anggaran penerimaan DAU sebesar Rp437.174.360.000,00 dan dapat terealisasi sebebesar Rp436.040.756.350,00 atau sebesar 99,74%.

1.c Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

DAK Fisik pada Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp87.680.822.078,00 atau 98,07% dari anggaran sebesar Rp89.409.492.000,00.

1.d Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

DAK Non Fisik pada Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp101.754.084.700,00 atau 85,59% dari anggaran sebesar Rp119.298.555.000,00.

b) Dana Desa

Dana Desa pada Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp82.600.289.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan.

Dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan penganggaran Dana Desa, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota yang dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar:

   Dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran dana desa dibagi secara merata kepada setiap desa secara nasional.

b. Alokasi Afirmasi:

   Dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran dana desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

c. Alokasi Kinerja:

Dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran dana desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik yaitu desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa, capaian keluaran dana desa, capaian hasil pembangunan desa, dengan bobot:

1) 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan desa;
2) 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan dana desa;
3) 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran dana desa;
4) 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan desa.

d. Alokasi Formula.

Dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari anggaran dana desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa dengan bobot:

1) 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
2) 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
3) 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
4) 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

B. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Bagi Hasil Pajak meliputi Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan dan Bagi Hasil Dari Pajak Rokok. Anggaran dan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak pada Tabel 5.1.16 berikut:

Tabel 5.1.16 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
I.	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**	**81.826.989.546,00**	**73.797.069.058,00**	**90,19**	**56.844.750.001,00**
1.	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	15.340.195.814,00	10.547.692.370,00	68,76	12.484.185.374,00
2.	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13.882.298.840,00	10.110.878.704,00	72,83	7.402.567.296,00
3.	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31.271.441.293,00	30.363.130.058,00	97,10	23.081.258.582,00
4.	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	83.083.531,00	107.792.658,00	129,74	80.134.099,00
5.	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	21.249.970.068,00	22.667.575.268,00	106,67	13.796.604.650,00

Realisasi penerimaan terbesar diperoleh dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu Rp30.363.130.058,00 namun tidak memenuhi target anggaran dimana hanya terealisasi sebesar 97,10% dan terendah diperoleh dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yaitu hanya sebesar Rp107.792.658,00 namun melebihi dari anggaran yang ditetapkan sebesar 129,74%. Berikut rincian Dana Bagi Hasil:

Tabel 5.1.17 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022

No	Nomor SK	Uraian	Penetapan	Realisasi	Realisasi
1	G/665/VI.03/HK/2021	TW. III TAHUN 2021	30/11/2021	01/04/2022	4.067.740.143,00
2	G/183/VI.03/HK/2022	TW. III TAHUN 2021	07/03/2022	20/06/2022	3.265.056.836,00
3	G/349/VI.03/HK/2022	TW. I TAHUN 2022	03/06/2022	08/09/2022	3.214.895.391,00
Jumlah					**10.547.692.370,00**

Tabel 5.1.18 Rincian Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun

No	Nomor SK	Uraian	Penetapan	Realisasi	Realisasi
1	G/665/VI.03/HK/2021	TW. III TAHUN 2021	30/11/2021	01/04/2022	2.333.738.438,00
2	G/183/VI.03/HK/2022	TW. III TAHUN 2021	07/03/2022	20/06/2022	2.581.901.213,00
3	G/349/VI.03/HK/2022	TW. I TAHUN 2022	03/06/2022	08/09/2022	2.727.581.988,00
4	G/475/VI.03/HK/2022	TW. II. TAHUN 2022	25/08/2022	16/12/2022	2.467.657.065,00
Jumlah					**10.110.878.704,00**

Tabel 5.1.19 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

No	Nomor SK	Uraian	Penetapan	Realisasi	Realisasi
1	G/665/VI.03/HK/2021	TW. III TAHUN 2021	30/11/2021	01/04/2022	6.579.638.445,00
2	G/183/VI.03/HK/2022	TW. III TAHUN 2021	07/03/2022	20/06/2022	7.869.888.453,00
3	G/349/VI.03/HK/2022	TW. I TAHUN 2022	03/06/2022	08/09/2022	7.865.914.976,00
4	G/475/VI.03/HK/2022	TW. II. TAHUN 2022	25/08/2022	16/12/2022	8.047.688.184,00
Jumlah					**30.363.130.058,00**

Tabel 5.1.20 Rincian DBH Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

No	Nomor SK	Uraian	Penetapan	Realisasi	Realisasi
1	G/665/VI.03/HK/2021	TW. III TAHUN 2021	30/11/2021	01/04/2022	21.750.225,00
2	G/183/VI.03/HK/2022	TW. III TAHUN 2021	07/03/2022	20/06/2022	25.234.908,00
3	G/349/VI.03/HK/2022	TW. I TAHUN 2022	03/06/2022	08/09/2022	30.043.032,00
4	G/475/VI.03/HK/2022	TW. II. TAHUN 2022	25/08/2022	16/12/2022	30.764.493,00
Jumlah					**107.792.658,00**

Tabel 5.1.21 Rincian Bagi Hasil Dari Pajak Rokok

No	Nomor SK	Uraian	Penetapan	Realisasi	Realisasi
1	G/ /VI.03/HK/2021	TW. IV. TAHUN 2021	-	04/01/2022	3.861.037.686,00
2	-	TW. I TAHUN 2022	-	20/06/2022	2.264.156.133,00
3	G/350/VI.03/HK/2022	TW. II. TAHUN 2022	03/06/2022	22/06/2022	6.140.415.106,00
4	G/476/VI.03/HK/2022	TW. III. TAHUN 2022	03/06/2022	28/09/2022	6.853.353.763,00
5	G/722/V.03/HK/2022	TW.IV. TAHUN 2022	28/11/2022	12/12/2022	3.548.612.580,00
Jumlah					**22.667.575.268,00**

Tabel 5.1.22 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak yang dibayarkan pada Tahun 2023

No	Nomor SK	Uraian	Penetapan	Realisasi	Realisasi
1	**Pajak Kendaraan Bermotor**				
	G/475/VI.03/HK/2022	TW. II TA. 2022	25/08/2022	25/01/2023	3.286.531.595,00
	G/72/VI.03/HK/2022	TW. III TA2022	28/11/2022	24/03/2023	3.845.639.083,00
2	**Pajak BBNKB**				
	G/72/VI.03/HK/2022	TW. III TA2022	28/11/2022	24/03/2023	2.496.344.711,00
3	**Pajak BBKB**				
	G/72/VI.03/HK/2022	TW. III TA2022	28/11/2022	24/03/2023	8.355.709.232,00
4	**Pajak PPAP**				
	G/72/VI.03/HK/2022	TW. III TA2022	28/11/2022	24/03/2023	26.502.366,00
5	**Pajak Rokok**				
	G/ /V.03/HK/2022	TW. IV TA2022	-	24/01/2023	4.370.191.990,00
Jumlah					**22.380.918.977,00**

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pos untuk menampung lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang terdiri dari objek Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat. Pada Tahun Anggaran 2022, lain-lain pendapatan yang sah dapat direalisasikan sebesar Rp2.532.000.000,00 atau sebesar 45,59% dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp5.553.362.141,00. Anggaran dan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan yang sah pada Tahun Anggaran 2022, pada tabel 5.1.23 berikut:

Tabel 5.1.23 Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Realisasi 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi		
			(Rp)	%	
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	5.553.362.141,00	2.532.000.000,00	45,59	36.257.373.000,00
	Jumlah	5.553.362.141,00	2.532.000.000,00	**45,59**	**36.257.373.000,00**

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Pendapatan hibah sebesar Rp2.532.000.000,00 didapat dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat. Anggaran Pendapatan hibah dari pemerintah pusat hibah AMD Rekomendasi ke-2, TA 2022 => 563111 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah (116.116 Hibah Air Minum Perdesaan (AMD).

5.1.2 BELANJA

Pada APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2022, Pos Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp888.011.329.931,07 dan telah direalisasikan sebesar Rp840.783.581.155,10 atau 94,68%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.24 Rincian Belanja TA 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Realisasi 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Belanja Operasi	600.595.734.976,07	563.899.096.735,10	93,89	549.807.397.920,00
2.	Belanja Modal	153.241.749.284,00	148.356.337.176,00	96,81	243.451.011.536,40
3.	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	66.000.000,00	4,40	967.492.415,00
4.	Belanja Transfer	132.673.845.671,00	128.462.147.244,00	96,83	142.707.055.774,00
	J u m l a h	**888.011.329.931,07**	**840.783.581.155,10**	**94,68**	**936.932.957.645,40**

5.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran Belanja Operasi merupakan pos anggaran untuk mendukung operasional pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Tahun Anggaran 2022.

Pada Tahun Anggaran 2022, belanja operasi dianggarkan sebesar Rp600.595.734.976,07 dan dapat direalisasikan sebesar Rp563.899.096.735,10 atau 93,89 dari target yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi belanja operasi TA 2022 disajikan pada Tabel 5.1.25 berikut:

Tabel 5.1.25 Rincian Belanja Operasi TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Realisasi 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Pegawai	344.730.157.012,07	326.272.576.092,00	94,65	309.144.195.766,00
2	Belanja Barang dan Jasa	225.665.919.468,00	208.016.628.415,15	92,18	208.415.433.764,00
3	Belanja Bunga	8.755.000.000,00	9.266.529.386,00	105,84	8.075.098.450,00
4	Belanja Hibah	18.994.378.496,00	17.988.882.841,95	94,71	15.510.369.940,00
5	Belanja Bantuan Sosial	2.450.280.000,00	2.354.480.000,00	96,09	8.662.300.000,00
	J u m l a h	**600.595.734.976,07**	**563.899.096.735,10**	**93,89**	**549.807.397.920,00**

Berdasarkan Tabel 5.1.24 di atas diketahui bahwa realisasi belanja operasi pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp563.899.096.735,10 atau 93,89% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp600.595.734.976,07. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja operasi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp549.807.397.920,00, terjadi peningkatan pengeluaran sebesar Rp14.091.698.815,10.

A. Belanja Pegawai

Pada Tahun Anggaran 2022, belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp344.730.157.012,07 dan dapat direalisasikan sebesar Rp326.272.576.092,00 atau 94,72%. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai disajikan pada Tabel 5.1.26 berikut:

Tabel 5.1.26 Rincian Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Realisasi 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi		
			(Rp)	%	
1.	**Gaji dan Tunjangan**	**204.079.092.402,07**	**197.411.042.849,00**	**96,73**	**192.992.061.745,00**
	Belanja Gaji Pokok ASN	150.062.470.435,07	146.592.943.038,00	97,69	144.561.521.071,00
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	14.756.228.259,00	14.450.990.657,00	97,93	14.489.671.566,00
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.663.585.669,00	6.476.220.000,00	97,19	6.577.901.955,00
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	9.533.906.750,00	9.441.048.000,00	99,03	9.235.325.500,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.780.896.744,00	1.710.600.000,00	96,05	1.536.516.500,00
	Belanja Tunjangan Beras	8.822.425.887,00	8.619.428.400,00	97,70	8.546.230.175,00

	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	333.455.248,00	274.028.805,00	82,18	279.277.648,00
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.293.159,00	2.003.976,00	37,86	1.993.476,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.781.794.236,00	8.630.054.797,00	80,04	6.635.321.925,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	384.747.304,00	307.726.922,00	79,94	1.128.301.929,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	954.288.711,00	905.998.254,00	94,94	0,00
2.	**Tambahan Penghasilan PNS**	**40.597.604.679,00**	**39.717.112.165,00**	**97,83**	**35.727.916.678,00**
	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	40.562.534.577,00	39.717.112.165,00	97,92	35.727.916.678,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	35.070.102,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**73.236.322.380,00**	**64.288.798.984,00**	**87,78**	**51.696.239.980,00**
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	535.675.000,00	498.883.884,00	93,13	426.815.010,00
	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	129.510.000,00	70.019.000,00	54,06	57.710.250,00
	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	64.699.346.980,00	57.538.996.100,00	88,93	45.568.513.220,00
	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	6.100.400,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.589.000.000,00	1.033.250.000,00	39,91	925.250.000,00
	Belanja Honorarium	4.932.090.000,00	4.863.400.000,00	98,70	4.574.431.500,00
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	344.600.000,00	284.250.000,00	82,49	143.520.000,00
4.	**Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD**	**10.995.404.440,00**	**10.397.812.352,00**	**94,57**	**9.985.751.497,00**
	Belanja Uang Representasi DPRD	719.775.000,00	671.790.000,00	93,33	674.940.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	81.396.000,00	80.018.600,00	98,31	80.395.600,00
	Belanja Tunjangan Beras DPRD	108.428.000,00	89.511.120,00	82,55	63.655.560,00

	Belanja Uang Paket DPRD	66.990.000,00	57.420.000,00	85,71	57.552.680,00
	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.043.673.750,00	974.095.500,00	93,33	974.095.500,00
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	85.503.600,00	85.503.600,00	100	85.503.600,00
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.798.700,00	14.798.700,00	100	14.798.700,00
	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.268.000.000,00	2.268.000.000,00	100	2.268.945.000,00
	Belanja Tunjangan Reses DPRD	567.000.000,00	567.000.000,00	100	561.645.000,00
	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	50.000.000,00	41.297.896,00	82,60	41.222.296,00
	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.916.761.904,00	2.786.006.936,00	95,52	2.569.797.561,00
	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.997.000.000,00	2.762.370.000,00	92,17	2.593.200.000,00
	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	76.077.486,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**	**1.224.039.111,00**	**1.039.271.642,00**	**84,91**	**1.493.302.054,00**
	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	144.223.573,00	23.400.000,00	16,22	59.208.045,00
	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	1.069.754.200,00	1.012.120.000,00	94,61	1.422.888.045,00
	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.058.182,00	869.040,00	42,22	2.588.685,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.262.380,00	510.506,00	40,44	1.591.602,00
	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.820,00	896	49,23	2.624,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.206.928,00	2.184.000,00	35,19	6.386.445,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	159.608,00	46.800,00	29,32	636.608,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	372.420,00	140.400,00	37,70	0,00
6.	**Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH**	**510.880.000,00**	**510.880.000,00**	**100**	**409.032.000,00**
	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	100	**0,00**
	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan	0,00	0,00	0,00	109.032.000,00

	Anggota DPRD				
	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	100	300.000.000,00
7.	**Belanja Pegawai BOS**	**13.546.802.000,00**	**12.379.496.100,00**	**91,38**	**11.820.430.500,00**
8.	**Belanja Pegawai BLUD**	**540.012.000,00**	**528.162.000,00**	**97,81**	**5.019.461.312,00**
	J u m l a h	**344.730.157.012,07**	**326.272.576.092,00**	**94,72**	**309.144.195.766,00**

a) Belanja Gaji dan Tunjangan

Realisasi belanja gaji dan tunjangan Rp197.411.042.849,00 merupakan belanja pegawai yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tersebut untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS.

b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp39.717.112.165,00, merupakan pembayaran belanja tambahan penghasilan guru dan tambahan penghasilan bukan guru.

c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp64.288.798.984,00 merupakan pembayaran Insentif atas Pemungutan Pajak & Retribusi, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru, Belanja Honorarium dan Jasa Pengelolaan BMD.

d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp10.397.812.352,00 yang terdiri dari Uang Representasi, Tunjangan, Uang Paket, Pembebanan PPh dan Uang Jasa Anggota DPRD.

e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp1.039.271.642,00 yang terdiri dari Gaji, Tunjangan dan Iuran Jaminan Kesehatan/Kecelakaan bagi KDH/WKDH.

f) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Realisasi belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp510.880.000,00 yang terdiri dari Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH.

g) Belanja Pegawai BOS

Realisasi Belanja Pegawai BOS terealisasi sebesar Rp12.379.496.100,00 atau sebesar 91,38% dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp13.546.802.000,00.

h) Belanja Pegawai BLUD

Realisasi Belanja Pegawai BLUD terealisasi sebesar Rp528.162.000,00 atau sebesar 93,73% dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp540.012.000,00.

B. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa untuk Tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar Rp208.016.628.415,15 atau 92,18% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp225.665.919.468,00. Realisasi Belanja barang dan jasa untuk Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp398.805.348,85 atau 0,19% jika dibandingkan Realisasi Belanja barang dan jasa untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp208.415.433.764,00. Realisasi Belanja barang dan jasa dirinci pada Tabel 5.1.27 berikut:

Tabel 5.1.27 Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Realisasi 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Barang	45.332.637.685,00	43.439.099.850,10	95,82	56.086.886.242,00
2	Belanja Jasa	85.847.502.230,00	80.491.672.777,00	93,76	88.933.440.250,00
3	Belanja Pemeliharaan	25.690.303.160,00	25.486.835.911,00	99,21	13.116.625.845,00
4	Belana Perjalanan Dinas	23.726.507.000,00	21.330.922.738,00	89,90	23.028.861.247,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.518.230.000,00	1.151.115.340,00	75,82	589.500.000,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	22.373.397.250,00	19.753.620.300,00	88,29	19.360.135.300,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	21.177.342.143,00	16.363.361.499,05	77,27	7.299.984.880,00
J u m l a h		**225.665.919.468,00**	**208.016.628.415,15**	**92,18**	**208.415.433.764,00**

a) Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sebesar Rp43.439.099.850,10 atau sebesar 95,82% dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar 45.332.637.685,00. Realisasi Belanja barang OPD dirinci pada Tabel 5.1.28 berikut:

Tabel 5.1.28 Rincian Belanja Barang TA 2022

No	OPD	REALISASI (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	940.477.450,00
2	Dinas Kesehatan	7.065.503.079,10
3	Puskesmas Kartaraharja	104.680.000,00
4	Puskesmas Dayamurni	66.560.000,00
5	Puskesmas Panaragan Jaya	100.190.000,00
6	Puskesmas Mulya Asri	98.590.000,00
7	Puskesmas Candra Mukti	96.240.000,00
8	Puskesmas Pagar Dewa	108.782.000,00
9	Puskesmas Kibang Budi Jaya	149.100.000,00
10	Puskesmas Toto Mulyo	70.350.000,00
11	Puskesmas Sukajaya	108.220.000,00
12	Puskesmas Mercu Buana	38.520.000,00
13	Puskesmas Toto Katon	51.160.000,00
14	Puskesmas Dwikora	159.400.000,00
15	Puskesmas Margodadi	56.770.000,00
16	Puskesmas Marga Kencana	24.400.000,00
17	Puskesmas Gilang Tunggal Makarta	91.305.000,00
18	Puskesmas Indraloka Jaya	117.103.000,00
19	Rumah Sakit Umum Daerah TUBABA	19.500.000,00
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.038.246.380,00
21	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	482.787.697,00
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	289.242.700,00

23	Satuan Polisi Pamong Praja	859.782.000,00
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	251.374.100,00
25	Dinas Pemadam Kebakaran	328.928.500,00
26	Dinas Sosial	355.944.250,00
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	117.592.000,00
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	341.646.000,00
29	Dinas Ketahanan Pangan	279.993.000,00
30	Dinas Lingkungan Hidup	995.585.475,00
31	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	551.115.000,00
32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh	402.474.500,00
33	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	704.806.800,00
34	Dinas Perhubungan	196.553.900,00
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	425.341.100,00
36	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	696.001.800,00
37	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	313.280.400,00
38	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	431.688.950,00
39	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	214.408.000,00
40	Dinas Perikanan	213.280.000,00
41	Dinas Pertanian	411.062.450,00
42	Dinas Peternakan	447.918.000,00
43	Sekretariat Daerah	7.935.955.820,00
44	Sekretariat DPRD	7.139.554.400,00
45	Kecamatan Tulang Bawang Tengah	295.344.000,00
46	Kecamatan Tulang Bawang Udik	103.642.000,00
47	Kecamatan Gunung Terang	98.522.000,00
48	Kecamatan Gunung Agung	103.628.000,00
49	Kecamatan Lambu Kibang	105.401.500,00
50	Kecamatan Way Kenanga	90.478.000,00
51	Kecamatan Tumijajar	133.694.000,00
52	Kecamatan Pagar Dewa	90.517.000,00
53	Kecamatan Batu Putih	79.119.800,00
54	Inspektorat	405.254.800,00
55	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.701.699.000,00
56	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	2.867.371.999,00
57	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.083.738.800,00
58	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	1.389.275.200,00
J u m l a h		**43.439.099.850,10**

b) Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa sebesar Rp80.491.672.777,00 atau sebesar 93,76% dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp85.847.502.230,00. Realisasi Belanja jasa OPD dirinci pada Tabel 5.1.29 berikut:

Tabel 5.1.29 Rincian Belanja Jasa TA 2022

No	OPD	REALISASI (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.387.064.550,00
2	Dinas Kesehatan	12.192.081.015,00
3	Puskesmas Kartaraharja	158.700.000,00
4	Puskesmas Dayamurni	181.100.000,00
5	Puskesmas Panaragan Jaya	143.050.000,00
6	Puskesmas Mulya Asri	150.600.000,00
7	Puskesmas Candra Mukti	120.600.000,00
8	Puskesmas Pagar Dewa	30.900.000,00
9	Puskesmas Kibang Budi Jaya	150.600.000,00
10	Puskesmas Toto Mulyo	242.400.000,00

11	Puskesmas Sukajaya	150.600.000,00
12	Puskesmas Mercu Buana	60.600.000,00
13	Puskesmas Toto Katon	60.600.000,00
14	Puskesmas Dwikora	91.400.000,00
15	Puskesmas Margodadi	150.800.000,00
16	Puskesmas Marga Kencana	120.600.000,00
17	Puskesmas Gilang Tunggal Makarta	35.100.000,00
18	Puskesmas Indraloka Jaya	34.200.000,00
19	Rumah Sakit Umum Daerah TUBABA	0,00
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.496.176.408,00
21	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1.858.409.553,00
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	795.201.172,00
23	Satuan Polisi Pamong Praja	3.298.932.000,00
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	533.200.000,00
25	Dinas Pemadam Kebakaran	1.003.702.000,00
26	Dinas Sosial	1.048.032.000,00
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	192.968.816,00
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ana	465.304.200,00
29	Dinas Ketahanan Pangan	210.797.436,00
30	Dinas Lingkungan Hidup	897.398.225,00
31	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	346.799.351,00
32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh	357.230.000,00
33	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.155.517.200,00
34	Dinas Perhubungan	946.988.000,00
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.504.760.708,00
36	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.901.784.660,00
37	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	431.225.353,00
38	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	475.234.648,00
39	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	250.780.376,00
40	Dinas Perikanan	246.932.934,00
41	Dinas Pertanian	341.722.114,00
42	Dinas Peternakan	399.884.632,00
43	Sekretariat Daerah	10.017.963.703,00
53	Sekretariat DPRD	4.748.627.956,00
54	Kecamatan Tulang Bawang Tengah	790.141.820,00
55	Kecamatan Tulang Bawang Udik	129.236.000,00
56	Kecamatan Gunung Terang	118.936.000,00
57	Kecamatan Gunung Agung	125.186.000,00
58	Kecamatan Lambu Kibang	117.536.000,00
59	Kecamatan Way Kenanga	132.236.000,00
60	Kecamatan Tumijajar	514.240.000,00
61	Kecamatan Pagar Dewa	121.552.500,00
62	Kecamatan Batu Putih	131.536.000,00
63	Inspektorat	417.874.200,00
64	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.073.827.475,00
65	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	2.020.732.076,00
66	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	790.100.679,00
67	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	1.621.969.017,00
J u m l a h		**80.491.672.777,00**

c) Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp25.486.835.911,00 atau sebesar 99,21% dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp25.690.303.160,00. Realisasi Belanja Pemeliharaan OPD dirinci pada Tabel 5.1.30 berikut:

Tabel 5.1.30 Rincian Belanja Pemeliharaan TA 2022

No	OPD	REALISASI (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.340.000,00
2	Dinas Kesehatan	180.180.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.973.377.679,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	620.935.930,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	58.670.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.930.000,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran	168.976.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	96.840.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.414.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh	11.120.000,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.450.000,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	16.670.000,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	4.400.000,00
14	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	13.670.000,00
15	Dinas Pertanian	42.954.000,00
16	Dinas Peternakan	10.000.000,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.500.000,00
18	Sekretariat Daerah	1.599.864.000,00
19	Sekretariat DPRD	255.115.302,00
20	Kecamatan Gunung Terang	6.000.000,00
21	Kecamatan Batu Putih	13.700.000,00
22	Inspektorat	88.290.000,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	52.222.000,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	86.650.000,00
25	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	81.057.000,00
26	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	46.510.000,00
J u m l a h		**25.486.835.911,00**

d) Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp21.330.922.738,00 atau sebesar 89,90% dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp23.726.507.000,00. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas OPD dirinci pada Tabel 5.1.31 berikut:

Tabel 5.1.31 Rincian Belanja Perjalanan Dinas TA 2022

No	OPD	REALISASI (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	460.264.000,00
2	Dinas Kesehatan	246.730.000,00
3	Puskesmas Kartaraharja	275.700.000,00
4	Puskesmas Dayamurni	392.950.000,00
5	Puskesmas Panaragan Jaya	311.600.000,00
6	Puskesmas Mulya Asri	406.300.000,00
7	Puskesmas Candra Mukti	411.700.000,00
8	Puskesmas Pagar Dewa	224.850.000,00
9	Puskesmas Kibang Budi Jaya	369.600.000,00
10	Puskesmas Toto Mulyo	291.700.000,00
11	Puskesmas Sukajaya	277.100.000,00
12	Puskesmas Mercu Buana	416.200.000,00
13	Puskesmas Toto Katon	214.000.000,00
14	Puskesmas Dwikora	254.400.000,00
15	Puskesmas Margodadi	255.700.000,00
16	Puskesmas Marga Kencana	186.500.000,00
17	Puskesmas Gilang Tunggal Makarta	302.100.000,00

18	Puskesmas Indraloka Jaya	143.950.000,00
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	516.305.156,00
20	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	86.032.000,00
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	72.299.617,00
22	Satuan Polisi Pamong Praja	33.420.000,00
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.950.000,00
24	Dinas Pemadam Kebakaran	37.190.000,00
25	Dinas Sosial	148.859.733,00
26	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	35.678.000,00
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ana	191.761.000,00
28	Dinas Ketahanan Pangan	187.302.000,00
29	Dinas Lingkungan Hidup	129.019.000,00
30	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	105.569.653,00
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh	237.514.000,00
32	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	664.718.000,00
33	Dinas Perhubungan	42.665.028,00
34	Dinas Komunikasi dan Informatika	230.373.000,00
35	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	253.318.000,00
36	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	72.240.000,00
37	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	76.173.000,00
38	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	79.434.000,00
39	Dinas Perikanan	40.280.000,00
40	Dinas Pertanian	207.344.000,00
41	Dinas Peternakan	118.019.000,00
42	Sekretariat Daerah	1.195.470.800,00
43	Sekretariat DPRD	7.151.766.752,00
44	Kecamatan Batu Putih	6.428.000,00
45	Kecamatan Gunung Terang	13.900.000,00
46	Kecamatan Gunung Agung	15.600.000,00
47	Kecamatan Way Kenanga	24.000.000,00
48	Kecamatan Lambu Kibang	22.500.000,00
49	Kecamatan Pagar Dewa	8.241.000,00
50	Inspektorat	1.465.738.000,00
51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.149.665.200,00
52	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	806.642.175,00
53	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	138.582.000,00
54	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	298.580.624,00
J u m l a h		**21.330.922.738,00**

e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp1.151.115.340,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.518.230.000,00. Adapun rincian Belanja dimaksud, pada Tabel 5.1.32 berikut:

Tabel 5.1.32 Rincian Belanja Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

NO	OPD	REALISASI (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	90.000.000,00
2	Dinas Lingkungan HIdup	3.292.000,00

3	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4.500.000,00
4	Dinas Ketahanan Pangan	305.000.000,00
5	Dinas Perikanan	5.000.000,00
6	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	79.990.000,00
7	Sekretariat Daerah	663.333.340,00
J u m l a h		**1.151.115.340,00**

f) Belanja Barang dan Jasa BOS

Rincian belanja barang jasa BOS terealisasi sebesar Rp19.753.620.300,00 atau sebesar 88,29% dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar 22.373.397.250,00. Adapun rincian Belanja dimaksud, pada Tabel 5.1.33 berikut:

Tabel 5.1.33 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	**Sekolah Dasar (SD)**	
	Kecamatan Tulang Bawang Tengah	3.741.550.500
	Kecamatan Tumijajar	2.327.629.000
	Kecamatan Tulang Bawang Udik	1.524.311.950
	Kecamatan Gunung Terang	834.187.500
	Kecamatan Batu Putih	827.921.000
	Kecamatan Gunung Agung	1.936.141.800
	Kecamatan Lambu Kibang	1.462.380.600
	Kecamatan Way Kenanga	1.210.741.000
	Kecamatan Pagar Dewa	152.549.000
2	**Sekolah Menengah Pertama (SMP)**	
	Kecamatan Tulang Bawang Tengah	1.721.978.200
	Kecamatan Tumijajar	1.167.794.150
	Kecamatan Tulang Bawang Udik	740.669.200
	Kecamatan Gunung Terang, Batu Putih	413.089.500
	Kecamatan Gunung Agung	761.183.900
	Kecamatan Lambu Kibang	535.719.000
	Kecamatan Pagar Dewa	395.774.000
J u m l a h		**19.753.620.300,00**

g) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Rincian belanja barang jasa BLUD terealisasi sebesar Rp16.363.361.499,05 atau sebesar 77,27% dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp21.177.342.143,00. Adapun rincian Belanja dimaksud, pada Tabel 5.1.34 berikut:

Tabel 5.1.34 Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Puskesmas Kartaraharja	386.401.515,05
2	Puskesmas Dayamurni	814.606.292,00
3	Puskesmas Panaragan Jaya	1.065.110.775,00
4	Puskesmas Mulya Asri	1.090.211.617,00
5	Puskesmas Candra Mukti	768.697.375,00
6	Puskesmas Pagar Dewa	238.926.400,00
7	Puskesmas Kibang Budi Jaya	558.963.803,00
8	Puskesmas Toto Mulyo	610.010.850,00

9	Puskesmas Sukajaya	647.527.248,00
10	Puskesmas Mercu Buana	475.395.231,00
11	Puskesmas Toto Katon	288.528.480,00
12	Puskesmas Dwikora	293.299.714,00
13	Puskesmas Margodadi	329.647.110,00
14	Puskesmas Marga Kencana	218.210.320,00
15	Puskesmas Gilang Tunggal Makarta	178.417.100,00
16	Puskesmas Indraloka Jaya	153.953.806,00
17	Rumah Sakit Umum Daerah TUBABA	8.155.190.475,00
18	Pasar Pulung Kencana	90.263.388,00
J u m l a h		**16.363.361.499,05**

C. Belanja Bunga

Realisasi belanja bunga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.266.529.386,00 atau 105,84% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.755.000.000,00, Belanja Bunga direalisasikan untuk pembayaran bunga pinjaman Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada PT.Sarana Multi Infrastruktur, Persero Jakarta. Rincian Belanja Bunga TA 2022 terinci dalam tabel 5.1.35 berikut:

Tabel 5.1.35 Rincian Belanja Bunga

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi 2022
1	31/01/2022	01/J.PENERIMAAN&BELANJABUNGA/PEN/LRA/TBB/2022	Mencatat Jurnal Penerimaan Dan Belanja Bunga Pen Tahun 2021 Yang Dipotong Langsung Oleh Dau Bulan Januari Rp 260.721.664,00 - Lra	260.721.664,00
2	31/01/2022	02/J.PENERIMAAN&BELANJABUNGA/PEN/LRA/TBB/2022	Mencatat Jurnal Penerimaan Dan Belanja Bunga Pen Tahun 2021 Yang Dipotong Langsung Oleh Dau Rp 130.803.087,00 Bulan Januari - Lra	130.803.087,00
3	25/02/2022	03/J.PENERIMAAN&BELANJABUNGA/PEN/LRA/TBB/2022	Mencatat Jurnal Penerimaan Dan Belanja Bunga Pen Tahun 2021 Yang Dipotong Langsung Oleh Dau Rp 255.123.866,00 Bulan Februari - Lra	255.123.866,00
4	28/03/2022	900/00757/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Kewajiban Bunga Dan Pokok Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode Maret Tahun 2022	1.046.910.548,00
5	28/03/2022	900/00758/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Kewajiban Bunga Dan Pokok Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode Maret Tahun 2022	536.726.664,00
6	31/03/2022	04/J.PENERIMAAN&BELANJABUNGA/PEN/LRA/TBB/2022	Mencatat Jurnal Penerimaan Dan Belanja Bunga Pen Tahun 2021 Yang Dipotong Langsung Oleh Dau Rp 282.458.567,00 Bulan Maret - Lra	282.458.567,00
7	28/04/2022	05/J.PENERIMAAN&BELANJABUNGA/PEN/LRA/TBB/2022	Mencatat Jurnal Penerimaan Dan Belanja Bunga Pen Tahun 2021 Yang Dipotong Langsung Oleh Dau Rp 273.347.000,00 Bulan April - Lra	273.347.000,00
8	31/05/2022	06/J.PENERIMAAN&BELANJABUNGA/PEN/LRA/TBB/2022	Mencatat Jurnal Penerimaan Dan Belanja Bunga Pen Tahun 2021 Yang Dipotong Langsung Oleh Dau Rp 282.458.567,00 Bulan Mei - Lra	282.458.567,00
9	23/06/2022	900/04176/SP2D/TUBABA/2022	Notifikasi Jatuh Tempo Pembayaran Kewajiban Pokok Dan Bunga Pinjaman	950.499.043,00

			Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode Bulan Juni 2022	
10	23/06/2022	900/04177/SP2D/ TUBABA/2022	Notifikasi Jatuh Tempo Pembayaran Kewajiban Pokok Dan Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode Bulan Juni 2022	493.439.192,00
11	30/06/2022	07/J.PENERIMAAN&BELANJABUNGA/PEN/LRA/TBB/2022	Mencatat Jurnal Penerimaan Dan Belanja Bunga Pen Tahun 2021 Yang Dipotong Langsung Oleh Dau Rp 273.347.000,00 Bulan Juni - Lra	273.347.000,00
12	29/07/2022	08/J.PENERIMAAN&BELANJABUNGA/PEN/LRA/TBB/2022	Mencatat Jurnal Penerimaan Dan Belanja Bunga Pen Tahun 2021 Yang Dipotong Langsung Oleh Dau Rp 282.458.567,00 Bulan Juli - Lra	282.458.567,00
13	31/08/2022	09/J.PENERIMAAN&BELANJABUNGA/PEN/LRA/TBB/2022	Mencatat Jurnal Penerimaan Dan Belanja Bunga Pen Tahun 2021 Yang Dipotong Langsung Oleh Dau Rp 282.458.567,00 Bulan Agustus - Lra	282.458.567,00
14	22/09/2022	900/07003/SP2D/ TUBABA/2022	Notifikasi Jatuh Tempo Pembayaran Kewajiban Pokok Dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode Bulan September 2022	833.790.381,00
15	22/09/2022	900/07004/SP2D/ TUBABA/2022	Notifikasi Jatuh Tempo Pembayaran Kewajiban Pokok Dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode Bulan September 2022	441.038.569,00
16	30/09/2022	10/J.PENERIMAAN&BELANJABUNGA/PEN/LRA/TBB/2022	Mencatat Jurnal Penerimaan Dan Belanja Bunga Pen Tahun 2021 Yang Dipotong Langsung Oleh Dau Rp 273.347.000,00 Bulan September - Lra	273.347.000,00
17	10/11/2022	900/07806/SP2D/ TUBABA/2022	Notifikasi Pembayaran Biaya Pengelolaan Untuk Pinjaman Pen Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021	98.033.980,00
18	22/12/2022	900/09951/SP2D/ TUBABA/2022	Notifikasi Jatuh Tempo Pembayaran Kewajiban Pokok Dan Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode Bulan Desember 2022	710.738.854,00
19	22/12/2022	900/09952/SP2D/ TUBABA/2022	Notifikasi Jatuh Tempo Pembayaran Kewajiban Pokok Dan Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode Bulan Desember 2022	385.790.086,00
20	31/12/2022	14/JK/BPK/BPKAD/2022	Koreksi Reklas Pengeluaran Pembiayaan PEN 2021 Rp529.913.408,00, Pembayaran Biaya Penglolaan Pinjaman PT SMI Sebesar 0,185% Untuk Pinjaman Pen Tahun 2020 Rp45.286.770,00 Dan Rp45.286.770,00	620.486.948,00
21	31/12/2022	16/JK/BPK/BPKAD/2022	Koreksi Belanja Bunga Dan Pengeluaran Pembiyaan PEN 2021 Yang Berasal Dari Pererimaan DAU Bulan Oktober Dan November Yang Dipotong Langsung - LRA	552.551.236,00
J u m l a h				**9.266.529.386,00**

D. Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2022 terealisasi sebesar Rp17.988.882.841,95 atau 94,71% dari anggaran sebesar 18.994.378.496,00, mengalami peningkatan sebesar

Rp2.478.512.901,95 dari realisasi TA 2021 sebesar Rp15.510.369.940,00. Belanja Hibah TA 2022 terinci dalam tabel 5.1.36 berikut:

Tabel 5.1.36 Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	TA 2022			TA 2021 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	8.974.217.256,00	8.615.836.679,90	96,01	4.729.156.200,00
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	9.637.852.000,00	8.990.736.922,05	93,29	9.998.904.500,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	382.309.240,00	382.309.240,00	100,00	382.309.240,00
J u m l a h		**18.994.378.496,00**	**17.988.882.841,95**	**94,71**	**15.510.369.940,00**

a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp8.615.836.679,90 dengan rincian pada Tabel 5.1.37 berikut:

Tabel 5.1.37 Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00	100,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	6.824.217.256,00	6.465.836.679,90	94,75
J u m l a h		**8.974.217.256,00**	**8.615.836.679,90**	**96,01**

b) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat untuk tahun anggaran 2022 tidak dianggarkan seperti Tahun Anggaran 2021, dimana pada tahun anggaran tersebut teralisasi sebesar Rp400.000.000,00 dengan peruntukan hibah Polres Tulang Bawang Barat dan Kodim 0412 Lampung Utara.

c) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp8.990.736.922,05 atau 93,29% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp9.637.852.000,00. Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dengan rincian pada Tabel 5.1.38 berikut:

Tabel 5.1.38 Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2022

.No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	**6.245.540.000,00**	**5.609.425.000,00**	**89,81**
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.186.200.000,00	5.550.775.000,00	89,73
	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	59.340.000,00	58.650.000,00	98,84
2	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	**931.138.100,00**	**931.138.100,00**	**100,00**
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	515.000.000,00	515.000.000,00	100,00
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	416.138.100,00	416.138.100,00	100,00
3	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**2.461.173.900,00**	**2.450.173.822,05**	**99,55**
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.152.918.000,00	2.141.917.922,05	99,49
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	208.255.900,00	208.255.900,00	100,00
	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
J u m l a h		**9.637.852.000,00**	**8.990.736.922,05**	**93,29**

a. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp382.309.240,00 atau 100% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp382.309.240,00. Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan rincian pada Tabel 5.1.39 berikut:

Tabel 5.1.39 Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	382.309.240,00	382.309.240,00	100
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	382.309.240,00	382.309.240,00	100
J u m l ah		**382.309.240,00**	**382.309.240,00**	**100**

Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan rincian pada Tabel 5.1.40 berikut:

Tabel 5.1.40 Rincian Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2022

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Realisasi
1	27/04/2022	900/02075/SP2D/ TUBABA/2022	Pembayaran Ls Bantuan Partai Pan	26.102.840,00
2	27/04/2022	900/02076/SP2D/ TUBABA/2022	Pembayaran Ls Bantuan Keuangan Partai Hanura	37.846.930,00
3	27/04/2022	900/02077/SP2D/ TUBABA/2022	Pembayaran Ls Bantuan Keuangan Partai Gerindra	57.976.530,00
4	27/04/2022	900/02078/SP2D/ TUBABA/2022	Pembayaran Ls Bantuan Keuangan Partai Perindo	27.360.940,00
5	27/04/2022	900/02079/SP2D/ TUBABA/2022	Pembayaran Ls Bantuan Keuangan Partai Pdi.P	94.021.095,00
6	27/04/2022	900/02080/SP2D/ TUBABA/2022	Pembayaran Ls Bantuan Keuangan Partai Demokrat	67.483.390,00
7	27/04/2022	900/02081/SP2D/ TUBABA/2022	Pembayaran Ls Hibah Partai Pkb	24.645.085,00
8	11/05/2022	900/02316/SP2D/ TUBABA/2022	Pembayaran Ls Bantuan Keuangan Partai Nasdem	46.872.430,00
Jumlah				**382.309.240,00**

b. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial TA 2022 terealisasi sebesar Rp2.354.480.000,00,00 atau 96,09% dari anggaran sebesar Rp2.450.280.000,00. Belanja bantuan sosial terdiri dari belanja bantuan sosial kepada individu dan belanja bantuan sosial kepada keluarga.

Penganggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat dimaksudkan diantaranya untuk korban kebakaran dan bantuan sosial kepada warga Sedangkan belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat yang direncanakan dimaksudkan untuk anggota legiun veteran Republik Indonesia di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Bantuan Program Mantra. Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dirinci dalam tabel 5.1.41 berikut:

Tabel 5.1.41 Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi 2022
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu				**40.280.000,00**
1	02/06/2022	900/03150/SP2D/ TUBABA/2022	Gu Dinsos Ta. 2022	2.640.000,00
2	27/06/2022	900/04206/SP2D/ TUBABA/2022	Gu Donsos Ta. 2022	2.640.000,00
3	07/11/2022	900/07725/SP2D/ TUBABA/2022	Pembayaran Ls Belanja Bantuan Veteran	35.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga				**2.314.200.000,00**
1	04/11/2022	900/07712/SP2D/ TUBABA/2022	Pembayaran Ls Pemberian Aksess Kelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar (Mantra)	572.700.000,00
2	29/11/2022	900/08409/SP2D/ TUBABA/2022	Pembayaran Ls Pemberian Aksess Kelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar (Mantra)	952.200.000,00
3	07/12/2022	900/08623/SP2D/ TUBABA/2022	Pembayaran Ls Pemberian Aksess Kelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar (Mantra)	815.100.000,00
4	30/12/2022	900/03/KONTRA POST/DINSOS/T BB/2022	Pengurang Belanja Hibah Mantra Keg. Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar Tahun 2022 Bank Bprs Syariah Tani	(5.100.000,00)
5	30/12/2022	900/04/KONTRA POST/DINSOS/T BB/2022	Pengurang Belanja Hibah Mantra Keg. Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar Tahun 2022 Bank Lampung	(20.400.000,00)
6	30/12/2022	900/05/KONTRA POST/DINSOS/T BB/2022	Pengembalian Mantra An Ibu Nur Aisah	(300.000,00)
J u m lah				**2.354.480.000,00**

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pos pengeluaran anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang menghasilkan barang inventaris daerah yang menambah kekayaan daerah. Pada Tahun Anggaran 2022, belanja modal dianggarkan sebesar Rp153.241.749.284,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp148.356.337.176,00 atau 96,81% dari target yang telah ditetapkan. Anggaran dan realisasi belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.42 Rincian Belanja Modal

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Realisasi 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Tanah	4.446.715.000,00	4.118.548.330,00	92,62	9.868.382.380,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	17.828.635.460,00	15.366.078.102,00	86,19	22.339.638.986,90
3	Belanja Gedung dan Bangunan	44.447.549.170,00	43.799.267.096,00	98,54	54.926.780.517,80
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	83.328.305.654,00	82.571.816.348,00	99,09	153.908.661.351,70
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.190.544.000,00	2.500.627.300,00	78,38	2.407.548.300,00
J u m l a h		**153.241.749.284,00**	**148.356.337.176,00**	**96,81**	**243.451.011.536,40**

Yang dirinci dalam masing-masing OPD pada Tabel berikut:

Tabel 5.1.43 Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 yang menambah Aset Tetap Tahun Anggaran 2022

No	Organisasi Perangkat Daerah	Belanja Modal Tanah	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Jumlah
1	Dinas Pendidikan		7.035.165.400,00	23.988.106.230,00		1.299.407.300,00	32.322.678.930
2	Dinas Kesehatan		2.630.022.450,00	14.800.800,00	98.041.058,00		2.742.864.308
3	Puskesmas Kartaraharja		2.490.000,00				2.490.000
4	Puskesmas Panaragan Jaya		49.900.000,00				49.900.000
5	Puskesmas Mulya Asri		52.950.000,00				52.950.000
6	Puskesmas Candra Mukti		31.175.000,00				31.175.000
7	Puskesmas Kibang Budi Jaya		33.501.880,00				33.501.880
8	Puskesmas Toto Mulyo		14.500.000,00				14.500.000
9	Puskesmas Sukajaya		23.575.991,00				23.575.991
10	Puskesmas Mercu Buana		1.725.000,00				1.725.000
11	Puskesmas Toto Katon		33.200.000,00				33.200.000
12	Puskesmas Margodadi		7.100.000,00				7.100.000
13	Puskesmas Marga Kencana		2.200.000,00				2.200.000
14	Puskesmas Indraloka Jaya		2.500.000,00				2.500.000
15	Rumah Sakit Umum Daerah TUBABA		1.890.656.450,00				1.890.656.450
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	434.223.000,00	997.198.800,00	19.193.838.056,00	82.473.775.290,00	1.192.140.000,00	104.291.175.146
17	Dinas Perumahan dan Pemukiman	3.684.325.330,00	107.379.198,00	186.423.000,00			3.978.127.528
18	Dinas Pemadam Kebakaran		91.500.000,00				91.500.000
19	Dinas Ketahanan Pangan		16.629.000,00				16.629.000
20	Dinas Lingkungan Hidup		79.920.000,00				79.920.000
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh		59.262.500,00			9.080.000,00	68.342.500
22	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		139.131.000,00				139.131.000
23	Dinas Perhubungan		0	24.949.000,00			24.949.000
24	Dinas Komunikasi Dan Informatika		152.620.000,00				152.620.000
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		64.487.500,00				64.487.500
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu		3.000.000,00				3.000.000
27	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga		22.283.000,00	194.845.320,00			217.128.320
29	Dinas Perikanan		12.000.000,00	196.304.690,00			208.304.690
30	Dinas Pertanian		37.351.250,00				37.351.250
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		46.025.000,00				46.025.000
32	Sekretariat Daerah		864.315.000,00				864.315.000

33	Sekretariat DPRD		573.650.000,00				573.650.000
34	Kecamatan TBT		4.090.000,00				4.090.000
35	Kecamatan Gunung Terang		6.014.000,00				6.014.000
36	Kecamatan Way Kenanga		3.646.000,00				3.646.000
37	Kecamatan Batu Putih		5.231.000,00				5.231.000
38	Inspektorat		49.980.000,00				49.980.000
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		157.890.000,00				157.890.000
40	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah		9.750.000,00				9.750.000
41	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah		52.062.683,00				52.062.683
Jumlah		**4.118.548.330,00**	**15.366.078.102,00**	**43.799.267.096,00**	**82.571.816.348,00**	**2.500.627.300,00**	**148.356.337.176,00**

A. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah pada Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp4.118.548.330,00 dari anggaran sebesar Rp4.446.715.000,00 atau 92,62%. Realisasi belanja modal tanah dirinci pada Tabel 5.1.44 berikut:

Tabel 5.1.44 Rincian Belanja modal tanah TA 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Realisasi 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	**Belanja Modal Tanah Persil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.113.290.380,00**
	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	2.870.539.300,00
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	1.242.751.080,00
2	**Belanja Modal Lapangan**	**4.446.715.000,00**	**4.118.548.330,00**	**92,62**	**5.755.092.000,00**
	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	4.012.492.000,00	3.684.325.330,00	91,82	5.081.166.000,00
	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	673.926.000,00
	Belanja Modal Lapangan Lainnya	434.223.000,00	434.223.000,00	100,00	0,00
	J u m l a h	**4.446.715.000,00**	**4.118.548.330,00**	92,62	**9.868.382.380,00**

Belanja Modal Tanah sebesar Rp4.118.548.330,00 merupakan kegiatan pada Dinas PUPR dan Dinas Perkimta Kabupaten Tulang Bawang Barat TA. 2022 yang direncanakan untuk pengadaan/pembelian tanah dengan peruntukan Bangunan perumahan, pembangunan jalan dan bangunan tempat kerja.

B. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2022 sebesar Rp15.366.078.102,00 atau sebesar 86,19% dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp17.828.635.460,00. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin dirinci pada Tabel 5.1.45 berikut:

Tabel 5.1.45 Rincian Belanja modal peralatan mesin TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Realisasi 2021
		Anggaran	Realisasi		(Rp)
		(Rp)	(Rp)	%	
1	**Belanja Modal Alat Besar**	**708.097.000,00**	**707.117.200,00**	**99,86**	**987.360.000,00**

	Belanja Modal Alat Besar Darat	700.000.000,00	699.300.000,00	99,90	845.000.000,00
	Belanja Modal Alat Bantu	8.097.000,00	7.817.200,00	96,54	142.360.000,00
2	**Belanja Modal Alat Angkutan**	**815.996.000,00**	**703.920.000,00**	**86,27**	**1.172.093.749,90**
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	735.996.000,00	624.000.000,00	84,78	1.132.493.749,90
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	80.000.000,00	79.920.000,00	99,90	39.600.000,00
3	**Belanja Modal Alat Pertanian**	**12.750.000,00**	**10.889.100,00**	**85,40**	**0,00**
	Belanja Modal Alat Pengolahan	12.750.000,00	10.889.100,00	85,40	0,00
4	**Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.640.000,00**
	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	00,00	0,00	3.000.000,00
	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	123.640.000,00
5	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**2.522.261.000,00**	**2.279.139.717,00**	**90,36**	**8.696.042.700,00**
	Belanja Modal Alat Kantor	259.823.000,00	173.861.119,00	66,92	4.123.753.800,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.162.566.000,00	2.005.641.598,00	92,74	3.805.743.900,00
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	99.872.000,00	99.637.000,00	99,76	766.545.000,00
6	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**	**192.240.000,00**	**189.431.250,00**	**98,54**	**686.570.000,00**
	Belanja Modal Alat Studio	147.750.000,00	145.083.750,00	98,20	323.070.000,00
	Belanja Modal Alat Komunikasi	42.990.000,00	42.847.500,00	99,67	303.650.000,00
	Belanja Modal Peralatan Pemancar	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	59.850.000,00
7	**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**	**3.279.457.260,00**	**3.126.917.330,00**	**95,35**	**5.101.864.087,00**
	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.279.457.260,00	3.126.917.330,00	95,35	3.406.953.407,00
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	1.694.910.680,00
8	**Belanja Modal Alat Laboratorium**	**135.950.000,00**	**55.948.600,00**	**41,15**	**266.779.000,00**
	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	50.000.000,00	49.998.600,00	100,00	0,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	1.860.000,00	1.860.000,00	100,00	0,00
	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	242.000.000,00
	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	84.090.000,00	4.090.000,00	4,86	10.375.000,00

	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	14.404.000,00
9	**Belanja Modal Komputer**	**9.899.899.400,00**	**8.048.190.105,00**	**81,30**	**4.596.130.250,00**
	Belanja Modal Komputer Unit	5.245.484.900,00	5.158.679.851,00	98,35	3.842.718.250,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.654.414.500,00	2.889.510.254,00	62,08	753.412.000,00
10	**Belanja Modal Alat Eksplorasi**	**100.000.000,00**	**98.250.000,00**	**98,25**	**8.165.000,00**
	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	100.000.000,00	98.250.000,00	98,25	8.165.000,00
11	**Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian**	**24.784.800,00**	**24.784.800,00**	**100,00**	**302.064.200,00**
	Belanja Modal Sumur	24.784.800,00	24.784.800,00	100,00	302.064.200,00
12	**Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja**	**2.200.000,00**	**1.340.000,00**	**60,91**	**0,00**
	Belanja Modal Alat Pelindung	2.200.000,00	1.340.000,00	60,91	0,00
13	**Belanja Modal Alat Peraga**	**135.000.000,00**	**120.150.000,00**	**89,00**	**0,00**
	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	135.000.000,00	120.150.000,00	89,00	0,00
14	**Belanja Modal Rambu-Rambu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395.930.000,00**
	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	395.930.000,00
	J u m l a h	**17.828.635.460,00**	**15.366.078.102,00**	**86,19**	**22.339.638.986,90**

Terdapat 6 Belanja pada Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin yang melebihi 90% dari anggaran yang ditetapkan, diantaranya yaitu Belanja Modal Alat Besar, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan, Belanja Modal Alat Eksplorasi, dan Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian.

Realisasi Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp707.117.200,00 atau sebesar 99,86% dari anggaran yang ditetapkan.

Tabel 5.1.46 Rincian Belanja Modal Alat Besar pada OPD Tahun 2022

No.	OPD	Realisasi
1	RSUD Tulang Bawang Barat	2.800.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	699.300.000,00
3	Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan	5.017.200,00
	J u m l a h	**707.117.200,00**

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp2.279.139.717,00 atau sebesar 90,36% dari anggaran yang ditetapkan.

Tabel 5.1.47 Rincian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga pada OPD Tahun 2022

No.	OPD	Realisasi
1	Puskesmas Suka Jaya	10.050.969,00
2	Puskesmas Totokaton	9.000.000,00
3	Puskesmas Margodadi	1.250.000,00
4	Rsud Tulang Bawang Barat	631.767.700,00
5	Puskesmas Kartaraharja	2.490.000,00
6	Puskesmas Panaragan Jaya	24.500.000,00
7	Puskesmas Mulya Asri	25.750.000,00
8	Puskesmas Candra Mukti	12.295.000,00
9	Puskesmas Kibang Budi Jaya	11.800.000,00
10	Puskesmas Toto Mulyo	7.000.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	34.650.000,00
12	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	39.703.800,00
13	Dinas Pemadam Kebakaran	66.500.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Tiyuh	44.810.000,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	18.981.000,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	66.650.000,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	48.950.000,00
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	3.000.000,00
19	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	1.515.000,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	2.500.000,00
21	Dinas Pertanian	12.951.250,00
22	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	29.725.000,00
23	Sekretariat Daerah	620.345.000,00
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	473.050.000,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31.390.000,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	27.593.998,00
27	Inspektorat	6.030.000,00
28	Kecamatan Gunung Terang	6.014.000,00
29	Kecamatan Way Kenanga	3.646.000,00
30	Kecamatan Batu Putih	5.231.000,00
	J u m l a h	**2.279.139.717,00**

Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp189.431.250,00 atau sebesar 98,54% dari anggaran yang ditetapkan.

Tabel 5.1.48 Rincian Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar pada OPD Tahun 2022

No.	OPD	Realisasi
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	7.250.000,00
2	Rsud Tulang Bawang Barat	1.964.750,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	93.264.000,00
4	Dinas Komunikasi Dan Informatika	18.445.000,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	15.537.500,00
6	Dinas Ketahanan Pangan	1.500.000,00

7	Dinas Pertanian	6.900.000,00
8	Sekretariat Daerah	44.570.000,00
	J u m l a h	**189.431.250,00**

Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp3.126.917.330,00 atau sebesar 95,35% dari anggaran yang ditetapkan.

Tabel 5.1.49 Rincian Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan pada OPD Tahun 2022

No.	OPD	Realisasi
1	Dinas Kesehatan	2.030.022.450,00
2	Puskesmas Totokaton	400.000,00
3	Rsud Tulang Bawang Barat	1.081.363.000,00
4	Puskesmas Candra Mukti	5.280.000,00
5	Puskesmas Kibang Budi Jaya	9.851.880,00
	J u m l a h	**3.126.917.330,00**

Realisasi Belanja Modal Alat Eksplorasi sebesar Rp98.250.000,00 atau sebesar 98,25% dari anggaran yang ditetapkan.

Tabel 5.1.50 Rincian Belanja Modal Alat Alat Eksplorasi pada OPD Tahun 2022

No.	OPD	Realisasi
1	Sekretariat Daerah	98.250.000,00
	J u m l a h	**98.250.000,00**

Realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebesar Rp24.784.800,00 atau sebesar 100% dari anggaran yang ditetapkan.

Tabel 5.1.51 Rincian Belanja Modal Alat Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian pada OPD Tahun 2022

No.	OPD	Realisasi
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	24.784.800,00
	J u m l a h	**24.784.800,00**

Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp1.340.000,00 atau sebesar 60,91% dari anggaran yang ditetapkan.

Tabel 5.1.52 Rincian Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja pada OPD Tahun 2022

No.	OPD	Realisasi
1	Rsud Tulang Bawang Barat	1.340.000,00
	J u m l a h	**1.340.000,00**

Realisasi Belanja Modal Alat Peraga sebesar Rp120.150.000,00 atau sebesar 89,00% dari anggaran yang ditetapkan.

Tabel 5.1.53 Rincian Belanja Modal Alat Peraga pada OPD Tahun 2022

No.	OPD	Realisasi
1	Rsud Tulang Bawang Barat	120.150.000,00
	J u m l a h	**120.150.000,00**

Target belanja modal komputer hanya sebesar 81,30% yaitu sebesar Rp8.048.190.105,00 dari anggaran sebesar Rp9.899.899.400,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada OPD dengan rincian pada Tabel 5.1.54 berikut:

Tabel 5.1.54 Rincian Belanja Modal Komputer Dinas per OPD TA 2022

NO	OPD	2022 REALISASI
1	**Belanja Modal Komputer Jaringan**	**15.000.000,00**
	Dinas Pemadam Kebakaran	15.000.000,00
2	**Belanja Modal Personal Computer**	**1.508.358.851,00**
	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	635.550.000,00
	Puskesmas Suka Jaya	9.455.968,00
	Puskesmas Totokaton	18.400.000,00
	Rsud Tulang Bawang Barat	145.800.000,00
	Puskesmas Panaragan Jaya	18.400.000,00
	Puskesmas Mulya Asri	22.500.000,00
	Puskesmas Candra Mukti	9.200.000,00
	Puskesmas Kibang Budi Jaya	7.850.000,00
	Puskesmas Toto Mulyo	7.500.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	145.200.000,00
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	51.769.098,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Tiyuh	4.025.000,00
	Dinas Komunikasi Dan Informatika	65.225.000,00
	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	18.000.000,00
	Dinas Ketahanan Pangan	10.399.000,00
	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	7.700.000,00
	Sekretariat Daerah	74.500.000,00
	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	86.800.000,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	116.900.000,00
	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	14.884.785,00
	Inspektorat	38.300.000,00
3	**Belanja Modal Komputer Unit Lainnya**	**3.635.321.000,00**
	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3.604.796.000,00
	Dinas Pemadam Kebakaran	10.000.000,00
	Dinas Perikanan	8.275.000,00
	Dinas Pertanian	2.500.000,00
	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	9.750.000,00
4	**Belanja Modal Peralatan Mainframe**	**2.121.000,00**
	Rsud Tulang Bawang Barat	2.121.000,00
5	**Belanja Modal Peralatan Mini Computer**	**2.300.000,00**
	Dinas Komunikasi Dan Informatika	2.300.000,00
6	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**	**123.143.454,00**
	Puskesmas Suka Jaya	4.069.054,00
	Puskesmas Mercu Buana	1.725.000,00
	Puskesmas Totokaton	5.400.000,00

	Puskesmas Margodadi	5.850.000,00
	Puskesmas Marga Kencana	2.200.000,00
	Puskesmas Indraloka Jaya	2.500.000,00
	Rsud Tulang Bawang Barat	23.500.000,00
	Puskesmas Panaragan Jaya	7.000.000,00
	Puskesmas Mulya Asri	4.700.000,00
	Puskesmas Candra Mukti	4.400.000,00
	Puskesmas Kibang Budi Jaya	4.000.000,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Tiyuh	8.567.500,00
	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	2.768.000,00
	Dinas Ketahanan Pangan	2.230.000,00
	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	8.600.000,00
	Sekretariat Daerah	2.650.000,00
	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	13.800.000,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.600.000,00
	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	9.583.900,00
7	**Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya**	**2.761.945.800,00**
	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2.737.570.800,00
	Dinas Perikanan	3.725.000,00
	Dinas Pertanian	15.000.000,00
	Inspektorat	5.650.000,00
J u m l a h		**8.048.190.105,00**

C. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan pada Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp43.799.267.096,00 dari anggaran sebesar Rp44.447.549.170,00 atau terealisasi 98,54% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan dirinci pada Tabel 5.1.55 berikut:

Tabel 5.1.55 Rincian Belanja modal gedung dan bangunan TA 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Realisasi 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	**Belanja Modal Bangunan Gedung**	**44.447.549.170,00**	**43.799.267.096,00**	**98,54**	**54.797.280.517,80**
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	**44.447.549.170,00**	**43.799.267.096,00**	**98,54**	**53.878.551.417,80**
	1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	9.440.415.100,00	8.820.866.600,00	93,44	17.040.057.163,00?
	2) Belanja Modal Bangunan Gedung	7.487.669.500,00	7.484.279.500,00	99,95	4.410.159.150,00

	Laboratorium				
	3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	14.800.800,00	14.800.800,00	100	596.272.650,00
	4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	186.017.700,00
	5) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	21.577.599.770,00	21.565.369.186,00	99,94	10.705.375.570,00
	6) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	197.032.000,00	194.845.320,00	98,89	0,00
	7) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar	3.735.335.800,00	3.726.414.800,00	99,76	15.447.039.734,80
	8) Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	25.000.000,00	24.949.000,00	99,80	0,00
	9) Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	168.367.550,00
	10) Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	0,00	0,00	0,00	1.209.772.300,00
	11) Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perika nan	197.280.000,00	196.304.690,00	99,51	196.780.000,00
	12) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	29.900.000,00
	13) Belanja Modal Bangunan Parkir	30.000.000,00	29.029.000,00	96,76	9.450.000,00
	14) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Taman	157.402.000,00	157.394.000,00	99,99	3.519.994.800,00
	15) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.585.014.200,00	1.585.014.200,00	100,00	340.654.800,00
	16) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	18.710.000,00

2.	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**918.729.100,00**
	1) Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00	769.818.600,00
	2) Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	0,00	0,00	0,00	49.410.500,00
	3) Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	0,00	0,00	0,00	99.500.000,00
3.	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Tanda Batas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.500.000,00**
	1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	129.500.000,00
	J u m l a h	**44.447.549.170,00**	**43.799.267.096,00**	**98,54**	**54.926.780.517,80**

Rincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada OPD dengan rincian pada Tabel 5.1.56 berikut:

Tabel 5.1.56 Rincian Belanja modal gedung dan bangunan per OPD TA 2022

NO	OPD	2022 REALISASI
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23.988.106.230,00
2	Dinas Kesehatan	14.800.800,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.193.838.056,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	186.423.000,00
5	Dinas Perhubungan	24.949.000,00
6	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	194.845.320,00
9	Dinas Perikanan	196.304.690,00
J u m l ah		**43.799.267.096,00**

Berdasarkan Tabel 5.1.51 diatas, realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan diatas, terdapat 9 OPD yang menganggarkan belanja modal gedung dan bangunan. Belanja terbesar terdapat di Dinas Pendidikan, yaitu sebesar Rp Rp23.988.106.230,00 dengan peruntukan pembangunan bangunan gedung laboratorium, tempat pendidikan dan faisilitas umum. Rincian anggaran dan

realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan dengan rincian pada Tabel 5.1.57 berikut:

Tabel 5.1.57 Rincian Belanja Modal Gedung & Bangunan Dinas Pendidikan TA 2022

NO	OPD	2022 REALISASI
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	7.481.801.500,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	14.921.290.530,00
3	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.585.014.200,00
J u m l a h		**23.988.106.230,00**

D. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp82.571.816.348,00, dari anggaran sebesar Rp83.328.305.654,00 atau terealisasi 98,83% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dirinci pada Tabel 5.1.58 berikut:

Tabel 5.1.58 Rincian Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2022

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Realisasi 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**68.136.026.958,00**	**67.549.124.062,00**	**99,14**	**143.485.829.299,00**
	Belanja Modal Jalan	64.016.134.058,00	63.579.231.162,00	99,32	129.915.204.799,00
	Belanja Modal Jembatan	4.119.892.900,00	3.969.892.900,00	96,36	13.570.624.500,00
2	**Belanja Modal Bangunan Air**	**814.144.312,00**	**792.518.700,00**	**97,34**	**2.710.570.211,60**
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	749.469.312,00	727.843.700,00	97,11	1.712.163.259,00
	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	64.675.000,00	64.675.000,00	100,00	998.406.952,60
3	**Belanja Modal Instalasi**	**14.320.279.384,00**	**14.173.721.586,00**	**98,98**	**6.900.036.735,50**
	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	9.760.122.384,00	9.617.559.528,00	98,54	6.900.036.735,50
	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	3.884.000.000,00	3.884.000.000,00	100	0,00
	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	676.157.000,00	672.162.058,00	99,41	0,00
4	**Belanja Modal Jaringan**	**57.855.000,00**	**56.452.000,00**	**97,57**	**812.225.105,60**
	Belanja Modal Jaringan Air Minum	57.855.000,00	56.452.000,00	97,57	0,00
	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	87.069.667,60

	Belanja Modal Jaringan Gas	0,00	0,00	0,00	725.155.438,00
	J u m l a h	**83.328.305.654,00**	**82.571.816.348,00**	**99,09**	**153.908.661.351,70**

Dari Tabel diatas, realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA. 2022 mengalami penurunan sebesar Rp71.336.845.003,70 bila dibandingkan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA. 2021 yang terealisasi sebesar Rp153.908.661.351,70 sehingga total belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA. 2022 sebesar Rp82.571.816.348,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pengadaan Jalan Tahun 2022 dirinci pada masing-masing OPD dalam Tabel berikut:

Tabel 5.1.59 Rincian Belanja Modal Pengadaan Jalan pada OPD Tahun 2022

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Pengadaan Jalan
		2022
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	63.579.231.162,00
	J u m l a h	**63.579.231.162,00**

Realisasi Belanja Modal Bangunan Pengadaan Jembatan Tahun 2022 dirinci pada masing-masing OPD dalam Tabel berikut:

Tabel 5.1.60 Rincian Belanja Modal Pengadaan Jembatan pada OPD Tahun 2022

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Pengadaan Modal Bangunan Air
		2022
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.969.892.900,00
	J u m l a h	**3.969.892.900,00**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pengadaan Bangunan Air Irigasi Tahun 2022 dirinci pada masing-masing OPD dalam Tabel berikut:

Tabel 5.1.61 Rincian Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi pada OPD Tahun 2022

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Pengadaan Bangunan Air Irigasi
		2022
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	727.843.700,00
	J u m l a h	**727.843.700,00**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pengadaan Bangunan Air Kotor Tahun 2022 dirinci pada masing-masing OPD dalam Tabel berikut:

Tabel 5.1.62 Rincian Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor pada OPD Tahun 2022

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Pengadaan Bangunan Air Kotor
		2022
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	64.675.000,00
	J u m l a h	**64.675.000,00**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pengadaan Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Tahun 2022 dirinci pada masing-masing OPD dalam Tabel berikut:

Tabel 5.1.63 Rincian Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Tahun 2022

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku
		2022
1	Dinas Kesehatan	25.879.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9.591.680.528,00
	J u m l a h	**9.617.559.528,00**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pengadaan Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik Tahun 2022 dirinci pada masing-masing OPD dalam Tabel berikut:

Tabel 5.1.64 Rincian Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik Tahun 2022

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Air Buangan Domestik
		2022
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3.884.000.000,00
	J u m l a h	**3.884.000.000,00**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pengadaan Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah Tahun 2022 dirinci pada masing-masing OPD dalam Tabel berikut:

Tabel 5.1.65 Rincian Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah Tahun 2022

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah
		2022
1	Rsud Tulang Bawang Barat	72.162.058,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	600.000.000,00
	J u m l a h	**672.162.058,00**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya Tahun 2022 dirinci pada masing-masing OPD dalam Tabel berikut:

Tabel 5.1.66 Rincian Belanja Modal Jaringan Listrik Tahun 2022

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Jaringan Listrik
		2022
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	56.452.000,00
	J u m l a h	**56.452.000,00**

E. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya pada Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp2.500.627.300,00 dari anggaran sebesar Rp3.190.544.000,00 atau terealisasi 78,74% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya dirinci pada Tabel 5.1.67 berikut:

Tabel 5.1.67 Rincian Belanja modal aset tetap lainnya TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Realisasi TA.2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan**	**1.973.964.000,00**	**1.291.907.300,00**	**65,45**	**1.219.068.300,00**
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.973.964.000,00	1.291.907.300,00	65,45	1.189.186.300,00
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	29.882.000,00
2	**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**	**1.207.500.000,00**	**1.199.640.000,00**	**99,35**	**839.800.000,00**
	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	7.500.000,00	7.500.000,00	100	50.000.000,00
	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	1.200.000.000,00	1.192.140.000,00	99,35	789.800.000,00
3	**Belanja Modal Tanaman**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.045.000,00**
	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	99.045.000,00
4	**Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.735.000,00**
	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	199.735.000,00
5	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**	**9.080.000,00**	**9.080.000,00**	**100**	**49.900.000,00**
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	9.080.000,00	9.080.000,00	100	49.900.000,00
	J u m l a h	**3.190.544.000,00**	**2.500.627.300,00**	**78,38**	**2.407.548.300,00**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tahun 2022 dirinci pada masing-masing OPD dalam Tabel berikut:

Tabel 5.1.68 Rincian Belanja Modal Bahan Perpustakaan pada OPD Tahun 2022

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Pengadaan Perpustakaan
		2022
1	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak**	**1.291.907.300,00**
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.291.907.300,00
2	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro**	**0,00**
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00
	J u m l a h	**1.291.907.300,00**

Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga Tahun 2022 dirinci pada masing-masing OPD dalam Tabel berikut:

Tabel 5.1.69 Rincian Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian pada OPD Tahun 2022

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Bercorak Kesenian
		2022
1	**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian**	**7.500.000,00**
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.500.000,00
2	**Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan**	**1.192.140.000,00**
	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1.192.140.000,00
	J u m l a h	**1.199.640.000,00**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Belanja Modal Aset Tak Berwujud Tahun 2022 dirinci pada masing-masing OPD dalam Tabel berikut:

Tabel 5.1.70 Rincian Belanja Modal Aset tak Berwujud pada OPD Tahun 2022

NO	Organisasi Perangkat Daerah	Pengadaan Aset Tak Berwujud
		2022
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Tiyuh	9.080.000,00
	J u m l a h	**9.080.000,00**

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga diperuntukkan bagi keperluan pengeluaran belanja yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk atas pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Realisasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp66.000.000,00 atau 4,40% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000,00. Realisasi belanja tidak terduga tersebut digunakan untuk

belanja pada Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2022. Realisasi belanja tidak terduga dirinci pada Tabel 5.1.71 berikut:

Tabel 5.1.71 Rincian Belanja tidak terduga TA 2022

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Realisasi
1	10/03/2022	900/00433/SP2D/ TUBABA/2022	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Kebakaran Di Panaragan Atas Nama Heliyanto Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022	15.000.000,00
2	31/05/2022	900/03056/SP2D/ TUBABA/2022	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Bantuan Kebakaran Atas Nama Haminah Kelurahan Panaragan Jaya Rt 02 Rw 07 Kecamatan Tbt Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022	5.000.000,00
3	04/11/2022	900/07711/SP2D/ TUBABA/2022	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Bantuan Kebakaran Atas Nama Zainal Abidin Tiyuh Penumangan Baru Rt 010 Rw 05 Kecamatan Tulang Bawang Udik Tubaba 2022	10.000.000,00
4	29/12/2022	900/10719/SP2D/ TUBABA/2022	Bantuan Belanja Tidak Terduga Korban Angin Puting Beliung Tiyuh Penumangan Dan Penumangan Baru 2022	10.000.000,00
5	29/12/2022	900/10720/SP2D/ TUBABA/2022	Bantuan Belanja Tidak Terduga Korban Angin Puting Beliung Tiyuh Penumangan Dan Penumangan Baru 2022	24.000.000,00
6	29/12/2022	900/10721/SP2D/ TUBABA/2022	Bantuan Belanja Tidak Terduga Korban Angin Puting Beliung Tiyuh Penumangan Dan Penumangan Baru 2022	1.000.000,00
7	29/12/2022	900/10722/SP2D/ TUBABA/2022	Bantuan Belanja Tidak Terduga Korban Angin Puting Beliung Tiyuh Penumangan Dan Penumangan Baru 2022	1.000.000,00
J u m l a h				**66.000.000,00**

5.1.2.4 Transfer

Transfer digunakan untuk menampung pengeluaran uang dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat ke entitas pelaporan lain. Transfer TA 2022 dianggarkan untuk Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menganggarkan transfer sebesar Rp132.673.845.671,00 dan merealisasikan sebesar Rp128.462.147.244,00 atau 96,83%.Belanja Transfer pada Tahun Anggaran 2022 terdapat pos Belanja Bantuan Keuangan dimana mengalami perubahan dari Tahun Anggaran 2021 yang berada pada Belanja Operasi. Realisasi belanja transfer dirinci pada Tabel 5.1.72 berikut:

Tabel 5.1.72 Rincian Belanja transfer TA 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Realisasi 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Belanja Bagi Hasil	2.366.358.000,00	0,00	0,00	4.792.178.045,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	130.307.487.671,00	128.462.147.244,00	98,58	137.914.877.729,00
	J u m l a h	**132.673.845.671,00**	**128.462.147.244,00**	**96,83**	**142.707.055.774,00**

A. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada Tahun Anggaran 2022 Belanja Bagi Hasil tidak terealisasi.

B. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan merupakan belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemeretaan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp130.307.487.671,00 dan terealisasi sebesar Rp128.462.147.244,00 atau 98,58%, terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi, Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota dan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. Belanja Bantuan Keuangan TA 2022 dan TA 2021 dirinci dalam tabel 5.1.73 berikut:

Tabel 5.1.73 Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dan TA2021

No	Uraian	TA 2022			TA 2021 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	303.109.344,00	303.109.344,00	100	0,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	130.004.378.327,00	128.159.037.900,00	98,58	137.914.877.729,00
	Jumlah	**130.307.487.671,00**	**128.462.147.244,00**	**98,58**	**137.914.877.729,00**

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp303.109.344,00 atau 100% dari anggaran. Realisasi Transfer Bagi Hasil kepada Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2022 dengan rincian pada Tabel 5.1.74 berikut:

Tabel 5.1.74 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi TA 2022

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Realisasi (Rp)
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi			**303.109.344,00**
1	02/06/2022	900/03132/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Ongkos Trasnit Haji Daerah (Otd) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022	303.109.344,00
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa			**128.159.037.900,00**
1	31/03/2022	900/01/DD/TUBABA/2022	Dana Desa Bulan Maret 2022	23.350.070.800,00
2	13/04/2022	900/01241/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Desa Triwulan I, Bpjs Kesehatan 6 Bulan, Bpjs Ketenagakerjaan 6 Bulan Dan *Operasional Tiyuh Persiapan* Se Kecamatan Tulang Bawang Tengah Tahun Anggaran 2022	3.365.885.360,00
3	13/04/2022	900/01242/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Desa Triwulan I, Bpjs Kesehatan 6 Bulan, Bpjs Ketenagakerjaan 6 Bulan Dan *Operasional Tiyuh Persiapan* Se Kecamatan Tumijajar Tahun Anggaran 2022	1.528.125.360,00
4	13/04/2022	900/01243/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Desa Triwulan I, Bpjs Kesehatan 6 Bulan, Bpjs Ketenagakerjaan 6 Bulan Dan *Operasional Tiyuh Persiapan* Se Kecamatan Tulang Bawang Udik Tahun Anggaran 2022	2.164.562.320,00
5	13/04/2022	900/01244/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Desa Triwulan I, Bpjs Kesehatan 6 Bulan, Bpjs Ketenagakerjaan 6 Bulan Dan *Operasional Tiyuh Persiapan* Se Kecamatan Gunung Terang Tahun Anggaran 2022	1.588.258.400,00
6	13/04/2022	900/01245/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Desa Triwulan I, Bpjs Kesehatan 6 Bulan, Bpjs Ketenagakerjaan 6 Bulan Dan *Operasional Tiyuh Persiapan* Se	1.956.498.320,00

			Kecamatan Gunung Agung Tahun Anggaran 2022	
7	13/04/2022	900/01246/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Desa Triwulan I, Bpjs Kesehatan 6 Bulan, Bpjs Ketenagakerjaan 6 Bulan Dan *Operasional Tiyuh Persiapan* Se Kecamatan Way Kenanga Tahun Anggaran 2022	1.624.426.000,00
8	13/04/2022	900/01247/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Desa Triwulan I, Bpjs Kesehatan 6 Bulan, Bpjs Ketenagakerjaan 6 Bulan Dan *Operasional Tiyuh Persiapan* Se Kecamatan Lambu Kibang Tahun Anggaran 2022	1.474.389.200,00
9	13/04/2022	900/01248/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Desa Triwulan I, Bpjs Kesehatan 6 Bulan, Bpjs Ketenagakerjaan 6 Bulan Dan *Operasional Tiyuh Persiapan* Se Kecamatan Pagar Dewa Tahun Anggaran 2022	779.251.440,00
10	13/04/2022	900/01249/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Desa Triwulan I, Bpjs Kesehatan 6 Bulan, Bpjs Ketenagakerjaan 6 Bulan Dan *Operasional Tiyuh Persiapan* Se Kecamatan Batu Putih Tahun Anggaran 2022	1.463.530.400,00
11	27/04/2022	900/02/DD/TUBABA/2022	Dana Desa Bulan April 2022	12.044.632.800,00
12	11/05/2022	900/03/DD/TUBABA/2022	Dana Desa Bulan Mei 2022	323.699.200,00
13	28/06/2022	900/04/DD/TUBABA/2022	Dana Desa Bulan Juni 2022	17.620.016.800,00
14	22/07/2022	900/05010/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Desa Bulan Mei Dan Tunjangan Kesehatan Aparatur Tiyuh Se Kecamatan Tulang Bawang Tengah Semester Ii Tahun Anggaran 2022	1.010.683.340,00
15	22/07/2022	900/05011/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Desa Bulan Mei Dan Tunjangan Kesehatan Aparatur Tiyuh Se Kecamatan Tumijajar Semester Ii Tahun Anggaran 2022	480.437.340,00
16	22/07/2022	900/05012/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Desa Bulan Mei Dan Tunjangan Kesehatan Aparatur Tiyuh Se Kecamatan Tulang Bawang Udik Semester Ii Tahun Anggaran 2022	604.280.580,00
17	22/07/2022	900/05013/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Desa Bulan Mei Dan Tunjangan Kesehatan Aparatur Tiyuh Se Kecamatan Gunung Terang Semester Ii Tahun Anggaran 2022	500.834.600,00
18	22/07/2022	900/05014/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Desa Bulan Mei Dan Tunjangan Kesehatan Aparatur Tiyuh Se Kecamatan Gunung Agung Semester Ii Tahun Anggaran 2022	615.079.580,00
19	22/07/2022	900/05015/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Desa Bulan Mei Dan Tunjangan Kesehatan Aparatur Tiyuh Se Kecamatan Way Kenanga Semester Ii Tahun Anggaran 2022	480.075.000,00
20	22/07/2022	900/05016/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Desa Bulan Mei Dan Tunjangan Kesehatan Aparatur Tiyuh Se Kecamatan Lambu Kibang Semester Ii Tahun Anggaran 2022	463.677.800,00
21	22/07/2022	900/05017/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Desa Bulan Mei Dan Tunjangan Kesehatan Aparatur Tiyuh Se Kecamatan Pagar Dewa Semester Ii Tahun Anggaran 2022	245.856.360,00
22	22/07/2022	900/05018/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Desa Bulan Mei Dan Tunjangan Kesehatan Aparatur Tiyuh Se Kecamatan Batu Putih Semester Ii Tahun Anggaran 2022	461.372.600,00
23	25/07/2022	900/05/DD/TUBABA/2022	Dana Desa Bulan Juli 2022	10.600.084.400,00

24	31/08/2022	900/06/DD/TUBABA/2022	Dana Desa Bulan Agustus	631.414.400,00
25	31/08/2022	900/06111/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Tulang Bawang Tengah Bulan Juni Tahun Anggaran 2022	735.067.340,00
26	31/08/2022	900/06112/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Tumijajar Bulan Juni Tahun Anggaran 2022	349.229.340,00
27	31/08/2022	900/06113/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Tulang Bawang Udik Bulan Juni Tahun Anggaran 2022	436.760.580,00
28	31/08/2022	900/06114/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Gunung Terang Bulan Juni Tahun Anggaran 2022	362.474.600,00
29	31/08/2022	900/06115/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Gunung Agung Bulan Juni Tahun Anggaran 2022	447.139.580,00
30	31/08/2022	900/06116/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Way Kenanga Bulan Juni Tahun Anggaran 2022	348.117.000,00
31	31/08/2022	900/06117/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Lambu Kibang Bulan Juni Tahun Anggaran 2022	336.903.800,00
32	31/08/2022	900/06118/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Pagar Dewa Bulan Juni Tahun Anggaran 2022	177.798.360,00
33	31/08/2022	900/06119/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Batu Putih Bulan Juni Tahun Anggaran 2022	334.052.600,00
34	20/09/2022	900/06918/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Tulang Bawang Tengah Bulan Juli Tahun Anggaran 2022	735.067.340,00
35	20/09/2022	900/06919/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Tumijajar Bulan Juli Tahun Anggaran 2022	349.229.340,00
36	20/09/2022	900/06920/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Tulang Bawang Udik Bulan Juli Tahun Anggaran 2022	436.760.580,00
37	20/09/2022	900/06921/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Gunung Terang Bulan Juli Tahun Anggaran 2022	362.474.600,00
38	20/09/2022	900/06922/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Gunung Agung Bulan Juli Tahun Anggaran 2022	447.139.580,00
39	20/09/2022	900/06923/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Way Kenanga Bulan Juli Tahun Anggaran 2022	348.117.000,00
40	20/09/2022	900/06924/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Lambu Kibang Bulan Juli Tahun Anggaran 2022	336.903.800,00
41	20/09/2022	900/06925/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Pagar Dewa Bulan Juli Tahun Anggaran 2022	177.798.360,00
42	20/09/2022	900/06926/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Batu Putih Bulan Juli Tahun Anggaran 2022	334.052.600,00
43	26/09/2022	900/07/DD/TUBABA/2022	Dana Desa Bulan September	1.984.802.400,00
44	11/10/2022	900/07181/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Lambu Kibang Bulan Agustus Tahun Anggaran 2022	336.903.800,00
45	11/10/2022	900/07182/SP2D/TUBABA	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Tumijajar Bulan Agustus Tahun	349.229.340,00

		/2022	Anggaran 2022	
46	11/10/2022	900/07183/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Tulang Bawang Udik Bulan Agustus Tahun Anggaran 2022	495.483.080,00
47	11/10/2022	900/07184/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Gunung Terang Bulan Agustus Tahun Anggaran 2022	362.474.600,00
48	11/10/2022	900/07185/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Gunung Agung Bulan Agustus Tahun Anggaran 2022	447.139.580,00
49	11/10/2022	900/07186/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Way Kenanga Bulan Agustus Tahun Anggaran 2022	348.117.000,00
50	11/10/2022	900/07187/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Pagar Dewa Bulan Agustus Tahun Anggaran 2022	177.798.360,00
51	11/10/2022	900/07188/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Batu Putih Bulan Agustus Tahun Anggaran 2022	334.052.600,00
52	11/10/2022	900/07189/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Tulang Bawang Tengah Bulan Agustus Tahun Anggaran 2022	735.067.340,00
53	26/10/2022	900/10/DD/TUBABA/2022	Dana Desa Bulan Oktober Tahun 2022	3.663.046.000,00
54	24/11/2022	900/08322/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Tulang Bawang Udik Bulan September Tahun Anggaran 2022	436.760.580,00
55	24/11/2022	900/08323/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Gunung Agung Bulan September Tahun Anggaran 2022	447.139.580,00
56	24/11/2022	900/08324/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Tulang Bawang Tengah Bulan September Tahun Anggaran 2022	735.067.340,00
57	24/11/2022	900/08325/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Gunung Terang Bulan September Tahun Anggaran 2022	362.474.600,00
58	24/11/2022	900/08326/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Lambu Kibang Bulan September Tahun Anggaran 2022	336.903.800,00
59	24/11/2022	900/08327/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Way Kenanga Bulan September Tahun Anggaran 2022	348.117.000,00
60	24/11/2022	900/08328/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Tumijajar Bulan September Tahun Anggaran 2022	349.229.340,00
61	24/11/2022	900/08329/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Batu Putih Bulan September Tahun Anggaran 2022	334.052.600,00
62	24/11/2022	900/08330/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Pagar Dewa Bulan September Tahun Anggaran 2022	177.798.360,00
63	28/11/2022	900/11/DD/TUBABA/2022	Dana Desa Bulan November 2022	12.183.722.400,00
64	02/12/2022	900/12/DD/TUBABA/2022	Dana Desa Bulan Desember 2022	198.799.800,00
65	09/12/2022	900/08857/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Tulang Bawang Tengah Bulan Oktober Tahun Anggaran 2022	735.067.340,00
66	09/12/2022	900/08858/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Tumijajar Bulan Oktober Tahun Anggaran 2022	349.229.340,00
67	09/12/2022	900/08859/SP2D/TUBABA	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Tulang Bawang Udik Bulan	436.760.580,00

		/2022	Oktober Tahun Anggaran 2022	
68	09/12/2022	900/08860/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Gunung Terang Bulan Oktober Tahun Anggaran 2022	362.474.600,00
69	09/12/2022	900/08861/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Gunung Agung Bulan Oktober Tahun Anggaran 2022	447.139.580,00
70	09/12/2022	900/08862/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Way Kenanga Bulan Oktober Tahun Anggaran 2022	348.117.000,00
71	09/12/2022	900/08863/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Lambu Kibang Bulan Oktober Tahun Anggaran 2022	336.903.800,00
72	09/12/2022	900/08864/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Pagar Dewa Bulan Oktober Tahun Anggaran 2022	177.798.360,00
73	09/12/2022	900/08865/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Batu Putih Bulan Oktober Tahun Anggaran 2022	334.052.600,00
74	29/12/2022	900/10710/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Batu Putih Bulan November Tahun Anggaran 2022	334.052.600,00
75	29/12/2022	900/10711/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Pagar Dewa Bulan November Tahun Anggaran 2022	177.798.360,00
76	29/12/2022	900/10712/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Tulang Bawang Tengah Bulan November Tahun Anggaran 2022	735.067.340,00
77	29/12/2022	900/10713/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Tumijajar Bulan November Tahun Anggaran 2022	349.229.340,00
78	29/12/2022	900/10714/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Tulang Bawang Udik Bulan November Tahun Anggaran 2022	436.760.580,00
79	29/12/2022	900/10715/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Gunung Terang Bulan November Tahun Anggaran 2022	362.474.600,00
80	29/12/2022	900/10716/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Gunung Agung Bulan November Tahun Anggaran 2022	447.139.580,00
81	29/12/2022	900/10717/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Way Kenanga Bulan November Tahun Anggaran 2022	348.117.000,00
82	29/12/2022	900/10718/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Lambu Kibang Bulan November Tahun Anggaran 2022	336.903.800,00
83	30/12/2022	900/10861/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Batu Putih Bulan Desember Tahun Anggaran 2022	334.052.600,00
84	30/12/2022	900/10862/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Tulang Bawang Tengah Bulan Desember Tahun Anggaran 2022	735.067.340,00
85	30/12/2022	900/10863/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Tumijajar Bulan Desember Tahun Anggaran 2022	349.229.340,00
86	30/12/2022	900/10864/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Tulang Bawang Udik Bulan Desember Tahun Anggaran 2022	436.760.580,00
87	30/12/2022	900/10865/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Gunung Agung Bulan Desember Tahun Anggaran 2022	447.139.580,00
88	30/12/2022	900/10866/SP2D/TUBABA	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Gunung Terang Bulan Desember	362.474.600,00

		/2022	Tahun Anggaran 2022	
89	30/12/2022	900/10867/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Way Kenanga Bulan Desember Tahun Anggaran 2022	348.117.000,00
90	30/12/2022	900/10868/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Lambu Kibang Bulan Desember Tahun Anggaran 2022	336.903.800,00
91	30/12/2022	900/10869/SP2D/TUBABA/2022	Pembayaran Alokasi Dana Tiyuh Se Kecamatan Pagar Dewa Bulan Desember Tahun Anggaran 2022	177.798.360,00
J u m l a h				**128.462.147.244,00**

Surplus/Defisit

Surplus/defisit merupakan selisih lebih atau kurang antara pendapatan dikurangi belanja dan transfer selama satu periode pelaporan. Dalam Tahun 2022 pendapatan terealisasi sebesar 867.425.393.944,82 dari anggaran sebesar Rp908.722.369.146,62 atau sebesar 95,46 %, sedangkan belanja terealisasi sebesar Rp839.850.826.494,10 dari anggaran Rp888.011.329.931,07 atau sebesar 94,58%. Surplus/defisit disajikan dalam Tabel 5.1.75 berikut:

Tabel 5.1.75 Surplus/Defisit TA 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Realisasi 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan	908.722.369.146,62	866.042.392.192,69	95,30	879.766.152.580,43
2	Belanja	888.011.329.931,07	840.783.581.155,10	94,68	936.932.957.645,40
SURPLUS/DEFISIT		**20.711.039.215,55**	**25.258.811.037,59**	**121,96**	**(57.166.805.064,97)**

5.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar lagi atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali, yang dalam penganggarannya dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2022 disajikan pada Tabel 5.1.76 berikut:

Tabel 5.1.76 Rincian Penerimaan Pembiayaan TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Realisasi 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Penggunaan SiLPA	9.604.754.217,45	9.604.754.217,68	100	50.849.035.830,42
2	Koreksi Penyesuaian atas SILPA	0,00	0,23	0,00	60.000,00
3	Pinjaman Dalam Negeri	6.200.000.000,00	0,00	00,00	52.991.340.780,00
4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.434.886.000,00	457.665.000,00	10,32	0,00
J u m l a h		**20.239.640.217,45**	**10.062.419.217,68**	**49,72**	**103.840.436.610,42**

Pada tahun 2002 terdapat Koreksi SiLPA sebesar Rp 0,23 disajikan pada Tabel 5.1.77 berikut:

Tabel 5.1.77 Rincian Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi
1	Koreksi Kas BLUD pada Puskesmas Mulya Asri	0,23
J u m l a h		**0,23**

Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat PDN adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya. Namun Pinjaman Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2022 tidak terealisasi walaupun terdapat nilai anggaran sebesar Rp 6.200.000.000,00.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp 457.665.000,00 merupakan penerimaan kembali yang berasal dari Kelompok Tani Peternak Sapi Tunas Remaja Tahap II sebesar Rp 245.000.000,00 dan Tahap III sebesar Rp 212.665.000,00.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat terutama dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pada Tahun Anggaran 2021 realisasi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam

Negeri. Pengeluaran pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2022 disajikan pada Tabel 5.1.78 berikut:

Tabel 5.1.78 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal TA 2022

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Realisasi
1	28/03/2022	900/00759/SP2D/ TUBABA/2022	PEMBAYARAN KEWAJIBAN BUNGA DAN POKOK PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PERIODE MARET TAHUN 2022	6.378.297.124,00
2	28/03/2022	900/00760/SP2D/ TUBABA/2022	PEMBAYARAN KEWAJIBAN BUNGA DAN POKOK PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PERIODE MARET TAHUN 2022	2.863.769.793,00
5	23/06/2022	900/04174/SP2D/ TUBABA/2022	Notifikasi Jatuh Tempo Pembayaran Kewajiban Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode Bulan Juni 2022	2.863.769.793,00
6	23/06/2022	900/04175/SP2D/ TUBABA/2022	Notifikasi Jatuh Tempo Pembayaran Kewajiban Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode Bulan Juni 2022	6.378.297.124,00
7	22/09/2022	900/07001/SP2D/ TUBABA/2022	Notifikasi Jatuh Tempo Pembayaran Kewajiban Pokok dan Bunga Pinjaman PEmerintah Daerah KAbupaten Tulang Bawang Barat Periode Bulan September 2022	6.378.297.124,00
8	22/09/2022	900/07002/SP2D/ TUBABA/2022	Notifikasi Jatuh Tempo Pembayaran Kewajiban Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode Bulan September 2022	2.863.769.793,00
9	22/12/2022	900/09953/SP2D/ TUBABA/2022	Notifikasi Jatuh Tempo Pembayaran Kewajiban Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode Bulan Desember 2022	6.378.297.124,00
10	22/12/2022	900/09954/SP2D/ TUBABA/2022	Notifikasi Jatuh Tempo Pembayaran Kewajiban Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode Bulan Desember 2022	2.863.769.793,00
11	31/12/2022	16/JK/BPK/BPK AD/2022	Koreksi Belanja Bunga dan Pengeluaran Pembiyaan PEN 2021 yang berasal dari Pererimaan DAU Bulan Oktober dan November yang dipotong langsung - LRA	1.261.698.590,00
J u m l a h				**38.229.966.258,00**

5.1.3.3 Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto merupakan selisih lebih atau kurang antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaraan pembiayaan selama satu periode pelaporan. Dalam Tahun 2022 penerimaan pembiayaan sebesar Rp10.062.359.217,68 dari anggaran sebesar Rp20.239.640.217,45 atau sebesar 49,72%, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp38.229.966.258,00 dari anggaran Rp40.950.679.433,00 atau sebesar 93,36%. Surplus/defisit disajikan dalam Tabel 5.1.79 berikut:

Tabel 5.1.79 Surplus/Defisit TA 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Realisasi 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Penerimaan Pembiayaan	20.239.640.217,45	10.062.359.217,68	49,72	103.840.436.610,42
2	Pengeluaran Pembiayaan	40.950.679.433,00	38.229.966.258,00	93,36	37.068.877.328,00
J u m l a h		**(20.711.039.215,55)**	**(28.167.607.040,32)**	**136,00**	**66.771.559.282,42**

5.1.3.4 Selisih Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA)

SiKPA adalah selisih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama Tahun Anggaran 2022 serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. SiKPA untuk Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 0,00 dan direalisasikan sebesar (Rp2.908.736.002,73).

Realisasi SiKPA pada Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

No.	Uraian	Realisasi TA. 2022
1	Kas di Kas Daerah Bank Lampung (pengeluaran)	29.157.594,48
2	Kas di Kas Daerah Bank BRI	576.780.908,60
3	Kas di Kas Daerah Bank Lampung (penerimaan)	602.176.543,40
4	Kas di Kas Daerah Bank BNI	1.425.596.694
5	Kas di Kas Daerah Bank MANDIRI	22.580.413,34
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	49.099.182,00
7	Kas di Bendahara BLUD	3.053.774.077,45
8	Kas di Bendahara BOS	35.308.612,00
9	Setara Kas	0,00
10	Hutang Pajak BUD	(8.700.290.326,00)
11	Hutang Pajak BLUD	(2.548.520,00)
12	Hutang Pajak SKPD	(371.182,00)
	J u m l a h	**(2.908.736.002,73)**

Dalam Rincian SiKPA tersebut terdapat komponen Kas di Kas Daerah sebesar Rp2.656.292.153,82. Kas di Kas Daerah tersebut termasuk diantaranya Sisa DAK yang sudah diterima di Rekening Kas Daerah namun belum terealisasi belanjanya. Berdasarkan catatan penerimaan dan Realisasi DAK seharusnya terdapat saldo DAK per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.308.963.435,00 yang terdiri dari:

No	Uraian Jenis DAK	Saldo per 31 Desember 2022
	DAK FISIK REGULER	**5.427.382.405**
1	Jalan	2.949.604.175
2	Kesehatan dan KB	49.987.800
3	Pendidikan	2.427.790.430
	DAK FISIK PENUGASAN	**612.267.000**
1	Penanggulangan Kemiskinan	612.267.000
	DAK NON FISIK	**5.269.314.030**
1	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	909.632.280
2	Dana Tambahan Penghasilan Guru	466.750.000
3	Dana Bantuan Operasional Kesehatan	3.710.262.500
4	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	104.915.000
5	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.440.450
6	Dana Pelayanan Ketahanan Pangan	8.255.000
7	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	67.058.800
Total		**11.308.963.435**

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

Tabel 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2022

NO.	URAIAN	REF	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7 . 3	9.604.754.217,45	50.849.095.830,42
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7 . 3 . 1	9.604.754.217,68	50.849.095.830,42
3	**Sub Total**		**(0,23)**	**0,00**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	7 . 3 . 3	(2.908.736.002,73)	9.604.754.217,45
5	**Sub Total**		**(2.908.736.002,96)**	**9.604.754.217,45**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	7 . 1 . 1 . 02	0,23	0,00
7	Lain-lain	7 . 1 . 1 . 03	0,00	0,00
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**		**(2.908.736.002,73)**	**9.604.754.217,45**

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Merupakan saldo hubungan antara saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang berkenaan. Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2022 sebesar Rp9.604.754.217,45 mengalami penurunan sebesar (Rp41.244.341.612,97) atau 429,42% dari Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2021.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan saldo hubungan antara saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang berkenaan. Saldo Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Tahun 2022 sebesar Rp9.604.754.217,68, mengalami penurunan sebesar (Rp41.244.341.612,74) dari Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Tahun 2022 sebesar Rp50.849.095.830,42.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) merupakan akumulasi atas selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan Realisasi belanja serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam APBD selama satu periode pelaporan. Saldo Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2022 sebesar (Rp2.908.736.002,73) mengalami penurunan sebesar (Rp12.513.490.220,18) dari Saldo Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2021 sebesar Rp9.604.754.217,45.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kas BLUD pada Puskesmas Mulya Asri sebesar Rp0,23.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo anggaran lebih akhir sebesar (Rp2.908.736.002,73) merupakan akumulasi atas selisih lebih/kurang antara Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 sebesar 9.604.754.217,45 dan Saldo Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan (Tahun 2022) sebesar Rp9.604.754.217,68 dan Saldo Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2022 sebesar (Rp2.908.736.002,73) serta Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp0,23.

Adapun Saldo anggaran lebih akhir sebesar (Rp2.908.736.002,73) terdiri dari pada Tabel 5.2.2 berikut.

Tabel 5.2.2 Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2022

No.	Uraian	2022	2021
1	Kas di Kas Daerah Bank Lampung (pengeluaran)	29.157.594,48	250.587.983,55
2	Kas di Kas Daerah Bank BRI	576.780.908,60	1.261.592.103,60
3	Kas di Kas Daerah Bank Lampung (penerimaan)	602.176.543,40	246.347.704,48
4	Kas di Kas Daerah Bank BNI	1.425.596.694	4.501.030.671,00
5	Kas Di Kas Daerah Bank Mandiri	22.580.413,34	743.366.038,43

6	Kas di Kas Daerah Bank Mandiri (Sub RKUD)	0,00	7.927.818,98
7	Kas Di Bendahara Pengeluaran	49.099.182,00	0,00
8	Kas Di Bendahara BLUD	3.053.774.077,45	3.143.551.073,41
9	Kas Di Bendahara BOS	35.308.612,00	34.456.612,00
10	Koreksi Silpa Tahun 2020	0,00	60.000,00
11	Hutang pajak BUD	(8.700.290.326,00)	(576.768.400,00)
12	Hutang Pajak BLUD	(2.548.520,00)	(7.397.388,00)
13	Hutang Pajak SKPD	(371.182,00)	0,00
J u m l a h		**(2.908.736.002,73)**	**9.604.754.217,45**

5.3 Penjelasan Pos -Pos Neraca

Neraca atau laporan posisi keuangan *(balance sheet)* adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tertentu. Secara garis besar neraca terdiri atas aset (aktiva), kewajiban *(liabilities)* dan ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

5.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dengan harapan manfaat ekonomi dan sosial di masa depan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Jumlah aset Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.864.050.263.046,69. Terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dengan rincian pada tabel 5.3.1 berikut**.**

Tabel 5.3.1 Aset per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/Turun %
1	Aset Lancar	57.292.228.693,26	59.739.415.588,90	(4,10)
2	Investasi Jangka Panjang	17.972.788.537,84	16.601.715.338,75	8,26
3	Aset Tetap	1.772.421.166.514,67	1.829.951.907.589,65	(3,14)
4	Aset Lainnya	16.364.079.300,92	14.427.753.761,25	13,42
Jumlah		**1.864.050.263.046,69**	**1.920.720.792.278,55**	**(2,95)**

Nilai aset per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar (2,95%) atau turun sebesar (Rp56.670.529.231,86) dibandingkan dengan nilai aset per 31 Desember 2021.

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, penyisihan piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

Adapun rincian aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp57.292.228.693,26 dengan rincian pada Tabel 5.3.2 sebagai berikut.

Tabel 5.3.2 Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Kas di Kas Daerah	2.656.292.153,82	7.010.912.320,04
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	49.099.182,00	0,00
4	kas di BLUD	3.053.774.077,45	3.143.551.073,41
5	Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara BOS	35.308.612,00	34.456.612,00
7	Setara Kas	0,00	0,00
8	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
9	Piutang Pendapatan	42.113.805.236,57	41.517.625.630,17
10	Piutang Lainnya	3.977.221.000,00	4.434.886.000,00
11	Penyisihan Piutang	(4.885.947.521,09)	(4.653.142.355,98)
12	Beban di Bayar Di Muka	134.887.916,57	73.643.235,26
13	Persediaan	10.157.788.035,94	8.177.483.074,00
	Jumlah	**57.292.228.693,26**	**59.739.415.588,89**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa secara umum aset lancar Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp57.292.228.693,26. Mengalami penurunan sebesar (Rp2.447.186.895,64) atau 4,10% apabila dibandingkan Tahun 2021. Rincian aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut.

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
2.656.292.153,82	**7.010.912.320,04**

Kas di kas daerah merupakan saldo kas akhir yang tertera pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Tulang Bawang Barat per 31 Desember 2022 yang terdiri dari beberapa rekening kas umum milik pemerintah daerah yaitu :

No.	Rekening RKUD	LKPD	Rekening Koran	Selisih
1	Kas di Kas Daerah PT. Bank Lampung (pengeluaran)	29.157.594,48	29.157.594,48	0,00
2	Kas di Kas Daerah PT. Bank Lampung (penerimaan)	602.176.543,40	602.176.543,40	0,00
3	Kas di Kas Daerah BRI	576.780.908,60	576.555.908,60	225.000,00
4	Kas di Kas Daerah BNI	1.425.596.694,00	730.465.553,00	695.131.141,00
5	Kas di Kas Daerah Bank MANDIRI	22.580.413,34	22.540.413,34	40.000,00
	Jumlah	**2.656.292.153,82**	**1.960.896.012,82**	**695.396.141,00**

Dari ke lima rekening RKUD tersebut secara total terdapat selisih sebesar Rp695.396.141,00 antara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Rekening koran yang terdiri atas :

1. Terdapat sesilih pada Bank BRI dengan rekening Koran sebesar Rp225.000,00 yang merupakan RTGS yang dipotong oleh Bank namun sampai dengan 31 Desember belum dikembalikan ke Kas daerah yaitu :
   - Bulan Oktober sebesar Rp15.000,00,
   - Bulan November sebesar Rp75.000,00 dan
   - Bulan Desember Sebesar Rp135.000,00.
2. Selanjutnya Pada Bank BNI, selisih sebesar Rp695.131.141,00 antara rekening koran dengan laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari :
   1. Masih terdapat saldo PNBP pada Rekening Penampungan BNI akibat pengembalian dari Rekening Penampungan ke RKUD BNI masih Terdapat Kekurangan sebesar Rp128.150.904,00,
   2. Terdapat Dobel SP2D Yang Belum Dikembalikan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp512.388.896,00 dengan Nomor SP2D sebagai berikut :

a. SP2D nomor 900/10781/SP2D/TUBABA/2022 sebesar Rp76.302.780,00 pada Dinas Kesehatan,
b. SP2D nomor 900/10781/SP2D/TUBABA/2022 sebesar Rp23.297.180,00 pada Kecamatan Gunung Agung,
c. SP2D nomor 900/10783/SP2D/TUBABA/2022 sebesar Rp247.161.962,00 pada Inspektorat,
d. SP2D nomor 900/10784/SP2D/TUBABA/2022 sebesar Rp44.734.451,00 pada Dinas PPKB,
e. SP2D nomor 900/10820/SP2D/TUBABA/2022 sebesar Rp10.000.000,00 pada Dinas PPKB,
f. SP2D nomor 900/10786/SP2D/TUBABA/2022 sebesar Rp20.516.123,00 pada Kecamatan Batu Putih,
g. SP2D nomor 900/10517/SP2D/TUBABA/2022 sebesar Rp2.500.000,00 pada PKM Toto Katon,
h. SP2D nomor 900/10516/SP2D/TUBABA/2022 sebesar Rp2.550.000,00 pada PKM Toto Katon dan
i. SP2D nomor 900/09035/SP2D/TUBABA/2022 sebesar Rp85.326.400,00 pada CV. Laras Cipta.

3. RGTS Bank BNI Tahun 2022 yang belum di kembalikan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember sebesar Rp27.239.500,00.
4. Kelebihan Pembayaran SP2D Tahun 2022 sebesar Rp354.500,00,
5. Kekurangan Pembayaran SP2D Tahun 2022 sebesar (Rp19.000,00),
6. Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun 2021 sebesar Rp17.536.250,00 dan
7. Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun 2022 sebesar Rp 9.480.091,00.

3. Pada Bank Mandiri terdapat selisih sebesar Rp40.000,00 antara rekening koran dengan laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan RTGS yang dipotong oleh Bank, namun sampai dengan 31 Desember belum dikembalikan ke Kas Daerah.

Terdapat sisa Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) TA 2022 sebesar Rp11.173.232.547,00 yang seharusnya masih dikuasai oleh BUD per 31 Desember 2022. Selain itu Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menggunakan uang pajak negara sebesar Rp8.700.290.326,00 yang telah dipungut oleh BUD dan belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan 31

Desember 2022. Dana DAK dan uang pajak negara tersebut digunakan untuk membayar belanja di akhir tahun 2022. Rincian sisa dana DAK per 31 Desember 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.3.3 Sisa Dana DAK per 31 Desember 2022 pada Kas Daerah

No	Dana DAK	Jumlah (Rp)
1	DAK Non Fisik	
	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	909.632.280,00
	Dana Tambahan Penghasilan Guru	466.750.000,00
	Dana Bantuan Operasional Kesehatan	3.710.262.500,00
	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	104.915.000,00
	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.440.450,00
	Dana Pelayanan Ketahanan Pangan	8.255.000,00
	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	67.058.800,00
2	DAK Fisik	
	DAK Reguler Jalan	2.949.604.175,00
	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	49.987.800,00
	DAK Reguler Bidang Pendidikan	2.427.790.430,00
	DAK Penugasan Penanggulangan Kemiskinan	476.536.112,00
	Jumlah	**11.173.232.547,00**

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
0,00	**0,00**

Kas di bendahara penerimaan merupakan pos untuk menampung saldo pendapatan/penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Namun sampai dengan 31 Desember 2022 tidak terdapat penerimaan pendapatan daerah pada kas di bendahara penerimaan yang belum disetor ke kasda.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
49.099.182,00	**0,00**

Kas di bendahara pengeluaran merupakan pos untuk menampung saldo kas yang berasal dari sisa lebih belanja yang masih berada di bendahara pengeluaran dan belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 masih terdapat Kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp49.099.182,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan. Sisa kas pada bendahara pengeluaran tersebut telah disetor ke kas daerah di Tahun 2023 sebesar Rp48.728.000,00, Selain itu terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Gunung Terang sebesar Rp371.182,00, pada Kas di bendahara Pengeluaran Kecamatan Gunung Terang berupa hutang PFK..

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan saldo kas yang tersebar pada 16 Puskesmas dan satu Rumah Sakit Umum dan Pasar Pulung per 31 Desember 2022, sebesar Rp3.053.774.077,45 dengan rincian sebagaimana tertera pada **Tabel 5.3.4**.

Tabel 5.3.4 Kas BLUD per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

No	Uraian	Saldo Awal	Pendapatan BLUD	Belanja BLUD	Utang PFK	Saldo Kas BLUD
1.	Puskesmas Kartaraharja	67.309.119,08	402.414.368,20	427.491.515,05	1.605.045,00	43.837.017,23
2.	Puskesmas Daya Murni	153.658.412,83	806.393.091,49	838.606.292,00	0,00	121.445.212,32
3.	Puskesmas Panaragan Jaya	355.529.279,02	1.048.016.181,17	1.142.010.775,00	772.830,00	262.307.515,19
4.	Puskesmas Mulya Asri	160.488.595,00	1.162.733.648,26	1.182.161.617,00	0,00	141.060.626,26
5.	Puskesmas Candra Mukti	135.484.912,00	732.444.947,57	825.072.375,00	0,00	42.857.484,57
6.	Puskesmas Pagar Dewa	42.849.928,19	237.070.869,84	244.926.400,00	0,00	34.994.398,03
7.	Puskesmas Kibang Budi Jaya	138.029.367,93	579.969.579,11	607.465.683,00	0,00	110.533.264,04
8.	Puskesmas Toto Mulyo	264.292.422,28	635.896.123,58	658.110.850,00	0,00	242.077.695,86
9.	Puskesmas Suka Jaya	412.383.128,10	590.818.820,12	693.903.239,00	0,00	309.298.709,22
10.	Puskesmas Mercu Buana	346.469.563,37	406.732.370,19	501.720.231,00	0,00	251.481.702,56
11.	Puskesmas Dwikora Jaya	909.372,23	317.578.178,94	317.299.714,00	0,00	1.187.837,17
12.	Puskesmas Toto Katon	39.609.270,41	326.930.333,59	344.528.480,00	59.609,00	22.070.733,00
13.	Puskesmas Margodadi	9.217.702,44	336.001.190,81	336.747.110,00	0,00	8.471.783,25
14.	Puskesmas Marga Kencana	1.336.724,72	233.337.409,95	233.610.320,00	32.536,00	1.096.350,67
15.	Puskesmas Gilang Tunggal Makarta	11.521.836,44	188.458.113,99	199.417.100,00	62.500,00	625.350,43
16.	Puskesmas Indraloka Jaya	1.584.317,37	176.637.887,28	168.453.806,00	16.000,00	9.784.398,65

17.	Rumah Sakit Umum Daerah TUBABA	995.479.734,00	10.740.174.636,00	10.285.720.983,00	0,00	1.449.933.387,00
18.	Pasar Pulung Kencana	0,00	122.124.000,00	121.413.388,00	0,00	710.612,00
	Saldo Akhir Kas BLUD	**3.136.153.685,41**	**19.043.731.750,09**	**19.128.659.878,05**	**2.548.520,00**	**3.053.774.077,45**

5.3.1.1.5 Kas di FKTP

Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
0,00	**0,00**

Kas di FKTP merupakan saldo kas pada 16 Puskesmas yang tersebar pada Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022 adalah sebesar nol Rupiah.

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara BOS

Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
35.308.612,00	**34.456.612,00**

Saldo Awal	Penerimaan Dana BOS	Pengeluaran Dana BOS	Saldo dibendahara BOS
34.456.612,00	35.863.746.500,00	35.862.894.500,00	35.308.612,00

Kas di Bendahara BOS merupakan saldo kas pada Bendahara BOS Sekolah Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2022. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp35.308.612,00 terdiri kas di bendahara BOS reguler. Sedangkan saldo BOS 2021 sebesar Rp34.456.612,00. Rincian pada lampiran 6.

5.3.1.1.7 Setara Kas

Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
0,00	**0,00**

Setara Kas merupakan Saldo investasi jangka pendek yang harus dapat segera diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada resiko perubahan nilai signifikan yang mempunyai masa jatuh tempo maksimal 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya. Saldo Setara Kas per 31 Desember 2021 *unaudited* sebesar Rp2.557.728.570,54 merupakan Saldo dan Remunerasi pada Rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) per 31 Desember 2022 yang diatur dalam PMK 218/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Dalam Bentuk Non Tunai Tahun 2022. Selanjutnya atas dasar Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023, maka dilakukan Koreksi Atas Setara Kas ke Aset Lainnya.

Piutang

Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
46.091.026.236,57	**45.952.511.630,17**

Piutang Pendapatan merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak dilihat dari segi waktu tetapi belum dicatat atau diterima pembayarannya atau merupakan hak Pemerintah Daerah yang belum diterima pembayarannya sampai berakhirnya periode pelaporan. Saldo piutang pendapatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp46.091.026.236,57 merupakan saldo piutang pendapatan dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Transfer Pemerintah daerah Lainnya, dengan rincian Tabel 5.3.5 sebagai berikut:

Tabel 5.3.5 Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Piutang Pajak Daerah	2.109.492.732,14	1.577.200.454,28
2.	Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
3.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	1.016.640.105,43	9.334.438.828,89
4.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	38.987.672.399,00	30.605.986.347,00
5.	Piutang Lainnya	3.977.221.000,00	4.434.886.000,00
	Jumlah	**46.091.026.236,57**	**45.952.511.630,17**

A. Piutang Pajak Daerah

Piutang pajak Daerah merupakan pos untuk menampung hak Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa tagihan pajak daerah kepada pihak ketiga (wajib pajak daerah) berdasarkan surat ketetapan pajak daerah yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan setelah masa periode pelaporan. Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.109.492.732,14 dengan rincian Tabel 5.3.6 sebagai berikut:

Tabel 5.3.6 Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No.	Uraian	31-Des-22	31-Des-21
1	Piutang Pajak Hotel	1.776.636,00	3.241.025,00
2	Piutang Pajak Restoran	75.267.397,00	66.182.672,00
3	Piutang Pajak Hiburan	1.946.914,00	1.946.914,00
4	Piutang Pajak Reklame	27.002.000,00	26.454.200,00
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.070.303.909,00	905.649.775,00
6	Piutang Pajak Parkir	2.611.000,00	6.761.000,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	14.005.250,00	14.984.077,28
8	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan	916.579.626,14	551.980.791,00
	Jumlah	**2.109.492.732,14**	**1.577.200.454,28**

1. Pajak Hotel

   Saldo piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.776.636,00, Berasal dari Ketetapan Tahun 2022 yang terbit sebesar Rp53.724.390,00 namun yang terealiasi Tahun 2022 sebesar Rp51.947.754,00;

2. Pajak Rumah Makan/Restoran

Saldo piutang Pajak Rumah Makan/Restoran per 31 Desember 2022 yang belum tertagih sebesar Rp 25.018.582,00 yang berasal dari Ketetapan yang terbit sebesar Rp1.093.813.833,08 namun realisasinya sebesar Rp1.068.795.251,08 dan terdapat Putang Tahun 2021 yang belun diterima sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp50.248.815,00. Sehingga piutang Rumah Makan/Restoran per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp75.267.397,00;

3. Pajak Hiburan

Terdapat Putang Tahun 2021 yang belun dierima sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.946.914,00.

4. Pajak Reklame

Ketetapan yang terbit untuk Tahun 2022 atas Pajak Reklame sebesar Rp255.165.250,00 namun tersealisasi sebesar Rp241.871.250,00, sehingga Piutang Tahun 2022 sebesar Rp13.708.000,00. Selanjutnya masih terdapat Piutang Tahun 2021 namun belum diterima sampai dengan 31 Desember 2022 sehingga piutang Pajak Reklame menjadi sebesar Rp27.002.000,00;

5. Pajak Penerangan Jalan

Saldo piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.070.303.909,00, berdasarakan Penerimaan bulan Januari Tahun 2023.;

6. Pajak Parkir

Saldo piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.611.000,00 berdasarkan Piutang Tahun 2021 yang belum diterima hingga 31 Desember 2022;

7. Pajak Air Tanah

Ketetapan yang terbit untuk Tahun 2022 atas Pajak Air Tanah sebesar Rp116.128.539,69 dan tersealisasi sebesar Rp116.128.539,69 sehingga sampai dengan 31 Desember 2022 piutang Pajak Air Tanah sebesar nol

Rupiah, namun terdapat saldo piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.005.250,00. Sehingga putang Pajak Air Tanah sebesar Rp14.005.250,00

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Saldo piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) per 31 Desember 2022 sebesar Rp407.327.313,14 dari Ketetapan untuk Tahun 2022 Rp8.988.766.910,00 namun terealisasi sebesar Rp8.581.439.596,86 Sehingga sampai dengan 31 Desember 2022 piutang PBB-P2 sebesar Rp407.327.313,14. Selain itu terdapat Putang Tahun 2021 yang belun diterima sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp509.252.313,00. Sehingga piutang PBB-P2 hingga 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp916.579.626,14.

B. Piutang Retribusi Daerah

Piutang retribusi merupakan pos untuk menampung hak Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa tagihan retribusi daerah kepada pihak ketiga (wajib retribusi daerah) berdasarkan surat ketetapan retribusi yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan.

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel 5.3.7 sebagai berikut:

Tabel 5.3.7 Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**

C. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya yang tercatat merupakan peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih,

1. Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah yang merupakan piutnag Remunerasi pada Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) per 31 Desember 2022 sebesar Rp620.176,54.
2. Piutang BLUD akibat peristiwa yang timbul dari kemitraan dengan BPJS atas fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca yang telah memenuhi kriteria sebesar Rp904.705.200,00 dan
3. Terdapat piutang atas denda keterlambatan pekerjaan Pasar Pulung tahun 2021 sebsesar Rp111.314.728,89 yang belum diterima Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2022.

Berikut rincian Satker yang memiliki saldo dan penyisihan puitang lain-lain PAD yang sah dapat dilihat pada tabel 5.3.8.

Tabel 5.3.8 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	620.176,54	0,00
2	Piutang BLUD Puskesmas Sukajaya	4.519.000,00	750.000,00
3	Piutang BLUD Puskesmas Dwikorajaya	2.372.000,00	564.000,00
4	Piutang BLUD Puskesmas Margodadi	2.560.000,00	0,00
5	Piutang BLUD Puskesmas Marga Kencana	3.259.000,00	1.211.000,00
6	Piutang BLUD Puskesmas Gilang Tunggal Makarta	829.000,00	0,00
7	Piutang BLUD Puskesmas Indraloka Jaya	5.610.000,00	4.985.000,00
8	Piutang BLUD Puskesmas Kartaraharja	7.990.000,00	9.622.000,00
9	Piutang BLUD Puskesmas Daya Murni	6.865.000,00	13.996.000,00
10	Piutang BLUD Puskesmas Panaragan Jaya	8.418.000,00	17.770.000,00
11	Piutang BLUD Puskesmas Poned Mulya Asri	11.060.000,00	28.477.100,00
12	Piutang BLUD Puskesmas Candra Mukti	4.057.000,00	6.657.000,00

13	Piutang BLUD Puskesmas Poned Pagar Dewa	3.460.000,00	1.747.100,00
14	Piutang BLUD Puskesmas Kibang Budi Jaya	9.286.000,00	7.606.000,00
15	Piutang BLUD Puskesmas Poned Toto Mulyo	11.224.000,00	6.048.000,00
16	Piutang BLUD Puskesmas Mercu Buana	0,00	3.970.000,00
17	Piutang BLUD Piutang BLUD Puskesmas Toto Katon	0,00	1.600.000,00
18	Piutang BLUD Rumah Sakit Umum Daerah TUBABA	264.966.200,00	9.118.120.900,00
19	Piutang BLUD Pasar Pulung Kencana	558.230.000,00	0,00
20	Piutang atas denda keterlabatan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	111.314.728,89	111.314.728,89
	Jumlah	**1.016.640.105,43**	**9.334.438.828,89**

D. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya yang tercatat pada neraca sebesar Rp3.977.221.000,00 berupa Piutang dana bergulir yang telah jatuh tempo tahun 2017 pada beberapa kelompok tani peternak sapi. Berikut tabel Piutang dana bergulir.

Tabel 5.3.9 Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 untuk Kelompuk Tani peternak sapi (investasi dana bergulir)

No.	Nama Kelompok Tani	Kewajiban Yang Harus Dibayar	Sisa Kewajiban
1.	Gembala Makmur	Tahap 1 (25%)	102.000.000,00
		Tahap 2 (35%)	245.000.000,00
		Tahap 3 (40%)	280.000.000,00
			627.000.000,00
2.	Makmur Berseri	Tahap 1 (25%)	175.000.000,00
		Tahap 2 (35%)	165.000.000,00
		Tahap 3 (40%)	280.000.000,00
			620.000.000,00
3.	Mahesa Kencana	Tahap 1 (25%)	0,00
		Tahap 2 (35%)	230.000.000,00

		Tahap 3 (40%)	280.000.000,00
			510.000.000,00
4.	Sumber Rezeki II	Tahap 1 (25%)	0,00
		Tahap 2 (35%)	144.700.000,00
		Tahap 3 (40%)	280.000.000,00
			424.700.000,00
5.	Sumber Rezeki	Tahap 1 (25%)	0,00
		Tahap 2 (35%)	245.000.000,00
		Tahap 3 (40%)	280.000.000,00
			525.000.000,00
6.	Tunas Remaja	Tahap 1 (25%)	0,00
		Tahap 2 (35%)	0,00
		Tahap 3 (40%)	67.335.000,00
			67.335.000,00
7.	Jaya Tani	Tahap 1 (25%)	0,00
		Tahap 2 (35%)	0,00
		Tahap 3 (40%)	255.000.000,00
			255.000.000,00
8.	Tani Harapan	Tahap 1 (25%)	175.000.000,00
		Tahap 2 (35%)	245.000.000,00
		Tahap 3 (40%)	280.000.000,00
			700.000.000,00
9.	Sidodadi	Tahap 1 (25%)	0,00
		Tahap 2 (35%)	0,00
		Tahap 3 (40%)	0,00
10.	Ngudi Makmur	Tahap 1 (25%)	0,00
		Tahap 2 (35%)	0,00
		Tahap 3 (40%)	248.186.000,00
			248.186.000,00
			3.977.221.000,00

E. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan pos untuk menampung hak Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk Triwulan II, III dan IV Tahun 2022, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Triwulan III dan IV Tahun 2022, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sampai dengan Triwulan III dan IV Tahun 2022, Pajak Pemanfaatan Air Permukaan (PAP) untuk Triwulan III dan IV Tahun 2022 dan Pajak Rokok Triwulan IV Tahun 2022. Piutang Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2022 sebesar Rp38.987.672.399,00 namun pada Bulan Januari Tahun 2023 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berupa Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Triwulan II sebesar

Rp3.286.531.595,00 dan Pajak Rokok Triwulan IV untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp4.370.191.990,00 telah dibayar Lunas. Selanjutnya untuk Triwulan III Tahun 2022 berupa Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp3.845.639.083,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp2.496.344.711,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp8.355.709.232,00 dan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PPAP) sebesar Rp26.502.366,00 telah dibayar lunas pada tanggal 24 Maret 2023. Untuk rincian Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel 5.3.10 berikut.

Tabel 5.3.10 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Piutang PKB Tw. II Tahun 2022	3.286.531.595,00	0,00
2	Piutang PKB Tw. III Tahun 2022	3.845.639.083,00	4.067.740.143,00
3	Piutang PKB Tw. IV Tahun 2022	3.850.581.811,00	3.265.056.836,00
4	Piutang BBNKB Tw. III Tahun 2022	2.496.344.711,00	2.333.738.438,00
5	Piutang BBNKB Tw. IV Tahun 2022	2.875.403.322,00	2.581.901.213,00
6	Piutang PBBKB Tw. III Tahun 2022	8.355.709.232,00	6.579.638.445,00
7	Piutang PBBKB Tw. IV Tahun 2022	9.846.835.082,00	7.869.888.453,00
8	Piutang PAP Tw. III Tahun 2022	26.502.366,00	21.750.225,00
9	Piutang PAP Tw. IV Tahun 2022	33.933.207,00	25.234.908,00
10	Piutang Pajak Rokok Tw. IV Tahun 2022	4.370.191.990,00	3.861.037.686,00
	Jumlah	**38.987.672.399,00**	**30.605.986.347,00**

1. Piutang PKB

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2022 sebesar Rp10.982.752.489,00 merupakan saldo piutang Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi TA 2022 untuk Triwulan II Rp3.286.531.595,00 dan Triwulan III sebesar Rp3.845.639.083,00 serta Triwulan IV sebesar Rp3.850.581.811,00.

2. Piutang BBNKB

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2022 sebesar Rp5.371.748.033,00 merupakan saldo piutang Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Provinsi TA 2022 untuk Triwulan III sebesar Rp2.496.344.711,00 dan saldo piutang Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Provinsi Triwulan IV TA. 2022 sebesar Rp2.875.403.322,00.

3. Piutang PBBKB

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp18.202.544.314,00 merupakan saldo piutang Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi TA 2022 untuk Triwulan III sebesar Rp8.355.709.232,00 dan untuk saldo piutang Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Triwulan IV TA 2022 sebesar Rp9.846.835.082,00.

4. Piutang PAP

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp60.435.573,00 merupakan saldo piutang Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP) Provinsi TA 2022 untuk Triwulan III sebesar Rp26.502.366,00 dan untuk saldo piutang Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP) Provinsi Triwulan IV sebesar Rp33.933.207,00. **.**

5. Piutang Pajak Rokok

Saldo Piutang Pajak Rokok sebesar Rp4.370.191.990,00 merupakan saldo piutang DBH Pajak Rokok Provinsi Triwulan IV TA 2022 sebesar Rp4.370.191.990,00 yang sudah dibayar pada Tahun 2023.

Rincian piutang bagi hasil provinsi pada lampiran 11.

F. Piutang Lainnya

Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
3.977.221.000,00	**4.546.240.728,89**

Piutang Saldo Piutang pada piutang lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.977.221.000,00 merupakan piutang dana bergulir kelompok tani peternak sapi yang pada tahun 2022 akun pendapatan tersebut dialihkan ke Lain-lain PAD yang sah sehingga saldo Piutang Lainnya pada Neraca Tahun 2022 menjadi nol. Tabel berikut sebagai visualisasi Piutang Lainnya untuk Tahun 2021.

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2022 lebih kecil dibanding kan tahun 2021, sebesar (Rp457.665.000,00) karena pada tanggal 18 Februari 2022 telah diterima pengembalian ke Pemerintah Daerah yang berasal dari kelompok tani Tunas Remaja sebesar Rp457.000.000,00.

Tabel 5.3.11 Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 untuk Kelompuk Tani peternak sapi (investasi dana bergulir)

No.	Nama Kelompok Tani	Kewajiban Yang Harus Dibayar	Sisa Kewajiban
1.	Gembala Makmur	Tahap 1 (25%)	102.000.000,00
		Tahap 2 (35%)	245.000.000,00
		Tahap 3 (40%)	280.000.000,00
			627.000.000,00
2.	Makmur Berseri	Tahap 1 (25%)	175.000.000,00
		Tahap 2 (35%)	165.000.000,00
		Tahap 3 (40%)	280.000.000,00
			620.000.000,00
3.	Mahesa Kencana	Tahap 1 (25%)	-
		Tahap 2 (35%)	230.000.000,00
		Tahap 3 (40%)	280.000.000,00
			510.000.000,00
4.	Sumber Rezeki II	Tahap 1 (25%)	-
		Tahap 2 (35%)	144.700.000,00
		Tahap 3 (40%)	280.000.000,00
			424.700.000,00
5.	Sumber Rezeki	Tahap 1 (25%)	-
		Tahap 2 (35%)	245.000.000,00
		Tahap 3 (40%)	280.000.000,00
			525.000.000,00
6.	Tunas Remaja	Tahap 1 (25%)	-
		Tahap 2 (35%)	-

		Tahap 3 (40%)	67.335.000,00
			67.335.000,00
7.	Jaya Tani	Tahap 1 (25%)	-
		Tahap 2 (35%)	-
		Tahap 3 (40%)	255.000.000,00
			255.000.000,00

8.	Tani Harapan	Tahap 1 (25%)	175.000.000,00
		Tahap 2 (35%)	245.000.000,00
		Tahap 3 (40%)	280.000.000,00
			700.000.000,00
9.	Sidodadi	Tahap 1 (25%)	-
		Tahap 2 (35%)	-
		Tahap 3 (40%)	-
			-
10.	Ngudi Makmur	Tahap 1 (25%)	-
		Tahap 2 (35%)	-
		Tahap 3 (40%)	248.186.000,00
			248.186.000,00
			3.977.221.000,00

Rincian Saldo Piutang pada piutang lainnya per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada lampiran 9.

5.3.1.1.9 Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
(4.885.947.521,09)	**(4.653.142.355,98)**

Penyisihan Piutang merupakan taksiran atas nilai piutang tak tertagih yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang

dari seseorang dan atau korporasi dan atau entitas lain oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 sebesar (Rp4.885.947.521,09) sebagaimana Tabel 5.3.12 berikut:

Tabel 5.3.12 Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(8.883,18)	(16.205,13)
2	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(50.373.907,91)	(330.913,36)
3	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(1.946.914,00)	(9.734,57)
4	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(13.774.470,00)	(132.271,00)
5	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(5.351.519,55)	(4.528.248,88)
6	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(2.611.000,00)	(33.805,00)
7	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(14.005.250,00)	(168.248,96)
8	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	(511.288.949,57)	(2.759.903,96)
9	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(114.427.264,89)	(57.247.093,39)
10	Penyisihan Piutang Bagi Hasil	(194.938.361,99)	(153.029.931,74)
11	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya (investasi dana bergulir)	(3.977.221.000,00)	(4.434.886.000,00)
Jumlah		**(4.885.947.521,09)**	**(4.653.142.355,99)**

Saldo rincian Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada lampiran 7, Penyisihan *Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada lampiran 8 dan 10. Penyisihan Penyisihan Piutang Bagi Hasil. Pada lampiran 11 dan Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya pada lampiran 9.*

5.3.1.1.10 Beban Dibayar Dimuka

Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
134.887.916,57	**73.643.235,26**

Beban Dibayar dimuka adalah pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Daerah dan membebani pagu anggaran. Namun barang / jasa / fasilitas dari pihak ketiga belum sepenuhnya diterima / dinikmati satuan kerja / pemerintah. Saldo Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp134.887.916,57 yang sebagian besar merupakan Beban Pajak Kendaraan Bermotor, dengan rincian pada Tabel 5.3.12 sebagai berikut:

Tabel 5.3.13 Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Beban Jasa Dibayar Dimuka	134.887.916,57	73.643.235,26
2	Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka	0,00	0,00
3	Beban Lainnya Dibayar Dimuka	0,00	0,00
	Jumlah	**134.887.916,57**	**73.643.235,26**

Saldo rincian Beban Dibayar dimuka sebesar Rp134.887.916,57 dapat dilihat pada lampiran 12.

5.3.1.1.11 Persediaan

Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
10.157.788.035,94	**8.177.483.074,00**

Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan *(supplies)* yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan barang-

barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu satu tahun. Meliputi persediaan barang pakai habis, alat tulis kantor, kertas dan cover, benda pos alat kesehatan, persediaan dokumen/administrasi tender, bahan komputer, obat dan obat-obatan lainya serta beberapa nilai persediaan berupa persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat dengan metode periodik dengan pendekatan beban yaitu pada saat pembelian atau berita acara serah terima barang dibukukan sebagai beban. Dasar pencatatan persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir / harga pokok produksi terakhir / nilai wajar atau persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode.

Saldo persediaan per 31 Desember 2022 senilai Rp10.157.788.035,94 terdiri dari:

Tabel 5.3.14 Persediaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

No	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	34.144.620,00	43.261.047,00
2	Kertas dan Cover	19.356.300,00	15.645.000,00
3	Bahan Cetak	3.231.740,00	0,00
4	Benda Pos	1.450.000,00	1.659.000,00
5	Persediaan Dokumen / Administrasi Tender	61.396.000,00	106.630.075,00
6	Bahan Komputer	131.481.892,00	139.511.500,00
7	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	11.340.750,00
8	Obat	9.897.580.312,94	5.252.232.096,00
9	Obat-obatan lainnya	9.147.171,00	2.597.929.606,00
10	Barang/Jasa Yang Akan Dihibahkan Kepada Masyarakat	0,00	9.274.000,00
	Jumlah Persediaan	**10.157.788.035,94**	**8.177.483.074,00**

Saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.157.788.035,94 merupakan saldo Persediaan pada OPD di Kabupaten Tulang Bawang Barat per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada lampiran 13.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
17.972.788.537,84	**16.601.715.338,75**

Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17.972.788.537,84 terdiri dari:

Tabel 5.3.15 Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

No.	Uraian	31 December 2022	31 December 2021
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	17.972.788.537,84	16.601.715.338,75
	Jumlah	**17.972.788.537,84**	**16.601.715.338,75**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang merupakan kelompok asset non lancar dan menurut sifat penanamannya dibagi menjadi dua yaitu:

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

5.5.1.2.2 Investasi Permanen	2022	2021
	17.972.788.537,84	**16.601.715.338,75**
Penyertaan Modal Pemerintah Kepada BUMD a. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Kepada PT. Bank Lampung.	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
Invetasi Permanen Lainnya a. Koperasi Ragem Sai Mangi Wawai merupakan penyertaan modal kepada Koperasi Pegawai Negeri RSMW Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penyertaan pada RSMW dicatat sebagai kewajiban jangka panjang, sesuai dengan dengan kementrian koperasi sehingga pemda tidak memiliki pengaruh yang siginifikan.	*2.000.000.000,00*	2.000.000.000,00
b. BPRS Tani Merupakan penyertaan modal pada Bank Syariah Mandiri Nomor seri D.161705/7000000025006776 Tanggal 10 Juni 2013 untuk pendirian PT. BPRS Tani Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai dengan 31 Desember 2022 serta terdapat penambahan metode ekuitas. Sebesar Rp1.371.073.199,09 .	*9.972.788.537,84*	8.601.715.338,75

Dengan menggunakan metode ekuitas pada investasi pemerintah daerah, yang digunakan untuk pencatatan pada Investasi Permanen BPRS Tani, dapat dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Pada Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak menambah nilai Investasi Jangka Panjang Permanen berupa penyertaan penambahan penyertaan modal.

Investasi Jangka Panjang Permanen pada lampiran 14.

5.3.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah daerah atau dimanfaatkan masyarakat umum.

Saldo aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.829.951.907.589,65. Pada tahun 2022 terjadi mutase asset, sehingga saldo akhir aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.772.421.166.514,67 dengan rincian pada Tabel 5.3.16 sebagai berikut.

Tabel 5.3.16 Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

No	Uraian	31 Desember 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2022
1.	Tanah	423.552.843.062,00	11.584.316.760,00	3.001.264.150,00	432.135.895.672,00
2.	Peralatan dan Mesin	311.733.702.484,45	57.833.867.186,00	40.586.127.940,00	328.981.441.730,45
3.	Gedung dan Bangunan	856.320.665.499,46	196.139.481.208,00	155.561.894.679,66	896.898.252.027,80
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.857.950.663.086,83	102.186.179.198,34	24.833.449.349,20	1.935.303.392.935,97
5.	Aset Tetap Lainnya	28.349.893.159,77	3.099.943.900,00	878.240.000,00	30.571.597.059,77
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	14.937.129.724,00	10.860.599.163,00	4.805.544.400,00	20.992.184.487,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.662.892.989.426,86)			(1.872.461.597.398,32)
	Jumlah	**1.829.951.907.589,65**	**381.704.387.415,34**	**229.666.520.518,86**	**1.772.421.166.514,67**

Komposisi aset tetap Pemerintah sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan dalam grafik berikut:

Adapun mutasi aset tetap selama Tahun 2022 antara lain terjadi karena :

Mutasi penambahan aset tetap terdiri dari Penambahan yang merupakan perolehan aset tetap melalui belanja modal pada pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022, hibah, reklasifikasi belanja modal, reklasifikasi kode barang, belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap, koreksi pencatatan, dan utang retensi 2022.

Mutasi pengurangan aset tetap terdiri dari pengurangan atas penghapusan aset tetap yang telah rusak atau tidak dapat dimanfaatkan lagi, hibah kepada pihak lain, aset yang rusak berat, belanja modal yang tidak dicatat sebagai aset tetap, dan aset lain-lain.

Pada Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual, terdapat kebijakan batasan minimal nilai kapitalisasi untuk setiap belanja barang yang menjadi aset tetap, yaitu sebagai berikut:

1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah aset Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan;
2) Pengeluaran tersebut lebih dari Rp25.000.000,00 per unit untuk gedung dan bangunan, jalan, jembatan, instalasi, jaringan dan irigasi;
3) Pengeluaran tersebut lebih dari Rp500.000,00 per unit untuk peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya;
4) Perolehan aset tetap tersebut dimaksudkan untuk digunakan, dan tidak dimaksudkan untuk dijual;
5) Biaya perolehan atas aset tetap terukur terdiri atas harga beli atau konstruksi serta biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap aset tersebut hingga siap digunakan. Oleh karena itu, selain biaya-biaya yang sudah termasuk di dalam kontrak konstruksi, belanja jasa konsultan perencanaan dan pengawasan dikapitalisasi menjadi nilai perolehan terhadap aset tersebut;
6) Untuk biaya-biaya yang muncul setelah perolehan aset tetap, misalnya biaya pemeliharaan, terdapat batasan nilai kapitalisasi. Apabila pengeluaran melebihi nilai Rp25.000.000,00 per unit untuk bangunan gedung dan lebih

dari Rp500.000,00 per unit untuk peralatan dan mesin, maka nilai tersebut akan dikapitalisasi ke dalam nilai aset tetap atau menambah nilai aset tetap tersebut. Penambahan nilai aset tetap terjadi apabila pengeluaran atas biaya-biaya tersebut bersifat menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi atas aset tersebut. Sedangkan untuk pengeluaran yang sifatnya hanya pemeliharaan rutin dengan maksud untuk mempertahankan kondisi aset tersebut berfungsi normal, tidak dikapitalisasi dan diperlakukan hanya sebagai biaya pemeliharaan/biaya operasional saja, meskipun nilai pengeluarannya cukup signifikan.

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap selama tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1) Tanah

Saldo awal aset tetap tanah per 1 Januari 2022 sebesar Rp423.552.843.062,00. Dalam Tahun 2022 terdapat penambahan aset tetap tanah sebesar Rp11.584.316.760,00 yang terdiri dari :

A. Mutasi Tambah

1. Belanja modal

   Belanja modal tanah tahun 2022 sebesar Rp4.118.548.330,00 yang terdiri dari

   a. Pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan terdapat belanja modal Tanah Untuk Jalan sebesar Rp3.684.325.330,00
   b. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat belanja modal Tanah Lapangan Lainnya sebesar Rp434.223.000,00

2. Hibah

   Hibah diterima sebesar Rp5.467.663.000,00 pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mendapatkan hibah tanah berupa :

   a. Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan sebesar Rp4.775.760.000,00 yang berasal dari Tiyuh Puluh Kencana dan Kabupaten Tulang Bawang.
   b. Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp499.435.000,00 berasal dari hibah masyarakat dan Kabupaten Tulang Bawang.

c. Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga sebesar Rp192.468.000,00.

3. Mutasi Masuk

   Terdapat Mutasi barang Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp127.600.000,00 yang sebelumnya tercatat pada Kecamatan Tulang Bawang Tengah kemudian dimutasikan ke Dinas Perhubungan.

4. Reklas Masuk

   a. Terdapat reklas masuk Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp29.029.000,- yang merupakan hasil reklas belanja modal Bangunan Parkir Pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
   b. Reklas Masuk Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp1.126.042.000,00 yang direklas dari belanja modal Tanah Untuk Jalan,
   c. Reklas masuk tanah untuk taman sebesar Rp715.434.430,00 yang sebelumnya tercatat pada Tanah Untuk Jalan.

B. Mutasi Kurang

1. Hibah Keluar

   Terdapat Hibah keluar pada pos belanja Modal Tanah Untuk Jalan sebesar Rp419.700.000,00 yang dihibahkan kepada Polresta Tulang Bawang Barat.

2. Mutasi Keluar

   Mutasi barang keluar Sebesar Rp127.600.000,00 pada Kecamatan Tulang Bawang Tengah Ke Dinas Perhubungan,

3. Reklas Keluar

   a. Tanah Untuk Jalan sebesar Rp1.841.476.430,00 yang direklas ke Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp1.126.042.000,00 dan Tanah Untuk Taman Rp715.434.430,00.
   b. Pos Belanja Modal Tanah Lapangan Lainnya yang direklas ke Belanja Barang dan Jasa (tidak menjadi aset) sebesar Rp434.223.000,00

c. Pos Belanja modal Tanah Untuk Jalan Rp178.264.720,00 yang digunakan untuk belanja materai, Belanja Makan Minum rapat, dll pada kegiatan pengadaan tanah.

Tabel 5.3.17 Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2022

NO	JENIS BARANG	SALDO AWAL 01/01/2022	MUTASI TAMBAH				MUTASI KURANG				
			BELANJA MODAL 2022	HIBAH MASUK	MUTASI MASUK	RE-KLAS MASUK	HIBAH KELUAR	MUTASI KELUAR	RE-KLAS KELUAR	ASET BARANG JASA	SALDO 31 DESEMBER 2022
1	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	4.731.922.590,00				29.029.000,00					4.760.951.590,00
2	TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PERUSAHAAN	2.162.400.000,00		4.775.760.000,00							6.938.160.000,00
3	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	78.992.820.772,00		499.435.000,00	127.600.000,00	1.126.042.000,00		127.600.000,00			80.618.297.772,00
4	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG SARANA OLAHRAGA			192.468.000,00							192.468.000,00
5	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT IBADAH	4.481.450.000,00									4.481.450.000,00
6	TANAH BASAH	930.000.000,00									930.000.000,00
7	TANAH PERKEBUNAN	14.450.001.000,00									14.450.001.000,00
8	TANAH LAPANGAN OLAH RAGA	1.834.000.000,00									1.834.000.000,00
9	TANAH LAPANGAN PENIMBUNAN BARANG	592.000.000,00									592.000.000,00
10	TANAH UNTUK JALAN	311.523.023.326,00	3.684.325.330,00				419.700.000,00		1.841.476.430,00	178.264.720,00	312.767.907.506,00
11	TANAH UNTUK BANGUNAN AIR	8.100.000,00									8.100.000,00
12	TANAH UNTUK BANGUNAN BERSEJARAH	3.509.242.191,00									3.509.242.191,00
13	TANAH UNTUK MAKAM	337.883.183,00									337.883.183,00
14	TANAH UNTUK TAMAN	-				715.434.430,00					715.434.430,00
15	LAPANGAN LAINNYA	-	434.223.000,00							434.223.000,00	-
	JUMLAH	**423.552.843.062,00**	**4.118.548.330,00**	**5.467.663.000,00**	**127.600.000,00**	**1.870.505.430,00**	**419.700.000,00**	**127.600.000,00**	**1.841.476.430,00**	**612.487.720,00**	**432.135.895.672,00**

2) Peralatan Dan Mesin

Saldo awal aset tetap-peralatan mesin per 1 Januari 2022 sesuai atau sama dengan saldo aset tetap peralatan mesin *audited* per 31 Desember 2021 yakni sebesar Rp311.733.702.484,45. Pada tahun 2022 terdapat koreksi saldo awal sebesar Rp709.345.500,00, mutasi tambah sebesar Rp57.124.521.688,00 dan mutasi kurang sebesar Rp40.586.127.942,00. Sehingga, saldo akhir aset tetap-peralatan mesin per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp328.981.441.731,55. Rincian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.3.18 Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2022

No	URAIAN	SALDO AKHIR 2021	MUTASI TAMBAH							MUTASI KURANG						SALDO AKHIR 2022
			KOREKSI SALDO AWAL	BELANJA	KOREKSI	HIBAH	REKLAS MASUK	MUTASI MASUK	BARANG JASA JADI ASET	EKSTAKOMPTABLE	HIBAH	ASET KE BARANG JASA	MUTASI KELUAR	REKLAS KELUAR	ASET RUSAK BERAT / HILANG/PENJUALAN	
1	Tractor	683.033.200,00														683.033.200,00
2	Grader	7.679.648.000,00					-									7.679.648.000,00
3	Excavator	4.519.588.000,00				1.157.288.000,00	-									5.676.876.000,00
4	Hauler	1.160.299.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	595.499.000,00	-		564.800.000,00
5	Asphalt Equipment	31.405.000,00					-									31.405.000,00
6	Compacting Equipment	4.151.904.440,00					-									4.151.904.440,00
7	Aggregate And Concrete Equipment	-					699.300.000,00									699.300.000,00
8	Loader	1.133.000.000,00					-									1.133.000.000,00
9	Alat Pengangkat	11.293.000,00					-							-		11.293.000,00
10	Mesin Proses	349.213.000,00														349.213.000,00
11	Alat Besar Darat Lainnya	-		699.300.000,00			-							699.300.000,00		-
12	Compressor	124.650.000,00														124.650.000,00
13	Electric Generating Set	2.773.496.161,00		-	-	-	6.970.000,00	-	-	-	-	-	-	-		2.780.466.161,00
14	Pompa	533.760.527,00		7.817.200,00	-	-	13.030.000,00	-	-	-		-	-	-		554.607.727,00
15	Mesin Bor	17.600.000,00					-									17.600.000,00
16	Unit Pemeliharaan Lapangan	-		-										-		-
17	Alat Pengolahan Air Kotor	15.100.000,00					-							-		15.100.000,00
18	Peralatan Sar Mountenering	47.550.000,00					4.815.500,00	-						-		52.365.500,00

No	URAIAN	SALDO AKHIR 2021	MUTASI TAMBAH							MUTASI KURANG						SALDO AKHIR 2022
			KOREKSI SALDO AWAL	BELANJA	KOREKSI	HIBAH	REKLAS MASUK	MUTASI MASUK	BARANG JASA JADI ASET	EKSTAKOMPTABLE	HIBAH	ASET KE BARANG JASA	MUTASI KELUAR	REKLAS KELUAR	ASET RUSAK BERAT / HILANG/PENJUALAN	
19	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18.144.386.938,00		24.000.000,00	270.480.000,00	-	4.558.268.000,00	12.503.319.000,00	-	-	-		6.561.346.000,00	2.728.600.420,00	1.596.470.000,00	24.614.037.518,00
20	Kendaraan Bermotor Penumpang	16.292.326.660,00		-	-	365.700.000,00	956.795.000,00	-	-	-	-	-	6.593.194.000,00	4.879.891.000,00		6.141.736.660,00
21	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.754.790.278,00	698.395.000,00	-	-	-	2.523.103.920,00	2.597.683.650,00	-	-		-	1.976.330.650,00	209.000.000,00	359.965.000,00	8.028.677.198,00
22	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.178.906.231,90	10.950.500,00	-	16.350.000,00	-	255.349.500,00	1.181.837.553,00	-	-	48.250.000,00	-	1.181.837.553,00	-		8.413.306.231,90
23	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	-		-				29.868.000,00								29.868.000,00
24	Kendaraan Bermotor Khusus	9.960.842.578,00		600.000.000,00		821.750.000,00	115.000.000,00	1.195.499.000,00		-			600.000.000,00	491.475.000,00		11.601.616.578,00
25	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	25.473.000,00														25.473.000,00
26	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	756.041.010,00		-	-		5.913.800,00	-	-	-		-	-	99.550.000,00		662.404.810,00
27	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	693.995.000,00		-	-		-	-	-	-		-	-	-		693.995.000,00
28	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	-		79.920.000,00												79.920.000,00
29	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Barang	224.340.000,00														224.340.000,00
30	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	249.100.000,00		-	-		-	-	-	-		-	-	-		249.100.000,00
31	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	143.997.200,00		-	-		-	-	-	-		-	-	-		143.997.200,00
32	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang	380.465.715,00		-	-		-	-	-	-		-	-	-		380.465.715,00
33	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	28.500.000,00					-									28.500.000,00
34	Kapal Terbang	1.700.000,00					-							-		1.700.000,00
35	Perkakas Bengkel Kayu	22.876.800,00					-									22.876.800,00
36	Perkakas Pabrik Es	21.630.000,00					-							-		21.630.000,00
37	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	-		-										-		-
38	Perkakas Standard (Standard Tools)	70.718.000,00					-							-		70.718.000,00
39	Peralatan Tukang Besi	2.750.000,00														2.750.000,00

No	URAIAN	SALDO AKHIR 2021	MUTASI TAMBAH							MUTASI KURANG						SALDO AKHIR 2022
			KOREKSI SALDO AWAL	BELANJA	KOREKSI	HIBAH	REKLAS MASUK	MUTASI MASUK	BARANG JASA JADI ASET	EKSTAKOMPTABLE	HIBAH	ASET KE BARANG JASA	MUTASI KELUAR	REKLAS KELUAR	ASET RUSAK BERAT / HILANG/PENJUALAN	
40	Peralatan Ukur, Gip Dan Feeting	191.588.626,00					-			-				-		191.588.626,00
41	Alat Ukur Universal	149.347.727,00		-	-		-	-	-	-		-	-	-		149.347.727,00
42	Alat Ukur/Test Klinis Lain	1.933.000,00		-		-		-								1.933.000,00
43	Alat Kalibrasi	15.150.000,00														15.150.000,00
44	Universal Tester	1.320.000,00					-							-		1.320.000,00
45	Alat Ukur/Pembanding	377.270.100,00		-		-	2.100.000,00	-					-	-		379.370.100,00
46	Alat Ukur Lain-Lain	148.575.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		148.575.000,00
47	Alat Timbangan/Biara	238.667.659,00		-			-							-		238.667.659,00
48	Anak Timbangan/Biara	90.750.000,00														90.750.000,00
49	Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman	48.275.000,00														48.275.000,00
50	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	28.605.000,00		10.889.100,00			500.000,00					9.603.000,00		1.286.100,00		29.105.000,00
51	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	263.089.200,00		-			7.200.000,00							3.000.000,00		267.289.200,00
52	Alat Laboratorium Pertanian	405.939.821,00					-							-		405.939.821,00
53	Alat Prosesing	252.350.000,00														252.350.000,00
54	Alat Produksi Perikanan	503.695.200,00		-	-		-	-	-	-		-	-	-		503.695.200,00
55	Alat-Alat Peternakan	346.974.870,00														346.974.870,00
56	Mesin Ketik	158.229.600,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		158.229.600,00
57	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	77.313.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		77.313.000,00
58	Alat Reproduksi (Penggandaan)	62.375.000,00					-							-		62.375.000,00
59	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6.803.922.827,00		57.750.000,00	-	159.698.872,00	683.127.000,00	-	-	-	-	-	-	-		7.704.498.699,00
60	Alat Kantor Lainnya	9.765.572.593,00		116.111.119,00	-	-	540.326.050,00	-	-	-	-	-	-	2.980.000,00		10.419.029.762,00

No	URAIAN	SALDO AKHIR 2021	MUTASI TAMBAH							MUTASI KURANG						SALDO AKHIR 2022
			KOREKSI SALDO AWAL	BELANJA	KOREKSI	HIBAH	REKLAS MASUK	MUTASI MASUK	BARANG JASA JADI ASET	EKSTAKOMPTABLE	HIBAH	ASET KE BARANG JASA	MUTASI KELUAR	REKLAS KELUAR	ASET RUSAK BERAT / HILANG/PENJUALAN	
61	Meubelair	23.904.174.571,55		696.958.000,00	-	834.730.491,00	1.937.914.500,00	-	-	1.103.150.540,00	59.415.000,00	6.120.000,00	-	585.228.000,00		25.619.864.022,55
62	Alat Pengukur Waktu	73.720.000,00		3.375.000,00	-		-	-	-	3.675.000,00		-	-	-		73.420.000,00
63	Alat Pembersih	649.173.849,00		29.233.250,00	-		15.600.000,00	-	-	-		-	-	-		694.007.099,00
64	Alat Pendingin	6.639.960.850,00		315.213.000,00	-	-	78.283.300,00	-	-	495.000,00	-	-	-	7.000.000,00		7.025.962.150,00
65	Alat Dapur	1.404.355.300,00		22.257.150,00	-	-	11.880.000,00	-	-	6.256.850,00	-	-	-	5.379.300,00		1.426.856.300,00
66	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.150.179.535,00		896.105.198,00	-	-	540.706.994,00	-	20.299.203,00	108.646.000,00	-	25.850.000,00	-	105.069.550,00		13.367.725.380,00
67	Alat Pemadam Kebakaran	514.950.000,00		42.500.000,00	-	-	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00		569.750.000,00
68	Meja Kerja Pejabat	4.276.456.890,00		18.981.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.000.000,00		4.242.437.890,00
69	Meja Rapat Pejabat	181.764.000,00		-	-		101.840.000,00	-	-	-	-	-	-	-		283.604.000,00
70	Kursi Kerja Pejabat	798.340.800,00		6.181.000,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-		804.521.800,00
71	Kursi Rapat Pejabat	322.949.350,00		30.000.000,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-		352.949.350,00
72	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	25.890.000,00		-	-		-	-	-	-		-	-	-		25.890.000,00
73	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	249.100.000,00		14.475.000,00	-		-	-	-	-		-	-	4.500.000,00		259.075.000,00
74	Lemari Dan Arsip Pejabat	1.430.769.720,00		30.000.000,00	-		-	-	-	-		-	-	-		1.460.769.720,00
75	Peralatan Studio Audio	3.905.330.454,00		118.584.000,00	-	-	34.498.000,00	-	-	-	-	3.640.754,00	-	25.629.892,00		4.029.141.808,00
76	Peralatan Studio Video Dan Film	511.936.253,00		16.054.750,00	-		12.612.000,00	-	-	-	-	-	-	-		540.603.003,00
77	Peralatan Cetak	26.750.000,00		-	-		-	-	-	-		-	-	-		26.750.000,00
78	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	36.800.000,00					4.950.000,00									41.750.000,00
79	Alat Studio Lainnya	132.111.900,00		10.445.000,00			-							10.445.000,00		132.111.900,00
80	Alat Komunikasi Telephone	5.729.352.261,00		41.687.500,00	-		114.210.000,00	-	-	-	-	-	-	-		5.885.249.761,00
81	Alat Komunikasi Radio Ssb	17.600.000,00														17.600.000,00

No	URAIAN	SALDO AKHIR 2021	MUTASI TAMBAH							MUTASI KURANG						SALDO AKHIR 2022
			KOREKSI SALDO AWAL	BELANJA	KOREKSI	HIBAH	REKLAS MASUK	MUTASI MASUK	BARANG JASA JADI ASET	EKSTAKOMPTABLE	HIBAH	ASET KE BARANG JASA	MUTASI KELUAR	REKLAS KELUAR	ASET RUSAK BERAT / HILANG/PENJUALAN	
82	Alat Komunikasi Radio Hf/Fm	40.320.000,00														40.320.000,00
83	Alat Komunikasi Radio Vhf	11.250.000,00		-	-		-	-	-	-		-	-	-		11.250.000,00
84	Alat Komunikasi Sosial	46.391.000,00		-			2.500.000,00	-			-			-		48.891.000,00
85	Alat Komunikasi Lainnya	40.000.000,00		1.160.000,00										1.160.000,00		40.000.000,00
86	Peralatan Pemancar Mf/Mw	10.000.000,00					-							-		10.000.000,00
87	Peralatan Pemancar Uhf	3.000.000,00														3.000.000,00
88	Peralatan Pemancar Shf	8.000.000,00														8.000.000,00
89	Peralatan Antena Mf/Mw	10.000.000,00					-							-		10.000.000,00
90	Peralatan Antena Uhf	1.000.000,00					-									1.000.000,00
91	Peeralatan Antena Shf/Parabola	97.744.000,00		1.500.000,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-		99.244.000,00
92	Switcher/Menara Antena	59.850.000,00		-												59.850.000,00
93	Humidity Control	79.750.000,00														79.750.000,00
94	Sumber Tenaga	179.000.000,00					-									179.000.000,00
95	Alat Kedokteran Umum	5.578.303.840,00		1.092.140.125,00			17.451.228,00			19.698.750,00				5.232.375,00		6.662.964.068,00
96	Alat Kedokteran Gigi	1.000.742.600,00		-			-									1.000.742.600,00
97	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	186.524.700,00		-			-	-								186.524.700,00
98	Alat Kedokteran Bedah	3.949.942.784,00		-			12.030.000,00	-						-		3.961.972.784,00
99	Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	1.199.544.800,00		542.673.005,00		675.935.000,00	333.000,00	538.251.250,00		780.330,00			538.251.250,00	-		2.417.705.475,00
100	Alat Kedokteran Tht	233.309.150,00		-			-									233.309.150,00
101	Alat Kedokteran Mata	246.200.300,00		333.000,00			-	-						333.000,00		246.200.300,00
102	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	464.050.000,00		-			-	-						3.180.000,00		460.870.000,00

No	URAIAN	SALDO AKHIR 2021	MUTASI TAMBAH							MUTASI KURANG						SALDO AKHIR 2022
			KOREKSI SALDO AWAL	BELANJA	KOREKSI	HIBAH	REKLAS MASUK	MUTASI MASUK	BARANG JASA JADI ASET	EKSTAKOMPTABLE	HIBAH	ASET KE BARANG JASA	MUTASI KELUAR	REKLAS KELUAR	ASET RUSAK BERAT / HILANG/PENJUALAN	
103	Alat Kedokteran Anak	453.268.600,00		1.491.771.200,00			-	1.491.771.200,00					1.491.771.200,00	-		1.945.039.800,00
104	Alat Kedokteran Poliklinik	162.784.800,00		-				-						12.030.000,00		150.754.800,00
105	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	102.863.000,00		-			-	-						-		102.863.000,00
106	Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf)	165.000.000,00														165.000.000,00
107	Alat Kedokteran Jantung	520.918.400,00		-			-							-		520.918.400,00
108	Alat Kedokteran Transfusi Darah	635.040.523,00		-												635.040.523,00
109	Alat Kedokteran Nuklir	2.675.000,00		-												2.675.000,00
110	Alat Kedokteran Gawat Darurat	39.000.000,00		-										-		39.000.000,00
111	Alat Kedokteran Iccu	-														-
112	Alat Kedokteran Bedah Jantung	-														-
113	Alat Kedokteran Lainnya	996.200.546,00		-			5.232.375,00	-		387.000,00				10.491.228,00		990.554.693,00
114	Alat Kesehatan Olah Raga	62.200.000,00		-	-		-	-	-	-		-	-	-		62.200.000,00
115	Alat Kesehatan Umum Lainnya	44.387.742.094,00		-			1.620.000,00							-		44.389.362.094,00
116	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	5.000.000,00														5.000.000,00
117	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	8.568.900,00		-												8.568.900,00
118	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	217.620.000,00					-							-		217.620.000,00
119	Alat Laboratorium Aspal, Cat Dan Kimia	78.675.000,00		-												78.675.000,00
120	Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan	1.936.000,00														1.936.000,00
121	Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik	13.860.000,00					-									13.860.000,00
122	Alat Laboratorium Umum	2.360.622.700,00		-	-	-	500.000,00	-		500.000,00			-	-		2.360.622.700,00
123	Alat Laboratorium Microbiologi	129.366.000,00		-			-							-		129.366.000,00

No	URAIAN	SALDO AKHIR 2021	MUTASI TAMBAH							MUTASI KURANG						SALDO AKHIR 2022
			KOREKSI SALDO AWAL	BELANJA	KOREKSI	HIBAH	REKLAS MASUK	MUTASI MASUK	BARANG JASA JADI ASET	EKSTAKOMPTABLE	HIBAH	ASET KE BARANG JASA	MUTASI KELUAR	REKLAS KELUAR	ASET RUSAK BERAT / HILANG/PENJUALAN	
124	Alat Laboratorium Kimia	347.359.500,00					-							-		347.359.500,00
125	Alat Laboratorium Patologi	196.583.000,00		-												196.583.000,00
126	Alat Laboratorium Immunologi	37.596.000,00		-			-						-			37.596.000,00
127	Alat Laboratorium Hematologi	1.000.000,00														1.000.000,00
128	Alat Laboratorium Film	6.940.000,00					1.871.000,00							-		8.811.000,00
129	Alat Laboratorium Farmasi	3.982.000,00		-			-							-		3.982.000,00
130	Alat Laboratorium Fisika	114.316.800,00		-			263.860.000,00	-			52.772.000,00	184.480.000,00		-		140.924.800,00
131	Alat Laboratorium Pembuatan Pola	34.500.000,00		-												34.500.000,00
132	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet Dan Plastik	4.500.000,00														4.500.000,00
133	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	2.100.000,00					-							-		2.100.000,00
134	Alat Laboratorium Pertanian	128.864.000,00		-		-	2.910.000,00	-						8.000.000,00		123.774.000,00
135	Alat Laboratorium Biologi Perairan	7.350.000,00					-							-		7.350.000,00
136	Alat Laboratorium Biologi	70.499.900,00					270.620.000,00				49.203.800,00	189.916.200,00		-		101.999.900,00
137	Laboratorium Kearsipan	8.377.450,00		-		-		-								8.377.450,00
138	Laboratorium Hematologi Dan Urinalisis	295.605.000,00		-												295.605.000,00
139	Alat Laboratorium Lain	115.403.500,00		-	-		-	-	-	-		-	-	-		115.403.500,00
140	Laboratory Safety Equipment	15.675.000,00					-									15.675.000,00
141	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia	186.659.100,00					1.200.000,00							-		187.859.100,00
142	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika	219.924.800,00					1.000.000,00							-		220.924.800,00
143	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Dasar	292.362.535,00					-							-		292.362.535,00
144	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Lanjutan	617.074.588,00					12.716.500,00							-		629.791.088,00

No	URAIAN	SALDO AKHIR 2021	MUTASI TAMBAH							MUTASI KURANG						SALDO AKHIR 2022
			KOREKSI SALDO AWAL	BELANJA	KOREKSI	HIBAH	REKLAS MASUK	MUTASI MASUK	BARANG JASA JADI ASET	EKSTAKOMPTABLE	HIBAH	ASET KE BARANG JASA	MUTASI KELUAR	REKLAS KELUAR	ASET RUSAK BERAT / HILANG/PENJUALAN	
145	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Menengah	190.011.065,00					-							-		190.011.065,00
146	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Atas	54.723.000,00					-							-		54.723.000,00
147	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ips	23.409.250,00					-							-		23.409.250,00
148	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama	75.550.200,00					2.145.000,00							-		77.695.200,00
149	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Keterampilan	296.059.500,00		-			-	-						-		296.059.500,00
150	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	1.293.696.972,00					42.060.000,00							-		1.335.756.972,00
151	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga	1.695.076.238,00					-							-		1.695.076.238,00
152	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Pkn	74.478.000,00					-							-		74.478.000,00
153	Alat Peraga Kejuruan	8.503.911.484,00					-							-		8.503.911.484,00
154	Alat Peraga Paud/Tk	-		49.998.600,00			-				49.998.600,00			-		-
155	Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	141.150.000,00					-							-		141.150.000,00
156	Modular Counting And Scientific Electronic	1.000.000,00					-							-		1.000.000,00
157	Recorder Display	3.860.000,00					-							-		3.860.000,00
158	System/Power Suplly	-		1.860.000,00										1.860.000,00		-
159	Alat Kesehatan Kerja	4.112.143.008,00		4.090.000,00		-	-	-		-		3.590.000,00		500.000,00		4.112.143.008,00
160	Alat Laboratorium Kwalitas Air Dan Tanah	68.782.000,00														68.782.000,00
161	Alat Laboratorium Kwalitas Udara	777.476.800,00		-										-		777.476.800,00
162	Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran	1.550.000,00					-							-		1.550.000,00
163	Laboratorium Lingkungan	568.611.990,00														568.611.990,00
164	Alat Laboratorium Penunjang	8.174.890.000,00		-		-	-	-						-		8.174.890.000,00
165	Data Accquisition And Analyzing System	970.641.348,00					-							-		970.641.348,00

No	URAIAN	SALDO AKHIR 2021	MUTASI TAMBAH							MUTASI KURANG						SALDO AKHIR 2022
			KOREKSI SALDO AWAL	BELANJA	KOREKSI	HIBAH	REKLAS MASUK	MUTASI MASUK	BARANG JASA JADI ASET	EKSTAKOMPTABLE	HIBAH	ASET KE BARANG JASA	MUTASI KELUAR	REKLAS KELUAR	ASET RUSAK BERAT / HILANG/PENJUALAN	
166	Peralatan Umum	5.800.000,00		-			-							-		5.800.000,00
167	Alat Keamanan	123.744.004,00		-			-	-						-		123.744.004,00
168	Alat Dalmas/Alat Dakhura	6.000.000,00														6.000.000,00
169	Alat Wanteror (Perlawanan Teror)	4.950.000,00					-							4.950.000,00		-
170	Alsus Fotografi Kepolisian	4.208.000,00					-							-		4.208.000,00
171	Komputer Jaringan	844.332.658,00		15.000.000,00	-		-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00		844.332.658,00
172	Personal Komputer	33.424.260.056,00		1.508.358.851,00	-	-	3.578.298.700,00	10.000.000,00	-	-	499.976.000,00	203.000,00	10.000.000,00	9.231.000,00		38.001.507.607,00
173	Komputer Unit Lainnya	20.000.000,00		3.635.321.000,00	-		-	-	-	-	374.405.130,00	7.150.870,00	-	3.273.765.000,00		-
174	Peralatan Mainframe	518.840.150,00		2.121.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-		521.461.150,00
175	Peralatan Mini Komputer	818.733.331,00		2.300.000,00	-	-	-	-	-	-		-	-	5.400.000,00		815.633.331,00
176	Peralatan Personal Komputer	9.577.755.222,00		123.143.452,00	-	-	232.170.000,00	-	-	-	-	-	-	3.162.000,00		9.929.906.674,00
177	Peralatan Jaringan	2.715.639.808,00		-	700.000,00	-	94.656.000,00	-	-	-		-	-	-		2.810.995.808,00
178	Peralatan Komputer Lainnya	1.500.000,00		2.761.945.800,00			-	-		445.241.300,00		99.203.500,00	-	2.217.501.000,00		1.500.000,00
179	Elektronik/Electric	-		98.250.000,00										98.250.000,00		-
180	Sumur Lainnya	-		24.784.800,00			-							24.784.800,00		-
181	Baju Pengaman	22.072.000,00														22.072.000,00
182	Topi Kerja															-
183	Alat Pelindung Lainnya	296.746.000,00		1.340.000,00	-		-	-	-	1.340.000,00		-	-	-		296.746.000,00
184	Alat Penolong	1.200.000,00					16.940.000,00							-		18.140.000,00
185	Alat Pendukung Pencarian	459.220.000,00					54.680.000,00							-		513.900.000,00
186	Alat Ukur Peralatan Faslektrik	10.000.000,00					-									10.000.000,00

No	URAIAN	SALDO AKHIR 2021	MUTASI TAMBAH							MUTASI KURANG						SALDO AKHIR 2022
			KOREKSI SALDO AWAL	BELANJA	KOREKSI	HIBAH	REKLAS MASUK	MUTASI MASUK	BARANG JASA JADI ASET	EKSTAKOMPTABLE	HIBAH	ASET KE BARANG JASA	MUTASI KELUAR	REKLAS KELUAR	ASET RUSAK BERAT / HILANG/PENJUALAN	
187	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya	-		120.150.000,00										120.150.000,00		-
188	Rambu Tidak Bersuar	2.761.143.331,00					-									2.761.143.331,00
189	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	395.930.000,00		-												395.930.000,00
190	Peralatan Permainan	52.654.464,00					13.295.000,00						-	-		65.949.464,00
191	Peralatan Senam	24.775.000,00		-			20.900.000,00							-		45.675.000,00
192	Peralatan Olah Raga Lainnya	25.250.000,00					-							-		25.250.000,00
	JUMLAH	**311.733.702.484,45**	**709.345.500,00**	**15.366.078.102,00**	**287.530.000,00**	**4.015.102.363,00**	**17.887.282.367,00**	**19.548.229.653,00**	**20.299.203,00**	**1.690.170.770,00**	**1.134.020.530,00**	**529.757.324,00**	**19.548.229.653,00**	**15.727.514.665,00**	**1.956.435.000,00**	**328.981.441.730,45**

Penjelasan atas Koreksi Saldo Awal, Mutasi tambah dan Mutasi Kurang adalah sebagai berikut :

A. Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin

Terdapat mutasi tambah sebesar Rp57.833.867.188,00 yang terdiri dari :

1. Koreksi Asat Saldo awal Rp709.345.500,00
2. Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp15.366.078.102,00,
3. Koreksi sebesar Rp287.530.000,00
4. Hibah masuk sebesar Rp4.015.102.363,00,
5. Reklas masuk sebesar Rp17.887.282.367,00
6. Mutasi masuk sebesar Rp19.548.229.653,00, serta
7. Penambahan dari belanja barang dan jasa yang menjadi aset sebesar Rp20.299.203,00. Adapun penjelasan dari mutasi tambah peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :

a. Koreksi tambah Saldo Peralatan dan Mesin

Koreksi saldo awal sebesar Rp709.345.500,00 yang terdiri dari berupa :

1. Terdapat dua unit Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp698.395.000,00
2. Satu unit Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp10.950.500,00.

Hal ini terjadi dikarenakana barang tersebut pada Simda-BMD masih tercatat dalam kondisi baik, sedangkan pada LKPD *audited* 2021 barang tersebut dicatat dalam keadaan rusak berat .

b. Belanja Modal

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2022 sebesar Rp15.366.078.102,00, yang terdiri dari :

1. Alat Besar Darat Lainnya sebesar Rp699.300.000,00,
2. Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp24.000.000,00,
3. Kendaraan Bermotor Khusus sebesar Rp600.000.000,00,
4. Pompa sebesar Rp7.817.200,00,
5. Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya sebesar Rp 79.920.000,00,
6. Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak sebesar Rp10.889.100,00,
7. Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp 57.750.000,00

8. Alat Pengukur Waktu sebesar Rp3.375.000,00,
9. Alat Dapur sebesar Rp22.257.150,00,
10. Meja Kerja Pejabat sebesar Rp1.8981.000,00,
11. Kursi Rapat Pejabat sebesar Rp30.000.000,00,
12. Lemari dan Arsip Pejabat sebesar Rp30.000.000,00,
13. Alat Studio Lainnya sebesar Rp10.445.000,00,
14. Alat Komunikasi Lainnya sebesar Rp1.160.000,00,
15. Peralatan Antena Shf/Parabola sebesar Rp1.500.000,00,
16. Alat Kedokteran Mata sebesar Rp333.000,
17. Alat Kedokteran Anak sebesar Rp1.491.771.200,00,
18. Alat Peraga Paud/Tk sebesar Rp49.998.600,00,
19. System/Power Suplly sebesar Rp1.860.000,
20. Alat Kesehatan Kerja sebesar Rp4.090.000,00,
21. Komputer Jaringan sebesar Rp15.000.000,00
22. Peralatan Main frame sebesar Rp2.121.000,00,
23. Peralatan Mini Komputer sebesar Rp2.300.000,00,
24. Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp4.2500.000,00,
25. Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp6.181.000,00,
26. Elektronik/*Electric* sebesar Rp98.250.000,00,
27. Sumur Lainnya sebesar Rp24.784.800,00,
28. Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya sebesar Rp120.150.000,00,
29. Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat sebesar Rp1.447.5000,00,
30. Peralatan Studio Audio sebesar Rp118.584.000,00,
31. Alat Pembersih sebesar Rp29.233.250,00,
32. Alat Kantor Lainnya sebesar Rp116.111.119,00,
33. Peralatan Studio Video dan Film sebesar Rp16.054.750,00,
34. Alat Komunikasi Telephone sebesar Rp41.687.500,00,
35. Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar Rp542.673.005,00,
36. Alat Kedokteran Umum sebesar Rp1.092.140.125,00,
37. Meubelair sebesar Rp696.958.000,00,

38. Peralatan Komputer Lainnya sebesar Rp2.761.945.800,00,
39. Komputer Unit Lainnya sebesar Rp3.635.321.000,00,
40. Alat Pendingin sebesar Rp315.213.000,00,
41. Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use)* sebesar Rp896.105.198,00,
42. Personal Komputer sebesar Rp1.508.358.851,00 dan
43. Peralatan Personal Komputer sebesar Rp123.143.454,00

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2022 tersebar pada 26 OPD serta 12 Puskesmas. Rincian Belanja Modal terdapat pada Tabel 5.3.1.7.

c. Koreksi Tambah

Pada tahun 2022 terdapat Koreksi tambah sebesar Rp287.530.000,00 yang terdiri dari :

1. Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp270.480.000,00,
2. Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp16.350.000,00 barang yang baru dicatat pada tahun 2022 dan dicatat pada Sekretariat Daerah, serta
3. Peralatan Jaringan sebesar Rp700.000,00 yang merupakan barang *ekstrakomptable* yang tercatat sebagai *intrakomptable.*

d. Hibah Masuk

Hibah masuk peralatan dan mesin pada tahun 2022 sebesar Rp4.015.102.363,00, yang terdiri dari :

1. Satu unit buah excavator Komatsu / PC 200 dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung dengan nilai sebesar Rp1.157.288.000,00 yang dicatat pada Dinas Lingkungan Hidup,
2. Satu unit Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang dengan nilai sebesar Rp72.000.000,00 yang dicatat pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,
3. Satu unit Kendaraan Bermotor Penumpang yang merupakan hibah dari Kementerian Perhubungan dengan nilai Rp293.700.000,00 yang dicatat pada Dinas Perhubungan,
4. Dua unit Kendaraan bermotor khusus (Mobil Pemadam Kebakaran) dari Pemerintah Jepang dan Pemerintah Provinsi Lampung dengan

Nilai Rp821.750.000,00 yang dicatat pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,

5. Hibah dari Kementerian PUPR berupa lima puluh (50) unit Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor dengan nilai Rp159.698.872,00 Meubelair dengan nilai sebesar Rp834.730.491,00 dan
6. Sebanyak 65 unit Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lapung yang di catat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp675.935.000,00.

e. Reklas Masuk

Reklas masuk peralatan dan mesin sebesar Rp17.887.282.367,00 yang terdiri atas :

1. Aggregate And Concrete Equipment sebesar Rp699.300.000,00,
2. Electric Generating Set sebesar Rp6.970.000,00,
3. Pompa sebesar Rp13.030.000,00,
4. Peralatan Sar Mountenering sebesar Rp4.815.500,00,
5. Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp4.558.268.000,
6. Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp956.795.000,00,
7. Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp2.523.103.920,00,
8. Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp255.349.500,00.
9. Kendaraan Bermotor Khusus sebesar Rp115.000.000,00,
10. Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp5.913.800,00,
11. Alat Ukur/Pembanding sebesar Rp2.100.000,00,
12. Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak sebesar Rp500.000,00,
13. Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian sebesar Rp7.200.000,00,
14. Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp683.127.000,00,
15. Alat Kantor Lainnya sebesar Rp540.326.050,00,
16. Meubelair sebesar Rp1.937.914.500,00,
17. Alat Pembersih sebesar Rp15.600.000,00,
18. Alat Pendingin sebesar Rp78.283.300,00,
19. Alat Dapur sebesar Rp11.880.000,00,
20. Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use)* sebesar Rp540.706.994,00,

21. Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp13.500.000,00,
22. Meja Rapat Pejabat sebesar Rp101.840.000,00,
23. Peralatan Studio Audio sebesar Rp34.498.000,00,
24. Peralatan Studio Video Dan Film sebesar Rp1.2612.000,00
25. Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah sebesar Rp4.950.000,00,
26. Alat Komunikasi Telephone sebesar Rp114.210.000,00,
27. Alat Komunikasi Sosial sebesar Rp2.500.000,00,
28. Alat Kedokteran Umum sebesar Rp17.451.228,00,
29. Alat Kedokteran Bedah sebesar Rp12.030.000,00,
30. Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar Rp333.000,00,
31. Alat Kedokteran Lainnya sebesar Rp5.232.375,00,
32. Alat Kesehatan Umum Lainnya sebesar Rp1.620.000,00,
33. Alat Laboratorium Umum sebesar Rp500.000,00,
34. Alat Laboratorium Film sebesar Rp1.871.000,00,
35. Alat Laboratorium Fisika sebesar Rp263.860.000,00
36. Alat Laboratorium Pertanian sebesar Rp2.910.000,00
37. Alat Laboratorium Biologi sebesar Rp27.0620.000,00,
38. Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia sebesar Rp1.200.000,00,
39. Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika sebesar Rp1.000.000,00,
40. Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Lanjutan sebesar Rp12.716.500,00,
41. Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama sebesar Rp21.450.00,00,
42. Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian sebesar Rp42.060.000,00,
43. Personal Komputer sebesar Rp3.578.298.700,00, Peralatan Mainframe sebesar Rp500.000,00,

44. Peralatan Personal Komputer sebesar Rp232.170.000,00 Peralatan Jaringan sebesar Rp94.656.000,00,
45. Alat Penolong sebesar Rp16.940.000,00,
46. Alat Pendukung Pencarian sebesar Rp54.680.000,00,
47. Peralatan Permainan sebesar Rp13.295.000,00 dan
48. Peralatan Senam sebesar Rp20.900.000,00.

f. Mutasi Masuk

Mutasi masuk pada tahun 2022 jumlah mutasi sebesar Rp19.548.229.653,00 yang terdiri dari :

1. Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp12.503.319.000,00,
2. Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp2.597.683.650,00,
3. Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp1.181.837.553,00,
4. Kendaraan Bermotor Roda Tiga sebesar Rp29.868.000,00,
5. Kendaraan Bermotor Khusus sebesar Rp1.195.499.000,00,
6. Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan Rp538.251.250,00,
7. Alat Kedokteran Anak sebesar Rp1.491.771.200,00 dan
8. Personal Komputer sebesar Rp10.000.000,00.

g. Belanja Barang Jasa Menjadi Aset

Terdapat Belanja Barang Jasa yang menjadi aset sebesar Rp20.299.203,00 yang dicatat pada Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use)* pada OPD Sekretariat Daerah.

B. Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin

Mutasi Kurang peralatan dan mesin terdiri atas

1. *Ekstrakomptable* sebesar Rp1.690.170.770,00,
2. Hibah keluar sebesar Rp1.134.020.530,00,
3. Belanja Modal Tidak Menjadi Aset sebesar Rp529.757.324,00,
4. Mutasi Kelua sebesar Rp19.548.229.653,00,
5. Reklas Keluar sebesar Rp15.727.514.665,00 dan

6. Aset tetap direklas ke Aset Rusak Berat dan dijual kepada Pihak Lain sebesar Rp1.956.435.000,00,

a. *Ekstrakomptable*

Pada tahun 2022`terdapat barang *ekstrakomptable* berjumlah Rp1.690.170.770,00 yang terdiri dari :

1. Alat Pendingin sebesar Rp495.000,00,
2. Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use)* sebesar Rp108.646.000,00,
3. Alat Pengukur Waktu sebesar Rp3.675.000,00,
4. Meubelair sebesar Rp1.103.150.540,00,
5. Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar Rp780.330,00,
6. Alat Kedokteran Lainnya sebesar Rp387.000,00,
7. Alat Laboratorium Umum sebesar Rp500.000,00,
8. Alat Dapur sebesar Rp6.256.850,00 Peralatan Komputer Lainnya sebesar Rp445.241.300,00,
9. Alat Pelindung Lainnya sebesar Rp1.340.000,00 dan
10. Alat Kedokteran Umum sebesar Rp19.698.750,00.

b. Hibah Keluar

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat memberikan Hibah peralatan dan mesin sebesar Rp1.134.020.530,00 yang terdiri dari :

1. Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp48.250.000,00,
2. Meubelair sebesar Rp59.415.000,00,
3. Alat Laboratorium Fisika sebesar Rp52.772.000,00,
4. Alat Laboratorium Biologi sebesar Rp 49.203.800,00,
5. Alat Peraga Paud/Tk sebesar Rp49.998.600,00,
6. Personal Komputer sebesar Rp499.976.000,00, dan
7. Komputer Unit Lainnya sebesar Rp374.405.130,00.

c. Belanja Modal Tidak Menjadi Aset

Pada Tahun 2022 terdapat Belanja modal yang tidak menjadi aset tetap sebesar Rp529.757.324,00 yang terdiri dari :

1. Belanja modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak sebesar Rp9.603.000,00,
2. Meubelair sebesar Rp6.120.000,00,
3. Peralatan Studio Audio sebesar Rp3.640.754,00,
4. Alat Laboratorium Fisika sebesar Rp184.480.000,00,
5. Alat Laboratorium Biologi sebesar Rp189.916.200,00
6. Personal Komputer sebesar Rp203.000,00,
7. Komputer Unit Lainnya sebesar Rp7.150.870,00,
8. Peralatan Komputer Lainnya sebesar Rp99.203.500,00,
9. Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use)* sebesar Rp25.850.000,00 dan
10. Alat Kesehatan Kerja sebesar Rp3.590.000,00

d. Mutasi Keluar

Pada Tahun 2022 terdapat mutasi barang keluar sebesar Rp19.548.229.653,00 yang terdiri atas :

1. Hauler sebesar Rp595.499.000,00,
2. Kendaraan Bermotor Khusus sebesar Rp600.000.000,00,
3. Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar Rp538.251.250,00,
4. Alat Kedokteran Anak sebesar Rp1.491.771.200,00,
5. Personal Komputer sebesar Rp10.000.000,00,
6. Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp1.976.330.650,00,
7. Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp6561.346.000,00,
8. Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp6593.194.000,00,
9. Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp1.181.837.553,00.

e. Reklas Keluar

Pada tahun 2022 terdapat mutasi keluar aset peralatan dan mesin sebesar Rp19.548.229.653,00 yang terdiri atas :

1. Alat Besar Darat Lainnya sebesar Rp699.300,000,00,
2. Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp209.000.000,00,
3. Kendaraan Bermotor Khusus sebesar Rp491.475.000,00,
4. Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp99.550.000,00,
5. Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak sebesar Rp1.286.100,00,
6. Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian sebesar Rp3.000.000,00,
7. Alat Pendingin sebesar Rp7.000.000,00,
8. Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp4.879.891.000,00,
9. Alat Dapur sebesar Rp5.379.300,00,
10. Alat Kantor Lainnya sebesar Rp2.980.000,00,
11. Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp1.200.000,00,
12. Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp2.728.600.420,00,
13. Meja Kerja Pejabat sebesar Rp53.000.000,00,
14. Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat sebesar Rp4.500.000,00,
15. Alat Studio Lainnya sebesar Rp10.445.000,00,
16. Alat Komunikasi Lainnya sebesar Rp1.160.000,00,
17. Alat Kedokteran Umum sebesar Rp5.232.375,00,
18. Alat Kedokteran Mata sebesar Rp333.000,00,
19. Alat Kedokteran Poliklinik sebesar Rp12.030.000,00,
20. Alat Kedokteran Lainnya sebesar Rp10.491.228,00,
21. Alat Laboratorium Pertanian sebesar Rp8.000.000,00,
22. *System/Power Suplly* sebesar Rp1.860.000,00,
23. Alat Kesehatan Kerja sebesar Rp500.000,00,
24. Alat Wanteror (Perlawanan Teror) sebesar Rp4.950.000,00,
25. Komputer Jaringan sebesar Rp15.000.000,00,
26. Personal Komputer sebesar Rp9.231.000,00,
27. Peralatan Mini Komputer sebesar Rp5.400.000,00,
28. Peralatan Personal Komputer sebesar Rp3.162.000,00,
29. Elektronik/Electric sebesar Rp98.250.000,00,

30. Sumur Lainnya sebesar Rp24.784.800,00,
31. Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya sebesar Rp12.0150.000,00,
32. Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam sebesar Rp3.180.000,00,
33. Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp105.069.550,00,
34. Peralatan Studio Audio sebesar Rp25.629.892,00,
35. Peralatan Komputer Lainnya sebesar Rp2.217.501.000,00,
36. Meubelair sebesar Rp585.228.000,00, dan Komputer Unit Lainnya sebesar Rp3.273.765.000,00.

f. Aset tetap direklas ke Aset Rusak Berat dan dijual kepada Pihak Lain

Pada tahun 2022 terdapat aset tetap yang direklas ke aset rusak berat berupa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp359.965.000,00 dan terdapat 2 unit Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan yang dijual tanpa melalui lelang kepada Mantan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat sebesar Rp1.596.470.000,00.

3) Gedung dan Bangunan

Saldo awal aset tetap gedung dan bangunan per 1 Januari 2022 sebesar Rp856.320.665.497,80. Pada tahun 2022, terdapat mutasi tambah sebesar Rp196.139.481.211,00 dan mutasi kurang sebesar Rp155.561.894.678,00 Sehingga saldo akhir per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp896.898.252.030,80

Tabel 5.3.19 Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2022

NO	JENIS BARANG	SALDO AWAL 31/12/2021	MUTASI TAMBAH						MUTASI KURANG						TOTAL ASET
			BELANJA MODAL 2022	HIBAH MASUK	MUTASI MASUK	RE-KLAS MASUK	BARANG JASA	HUTANG RETENSI 2023	HIBAH KELUAR	MUTASI KELUAR	RE-KLAS KELUAR	BARANG JASA	RETENSI TAHUN 2021	PAKAI HABIS	
1	Bangunan Gedung Kantor	175.401.315.558,23	8.820.866.600,00		17.295.750.008,00	-		386.415.800,00	396.156.000,00	17.592.910.008,00	4.133.347.323,00	941.120.000,00	996.700.500,00	-	177.844.114.135,23
2	Bangunan Gudang	9.016.657.922,00								-					9.016.657.922,00
3	Bangunan Gedung Instalasi	1.670.431.537,00													1.670.431.537,00
4	Bangunan Gedung Laboratorium	4.532.619.832,00	7.484.279.500,00			-			-		7.250.861.650,00		233.417.850,00	-	4.532.619.832,00
5	Bangunan Kesehatan	106.063.191.971,00	14.800.800,00	-	169.502.461,00	-				169.502.461,00	-		14.800.800,00		106.063.191.971,00
6	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	44.897.812.094,00	-		-	-	134.286.926,00			-	-	-			45.032.099.020,00
7	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.882.773.775,00				-					-			-	2.882.773.775,00
8	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	250.143.748.095,23	21.565.369.186,00			8.283.466.650,00			965.229.100,00		8.298.801.156,00		517.171.080,00	171.380.000,00	270.040.002.595,23
9	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	6.108.018.858,00	194.845.320,00		1.362.668.728,00	-				1.362.668.728,00		4.532.000,00			6.298.332.178,00
10	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	137.789.955.161,00	3.726.414.800,00		106.028.382.810,00	-		39.635.700,00		106.028.382.810,00		396.357.000,00	3.369.693.500,00		137.789.955.161,00
11	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	487.897.234,00	-	-	187.362.000,00	-		-		187.362.000,00	-		-		487.897.234,00
12	Bangunan Gedung Garasi/Pool	1.671.591.172,00	24.949.000,00		-	-	-			-	-	-			1.696.540.172,00
13	Bangunan Gedung Perpustakaan	1.085.952.425,00	-			-					-			-	1.085.952.425,00
14	Bangunan Pengujian Kelaikan	130.300.000,00													130.300.000,00
15	Bangunan Peternakan/Perikanan	257.522.459,00	196.304.690,00		220.132.027,00	156.116.000,00	-			-	-	-			830.075.176,00
16	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	7.730.850.313,00	-	-	-	-	-			-	156.116.000,00	-			7.574.734.313,00
17	Bangunan Fasilitas Umum	746.251.949,00	1.585.014.200,00		3.632.993.208,00	-					1.567.085.000,00		17.929.200,00	-	4.379.245.157,00
18	Bangunan Parkir	-	29.029.000,00			-					29.029.000,00				-
19	Taman	4.666.102.544,00	157.394.000,00		297.160.000,00	-			19.895.000,00		-		126.501.000,00		4.974.260.544,00
20	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.298.128.763,00			82.833.000,00	428.688.272,00				82.833.000,00					4.726.817.035,00

NO	JENIS BARANG	SALDO AWAL 31/12/2021	MUTASI TAMBAH						MUTASI KURANG						TOTAL ASET
			BELANJA MODAL 2022	HIBAH MASUK	MUTASI MASUK	RE-KLAS MASUK	BARANG JASA	HUTANG RETENSI 2023	HIBAH KELUAR	MUTASI KELUAR	RE-KLAS KELUAR	BARANG JASA	RETENSI TAHUN 2021	PAKAI HABIS	
21	Rumah Negara Golongan I	82.800.000,00													82.800.000,00
22	Rumah Negara Golongan Iii	29.673.582.679,00	-		-	-	-			-	-	-			29.673.582.679,00
23	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	6.661.402.611,00	-		103.424.240,00						428.688.273,66				6.336.138.577,34
24	Flat/Rumah Susun			12.793.160.000,00											12.793.160.000,00
25	Tugu	12.946.331.000,00				-									12.946.331.000,00
26	Bangunan Peninggalan	32.528.424.000,00		-		639.122.632,00		68.739.100,00		103.424.240,00					33.132.861.492,00
27	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	8.948.991.238,00				-									8.948.991.238,00
28	Pagar	5.898.012.309,00	-		-	-	30.374.553,00			-	-	-			5.928.386.862,00
	JUMLAH	**856.320.665.499,46**	**43.799.267.096,00**	**12.793.160.000,00**	**129.380.208.482,00**	**9.507.393.554,00**	**164.661.479,00**	**494.790.600,00**	**1.381.280.100,00**	**125.527.083.247,00**	**21.863.928.402,66**	**1.342.009.000,00**	**5.276.213.930,00**	**171.380.000,00**	**896.898.252.027,80**

Penjelasan terhadap Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang sebagai berikut :

A. Mutasi Tambah

Mutasi Tambah pada Aset Tetap Gedung Bagunan terdiri dari :

1. Belanja modal sebesar Rp43.799.267.096,00,
2. Hibah masuk sebesar Rp12.793.160.000,00,
3. Mutasi masuk sebesar Rp129.380.208.482,00,
4. Reklas masuk sebesar Rp9.507.393.554,00,
5. Belanja Barang Jasa yang menjadi aset sebesar Rp164.661.479,00, serta
6. Hutang retensi tahun 2023 sebesar Rp494.790.600,00.

Adapun penjelasan terhadap mutasi tambah pada aset Gedung bangunan adalah sebagai berikut :

a. Belanja Modal

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan belanja modal Gedung Bangunan sebesar Rp43.799.267.096,00 yang terdiri dari :

1. Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp8.820.866.600,00,
2. Bangunan Kesehatan sebesar Rp14.800.800,00,
3. Bangunan Gedung Laboratorium sebesar Rp7.484.279.500,00,
4. Bangunan Gedung Tempat Olah Raga sebesar Rp194.845.320,00,
5. Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebesar Rp3.726.414.800,00,
6. Bangunan Gedung Garasi/Pool sebesar Rp24.949.000,00,
7. Bangunan Peternakan/Perikanan sebesar Rp196.304.690,00,
8. Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp1.585.014.200,00,
9. Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp21.565.369.186,
10. Bangunan Parkir sebesar Rp29.029.000, dan
11. Taman sebesar Rp157.394.000,00

Rincian belanja modal terdapat pada Tabel 5.3.1.19

b. Hibah Masuk

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mendapatkan hibah aset berupa Flat/Rumah Susun dari Kementerian PUPR dengan nilai sebesar Rp12.793.160.000,00 dan dicatat pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

c. Mutasi Masuk

Pada Tahun 2022 mutasi masuk aset Gedung bangunan sebesar Rp129.380.208.482,00 yang terdiri dari :

1. Bangunan Kesehatan sebesar Rp169.502.461,00,
2. Bangunan Gedung Tempat Olah Raga sebesar Rp1.362.668.728,00,
3. Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebesar Rp106.028.382.810,00,
4. Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga sebesar Rp187.362.000,00,
5. Bangunan Peternakan/Perikanan sebesar Rp220.132.027,00,
6. Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp3.632.993.208,00,
7. Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp17295750008,
8. Taman sebesar Rp297.160.000,00, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp82.833.000,00 dan
9. Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan sebesar Rp103.424.240,00.

d. Reklas Masuk

Pada Tahun 2022 terdapat reklas masuk sebesar Rp9.507.393.554,00 yang terdiri dari :

1. Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp8.283.466.650,00,
2. Bangunan Peternakan/Perikanan sebesar Rp156.116.000,00,
3. Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp428.688.272,00,
4. Bangunan Peninggalan sebesar Rp639.122.632,00.

Rincian reklas masuk Gedung bangunan dapat dilihat pada pada tabel dibawah ini Tabel 5.3.1.19.

e. Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset

Pada Tahun 2022 terdapat belanja barang dan jasa berupa belanja pemeliharaan Gedung kantor yang menjadi aset tetap sebesar Rp164.661.479,00 dengan rincian :

1. Bangunan Gedung Tempat Ibadah sebesar Rp134.286.926,00 dan
2. Pagar sebesar Rp30.374.553,00 yang dicatat pada OPD Sekretariat Daerah.

f. Hutang Retensi 2023 Yang Menjadi Aset

Pada tahun 2022 Hutang Retensi yang dicatat sebagai penambah nilai aset sebesar Rp494.790.600,00 yang terdiri dari :

1. Bangunan Gedung Kantor sebesar 386.415.800,00,
2. Bangunan Gedung Pertokoan / Koperasi / Pasar sebesar Rp39.635.700,00,
3. Bangunan Peninggalan Rp68.739.100,00. Keseluruhan hutang retensi tersebut tercatat pada Dinas PUPR.

B. MUTASI KURANG GEDUNG BANGUNAN

Mutasi Kurang pada Aset Gedung Bangunan Tahun 2022 terdiri dari :

1. Hibah keluar sebesar Rp1.381.280.100,00,
2. Mutasi keluar sebesar Rp125.527.083.247,00,
3. Reklas Keluar sebesar Rp21.863.928.401,00
4. Belanja modal yang digunakan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp1.342.009.000,00,
5. Belanja modal yang digunakan untuk pembayaran retensi tahun 2021 sebesar Rp5.276.213.930,00,
6. Belanja modal yang digunakan untuk belanja barang pakai habis sebesar Rp171.380.000,00. .

Adapun rincian tersebut adalah sebagai berikut :

a. Hibah Keluar

Pada Tahun 2022 pemerintah kabupaten tulang Bawang memberikan hibah dari pos belanja modal sebesar Rp1.381.280.100,00 yang terdiri dari

1. Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp396.156.000,00,

2. Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp965.229.100,
3. Taman sebesar Rp19.895.000,00.

b. Mutasi Keluar

Pada Tahun 2022 mutasi keluar aset Gedung bangunan sebesar Rp125.527.083.247,00 yang terdiri dari :

1. Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp17.592.910.008, Bangunan Kesehatan sebesar Rp169.502.461,00,
2. Bangunan Gedung Tempat Olah Raga sebesar Rp1.362.668.728,00,
3. Bangunan Gedung Pertokoan / Koperasi / Pasar sebesar Rp106.028.382.810,00,
4. Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga sebesar Rp187.362.000,00,
5. Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp82.833.000,00,
6. Bangunan Peninggalan sebesar Rp103.424.240,00.

Rincian mutasi keluar Gedung bangunan dapat dilihat pada Tabel 5.3.1.19.

c. Reklas Keluar

Pada Tahun 2022 terdapat reklas keluar aset Gedung bangunan sebesar Rp221.863.928.402,66 yang terdiri dari :

1. Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp639.122.632,00,
2. Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp3.494.224.691,00,
3. Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp2.638.600.00,00,
4. Bangunan Parkir sebesar Rp270.620.000,00,
5. Mess / Wisma / Bungalow/ Tempat Peristirahatan sebesar Rp428.688.273,66,
6. Bangunan Gedung Laboratorium sebesar Rp6.644.078.656,00, dan
7. Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp1.654.722.500,00.

Rincian reklas keluar Gedung bangunan dapat dilihat pada Tabel 5.3.1.19.

d. Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset

Pada tahun 2022 terdapat belanja modal yang tidak menjadi aset sebesar Rp1.342.009.000,00 yang terdiri dari :

1. Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp941.120.000,00,
2. Bangunan Gedung Tempat Olah Raga sebesar Rp4.532.000,00,
3. Bangunan Gedung Pertokoan / Koperasi / Pasar sebesar Rp396.357.000,00.

e. Belanja Modal Yang Digunakan Untuk Pembayaran Retensi Tahun 2021

Pada Tahun 2022 terdapat belanja retensi untuk perolehan barang tahun 2022, sehingga tidak dicatat sebagai penambah nilai aset. Hal ini dikarenakan nilai tersebut sudah ditambahkan pada nilai aset pada tahun 2021. Retensi tersebut terdiri dari :

1. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp996.700.500,00,
2. Bangunan Gedung Laboratorium sebesar Rp233.417.850,00,
3. Bangunan Kesehatan sebesar Rp14.800.800,00,
4. Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp517.171.080,00,
5. Bangunan Gedung Pertokoan / Koperasi / Pasar sebesar Rp3.369.693.500,00, dan
6. Taman sebesar Rp126.501.000,00.

Rincian Modal Gedung Bangunan Tahun 2022 yang digunakan untuk pembayaran retensi dapat dilihat pada Tabel 5.3.1.19.

f. Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset

Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dan sebesar Rp171.380.000. Rincian Modal yang Tidak Menjadi Aset Gedung bangunan dapat dilihat pada Tabel 5.3.1.19.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo awal aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 1 Januari 2022 sesuai atau sama dengan saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan *audited* per 31 Desember 2021 yakni sebesar Rp1.857.950.663.086,83. Pada tahun 2022 terdapat mutasi tambah sebesar Rp102.186.179.198,34 dan mutasi kurang sebesar Rp24.833.449.356,34. Sehingga saldo akhir aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp1.935.303.392.935,97.

Tabel 5.3.20 Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

NO	JENIS BARANG	SALDO AWAL 01/01/2022	MUTASI TAMBAH								MUTASI KURANG							TOTAL ASET
			BELANJA MODAL 2022	HIBAH MASUK	MUTASI MASUK	RE-KLAS MASUK	KOREKSI TAMBAH	BARANG JASA	HUTANG RETENSI 2023	HUTANG PENGAWASAN 2023	HIBAH KELUAR	MUTASI KELUAR	RE-KLAS KELUAR	KOREKSI KURANG	RETENSI TAHUN 2021	SWAKELOLA	PAKAI HABIS	
1	JALAN KABUPATEN	1.008.959.835.543,77	61.708.960.162,00			2.129.345.200,00	131.495.803,34	1.474.696.850,00	5.922.413.975,00	257.935.000,00		3.632.993.208,00	-		10.243.548.296,20			1.066.708.141.029,91
2	JALAN DESA	154.434.411.481,97	1.870.271.000,00			-						-			820.346.000,00	1.049.925.000,00		154.434.411.481,97
3	JALAN TOL	209.539.270,30				-												209.539.270,30
4	JALAN KERETA API	209.633.302,32				-												209.633.302,32
5	LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	210.084.444,72				-												210.084.444,72
6	JALAN KHUSUS	136.425.087.434,51	-		-	-	-	-				-	-					136.425.087.434,51
7	JALAN LAINNYA	6.274.973.771,00	-															6.274.973.771,00
8	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN	185.715.623.852,35	3.969.892.900,00			181.369.579,00			415.313.200,00	90.544.781,00			2.258.795.800,00	71.473.400,00	116.417.900,00			187.926.057.212,35
9	JEMBATAN PENYEBERANGAN	219.908.704,00	-															219.908.704,00
10	BANGUNAN WADUK IRIGASI	6.604.399.314,00				-												6.604.399.314,00
11	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI	106.306.781.261,00			93.658.000,00	-						93.658.000,00						106.306.781.261,00
12	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	28.899.710.383,00				-												28.899.710.383,00
13	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	1.400.975.968,00				-												1.400.975.968,00
14	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	385.338.356,00																385.338.356,00
15	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI	2.398.989.573,00	180.626.700,00			-									180.626.700,00			2.398.989.573,00
16	BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA	-	547.217.000,00			-									-	547.217.000,00		-
17	BANGUNAN WADUK PASANG SURUT	1.296.889.706,00				-												1.296.889.706,00
18	BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT	346.313.000,00				-												346.313.000,00
19	BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT	329.610.973,00			-							220.132.027,00						109.478.946,00

NO	JENIS BARANG	SALDO AWAL 01/01/2022	MUTASI TAMBAH								MUTASI KURANG							TOTAL ASET
20	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT LAINNYA	7.872.579.954,00				-												7.872.579.954,00
21	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA	15.305.677.304,50				-												15.305.677.304,50
22	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA	3.494.743.617,00				-												3.494.743.617,00
23	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	85.217.062.524,90				974.784.998,00		99.302.000,00		49.363.000,00								86.340.512.522,90
24	BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI	4.528.867.523,00				-												4.528.867.523,00
25	BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI	1.184.947.000,00																1.184.947.000,00
26	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	20.077.530.054,00	-		-	-	-	-				-	-					20.077.530.054,00
27	BANGUNAN PELENGKAP SUMBER AIR	-				1.355.827.421,00				57.910.165,00								1.413.737.586,00
28	BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU	3.391.288.503,00				-												3.391.288.503,00
29	BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU	745.288.000,00				-												745.288.000,00
30	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	13.285.871.999,00				-												13.285.871.999,00
31	BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR	4.383.941.000,00	64.675.000,00			-							-		64.675.000,00			4.383.941.000,00
32	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR	3.323.158.000,00	-		-	-	-	-				-	-					3.323.158.000,00
33	BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR	4.577.049.385,00				-												4.577.049.385,00
34	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.994.746.026,00																1.994.746.026,00
35	INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR	1.075.350.254,82	-															1.075.350.254,82
36	INSTALASI AIR TANAH DALAM	9.381.689.078,92				-												9.381.689.078,92
37	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	20.431.666.180,75	9.617.559.528,00			24.784.800,00	6.884.460,00	492.104.000,00	457.348.500,00		-		-	-	575.261.900,00		-	30.455.085.568,75
38	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK	3.656.051.560,00	3.884.000.000,00			-					3.884.000.000,00							3.656.051.560,00
39	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK	336.883.348,00		4.981.354.000,00														5.318.237.348,00
40	BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH	-	672.162.058,00			-					600.000.000,00							72.162.058,00
41	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK	99.758.100,00																99.758.100,00
42	JARINGAN AIR MINUM	-	56.452.000,00			-					-	-				56.452.000,00		-
43	JARINGAN TRANSMISI	12.110.630.217,00				-												12.110.630.217,00
44	JARINGAN DISTRIBUSI	213.850.000,00	-		-	-	-	-				-	-					213.850.000,00

NO	JENIS BARANG	SALDO AWAL 01/01/2022	MUTASI TAMBAH								MUTASI KURANG							TOTAL ASET
45	JARINGAN LISTRIK LAINNYA	417.927.118,00	-		417.927.118,00	-						417.927.118,00						417.927.118,00
46	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH	216.000.000,00	-		-	-	-	-				-	-					216.000.000,00
	JUMLAH	**1.857.950.663.086,83**	**82.571.816.348,00**	**4.981.354.000,00**	**511.585.118,00**	**4.666.111.998,00**	**138.380.263,34**	**2.066.102.850,00**	**6.795.075.675,00**	**455.752.946,00**	**4.484.000.000,00**	**4.364.710.353,00**	**2.258.795.800,00**	**71.473.400,00**	**12.000.875.796,20**	**1.653.594.000,00**	**-**	**1.935.303.392.935,97**

A. MUTASI TAMBAH ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Uraian mutasi tambah aset tetap pada kelompok jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp102.186.179.198,34 terdiri atas:

1. Belanja Modal sebesar Rp82.571.816.348,00,
2. Hibah Masuk sebesar Rp4.981.354.000,00,
3. Mutasi Masuk sebesar Rp511.585.118,00,
4. Reklas Masuk sebesar Rp4.666.111.998,00,
5. Koreksi Tambah sebesar Rp138.380.263,34,
6. Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset sebesar Rp2.066.102.850,00,
7. Hutang Retensi Tahun 2023 Yang Menjadi Aset sebesar Rp6.795.075.675,00 dan
8. Hutang Pengawasan Yang Menjadi Aset sebesar Rp455.752.946,00.

a. Belanja Modal

Pada Tahun 2022 terdapat belanja modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan sebesar Rp82.571.816.348,00 yang terdiri dari :

1. Jalan Kabupaten sebesar Rp61.708.960.162, Jalan Desa sebesar Rp1.870.271.000,00,
2. Jembatan Pada Jalan Kabupaten sebesar Rp3.969.892.900,00,
3. Bangunan Pelengkap Irigasi sebesar Rp180.626.700,00,
4. Bangunan Air Irigasi Lainnya sebesar Rp547.217.000,00,
5. Bangunan Pembawa Air Kotor sebesar Rp64.675.000,00,
6. Instalasi Air Buangan Domestik sebesar Rp3.884.000.000,00,
7. Jaringan Air Minum sebesar Rp56.452.000,00,
8. Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya sebesar Rp9.617.559.528,00, dan
9. Bangunan Penampung Sampah sebesar Rp672.162.058.

Rincian Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tahun 2022 yang digunakan untuk pembayaran retensi dapat dilihat pada Tabel 5.3.1.20.

b. Hibah Masuk

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat memperoleh hibah berupa Instalasi Pengolahan Sampah Organik Dari

Balai Sarana dan Prasarana Wilayah Lampung Kementerian PUPR sebesar Rp4.981.354.000,00 yang dicatat pada Dinas Lingkungan Hidup.

c. Mutasi Masuk

Pada Tahun 2022 terdapat mutasi masuk sebesar Rp511.585.118,00 yang terdiri dari Bangunan Pengambil Irigasi sebesar Rp93.658.000,00 dan Jaringan Listrik Lainnya sebesar Rp417.927.118,00. Rincian mutasi masuk Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 5.3.1.20.

d. Reklas Masuk

Pada Tahun 2022 terdapat reklas masuk sebesar Rp4.666.111.998,00 yang terdiri dari :

1. Jalan Kabupaten sebesar Rp2.129.345.200,00, Jembatan pada jalan Kabupaten sebesar Rp181.369.579,00,
2. Bangunan Pembuang Pengaman Sungai sebesar Rp974.784.998,00,
3. Bangunan Pelengkap Sumber Air sebesar Rp1.355.827.421,00, dan
4. Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya sebesar Rp24.784.800,00.

Rincian reklas masuk Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 5.3.1.20

e. Koreksi Tambah

Pada Tahun 2022 terdapat koreksi tambah Rp138.380.263,34 yang terdiri dari Jalan Kabupaten sebesar Rp131.495.803,34 dan Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya sebesar Rp6.884.460,00 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

f. Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset

Pada Tahun 2022 terdapat belanja barang dan jasa menjadi aset sebesar Rp2.066.102.850,00 yang terdiri dari :

1. Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi sebesar Rp1.474.696.850,00,
2. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi sebesar Rp99.302.000,00,
3. Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air sebesar Rp98.290.000,00, dan

4. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air sebesar Rp393.814.000,00.

Rincian Barang dan Jasa Menjadi Aset Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 5.3.1.20.

g. Hutang Retensi Tahun 2023 Yang Menjadi Aset

Pada Tahun 2022 terdapat hutang retensi tahun 2023 yang menjadi aset sebesar Rp6.795.075.675,00 yang terdiri dari :

1. Jalan Kabupaten sebesar Rp5.922.413.975,00,
2. Jembatan Pada Jalan Kabupaten sebesar Rp415.313.200,00,
3. Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya sebesar Rp457.348.500,00

yang keseluruhannya berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

h. Hutang Pengawasan Yang Menjadi Aset

Pada Tahun 2022 terdapat hutang pengawasan belanja aset Rp455.752.946,00 yang terdiri dari :

1. Jalan Kabupaten sebesar Rp257.935.000,00,
2. Jembatan Pada Jalan Kabupaten sebesar Rp90.544.781,00,
3. Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Jembatan Pada Jalan Kabupaten sebesar Rp49.363.000,00,
4. Bangunan Pelengkap Sumber Air Rp57.910.165,00

yang keseluruhannya berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

B. MUTASI KURANG ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Uraian mutasi kurang aset tetap pada kelompok jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp24.833.449.349,20 terdiri atas:

1. Hibah Keluar sebesar Rp4.484.000.000,00,

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat memberikan hibah kelompok jalan, irigasi dan jaringan Rp4.484.000.000,00 yang terdiri dari Hibah Instalasi Air Buangan Domestik Rp3.884.000.000,00 yang diberikan kepada Tiyuh Tirta Kencana, Tiyuh Gunung Sari, Tiyuh Toto Katon, Tiyuh Marga Kencana,

Tiyuh Kagungan Ratu, Tiyuh Sumber Rejo, hibah Bangunan Penampung Sampah yang diberikan kepada Dayamurni.

2. Mutasi Keluar sebesar Rp4.364.710.353,00,

   Pada Tahun 2022 terdapat mutasi aset antar OPD kelompok Jalan, Irigasi Dan Jaringan sebesar Rp4.364.710.353,00 yang terdiri dari :

   1. Jalan Kabupaten sebesar Rp3.632.993.208,00,
   2. Bangunan Pengambilan Irigasi sebesar Rp93.658.000,00,
   3. Bangunan Pengaman Pasang Surut sebesar Rp220.132.027,00 dan
   4. Jaringan Listrik Lainnya sebesar Rp417.927.118,00.

   Rincian mutasi keluar Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 5.3.1.20.

3. Reklas Keluar sebesar Rp2.258.795.800,00,

   Pada Tahun 2022 terdapat reklas keluar aset kelompok jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp 2.258.795.800,00 yang terdiri dari Jembatan Pada Jalan Kabupaten sebesar Rp 2.258.795.800,00. Rincian reklas keluar Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 5.3.1.20..

4. Koreksi Kurang sebesar Rp71.473.400,00,

   Pada Tahun 2022 melakukan koreksi kurang sebesar Rp71.473.400,00 pada Jembatan Pada Jalan Kabupaten pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5. Pembayaran Retensi Pengadaan Aset Tahun 2021 sebesar Rp12.000.875.803,34

   Pada Tahun 2022 terdapat belanja modal yang digunkan untuk pembayaran retensi pengadaan aset Tahun 2021 sebesar Rp12.000.875.796,20 yang terdiri dari :

   1. Jalan Kabupaten sebesar Rp10.243.548.296,20,
   2. Jalan Desa sebesar Rp820.346.000,00,
   3. Jembatan Pada Jalan Kabupaten sebesar Rp116.417.900,00,
   4. Bangunan Pelengkap Irigasi sebesar Rp180.626.700,00,
   5. Bangunan Pembawa Air Kotor sebesar Rp64.675.000,00,
   6. Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya sebesar Rp25.879.000,00, dan

7. Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya sebesar Rp549.382.900,00. Rincian dapat dilihat pada Tabel 5.3.1.20.

6. Belanja Modal untuk Barang Jasa sebesar Rp1.653.594.000,00.

   Pada Tahun 2022 terdapat belanja modal yang di gunakan untuk kegiatan barang jasa (tidak menjadi aset) sebesar Rp1.653.594.000,00 yang terdiri dari Jalan Desa sebesar Rp1.049.925.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Bangunan Air Irigasi Lainnya sebesar Rp547.217.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan Jaringan Air Minum sebesar Rp56.452.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

5) Aset Tetap Lainnya

Saldo awal aset tetap lainnya per 1 Januari 2022 sesuai atau sama dengan saldo aset tetap lainnya *audited* per 31 Desember 2021 sebesar Rp28.349.893.159,77. Pada tahun 2022 terdapat mutasi tambah sebesar Rp3.099.943.900,00 dan mutasi kurang sebesar Rp878.240.000,00 sehingga saldo akhir aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp30.571.597.059,77 dengan rincian pada Tabel 5.5.21 berikut.

Tabel 5.3.21 Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2022

NO	JENIS BARANG	SALDO AWAL 01/01/2022	MUTASI MASUK		MUTASI KURANG			TOTAL ASET
			BELANJA MODAL 2022	RE-KLAS MASUK	RE-KLAS KELUAR	ASET LAINNYA	BARANG JASA	
1	Buku Umum	17.057.652.175,77	992.207.300,00	-	587.166.600,00		274.493.400,00	17.188.199.475,77
2	Buku Filsafat	2.340.000,00		-	-		-	2.340.000,00
3	Buku Agama	1.646.655.693,00	-	57.770.400,00	-		-	1.704.426.093,00
4	Buku Ilmu Sosial	730.569.291,00	-	93.628.900,00	-		-	824.198.191,00
5	Buku Ilmu Bahasa	1.332.320.708,00	-	272.900.900,00	-		-	1.605.221.608,00
6	Buku Matematika Dan Pengetahuan Alam	1.475.138.931,00	-	114.091.700,00	-		-	1.589.230.631,00
7	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	50.585.363,99	-	3.036.400,00	-		-	53.621.763,99
8	Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga	737.889.361,00		44.758.300,00	-		-	782.647.661,00
9	Buku Geografi, Biografi, Sejarah	3.543.463,00	299.700.000,00	-	-		-	303.243.463,00
10	Serial	45.700.000,00						45.700.000,00
11	Buku Laporan	11.132.220,00						11.132.220,00
12	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	-		12.150.000,00				12.150.000,00
13	Audio Visual	13.374.760,00		-	-		-	13.374.760,00
14	Bahan Kartografi	320.558.590,00	-	980.000,00	-		-	321.538.590,00
15	Naskah (Manuskrip) / Asli	450.000,00		-	-		-	450.000,00
16	Karya Musik	48.487.050,00		-	-		-	48.487.050,00
17	Karya Grafika (Graphic Material)	11.805.974,00		-	-		-	11.805.974,00
18	Three Dimensional Artefacs And Realita	54.055.284,00		-	-		-	54.055.284,00

NO	JENIS BARANG	SALDO AWAL 01/01/2022	MUTASI MASUK		MUTASI KURANG			TOTAL ASET
			BELANJA MODAL 2022	RE-KLAS MASUK	RE-KLAS KELUAR	ASET LAINNYA	BARANG JASA	
19	Alat Musik	1.896.757.440,00	7.500.000,00	-	7.500.000,00		-	1.896.757.440,00
20	Barang Bercorak Kesenian Lainnya	50.041.850,00		-	-		-	50.041.850,00
21	Pahatan	915.300.000,00	-	-	-			915.300.000,00
22	Maket, Miniatur,Replika,Foto Dokumen Dan Benda Bersejarah	69.900.000,00	1.192.140.000,00	-	-			1.262.040.000,00
23	Barang Kerajinan	174.125.000,00	-	-	-			174.125.000,00
24	Hewan Kebun Binatang	49.000.000,00						49.000.000,00
25	Ikan Budidaya	114.750.000,00						114.750.000,00
26	Tanaman	1.338.025.005,00		-				1.338.025.005,00
27	Batuan Koleksi	199.735.000,00		-				199.735.000,00
28	Software	-	9.080.000,00			9.080.000,00		-
	JUMLAH	**28.349.893.159,77**	**2.500.627.300,00**	**599.316.600,00**	**594.666.600,00**	**9.080.000,00**	**274.493.400,00**	**30.571.597.059,77**

1. Mutasi Bertambah

Mutasi tambah aset tetap lainnya selama tahun 2022 sebesar Rp3.880.663.900,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Belanja modal Tahun 2022 yang memenuhi kriteria aset tetap lainnya sebesar Rp2.500.627.300,00 terdiri dari Belanja Modal Buku Umum sebesar Rp992.207.300,00, Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah sebesar Rp299.700.000,00, Belanja Modal Alat Musik sebesar Rp7.500.000,00, Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah Rp1.192.140.000,00 dan Belanja Modal Software yang tercatat pada Aset Lainnya pada sisi Neraca sebesar Rp 9.080.000,00

b) Mutasi tambah sebesar Rp1.389.116.600,00 merupakan reklas dan mutasi aset antar SKPD.

2. Mutasi Berkurang

Mutasi kurang aset tetap lainnya sebesar Rp1.658.960.000,00 terdiri dari:

a) Mutasi kurang sebesar Rp274.493.400,00 merupakan aset buku yang dibagikan ke siswa yang menjadi barang jasa.

b) Mutasi kurang sebesar Rp1.393.546.600,00 merupakan reklas dan mutasi aset antar SKPD.

Sehingga saldo akhir aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp30.571.597.059,77.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo awal Konstruksi Dalam Pekerjaan per 1 Januari 2022 sesuai atau sama dengan saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan *audited* per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.937.129.724,00. Pada tahun 2022 terdapat mutasi tambah sebesar Rp10.860.599.163,00, dan mutasi kurang sebesar Rp4.805.544.400,00. Sehingga saldo akhir konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp20.992.184.487,00 dengan rincian pada Tabel 5.5.23 berikut:

Tabel 5.3.22 Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2022

No.	URAIAN	SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2021	Bertambah			Berkurang		SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2022
			Tunda Bayar	Hutang Retensi 2022	reklas	Lebih Catat	Berkurang	
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	159.370.000,00			-		-	159.370.000,00
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	-			-		-	-
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	7.994.055.024,00	446.945.400,00	275.350.416,00	10.138.303.347,00	1.271.878.000,00	-	17.582.776.187,00
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.783.704.700,00			-	1.151.135.000,00	2.382.531.400,00	3.250.038.300,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya	-			-		-	-
JUMLAH		**14.937.129.724,00**	**446.945.400,00**	**275.350.416,00**	**10.138.303.347,00**	**2.423.013.000,00**	**2.382.531.400,00**	**20.992.184.487,00**

1. Mutasi Bertambah

Saldo mutasi bertambah nilai konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2022 sebesar Rp10.860.599.163,00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Mutasi tambah sebesar Rp446.945.400,00 atas Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Dinas PUPR.

b) Mutasi tambah sebesar Rp275.350.416,00 atas Utang Retensi Tahun 2022 Modal Bangunan Gedung pada Dinas PUPR.

c) Mutasi tambah reklas aset sebesar Rp3.494.224.691,00 dari Bangunan Gedung Kantor ke Konstruksi dalam Pngerjaan Bangunan Peninggalan pada Dinas PUPR

d) Mutasi tambah reklas aset sebesar Rp6.644.078.656,00 dari Bangunan Gedung Tempat Pendidikan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan pada Dinas PUPR.

2. Mutasi Berkurang

Saldo mutasi berkurang nilai konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2022 sebesar Rp4.805.544.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Mutasi lebih catat aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan yang dikoreksi sebesar Rp1.271.878.000,00 pada Dinas PUPR.

b) Mutasi lebih catat aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dikoreksi sebesar Rp1.151.135.000,00 pada Dinas PUPR

c) Mutasi kurang reklas aset sebesar Rp2.382.531.400,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

7) Akumulasi Penyusutan

Kebijakan penyusutan dilakukan berdasarkan Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.

Nilai penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan merupakan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Aset tetap yang telah habis umur ekonomisnya namun masih dalam keadaan baik dan dapat dimanfaatkan tetap dicatat didalam Buku Inventaris Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai dengan aset tetap tersebut dinyatakan rusak dan dilakukan penghapusan. Ketika dilakukan penghapusan atau mutasi terhadap aset tetap, dilakukan koreksi pencatatan terhadap nilai buku sekaligus akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan.

Saldo awal akumulasi penyusutan per 1 Januari 2022 sebesar (Rp1.662.892.989.426,86). Selama Tahun 2022 mengalami penambahan sebesar (Rp209.568.607.971,46) sehingga Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dicatat sebesar (Rp1.872.461.597.398,32).

Rincian mutasi akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 5.5.23 berikut ini.

Tabel 5.3.23 Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2022

No.	URAIAN	JUMLAH PENYUSUTAN DESEMBER 2021	PENAMBAHAN					PENGURANGAN					JUMLAH PENYUSUTAN DESEMBER 2022
			Beban Penyusutan 2022	Mutasi	Rklass	Koreksi	TOTAL	Koreksi	Mutasi	Hibah	Lain-lain (Hilang, Reklas kode barang, koreksi catat dll)	TOTAL	
1	AP Alat Besar Darat-Tractor	(683.033.200,00)	(181.987.568.279,00)			(26.726.991.788,00)	(208.714.560.067,00)	(208.714.560.067,00)				(208.714.560.067,00)	**(683.033.200,00)**
2	AP Alat Besar Darat-Grader	(7.225.661.134,00)	(419.064.800,00)				(419.064.800,00)					-	**(7.644.725.934,00)**
3	AP Alat Besar Darat- Excavator	(2.896.395.966,00)	(1.490.201.234,00)				(1.490.201.234,00)					-	**(4.386.597.200,00)**
4	AP Alat Besar Darat-Hauler	(1.111.065.817,00)		(269.050.000,00)			(269.050.000,00)	(546.524.150,00)	(269.000.000,00)			(815.524.150,00)	**(564.591.667,00)**
5	AP Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	(18.319.583,00)	(3.140.500,00)				(3.140.500,00)					-	**(21.460.083,00)**
6	AP Alat Besar Darat- Compacting Equipment	(2.715.434.698,00)	(250.147.944,00)				(250.147.944,00)					-	**(2.965.582.642,00)**
7	AP Alat Besar Darat- Aggregate and Concrete Equipment		(5.827.500,00)				(5.827.500,00)					-	**(5.827.500,00)**
8	AP Alat Besar Darat-Loader	(632.591.667,00)	(113.300.000,00)				(113.300.000,00)					-	**(745.891.667,00)**
9	AP Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	(7.136.542,00)	(872.500,00)				(872.500,00)					-	**(8.009.042,00)**
10	AP Alat Besar Darat-Mesin Proses	(243.505.141,00)	(33.922.025,00)				(33.922.025,00)					-	**(277.427.166,00)**
11	AP Alat Bantu-Compressor	(47.485.714,00)	(17.807.143,00)				(17.807.143,00)					-	**(65.292.857,00)**
12	AP Alat Bantu-Electric Generating Set	(1.868.972.441,00)	(281.445.244,00)	-		(6,00)	(281.445.250,00)	(2,00)				(2,00)	**(2.150.417.689,00)**
13	AP Alat Bantu-Pompa	(371.934.525,00)	(37.208.527,00)			(2,00)	(37.208.529,00)	-				-	**(409.143.054,00)**
14	AP Alat Bantu-Mesin Bor	(14.666.668,00)	(2.514.286,00)				(2.514.286,00)		(1,00)			(1,00)	**(17.180.953,00)**
15	AP Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	(5.433.336,00)	(2.071.430,00)			-	(2.071.430,00)		(2,00)			(2,00)	**(7.504.764,00)**
16	AP Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering	(7.420.856,00)	(6.864.491,00)				(6.864.491,00)					-	**(14.285.347,00)**
17	AP Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(15.982.417.323,00)	(3.147.072.146,00)	(8.320.372.918,00)			(11.467.445.064,00)	(2.978.165.365,00)			(1.596.470.000,00)	(4.574.635.365,00)	**(22.875.227.022,00)**
18	AP Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(13.942.853.900,00)	-	(163.600.000,00)	(678.884.702,00)	(104.892.856,00)	(947.377.558,00)	(158.228.572,00)	(5.820.925.204,00)		(3.918.815.715,00)	(9.897.969.491,00)	**(4.992.261.967,00)**
19	AP Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(5.590.582.367,00)	(4.149.861.054,00)	(1.398.438.616,00)		(19.000.000,00)	(5.567.299.670,00)	(4.806.300,00)	(1.921.472.750,00)		(1.376.477.979,00)	(3.302.757.029,00)	**(7.855.125.008,00)**
20	AP Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(7.233.345.386,26)	(419.129.953,00)	(2.004.802.159,00)	(102.332.668,00)	(52.035.061,00)	(2.578.299.841,00)	(1.121.468.838,26)	(893.464.218,00)	(29.869.048,00)		(2.044.802.104,26)	**(7.766.843.123,00)**
21	AP Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga		(4.266.857,00)	(23.112.143,00)			(27.379.000,00)					-	**(27.379.000,00)**
22	AP Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(5.196.420.095,74)	(1.157.288.460,00)	(595.499.000,00)		(1.962.918.105,26)	(3.715.705.565,26)	(160.537.127,00)	(600.000.000,00)		(473.922.321,00)	(1.234.459.448,00)	**(7.677.666.213,00)**
23	AP Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	(25.473.000,00)					-					-	**(25.473.000,00)**

24	AP Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	(718.749.342,00)	(25.053.326,00)	(338.430.000,00)			(363.483.326,00)	(338.480.000,00)	(99.500.000,00)			(437.980.000,00)	**(644.252.668,00)**
25	AP Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	(648.078.332,00)	(42.625.000,00)				(42.625.000,00)					-	**(690.703.332,00)**
26	AP Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya		(6.660.000,00)				(6.660.000,00)					-	**(6.660.000,00)**
27	AP Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	(203.775.501,00)	(20.564.499,00)				(20.564.499,00)					-	**(224.340.000,00)**
28	AP Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	(184.323.333,00)	(24.910.000,00)				(24.910.000,00)					-	**(209.233.333,00)**
29	AP Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	(117.782.403,00)	(14.399.720,00)				(14.399.720,00)					-	**(132.182.123,00)**
30	AP Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	(380.465.715,00)					-					-	**(380.465.715,00)**
31	AP Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	(11.400.000,00)	(5.700.000,00)				(5.700.000,00)					-	**(17.100.000,00)**
32	AP Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang	(517.083,00)	(85.000,00)				(85.000,00)					-	**(602.083,00)**
33	AP Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Kayu	(5.235.360,00)	(2.287.680,00)				(2.287.680,00)					-	**(7.523.040,00)**
34	AP Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Pabrik Es	(15.836.251,00)	(1.156.750,00)				(1.156.750,00)					-	**(16.993.001,00)**
35	AP Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	(70.718.000,00)					-					-	**(70.718.000,00)**
36	AP Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	(641.667,00)	(550.000,00)				(550.000,00)					-	**(1.191.667,00)**
37	AP Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	(177.297.718,00)	(188.578.626,00)				(188.578.626,00)	(175.502.718,00)				(175.502.718,00)	**(190.373.626,00)**
38	AP Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(149.347.727,00)					-					-	**(149.347.727,00)**
39	AP Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain	(1.933.000,00)					-					-	**(1.933.000,00)**
40	AP Alat Ukur-Alat Kalibrasi	(15.150.000,00)					-					-	**(15.150.000,00)**
41	AP Alat Ukur-Universal Tester	(902.000,00)	(264.000,00)				(264.000,00)					-	**(1.166.000,00)**
42	AP Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	(338.334.267,00)	(12.731.666,00)				(12.731.666,00)					-	**(351.065.933,00)**
43	AP Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	(133.003.084,00)	(7.589.000,00)				(7.589.000,00)					-	**(140.592.084,00)**
44	AP Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	(238.530.159,00)	(137.500,00)				(137.500,00)					-	**(238.667.659,00)**
45	AP Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara	(21.175.001,00)	(18.150.000,00)				(18.150.000,00)					-	**(39.325.001,00)**
46	AP Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	(47.295.313,00)	(979.687,00)				(979.687,00)					-	**(48.275.000,00)**
47	AP Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	(15.908.125,00)	(4.181.250,00)				(4.181.250,00)					-	**(20.089.375,00)**
48	AP Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	(236.059.724,00)	(13.664.895,00)				(13.664.895,00)	(1.125.000,00)				(1.125.000,00)	**(248.599.619,00)**
49	AP Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	(401.455.238,00)	(1.145.000,00)			(2.910.000,00)	(4.055.000,00)					-	**(405.510.238,00)**
50	AP Alat Pengolahan-Alat Processing	(252.350.000,00)					-					-	**(252.350.000,00)**
51	AP Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	(496.895.205,00)	(4.800.000,00)				(4.800.000,00)					-	**(501.695.205,00)**
52	AP Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	(346.974.870,00)					-					-	**(346.974.870,00)**
53	AP Alat Kantor-Mesin Ketik	(158.229.600,00)					-					-	**(158.229.600,00)**
54	AP Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(74.039.250,00)	(1.878.750,00)				(1.878.750,00)					-	**(75.918.000,00)**
55	AP Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	(57.333.333,00)	(1.100.000,00)				(1.100.000,00)					-	**(58.433.333,00)**
56	AP Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(5.031.924.535,00)	(609.636.175,00)		(5.150.000,00)	(46.681.401,00)	(661.467.576,00)	(41.114.735,00)				(41.114.735,00)	**(5.652.277.376,00)**

57	AP Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(5.300.691.611,00)	(1.549.669.104,00)		(4.100.000,00)	(36.586.012,00)	(1.590.355.116,00)	(6.653.666,00)				(6.653.666,00)	**(6.884.393.061,00)**
58	AP Alat Rumah Tangga- Mebel	(19.666.246.333,67)	(1.658.095.875,88)			13.423.354,88	(1.644.672.521,00)	(1.125.000,00)	(2.000.000,00)			(3.125.000,00)	**(21.307.793.854,67)**
59	AP Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(73.720.000,00)					-	(300.000,00)				(300.000,00)	**(73.420.000,00)**
60	AP Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(432.246.127,00)	(75.352.675,00)				(75.352.675,00)					-	**(507.598.802,00)**
61	AP Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(5.432.348.844,00)	(434.388.765,00)			(20.778.234,00)	(455.166.999,00)	(15.144.934,00)	(3.150.000,00)			(18.294.934,00)	**(5.869.220.909,00)**
62	AP Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(1.056.168.095,00)	(129.156.444,00)				(129.156.444,00)					-	**(1.185.324.539,00)**
63	AP Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(10.457.185.560,00)	(652.762.695,00)			(27.388.333,00)	(680.151.028,00)	(28.298.333,00)				(28.298.333,00)	**(11.109.038.255,00)**
64	AP Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(474.530.003,00)	(22.521.666,00)				(22.521.666,00)					-	**(497.051.669,00)**
65	AP Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(3.910.370.984,00)	(100.837.010,00)			(3.533.334,00)	(104.370.344,00)	(3.533.334,00)				(3.533.334,00)	**(4.011.207.994,00)**
66	AP Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(161.266.671,00)	(16.861.000,00)			-	(16.861.000,00)					-	**(178.127.671,00)**
67	AP Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(615.314.307,00)	(44.729.767,00)				(44.729.767,00)					-	**(660.044.074,00)**
68	AP Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(277.991.022,00)	(13.199.998,00)				(13.199.998,00)					-	**(291.191.020,00)**
69	AP Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	(25.890.000,00)					-					-	**(25.890.000,00)**
70	AP Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(147.205.012,00)	(21.318.750,00)				(21.318.750,00)					-	**(168.523.762,00)**
71	AP Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(1.187.201.046,00)	(70.211.168,00)				(70.211.168,00)					-	**(1.257.412.214,00)**
72	AP Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(3.313.947.639,00)	(245.897.461,00)				(245.897.461,00)	(5.640.000,00)			(4.100.000,00)	(9.740.000,00)	**(3.550.105.100,00)**
73	AP Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(190.885.761,00)	(326.469.386,00)			(958.800,00)	(327.428.186,00)	(246.856.261,00)				(246.856.261,00)	**(271.457.686,00)**
74	AP Alat Studio-Peralatan Cetak	(945.834,00)	(5.350.000,00)				(5.350.000,00)					-	**(6.295.834,00)**
75	AP Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	(15.900.000,00)	(6.050.000,00)				(6.050.000,00)					-	**(21.950.000,00)**
76	AP Alat Studio-Alat Studio Lainnya	(109.611.900,00)	(6.000.000,00)				(6.000.000,00)					-	**(115.611.900,00)**
77	AP Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(5.311.973.721,00)	(198.142.443,00)			(10.999.944,00)	(209.142.387,00)	(10.999.944,00)			(79.900.000,00)	(90.899.944,00)	**(5.430.216.164,00)**
78	AP Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	(17.600.000,00)					-					-	**(17.600.000,00)**
79	AP Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	(40.320.000,00)					-					-	**(40.320.000,00)**
80	AP Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	(6.750.000,00)	(2.250.000,00)				(2.250.000,00)					-	**(9.000.000,00)**
81	AP Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	(43.336.000,00)	(981.667,00)				(981.667,00)					-	**(44.317.667,00)**
82	AP Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	(10.000.000,00)	(8.000.000,00)				(8.000.000,00)					-	**(18.000.000,00)**
83	AP Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar MF/MW	(3.416.668,00)	(1.000.000,00)				(1.000.000,00)					-	**(4.416.668,00)**
84	AP Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar UHF	(2.425.000,00)	(300.000,00)				(300.000,00)					-	**(2.725.000,00)**
85	AP Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar SHF	(1.466.667,00)	(800.000,00)				(800.000,00)					-	**(2.266.667,00)**
86	AP Peralatan Pemancar- Peralatan Antena MF/MW	(6.091.667,00)	(1.000.000,00)				(1.000.000,00)					-	**(7.091.667,00)**
87	AP Peralatan Pemancar- Peralatan Antena UHF	(666.667,00)	(100.000,00)				(100.000,00)					-	**(766.667,00)**
88	AP Peralatan Pemancar- Peralatan Antena SHF/Parabola	(70.628.416,00)	(8.473.501,00)				(8.473.501,00)					-	**(79.101.917,00)**
89	AP Peralatan Pemancar- Switcher/Menara Antena	(997.500,00)	(5.985.000,00)				(5.985.000,00)					-	**(6.982.500,00)**

90	AP Peralatan Pemancar- Humidity Control	(21.266.667,00)	(7.975.000,00)				(7.975.000,00)					-	**(29.241.667,00)**
91	AP Peralatan Pemancar- Sumber Tenaga	(40.033.333,00)	(35.800.000,00)				(35.800.000,00)					-	**(75.833.333,00)**
92	AP Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(5.102.981.057,00)	(387.978.890,00)				(387.978.890,00)	(142.764.167,00)		(1.560.000,00)		(144.324.167,00)	**(5.346.635.780,00)**
93	AP Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	(895.832.846,00)	(70.012.254,00)				(70.012.254,00)					-	**(965.845.100,00)**
94	AP Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	(185.824.700,00)	(13.030.000,00)				(13.030.000,00)	(12.880.000,00)				(12.880.000,00)	**(185.974.700,00)**
95	AP Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	(1.726.610.028,00)	(502.705.194,00)			(180.000,00)	(502.885.194,00)					-	**(2.229.495.222,00)**
96	AP Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	(1.129.202.983,00)	(34.763.360,00)			(140.000,00)	(34.903.360,00)	(140.000,00)				(140.000,00)	**(1.163.966.343,00)**
97	AP Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	(201.576.190,00)	(6.459.500,00)				(6.459.500,00)					-	**(208.035.690,00)**
98	AP Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	(245.266.967,00)	(200.000,00)				(200.000,00)					-	**(245.466.967,00)**
99	AP Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	(399.240.166,00)	(54.259.667,00)				(54.259.667,00)	(1.512.000,00)		(1.560.000,00)		(3.072.000,00)	**(450.427.833,00)**
100	AP Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	(452.331.933,00)	(36.348.443,00)				(36.348.443,00)					-	**(488.680.376,00)**
101	AP Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	(79.964.090,00)	(14.402.280,00)				(14.402.280,00)				(20.499,00)	(20.499,00)	**(94.345.871,00)**
102	AP Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	(102.863.000,00)	-				-					-	**(102.863.000,00)**
103	AP Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	(165.000.000,00)	-				-					-	**(165.000.000,00)**
104	AP Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	(520.918.400,00)	-				-					-	**(520.918.400,00)**
105	AP Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah		(137.592.115,00)				(137.592.115,00)					-	**(137.592.115,00)**
106	AP Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir	(2.675.000,00)	-				-					-	**(2.675.000,00)**
107	AP Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	(39.000.000,00)	-				-					-	**(39.000.000,00)**
108	AP Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	(329.650.814,00)	(159.892.255,00)			(728.270,00)	(160.620.525,00)					-	**(490.271.339,00)**
109	AP Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Olahraga	(54.503.333,00)	(4.440.000,00)				(4.440.000,00)					-	**(58.943.333,00)**
110	AP Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Umum Lainnya	(20.569.078.206,00)	(7.304.235.718,00)				(7.304.235.718,00)	(628.229.071,00)				(628.229.071,00)	**(27.245.084.853,00)**
111	AP Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	(1.166.667,00)	(1.000.000,00)				(1.000.000,00)					-	**(2.166.667,00)**
112	AP Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Batuan/Geologi	(8.568.900,00)	-				-					-	**(8.568.900,00)**
113	AP Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	(52.619.996,00)	(41.174.995,00)				(41.174.995,00)	(1.575.000,00)				(1.575.000,00)	**(92.219.991,00)**
114	AP Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	(78.675.000,00)	-				-					-	**(78.675.000,00)**
115	AP Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	(1.936.000,00)	-				-					-	**(1.936.000,00)**
116	AP Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	(13.860.000,00)	-				-					-	**(13.860.000,00)**
117	AP Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Umum	(2.314.046.166,00)	(118.822.867,00)			(655.300.000,00)	(774.122.867,00)	(728.153.000,00)				(728.153.000,00)	**(2.360.016.033,00)**
118	AP Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mikrobiologi	(128.426.000,00)	(240.000,00)				(240.000,00)					-	**(128.666.000,00)**
119	AP Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Kimia	(347.359.500,00)	-				-					-	**(347.359.500,00)**
120	AP Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Patologi	(196.583.000,00)	-				-					-	**(196.583.000,00)**
121	AP Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Immunologi	(37.596.000,00)	-				-					-	**(37.596.000,00)**
122	AP Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hematologi	(16.667,00)	(200.000,00)				(200.000,00)					-	**(216.667,00)**

123	AP Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Film	(1.503.668,00)	(1.606.283,00)				(1.606.283,00)					-	**(3.109.951,00)**
124	AP Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Farmasi	(862.766,00)	(796.400,00)				(796.400,00)					-	**(1.659.166,00)**
125	AP Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Fisika	(34.470.160,00)	(17.570.400,00)			(169.170,00)	(17.739.570,00)	(169.170,00)				(169.170,00)	**(52.040.560,00)**
126	AP Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pembuatan Pola	(34.500.000,00)	-				-					-	**(34.500.000,00)**
127	AP Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik	(4.500.000,00)	-				-					-	**(4.500.000,00)**
128	AP Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	(2.100.000,00)	-				-					-	**(2.100.000,00)**
129	AP Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pertanian	(110.448.995,00)	(5.568.333,00)				(5.568.333,00)	(2.910.000,00)				(2.910.000,00)	**(113.107.328,00)**
130	AP Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Biologi Perairan	(7.350.000,00)	-				-					-	**(7.350.000,00)**
131	AP Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Biologi	(70.499.900,00)	-			(1.575.000,00)	(1.575.000,00)	-				-	**(72.074.900,00)**
132	AP Unit Alat Laboratorium- Laboratorium Kearsipan	(8.377.450,00)	-				-					-	**(8.377.450,00)**
133	AP Unit Alat Laboratorium- Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	(241.705.000,00)	(53.900.000,00)				(53.900.000,00)					-	**(295.605.000,00)**
134	AP Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Lain	(97.968.833,00)	(14.944.000,00)				(14.944.000,00)					-	**(112.912.833,00)**
135	AP Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment	(6.095.833,00)	(1.045.000,00)				(1.045.000,00)					-	**(7.140.833,00)**
136	AP Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	(181.750.350,00)	(545.000,00)				(545.000,00)					-	**(182.295.350,00)**
137	AP Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	(219.924.800,00)	(41.667,00)				(41.667,00)					-	**(219.966.467,00)**
138	AP Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	(279.396.771,00)	(6.691.180,00)				(6.691.180,00)					-	**(286.087.951,00)**
139	AP Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	(608.147.921,00)	(3.787.638,00)				(3.787.638,00)					-	**(611.935.559,00)**
140	AP Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	(178.442.128,00)	(9.882.270,00)				(9.882.270,00)					-	**(188.324.398,00)**
141	AP Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	(54.078.000,00)	(645.000,00)				(645.000,00)					-	**(54.723.000,00)**
142	AP Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	(23.399.250,00)	(10.000,00)				(10.000,00)					-	**(23.409.250,00)**
143	AP Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	(73.175.200,00)	(1.517.875,00)				(1.517.875,00)					-	**(74.693.075,00)**
144	AP Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	(212.206.267,00)	(8.072.750,00)				(8.072.750,00)					-	**(220.279.017,00)**
145	AP Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	(1.264.425.380,00)	(10.483.183,00)			(43.740,00)	(10.526.923,00)	(43.740,00)				(43.740,00)	**(1.274.908.563,00)**
146	AP Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	(1.665.979.861,00)	(20.869.708,00)				(20.869.708,00)					-	**(1.686.849.569,00)**
147	AP Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	(53.364.364,00)	(9.887.135,00)				(9.887.135,00)					-	**(63.251.499,00)**
148	AP Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan	(8.404.199.193,00)	(791.680.834,00)				(791.680.834,00)	(1.237.003.297,00)				(1.237.003.297,00)	**(7.958.876.730,00)**
149	AP Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	(43.814.997,00)	(27.580.000,00)				(27.580.000,00)					-	**(71.394.997,00)**
150	AP Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting and Scientific Electronic	(116.666,00)	(66.666,00)				(66.666,00)					-	**(183.332,00)**
151	AP Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display	(2.030.329,00)	(257.332,00)			(2,00)	(257.334,00)	-				-	**(2.287.663,00)**
152	AP Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja	(1.804.880.125,00)	(365.307.273,00)				(365.307.273,00)					-	**(2.170.187.398,00)**
153	AP Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	(47.756.643,00)	(5.010.954,00)				(5.010.954,00)	(1,00)				(1,00)	**(52.767.596,00)**
154	AP Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	(675.664.362,00)	(101.812.438,00)				(101.812.438,00)					-	**(777.476.800,00)**
155	AP Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	(1.550.000,00)	-				-					-	**(1.550.000,00)**

156	AP Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	(568.611.990,00)	-				-					-	**(568.611.990,00)**
157	AP Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	(395.828.095,00)	(1.167.841.430,00)			(27.930.000,00)	(1.195.771.430,00)	(27.930.000,00)				(27.930.000,00)	**(1.563.669.525,00)**
158	AP Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System	(588.717.818,00)	(64.709.430,00)			(153,00)	(64.709.583,00)					-	**(653.427.401,00)**
159	AP Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum	(1.083.887,00)	(386.666,00)			(1,00)	(386.667,00)					-	**(1.470.554,00)**
160	AP Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	(8.706.500,00)	(388.889,00)		(2.000.000,00)	(8.219.013,00)	(10.607.902,00)					-	**(19.314.402,00)**
161	AP Senjata Kepolisian-Alsus Fotografi Kepolisian		(1.402.666,00)			-	(1.402.666,00)	(3.974.222,00)				(3.974.222,00)	**2.571.556,00**
162	AP Komputer Unit-Komputer Jaringan	(664.718.580,00)	(90.769.584,00)				(90.769.584,00)	(31,00)				(31,00)	**(755.488.133,00)**
163	AP Komputer Unit-Personal Computer	(22.680.901.539,00)	(4.418.254.074,00)			(115.717.500,00)	(4.533.971.574,00)	(96.264.133,00)	(9.583.333,00)			(105.847.466,00)	**(27.109.025.647,00)**
164	AP Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	-	-				-					-	-
165	AP Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe	(459.400.462,00)	(23.056.867,00)				(23.056.867,00)					-	**(482.457.329,00)**
166	AP Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer	(715.845.245,00)	(61.781.428,00)			(5.600.000,00)	(67.381.428,00)				(8.516.667,00)	(8.516.667,00)	**(774.710.006,00)**
167	AP Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	(6.816.356.388,00)	(1.321.780.554,00)		(8.516.667,00)	(13.018.648,00)	(1.343.315.869,00)	(20.485.363,00)				(20.485.363,00)	**(8.139.186.894,00)**
168	AP Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	(2.425.215.690,00)	(92.458.163,00)			(350.000,00)	(92.808.163,00)	(10.482.328,00)				(10.482.328,00)	**(2.507.541.525,00)**
169	AP Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya	(1.500.000,00)	-				-					-	**(1.500.000,00)**
170	AP Alat Pelindung-Baju Pengaman	(22.072.000,00)	-				-					-	**(22.072.000,00)**
171	AP Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	(355.877.773,00)	(15.566.677,00)	(5.666.667,00)		13.200.445,00	(8.032.899,00)				(2.000.000,00)	(2.000.000,00)	**(361.910.672,00)**
172	AP Alat SAR-Alat Penolong	(38.760.000,00)	(927.834,00)				(927.834,00)	(1.272.166,00)			(5.900.000,00)	(7.172.166,00)	**(32.515.668,00)**
173	AP Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	(74.364.077,00)	(68.134.165,00)				(68.134.165,00)					-	**(142.498.242,00)**
174	AP Alat Kerja Penerbangan- Alat Ukur Peralatan Faslektrik	(2.166.667,00)	(2.000.000,00)				(2.000.000,00)					-	**(4.166.667,00)**
175	AP Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	(2.509.907.282,00)	(125.015.337,00)				(125.015.337,00)	(1,00)				(1,00)	**(2.634.922.618,00)**
176	AP Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		(56.561.436,00)			(14.175.244,00)	(70.736.680,00)					-	**(70.736.680,00)**
177	AP Peralatan Olahraga- Peralatan Permainan	(7.428.412,00)	(11.778.636,00)				(11.778.636,00)					-	**(19.207.048,00)**
178	AP Peralatan Olahraga- Peralatan Senam	(7.644.583,00)	(6.953.333,00)				(6.953.333,00)					-	**(14.597.916,00)**
179	AP Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Lainnya	(10.304.166,00)	(5.050.000,00)				(5.050.000,00)					-	**(15.354.166,00)**
180	AP Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(41.649.032.512,00)	(6.821.365.328,00)			(4.012.986,00)	(6.825.378.314,00)	(1.888.952,00)	(1.610.944.280,00)			(1.612.833.232,00)	**(46.861.577.594,00)**
181	AP Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang	(2.081.586.800,00)	(357.936.895,00)			(566.684.144,00)	(924.621.039,00)	(212.024.223,00)			(14.649.431,00)	(226.673.654,00)	**(2.779.534.185,00)**
182	AP Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Instalasi	(395.859.012,00)	(49.142.421,00)			(12.089.034,00)	(61.231.455,00)	(2.549.152,00)				(2.549.152,00)	**(454.541.315,00)**
183	AP Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Laboratorium	(11.936.564,00)	(90.652.398,00)			(6.716.384.749,00)	(6.807.037.147,00)					-	**(6.818.973.711,00)**
184	AP Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan	(20.259.914.046,00)	(2.695.388.712,00)	(456.069.543,00)		(2.458.489.573,00)	(5.609.947.828,00)	(4.492.062.498,00)	(169.502.461,00)			(4.661.564.959,00)	**(21.208.296.915,00)**
185	AP Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(6.952.284.368,00)	(1.464.766.291,00)	-		(2,00)	(1.464.766.293,00)	(1,00)				(1,00)	**(8.417.050.660,00)**
186	AP Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(622.647.317,00)	(93.844.997,00)			(9,00)	(93.845.006,00)	(6,00)				(6,00)	**(716.492.317,00)**
187	AP Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(67.430.012.025,00)	7.513.576.228,00				7.513.576.228,00	7.905.848.311,00				7.905.848.311,00	**(67.822.284.108,00)**
188	AP Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga	(1.784.170.085,00)	(190.073.500,00)	(247.938.301,00)			(438.011.801,00)		(412.585.809,00)			(412.585.809,00)	**(1.809.596.077,00)**

189	AP Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	(6.472.409.311,00)	(3.182.491.027,00)			(883.569.857,00)	(4.066.060.884,00)	(783.340.339,00)	(701.864.065,00)			(1.485.204.404,00)	**(9.053.265.791,00)**
190	AP Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(432.557.039,00)	(33.560.476,00)			(1,00)	(33.560.477,00)	(160.194.510,00)	(27.167.490,00)			(187.362.000,00)	**(278.755.516,00)**
191	AP Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool	(390.195.874,00)	(55.011.890,00)			(12.416.349,00)	(67.428.239,00)	(2,00)				(2,00)	**(457.624.111,00)**
192	AP Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Perpustakaan	(50.182.469,00)	(33.687.496,00)				(33.687.496,00)	(72,00)				(72,00)	**(83.869.893,00)**
193	AP Gedung Tempat Kerja- Bangunan Pengujian Kelaikan	(24.250.280,00)	(4.343.334,00)				(4.343.334,00)	(2,00)				(2,00)	**(28.593.612,00)**
194	AP Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peternakan/Perikanan	(64.880.179,00)	(16.677.527,00)		(156.116.000,00)	(39.990.653,00)	(212.784.180,00)	(132.958.793,00)				(132.958.793,00)	**(144.705.566,00)**
195	AP Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(2.881.943.299,00)	(189.816.460,00)				(189.816.460,00)	(7.334.835,00)			(164.103.292,00)	(171.438.127,00)	**(2.900.321.632,00)**
196	AP Gedung Tempat Kerja- Bangunan Fasilitas Umum		(317.674.476,00)			(1.569.355.809,00)	(1.887.030.285,00)					-	**(1.887.030.285,00)**
197	AP Gedung Tempat Kerja- Taman	(305.883.496,00)	(216.885.989,00)			(30.549,00)	(216.916.538,00)					-	**(522.800.034,00)**
198	AP Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(839.988.970,00)	(99.507.162,00)				(99.507.162,00)	(58.708.801,00)				(58.708.801,00)	**(880.787.331,00)**
199	AP Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	(33.350.000,00)	(2.760.000,00)				(2.760.000,00)					-	**(36.110.000,00)**
200	AP Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	(5.691.993.209,00)	(1.001.851.081,00)				(1.001.851.081,00)					-	**(6.693.844.290,00)**
201	AP Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	(1.270.881.868,00)	(187.116.159,00)			(161.351.940,00)	(348.468.099,00)	(523.813.714,00)			FALSE	(523.813.714,00)	**(1.095.536.253,00)**
202	AP Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun		(255.863.200,00)				(255.863.200,00)					-	**(255.863.200,00)**
203	AP Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi		-			(3,00)	(3,00)	-				-	**(3,00)**
204	AP Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	(1.500.812.305,00)	(431.544.364,00)			(274.269.330,00)	(705.813.694,00)					-	**(2.206.625.999,00)**
205	AP Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	(4.817.363.912,00)	(1.091.839.469,00)	(226.483.368,00)			(1.318.322.837,00)					-	**(6.135.686.749,00)**
206	AP Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	(1.280.244.440,00)	(298.299.700,00)			(5,00)	(298.299.705,00)					-	**(1.578.544.145,00)**
207	AP Tugu Tanda Batas-Pagar	(458.441.141,00)	(303.525.689,00)			60.514.109,00	(243.011.580,00)					-	**(701.452.721,00)**
208	AP Jalan-Jalan Kabupaten	(887.506.613.547,18)	(70.942.939.964,00)	(25.671.863.534,46)			(96.614.803.498,46)					-	**(984.121.417.045,64)**
209	AP Jalan-Jalan Desa	(99.862.215.865,50)	(18.150.500.193,00)				(18.150.500.193,00)					-	**(118.012.716.058,50)**
210	AP Jalan-Jalan Tol	(87.308.029,00)	(41.907.854,00)				(41.907.854,00)					-	**(129.215.883,00)**
211	AP Jalan-Jalan Kereta Api	(90.841.097,00)	(41.926.660,00)				(41.926.660,00)					-	**(132.767.757,00)**
212	AP Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang	(91.036.593,00)	(42.016.889,00)				(42.016.889,00)					-	**(133.053.482,00)**
213	AP Jalan-Jalan Khusus	(122.679.927.005,51)	(11.609.932.767,00)				(11.609.932.767,00)					-	**(134.289.859.772,51)**
214	AP Jalan-Jalan Lainnya	(6.274.973.771,00)	-				-					-	**(6.274.973.771,00)**
215	AP Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	(50.957.307.500,00)	(9.432.474.029,00)			(25.788.389,00)	(9.458.262.418,00)					-	**(60.415.569.918,00)**
216	AP Jembatan-Jembatan Penyeberangan	(53.698.041,00)	(12.019.700,00)				(12.019.700,00)	(2,00)				(2,00)	**(65.717.739,00)**
217	AP Bangunan Air Irigasi- Bangunan Waduk Irigasi	(1.043.369.966,00)	(217.703.376,00)			(3,00)	(217.703.379,00)					-	**(1.261.073.345,00)**
218	AP Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi	(19.327.958.654,00)	(3.525.605.702,00)	(13.268.217,00)		(1.164.076,00)	(3.540.037.995,00)					-	**(22.867.996.649,00)**
219	AP Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi	(4.328.682.312,00)	(961.242.384,00)			(2,00)	(961.242.386,00)	(2,00)				(2,00)	**(5.289.924.696,00)**
220	AP Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembuang Irigasi	(377.485.190,00)	(46.699.199,00)				(46.699.199,00)					-	**(424.184.389,00)**
221	AP Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi	(62.296.370,00)	(7.706.764,00)			(2,00)	(7.706.766,00)					-	**(70.003.136,00)**

222	AP Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pelengkap Irigasi	(163.496.750,00)	(53.401.054,00)			(1,00)	(53.401.055,00)					-	**(216.897.805,00)**
223	AP Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut	(232.862.520,00)	(43.229.656,00)			(2,00)	(43.229.658,00)					-	**(276.092.178,00)**
224	AP Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut	(103.639.212,00)	(11.343.766,00)			(1,00)	(11.343.767,00)					-	**(114.982.979,00)**
225	AP Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut	(57.689.744,00)	(89.295.310,00)				(89.295.310,00)	(60.445.295,00)	(66.651.086,00)			(127.096.381,00)	**(19.888.673,00)**
226	AP Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	(1.686.299.288,00)	(262.419.339,00)				(262.419.339,00)	(6,00)				(6,00)	**(1.948.718.621,00)**
227	AP Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	(3.982.726.329,00)	(612.227.093,00)			-	(612.227.093,00)	(2,00)				(2,00)	**(4.594.953.420,00)**
228	AP Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	(1.454.747.813,00)	(139.789.744,00)			(2,00)	(139.789.746,00)	-				-	**(1.594.537.559,00)**
229	AP Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	(50.015.917.246,00)	(7.594.026.420,00)				(7.594.026.420,00)	(18.724.171,00)				(18.724.171,00)	**(57.591.219.495,00)**
230	AP Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	(3.109.365.953,00)	(452.886.753,00)				(452.886.753,00)					-	**(3.562.252.706,00)**
231	AP Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	(631.971.733,00)	(118.494.700,00)				(118.494.700,00)					-	**(750.466.433,00)**
232	AP Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	(4.604.362.051,00)	(669.251.002,00)				(669.251.002,00)	(1,00)				(1,00)	**(5.273.613.052,00)**
233	AP Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air		(27.489.342,00)				(27.489.342,00)					-	**(27.489.342,00)**
234	AP Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	(1.104.828.991,00)	(113.042.951,00)				(113.042.951,00)	(3,00)				(3,00)	**(1.217.871.939,00)**
235	AP Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	(31.053.665,00)	(24.842.932,00)				(24.842.932,00)					-	**(55.896.597,00)**
236	AP Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	(2.620.723.901,00)	(442.862.402,00)				(442.862.402,00)	(5,00)				(5,00)	**(3.063.586.298,00)**
237	AP Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa Air Kotor	(400.736.040,00)	(146.131.369,00)				(146.131.369,00)					-	**(546.867.409,00)**
238	AP Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembuang Air Kotor	(270.613.924,00)	(110.771.930,00)			(1,00)	(110.771.931,00)					-	**(381.385.855,00)**
239	AP Bangunan Air Kotor- Bangunan Pelengkap Air Kotor	(230.786.842,00)	(152.568.314,00)				(152.568.314,00)					-	**(383.355.156,00)**
240	AP Bangunan Air Kotor- Bangunan Air Kotor Lainnya		(94.196.340,00)			(66.491.534,00)	(160.687.874,00)					-	**(160.687.874,00)**
241	AP Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	(32.122.969,00)	(27.567.980,00)				(27.567.980,00)	(12.670.781,00)				(12.670.781,00)	**(47.020.168,00)**
245	AP Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	(2.440.480.531,00)	(312.722.971,00)				(312.722.971,00)	(6,00)				(6,00)	**(2.753.203.496,00)**
246	AP Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	(1.446.334.983,00)	(681.055.549,00)	(141.939.076,00)		(1,00)	(822.994.626,00)					-	**(2.269.329.609,00)**
247	AP Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Domestik	(494.482.948,00)	(169.165.554,00)		(37.286.154,00)	(94.309.293,00)	(300.761.001,00)					-	**(795.243.949,00)**
248	AP Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	(267.077.840,00)	(531.823.735,00)			(4.026.594.483,00)	(4.558.418.218,00)					-	**(4.825.496.058,00)**
249	AP Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah		-				-					-	**-**
250	AP Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Induk	(10.252.916,00)	(3.325.269,00)			(1,00)	(3.325.270,00)					-	**(13.578.186,00)**
251	AP Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	(1.977.898.540,00)	(302.765.756,00)				(302.765.756,00)					-	**(2.280.664.296,00)**
252	AP Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(37.537.709,00)	(5.346.250,00)	-			(5.346.250,00)					-	**(42.883.959,00)**
253	AP Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya		(10.448.178,00)	(33.085.897,00)			(43.534.075,00)					-	**(43.534.075,00)**
254	AP Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di atas Tanah	(86.525.000,00)	(18.268.084,00)			(5.601.063,00)	(23.869.147,00)					-	**(110.394.147,00)**
		(1.662.892.989.426,86)	**(358.295.721.335,88)**	**(39.909.619.439,46)**	**(994.386.191,00)**	**(46.690.276.555,38)**	**(445.890.003.521,72)**	**(216.035.719.899,26)**	**(12.607.810.699,00)**	**(32.989.048,00)**	**(7.644.875.904,00)**	**(236.321.395.550,26)**	**(1.872.461.597.398,32)**

5.3.1.4 Aset Lainnya

Saldo aset lainnya pada Neraca Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.364.079.300,92 yang terdiri dari Aset Tidak Berwujud tahun 2021 sebesar Rp1.271.615.105,00 mengalami penambahan di Tahun 2022 sebesar Rp9.080.000,00 sehingga saldo aset tak berwujud sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.280.695.105,00 dengan amortisasi penyusutan sebesar (Rp530.448.435,08) dan saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.251.361.831,00 mengalami pengurangan sebesar Rp1.825.132.821,00 yang berasal dari reklas aset rusak berat berupa aset peralatan dan mesin yang kembali ke Asetnya berupa Kendaran bermotor Angkutan Barang dan Kendaraan bermotor Roda Dua, serta Akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar (Rp9.194.637.594,00). Selanjutnya terdapat penambahan sebesar Rp2.557.108.394,00 yang diatur pada PMK 218/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Dalam Bentuk Non Tunai Tahun 2022. Berdasarkan dasar Surat Kemendagri Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tahun 15 Maret 2023, maka dilakukan Koreksi Atas Setara Kas ke Aset Lainnya sehingga saldo aset lainnya per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp16.364.079.300,92 terinci pada Tabel 5.3.24 berikut.

Tabel 5.3.24 Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-Lain dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2022

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
2	Aset tidak berwujud	1.280.695.105,00	1.271.615.105,00
3	Akumulasi penyusutan aset tidak berwujud	(530.448.435,08)	(329.866.080,75)
4	Aset lain-lain	22.251.361.831,00	24.076.494.652,00
5	Akumulasi penyusutan aset lainnya	(9.194.637.594,00)	(10.590.489.915,00)
6	Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF)	2.557.108.394,00	0,00
	Jumlah	**16.364.079.300,92**	**14.427.753.761,25**

5.3.1.4.1 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.271.615.105,00 dan pada Desember Tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp9.080.000,00 berupa belanja *software* pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Tiyuh. Dengan demikian Saldo Aset - Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.280.695.105,00. Akumulasi amortisasi per 31 Desember sebesar (Rp530.448.435,08), sehingga saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp750.246.669,92 dengan rincian Tabel 5.3.25 sebagai berikut.

Tabel 5.3.25 Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2022

Saldo Aset Tidak Berwujud pada tahun 2022 sebesar Rp750.246.669,92. Saldo tersebut berasal dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp941.749.024,25 dengan amortisasi sebesar (Rp329.866.080,75). Pada Tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp9.080.000,00 dengan penambahan amortisasi sebesar (Rp200.582.354,33) pada objek aset tersebut. *Rincian dapat dilihat pada lampiran 15.*

Tabel 5.3.25 Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2022

No	OPD	31-Des-21	Penamhan 2022	31-Des-22	Akumulasi Amortisasi	31 Desember 2022
1	Dinas Pendidikan	164.829.905,00	0,00	164.829.905,00	(71.050.395,10)	93.779.509,90
2	SDN 4 Pulung Kencana	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	(2.343.333,33)	1.456.666,67
3	SDN 2 Margodadi	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	(2.343.333,33)	1.456.666,67
4	SDN 2 Daya Sakti	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	(2.343.333,33)	1.456.666,67
5	SDN 1 Margo Mulyo	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	(2.343.333,33)	1.456.666,67
6	SDN 1 Karta Sari	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	(2.343.333,33)	1.456.666,67
7	SDN 1 Sumber Jaya	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	(2.343.333,33)	1.456.666,67
8	SDN 1 Pagar Jaya	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	(2.343.333,33)	1.456.666,67
9	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	580.285.200,00	0,00	580.285.200,00	(116.057.040,00)	464.228.160,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Tiyuh	0,00	9.080.000,00	9.080.000,00	(1.059.333,33)	8.020.666,67
11	Bagian Umum Sekretariat Daerah	49.900.000,00	0,00	49.900.000,00	(10.811.666,67)	39.088.333,33
12	Sekretariat DPRD	176.000.000,00	0,00	176.000.000,00	(41.066.666,67)	134.933.333,33
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	0,00

14	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	204.000.000,00	0,00	204.000.000,00	(204.000.000,00)	0,00
15	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	0,00
	Jumlah	**1.271.615.105,00**	**9.080.000,00**	**1.280.695.105,00**	**(530.448.435,08)**	**750.246.669,92**

5.3.1.4.2 Aset Lain-Lain

Merupakan reklasifikasi aset dari Aset Tetap yang sudah tidak memenuhi kriteria sebesar Rp22.251.361.831,00 Aset lain-lain. Nilai tersebut dapat dijelaskan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Aset yang akan dihibahkan

   Pada neraca per 31 Desember 2022, terdapat saldo aset yang akan dihibahkan sebesar Rp8.249.625.453,00.

b. Aset Lain-lain

   Pada neraca per 31 Desember 2022, terdapat saldo aset lain-lain sebesar Rp145.686.933,00.

c. Aset Rusak Berat

   Pada neraca per 31 Desember 2022, terdapat saldo aset rusak besar sebesar Rp10.860.097.185,00.

d. Aset Tidak Diketahui Keberadaanya

   Pada neraca per 31 Desember 2022, terdapat saldo aset rusak besar sebesar Rp148.775.000,00.

e. Aset Hilang

   Pada neraca per 31 Desember 2022, terdapat saldo aset hilang sebesar Rp2.317.050.260,00.

f. Software yang tidak terpakai

   Pada neraca per 31 Desember 2022, terdapat saldo software yang tidak terpakai sebesar Rp530.127.000,00.

Rincian masing-masing Aset Lainnya dapat dilihat pada lampiran 16.

Selanjutnya bedasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023, maka dilakukan koreksi Atas

Setara Kas ke Aset Lainnya, sehingga saldo aset lainnya per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp16.364.079.300,92

Saldo aset lain-lain per 1 Januari 2022 sebesar Rp24.076.494.652,00. Mengalami pengurangan dalam tahun 2022 sebesar Rp1.825.132.821,00;

Rincian aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat per 31 Desember 2022 senilai Rp22.251.361.831,00 pada Tabel 5.3.26 terdiri atas:

Tabel 5.3.26 Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2022

No.	Uraian	2021	2022
1	Aset yang akan dihibahkan	8.249.625.453,00	8.249.625.453,00
2	Aset Lain-lain	145.686.933,00	145.686.933,00
3	Aset Rusak Berat	12.685.230.006,00	10.860.097.185,00
4	Aset Tidak Diketahui Keberadaannya	148.775.000,00	148.775.000,00
5	Aset Hilang	2.317.050.260,00	2.317.050.260,00
6	Software yang tidak terpakai	530.127.000,00	530.127.000,00
7	Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF)	0,00	2.557.108.394,00
		24.076.494.652,00	**22.251.361.831,00**
	Penyusutan	**(10.590.489.915,00)**	**(9.194.637.594,00)**
	Aset Lain Nett	**13.486.004.737,00**	**13.056.724.237,00**

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban diakui apabila pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Sedangkan kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Saldo kewajiban Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp144.135.118.259,14 dengan penjelasan sebagai berikut:

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp81.431.037.820,81 dengan rincian pada Tabel 5.3.27 berikut.

Tabel 5.3.27 Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	8.703.210.028,00	584.165.788,00
2.	Utang Bunga	139.075.944,31	8.896.715.016,93
3.	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	50.473.166.998,67	39.246.539.200,43
4.	Pendapatan Diterima Di Muka	91.851.000,00	119.968.000,00
5.	Utang Belanja	20.835.684.087,13	35.029.843.823,55
6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.188.049.762,70	10.001.000,70
	Jumlah	**81.431.037.820,81**	**83.887.232.829,61**

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan saldo Kewajiban pembayaran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada Pihak Ketiga yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2022.

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.703.210.028,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.28 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

No.	Jenis Utang PFK	2022	2021
1.	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	177.095.648,00	0,00
2.	Pajak Penghasilan Ps 21	2.110.430.429,00	7.020.304,00
3.	Pajak Penghasilan Ps 22	20.403.483,00	27.273,00
4.	Pajak Penghasilan Ps 23	45.966.373,00	233.811,00
5.	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	874.063.711,00	152.238.100,00
6.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	5.475.250.384,00	424.646.300,00
	Jumlah	**8.703.210.028,00**	**584.165.788,00**

Rincian umtuk masing satuan kerja yang memiliki saldo utang PFK sampai dengan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada lampiran 17.

5.3.2.1.2 Utang Bunga

Utang bunga merupakan saldo kewajiban pembayaran utang bunga Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur, Persero dan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Saldo utang bunga per 31 Desember 2022 sebesar Rp139.075.944,31. Dengan rincian sebagai berikut :

a. Utang bunga PT. Sarana Multi Infrastruktur, persero pembangunan tiga ruas jalan yang akan jatuh tempo pada Tanggal 23 Maret Tahun 2023 sebesar Rp33.623.732,24.
b. Utang bunga PT. Sarana Multi Infrastruktur, persero pembangunan Pasar Pulung yang tempo pada Tanggal 23 Maret Tahun 2023 sebesar Rp60.037.305,35,
c. Utang Bunga Pemulihan Ekonomi Nasional yang diterima di Tahun 2021 yang berupa biaya administrasi yang jatuh tempo di Tanggal 24 Januari 2023 Rp45.414.906,72,

   Rincian dapat dilihat pada Lampiran 18.

5.3.2.1.3 Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Saldo Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) per 31 Desember 2022 sebesar Rp50.473.138.886,49 merupakan saldo kewajiban utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang berupa utang Pokok yang akan Jatuh Tempo di tahun 2022. Dengan rincian sebagai berikut :

a. Utang Pokok Pinjaman PT. Sarana Multi Infrastruktur, persero pembangunan tiga ruas jalan yang akan jatuh tempo di Tahun 2022 sebesar Rp11.455.078.688,00,
b. Utang bunga PT. Sarana Multi Infrastruktur, persero pembangunan Pasar Pulung yang akan jatuh tempo di Tahun 2022 sebesasr Rp25.513.191.559,00,

c. Utang Bunga Pemulihan Ekonomi Nasional yang diterima di Tahun 2020, berupa biaya administrasi yang harus dibayar sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 Rp5.303.855.916,67, dan
d. Utang Bunga Pemulihan Ekonomi Nasional yang diterima di Tahun 2021 dan harus dibayar pada sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp8.201.040.835,00.

Rincian dapat dilihat pada Lampiran 19.

5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas suatu barang/jasa yang sesungguhnya belum merupakan hak pada periode pelaporan, sehingga dikategorikan suatu uang muka bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan termasuk kategori kewajiban jangka pendek.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dicatat sebesar Rp91.851.000,00 terdiri dari :

a. Penerimaan pada Tahun 2021 senilai Rp75.085.000,00 berupa sewa barang milik daerah/bangunan oleh PT. BPRS Tani Tulang Bawang Barat Jangka waktu sewa 5 (lima) tahun, sehingga nilai Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp45.051.000,00.
b. Penerimaan pada Tahun 2021 sebesar Rp65.500.000,00 berupa Sewa Ruang Kantor Kas Bank Lampung yang terletak di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Tulang Bawang Barat jangka waktu 5 (lima) tahun jumlah sehingga nilai Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp39.300.000,00.
c. Penerimaan pada Tahun 2022 sebesar Rp10.000.000,00 berupa Sewa Tempat Mesin ATM Bank BRI yang terletak di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Tulang Bawang Barat, dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, sehingga nilai Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp7.500.000,00.

Rincian perhitungan pada Lampiran 20.

5.3.2.1.5 Utang Belanja

Utang belanja merupakan belanja atau biaya yang harus diakui Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas manfaat yang telah diterima lebih dahulu walaupun belanja/biaya atas manfaat tersebut belum dibayarkan.

Saldo utang belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.835.684.087,13 yang terdiri dari utang belanja barang dan jasa, utang belanja hibah, utang belanja jasa kantor dengan rincian pada Tabel 5.3.29 berikut.

Tabel 5.3.29 Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

No	Uraian	31-Des-22	31-Des-21
1	Utang Belanja Pegawai	11.150.000,00	8.065.520.180,00
2	Utang Belanja Barang	0,00	61.470.500,00
3	Utang Belanja Jasa	8.687.313.808,19	9.518.378.221,55
4	Utang Belanja Pemeliharaan	6.662.138,00	49.648.000,00
5	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	44.568.944,00	0,00
6	Utang Belanja Hibah	0,00	172.235.300,00
7	Utang Belanja Modal	7.289.866.275,00	17.162.591.622,00
8	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.218.009.346,64	0,00
9	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	340.561.404,30	0,00
10	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	237.662.171,00	0,00
	Jumlah	**20.835.794.087,13**	**35.029.843.823,55**

1. Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang belanja Pegawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.150.000,00 merupakan Saldo kewajiban pembayaran utang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pegawai terdiri dari Utang Belanja Pegawai BLUD Pasar Pulung Tahun 2022.

2. Utang Belanja Jasa

Saldo Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.687.313.808,19 merupakan saldo kewajiban Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas pembayaran utang Jasa kepada pihak lainnya yang terdiri dari utang tagihan listrik sebesar Rp108.831.483,34, utang utang belanja

kawat/faksimili/internet/tv berlangganan sebesar Rp2.510.478,00, utang pembayaran pajak, bea, dan perizinan kendaraan dinas yang masih harus dibayar sebesar Rp160.998.128,65 dan utang belanja jasa konsultansi konstruksi sebesar Rp8.396.823.718,20, *rincian dapat dilihat pada lampiran 22.*

3. Utang Belanja Pemeliharaan

Saldo Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.662.138,00 merupakan saldo kewajiban Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas pembayaran utang Jasa pemeliharaan aset kepada pihak lainnya yang terdiri dari utang Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Buangan Domestik, *rincian dapat dilihat pada lampiran 22.*

4. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD

Saldo Utang Belanja Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp44.568.944,00 merupakan saldo kewajiban Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas pembayaran utang, Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD yang tersebar pada beberapa Puskesmas dan RSUD serta BLUD Pasar Pulung.

5. Utang Belanja Modal

Utang Belanja Modal per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.289.866.275,00 merupakan saldo kewajiban Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas pembayaran utang belanja modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp386.415.800,00, utang belanja - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebesar Rp39.635.700,00, utang belanja modal Bangunan Peninggalan sebesar Rp68.739.100,00, utang belanja modal Jalan Kabupaten sebesar Rp5.922.413.975,00 dan utang belanja modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya sebesar Rp457.348.500,00.

6. Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

Saldo Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.218.009.346,64 merupakan saldo kewajiban Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas Bagi Hasil Pajak Daerah

Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2021 sebesar Rp1.987.496.879,16 dan Tahun 2022 sebesar Rp2.230.512.467,48.

7. Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

Saldo Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa per 31 Desember 2022 sebesar Rp340.561.404,30 merupakan saldo kewajiban Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2021 sebesar Rp164.938.475,90 dan Tahun 2022 sebesar Rp175.622.928,40.

8. Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Saldo Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa per 31 Desember 2022 sebesar Rp237.662.171,00 merupakan saldo kewajiban Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas Alokasi Dana Desa yang kurang salur Tahun 2021 sebesar Rp20.662.971,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp217.253.200,00.

5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Utang Tunda Bayar atas pengadaan aset tetap sampai dengan Tahun 2022. Saldo Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.188.049.762,70.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang masih harus dibayarkan kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo setelah periode pelaporan atau Tahun 2022.

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp62.704.080.438,33 yang merupakan utang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dari lembaga keuangan bukan bank dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang pokok PEN yang diterima di Tahun 2021 (Pemulihan Ekonomi Nasional) untuk pembangunan infrastruktur yang akan jatuh tempo di Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027 sebesar Rp19.175.479.083,33;
b. Utang pokok PEN yang diterima di Tahun 2022 (Pemulihan Ekonomi Nasional) untuk pembangunan infrastruktur yang akan jatuh tempo di Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2029 sebesar Rp44.169.841.109,18.

Rincian Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada lampiran 36.

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas merupakan jumlah kekayaan bersih yang dimiliki pemerintah daerah dan merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban.

Ekuitas pada neraca Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.719.915.144.787,54. Apabila dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.724.672.884.954,37, terjadi penurunan sebesar (Rp4.757.740.166,83) atau mengalami kenaikan sebesar (2,95%).

5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Laporan Operasional diperlukan untuk mengevaluasi Pendapatan-LO dan Beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga laporan operasional menyediakan informasi:

a. besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah untuk menjalankan pelayanan;
b. operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
c. prediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
d. penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional Tahun 2022 dan Tahun 2021 disajikan pada tabel 5.4.1 berikut:

Tabel 5.4.1 Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	Jumlah		Kenaikan	Naik/ Turun (%)
	2022	2021	(Penurunan)	
Kegiatan Operasional				
Pendapatan LO	801.353.226.032,17	817.093.920.589,89	(15.740.694.557,72)	(1,93)
Beban LO	800.556.253.726,34	888.108.698.691,37	(87.552.444.965,03)	(9,86)
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	**796.972.305,83**	**(71.014.778.101,48)**	**71.811.750.407,31**	**(101,12)**
Kegiatan Non Operasional	**185.522.400,51**	**0,00**	**185.522.400,51**	**0,00**
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Kelebihan Cadangan Penyisihan Piutang – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualana Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Kegatan Non Opersional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	**185.522.400,51**	**0,00**	**185.522.400,51**	**(0,00)**
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	**982.494.706,34**	**(71.014.778.101,48)**	**71.811.750.407,31**	**(101,38)**
Pendapatan Luar Biasa-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	66.000.000,00	967.492.415,00	(901.492.415,00)	(101,38)
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	**(66.000.000,00)**	**(967.492.415,00)**	**901.492.415,00**	0,00
Surplus/Defisit LO	**916.494.706,34**	**(71.982.270.516,48)**	**72.898.765.222,82**	**(101,27)**

KEGIATAN OPERASIONAL

5.4.1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan realisasi pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat pelayanan telah diberikan dan timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatpan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pada Tahun Anggaran 2022, Pendapatan-LO diperoleh sebesar Rp801.353.226.032,17, sedangkan Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2022 yang tidak termasuk Dana Desa sebesar Rp783.442.103.192,69 terdapat penambahan sebesar Rp17.911.122.839,48 yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp532.292.277,86 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp249.080.976,59 dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.557.108.394,00 serta Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar

Rp8.381.686.052,00, sementara Penurunan sebesar (Rp8.475.204.123,97) merupakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan-LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Besarnya masing-masing pendapatan yang direalisasikan pada tahun 2022 serta yang menjadi Laporan Operasi pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 5.4.2 di bawah ini:

Tabel 5.4.2 Pendapatan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Uraian	LO 2022	LO 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	43.839.163.749,17	55.548.036.450,88	(11.708.872.701,71)	(21,08)
2	Pendapatan Transfer	740.315.903.020,00	715.674.740.886,01	24.641.162.133,99	3,44
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17.198.159.263,00	45.871.143.253,00	(28.672.983.990,00)	(62,51)
	Jumlah	**801.353.226.032,17**	**817.093.920.589,89**	**(15.740.694.557,72)**	**(1,93)**

Jika dibandingkan dengan Pendapatan LO tahun 2021, pendapatan Laporan Operasional tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak (Rp15.740.694.557,72) atau (1,93) %.

Perbandingan antara Pendapatan LO tahun 2022 dengan LO Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

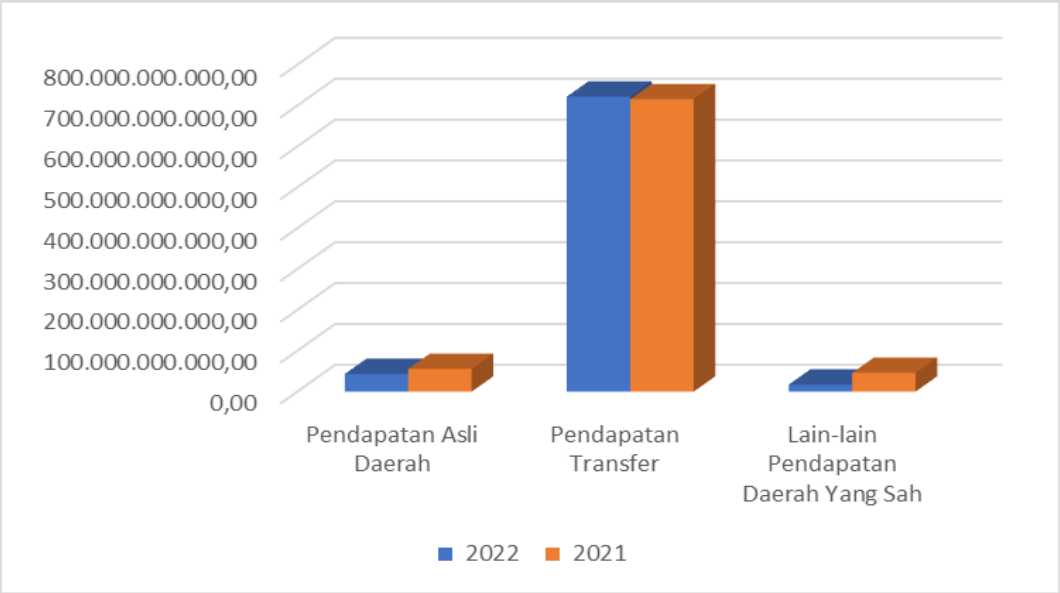

Rincian persentase masing-masing pos pembentuk Pendapatan LO tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

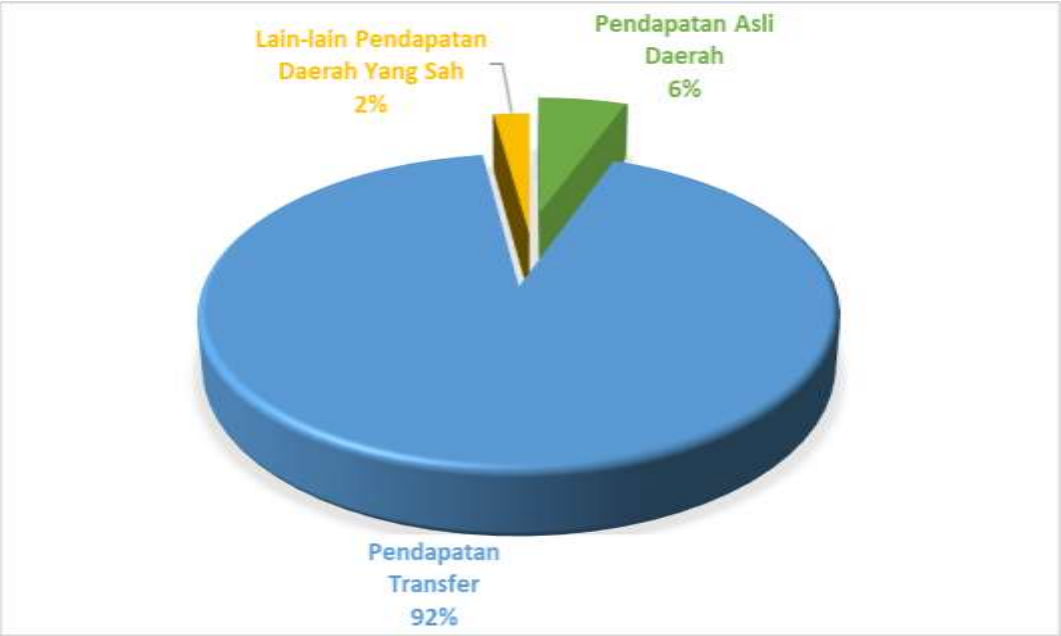

Dari gambar di atas diketahui bahwa Pendapatan Transfer mempunyai porsi terbesar dari keseluruhan Pendapatan Daerah LO yaitu mencapai 92% sedangkan PAD hanya sebesar 6% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 2%. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan guna menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya.

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pada Tahun Anggaran 2022, Pendapatan Asli Daerah - LO sebesar Rp43.839.163.749,17, terjadi penurunan bila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2021 sebesar (Rp11.708.872.701,71) atau (22,04%). Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO disajikan dalam tabel 5.4.3 berikut:

Tabel 5.4.3 Pendapatan Asli Daerah Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	23.096.332.272,49	20.154.210.179,97	2.942.122.092,52	11,96
2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.862.050.812,00	1.597.759.759,00	264.291.053,00	16,54
3	Pendapatan Hasil	2.800.974.867,17	2.247.440.164,56	553.534.702,61	13,55

	Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	16.079.805.797,51	31.548.626.347,35	(15.468.820.549,84)	(21,98)
	Jumlah	**43.839.163.749,17**	**55.548.036.450,88**	**(11.708.872.701,71)**	**(21,08)**

Berdasarkan Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO di atas terlihat bahwa akun Pendapatan Asli Daerah - LO memiliki capaian realisasi di atas realisasi Tahun 2021, dengan kenaikan tertinggi ada pada Pendapatan Pendapatan Retribusi Daerah - LO dengan kenaikan 16,54% atau Rp264.291.053,00.

Jika realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2022 dibandingan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp. (8.286.223.338,06) atau sebesar (19,13)% sebagaimana disajikan pada tabel 5.4.4 berikut ini:

Tabel 5.4.4 Perbandingan Pendapatan Asli Daerah-LRA dan Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
		LO	LRA	
1	Pendapatan Pajak Daerah	23.096.332.272,49	22.564.039.994,63	532.292.277,86
2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.862.050.812,00	1.862.050.812,00	-
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.800.974.867,17	2.551.893.890,58	249.080.976,59
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	16.079.805.797,51	24.555.009.921,48	(8.475.204.123,97)
	Jumlah	**43.839.163.749,17**	**51.532.994.618,69**	**(7.693.830.869,52)**

a) Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah, yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Metode pembayaran pajak daerah menggunakan metode *self assessment* dan *official assessment* kepada wajib pajak. Metode *self assessment* digunakan untuk pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak BPHTB. Sedangkan Metode *Official Assessment* berlaku pada Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).

Pada Tahun Anggaran 2022, Pendapatan Pajak Daerah - LO sebesar Rp23.096.332.272,49, terjadi kenaikan bila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2021 sebesar Rp20.154.210.179,97 atau 11,96%, seperti disajikan dalam tabel 5.4.5 berikut:

Tabel 5.4.5 Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pajak Hotel	50.483.365,00	90.604.729,00	(40.121.364,00)	(44,28)
2	Pajak Restoran	1.077.879.976,08	870.873.063,35	207.006.912,73	23,77
3	Pajak Pameran	2.800.000,00	3.553.004,00	(753.004,00)	(21,19)
4	Pajak Hiburan	-	(2.800.052,00)	2.800.052,00	(100,00)
5	Pajak Reklame	242.419.050,00	221.522.220,00	20.896.830,00	9,43
6	Pajak Penerangan Jalan	11.924.415.430,00	10.287.144.211,00	1.637.271.219,00	15,92
7	Pajak Parkir	103.050.000,00	91.750.000,00	11.300.000,00	12,32
8	Pajak Air Tanah	115.149.712,41	113.941.136,62	1.208.575,79	1,06
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	8.946.038.432,00	8.050.327.376,00	895.711.056,00	11,13
10	Pajak BPHTB	634.096.307,00	427.294.492,00	206.801.815,00	48,40
	Jumlah	**23.096.332.272,49**	**20.154.210.179,97**	**2.942.122.092,52**	**14,60**

Berdasarkan Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO di atas terlihat bahwa akun Pendapatan Pajak Daerah - LO memiliki capaian realisasi di atas realisasi Tahun 2021, dengan kenaikan tertinggi ada pada Pajak Restoran dengan kenaikan 23,77% atau Rp207.006.912,73.

Terdapat kenaikan yang signifikan dari perbandingan pendapatan LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 atas pajak restoran sebesar Rp207.006.912,73, pajak penerangan jalan sebesar Rp1.637.271.219,00, pajak parkir

Rp11.300.000,00, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar Rp895.711.056,00 dan pajak reklame sebesar Rp20.896.830,00.

Terdapat penurunan pada pajak hiburan (Rp2.800.052,00) yang pada Tahun 2022 tidak teralisasi, penurunan pajak hotel sebesar (Rp40.121.364,00) serta pajak pameran yang mengalami penurunan sebesar (Rp. 753.004,00) dibandingkan dengan Tahun 2021.

Jika realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2022 dibandingan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp532.292.277,86 atau sebesar 1,39% sebagaimana disajikan pada tabel 5.4.6 berikut :

Tabel 5.4.6 Pendapatan Pajak LRA dan LO Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
		LO	LRA	
1	Pajak Hotel	50.483.365,00	51.947.754,00	(1.464.389,00)
2	Pajak Restoran	1.077.879.976,08	1.068.795.251,08	9.084.725,00
3	Pajak Pameran	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
5	Pajak Reklame	242.419.050,00	241.871.250,00	547.800,00
6	Pajak Penerangan Jalan	11.924.415.430,00	11.759.761.296,00	164.654.134,00
7	Pajak Parkir	103.050.000,00	107.200.000,00	(4.150.000,00)
8	Pajak Air Tanah	115.149.712,41	116.128.539,69	(978.827,28)
9	Pajak Bumi dan Bangunan	8.946.038.432,00	8.581.439.596,86	364.598.835,14
10	Pajak BPHTB	634.096.307,00	634.096.307,00	0,00
	Jumlah	**23.096.332.272,49**	**22.564.039.994,63**	**532.292.277,86**

Pada tabel diatas terlihat bahwa Pendapatan Pajak Daerah - LO pada pajak hotel, pajak parkir, dan pajak air tanah lebih kecil dibandingkan dengan Pendapatan LRA. Hanya pajak pameran – LO, dan pajak BPHTB - LO yang sama dengan Pendapatan LRA.

Rincian perhitungan Pendapatan Pajak Daerah antara LO dan LRA tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 5.4.7 di bawah:

Tabel 5.4.7 Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah Antara LO dan LRA Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	LRA 2022	Pengurangan		Penambahan		LO 2022
			Pelunasan Piutang Tahun Sebelumnya	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021	Piutang tahun 2022	Pendapatan LO atas Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2020	
1	Pajak Hotel	51.947.754,00	3.241.025,00	-	1.776.636,00	-	50.483.365,00
2	Pajak Restoran	1.068.795.251,08	66.182.672,00	-	75.267.397,00	-	1.077.879.976,08
3	Pajak Hiburan	2.800.000,00	1.946.914,00	-	1.946.914,00	-	2.800.000,00
4	Pajak Reklame	241.871.250,00	26.454.200,00	-	27.002.000,00	-	242.419.050,00
5	Pajak Penerangan Jalan	11.759.761.296,00	905.649.775,00	-	1.070.303.909,00	-	11.924.415.430,00
6	Pajak Parkir	107.200.000,00	6.761.000,00	-	2.611.000,00	-	103.050.000,00
7	Pajak Air Tanah	116.128.539,69	14.984.077,28	-	14.005.250,00	-	115.149.712,41
8	Pajak Bumi dan Bangunan	8.581.439.596,86	551.980.791,00	-	916.579.626,14	-	8.946.038.432,00
9	Pajak BPHTB	634.096.307,00	0,00	-	0,00	-	634.096.307,00
	Jumlah	**22.564.039.994,63**	**1.577.200.454,28**	**0,00**	**2.109.492.732,14**	**0,00**	**23.096.332.272,49**

Pendapatan Pajak Daerah - LO sebesar Rp23.096.332.272,49. Jumlah ini terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah - LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp22.564.039.994,63. Kemudian terdapat pengurangan atas pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp1.577.200.454,28 dan terdapat penambahan dari Pendapatan LO atas piutang pajak daerah tahun 2022 sebesar Rp2.109.492.732,14.

Dengan nilai piutang pajak sebesar Rp2.109.492.732,14 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak masih sangat rendah untuk melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya. Hal ini berdampak pada pendapatan yang direalisasikan umumnya masih kurang dibandingkan dari yang seharusnya diterima.

b) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah, yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pada Tahun Anggaran 2022, Pendapatan Retribusi Daerah - LO sebesar Rp. 1.862.050.812,00, terjadi kenaikan sebesar Rp. 264.291.053,00 bila dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2021 sebesar Rp1.597.759.759,00 atau 16,54%. Rincian Pendapatan Retribusi - LO disajikan dalam tabel 5.4.8 berikut:

Tabel 5.4.8 Rincian Pendapatan Retribusi -LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Retribusi Jasa Umum	**1.137.745.364,00**	**898.140.940,00**	**239.604.424,00**	**26,68**
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	389.779.382,00	240.190.000,00	149.589.382,00	38,38
2	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	115.830.000,00	126.479.040,00	(10.649.040,00)	(9,19)
3	Retribusi Kios-LO	382.800.000,00	367.200.000,00	15.600.000,00	4,08
4	Retribusi Pelataran-LO	29.744.382,00	0,00	29.744.382,00	0,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	2.584.500,00	0,00	2.584.500,00	0,00
6	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	217.007.100,00	164.271.900,00	52.735.200,00	24,30
	Retribusi Jasa Usaha	**476.268.764,00**	**508.726.280,00**	**(32.457.516,00)**	**(6,38)**
7	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	0,00	140.585.000,00	(140.585.000,00)	0,00
8	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	0,00	(42.400.000,00)	42.400.000,00	0,00
9	Pemakiana Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	50.300.000,00	50.080.000,00	220.000,00	0,44
10	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO	393.944.382,00	352.800.000,00	41.144.382,00	10,44

11	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	8.280.000,00	7.661.280,00	618.720,00	7,47
12	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	23.744.382,00	0,00	23.744.382,00	100,00
	Retribusi Perizinan Tertentu	**248.036.684,00**	**190.892.539,00**	**57.144.145,00**	**23,04**
13	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	248.036.684,00	0,00	248.036.684,00	0,00
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	190.892.539,00	(190.892.539,00)	0,00
	Jumlah	**1.862.050.812,00**	**1.597.759.759,00**	**264.291.053,00**	**14,19**

Berdasarkan rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO di atas terlihat bahwa akun Pendapatan Retribusi Daerah - LO memiliki capaian realisasi di atas realisasi Tahun 2021, dengan kenaikan tertinggi ada pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO dengan kenaikan 38,38% atau Rp. 149.589.382,00.

Terdapat akun penerimaan pada Tahun 2021 yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp190.892.539,00 berpindah pada akun penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp248.036.684,00 yang menagalami kenaikan cukup besar yaitu Rp57.144.145,00 dari perbandingan Pendapatan LO Tahun 2021 berupa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO sebesar Rp217.007.100,00 mengalami peningkatan sebesar Rp52.735.200,00 dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp164.271.900,0, Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO mengalami peningkatan sebesar Rp41.144.382,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum hanya mengalami pengingkatan sebesar Rp618.720,00.

Terdapat penurunan Pada Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO sebesar (Rp10.649.040,00).

Pada penerimaan Retribusi terdapat beberapa akun penerimaan yang tidak terealisasi akun penerimaaan retribusi daerah berupa Retribusi Penyewaan Bangunan-LO yang telah dibayar lunas oleh Pihak BUMD berupa BPRS Tani dan Koperasi RSMW hingga tahun 2025.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2022 tidak terdapat selisih jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah menurut LRA pada periode yang sama.

Tabel 5.4.9 Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan Retribusi Daerah-LRA TA. 2022

No.	Uraian	Retribusi LO	Retribusi LRA	Selisih
	Retribusi Jasa Umum	**1.137.745.364,00**	**1.137.745.364,00**	**0,00**
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	389.779.382,00	389.779.382,00	0,00
2	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	115.830.000,00	115.830.000,00	0,00
3	Retribusi Kios-LO	382.800.000,00	382.800.000,00	0,00
4	Retribusi Pelataran-LO	29.744.382,00	29.744.382,00	0,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	2.584.500,00	2.584.500,00	0,00
6	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	217.007.100,00	217.007.100,00	0,00
	Retribusi Jasa Usaha	**476.268.764,00**	**476.268.764,00**	**0,00**
7	Pemakiana Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	50.300.000,00	50.300.000,00	0,00
8	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO	393.944.382,00	393.944.382,00	0,00
9	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00
10	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	23.744.382,00	23.744.382,00	0,00
	Retribusi Perizinan Tertentu	**248.036.684,00**	**248.036.684,00**	**0,00**
11	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	248.036.684,00	248.036.684,00	0,00
	Jumlah	**1.862.050.812,00**	**1.862.050.812,00**	**0,00**

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO Tahun 2022 sebesar Rp2.800.974.867,17. Terjadi kenaikan bila dibandingkan dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - LO Tahun 2021 sebesar Rp553.534.702,61 atau 24,63%. Rincian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - LO disajikan dalam tabel 5.4.10 berikut :

Tabel 5.4.10 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.800.974.867,17	2.247.440.164,56	553.534.702,61	24,63
	Jumlah	**2.800.974.867,17**	**2.247.440.164,56**	**553.534.702,61**	**24,63**

Jika realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - LO Tahun 2022 dibandingan dengan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp249.080.976,59. Berupa Penyesuaian Penyertaaan Modal Tahun 2022 akibat perhitungan Metode Ekuitas penyertaan modal pada BPRS Tani.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2022 merupakan deviden atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar Rp2.551.893.890,58. Yang terdiri dari:

1. Deviden Bank Lampung Tahun Buku 2021 Rp1.843.636.698,33,
2. Deviden BPRS Syariah Tani Tahun Buku 2021 Rp558.257.192,25.
3. Bagi Hasil Koperasi Ragem Sai Mangi Wawai Tahun Buku 2021 Rp150.000.000,00.

d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan-LO lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada Tahun Anggaran 2022, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah - LO sebesar Rp16.079.805.797,51, terjadi penurunan bila dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2021 sebesar (Rp15.468.820.549,84) atau (21,98%). Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah - LO disajikan dalam tabel 5.4.11 berikut:

Tabel 5.4.11 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO	(0,51)	0,00	(0,51)
2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-LO	32.372.350,00	0,00	32.372.350,00
3	Hasil Sewa BMD-LO	38.117.000,00	(60.068.000,00)	98.185.000,00
4	Jasa giro Kas Daerah - LO	569.108.361,97	821.087.734,25	(251.979.372,28)
5	Jasa giro kas Bendahara - LO	3.635.054,52	7.463.981,97	(3.828.927,45)
6	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	725.051.232,47	1.510.343.616,86	(785.292.384,39)
7	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	4.900.002,00	0,00	4.900.002,00
8	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	0,00	196.610.885,00	(196.610.885,00)
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	2.933.430.394,26	0,00	2.933.430.394,26
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	414.203.257,00	5.137.271.935,98	(4.723.068.678,98)
11	Pendapatan dari BLUD-LO	10.725.312.849,86	300.754.021,00	10.424.558.828,86
12	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	0,00	23.619.582.116,41	(23.619.582.116,41)
13	Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka - LO	0,00	15.580.055,88	(15.580.055,88)
14	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	633.675.295,94	0,00	633.675.295,94
	Jumlah	**16.079.805.797,51**	**31.548.626.347,35**	**(15.468.820.549,84)**

Terdapat 3 Jenis Pendapatan yang tidak terealisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yautu pendapatan dari tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara-LO dipindahkan ke Lain-lain PAD yang sah lainnya.

Selanjutnya pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah-LO dan pendapatan dari pengembalian uang muka - LO dipindahkan ke pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan-LO sehingga tidak ada realiasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Jika realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah - LO Tahun 2022 dibandingan dengan realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp8.475.824.300,51 sebagaimana disajikan pada tabel 5.4.12 berikut ini :

Tabel 5.4.12 Rincian Objek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun Anggaran 2022 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menurut LRA

No.	Uraian	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	Selsih
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO	(0,51)	185.522.400,00	(185.522.400,51)
2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-LO	32.372.350,00	32.372.350,00	0,00
3	Hasil Sewa BMD-LO	38.117.000,00	10.000.000,00	28.117.000,00
4	Jasa giro Kas Daerah - LO	569.108.361,97	569.108.361,97	0,00
5	Jasa giro kas Bendahara - LO	3.635.054,52	3.635.054,52	0,00
6	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	725.051.232,47	725.051.232,47	0,00
7	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	4.900.002,00	4.900.002,00	0,00
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	2.933.430.394,26	2.993.452.797,60	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	414.203.257,00	414.203.257,00	0,00
11	Pendapatan dari BLUD-LO	10.725.312.849,86	19.043.731.749,86	(8.318.418.900,00)
14	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	633.675.295,94	633.675.295,94	452.006,77
	Jumlah	**16.079.805.797,51**	**24.555.630.098,02**	**(8.475.372.293,74)**

Terdapat selisih antara Lain-Lain Pad Yang Sah – LO Dengan Lain-Lain Pad Yang Sah – LRA sebesar (Rp8.475.372.293,74), yaitu hasil Penjualan Alat Angkutan-LO sebesar (Rp185.522.400,51) yang merupakan Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO. Hasil sewa BMD-LO terdapat selisih sebesar Rp28.117.000,00 yang berupa pendapatan dibayar dimuka sewa gedung milik pemerintah daerah kepada BPRS Tani dan RSMW yang tersisa 36 bulan, Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-

LO sebesar Rp620.176,54 merupakan Saldo Remunerasi pada Rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) per 31 Desember 2022 yang diatur pada PMK 218/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Dalam Bentuk Non Tunai Tahun 2022.

Pendapatan BLUD terdapat selisih sebesar (Rp8.318.418.900,00) yang merupakan penerimaan piutang BLUD tahun 2022 sebesar Rp9.223.124.100,00 dikurangi Piutang BLUD Tahun 2022 sebesar Rp904.705.200,00 serta Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya Rp452.006,77 berupa Pendapatan atas kelebihan pengembalian RTGS Bank BNI Tahun 2021 sebesar Rp452.000,00 dan Rp6,77 meurapak pendapatan atas selisih uang kecil pada Bank BNI.

Namun Penerimaan BLUD-LO diperoleh sebesar Rp10.725.312.849,86 yang berasal dari penerimaan BLUD LRA sebesar Rp19.043.731.749,86 dikurangi Piutang tahun 2021 sebesar Rp9.223.124.100,00 kemudian dikurangi Piutang Tahun 2022 sebesar Rp904.705.200,00.

Tabel 5.4.13 Perhitungan Pendapatan BLUD-LO

No	Uraian	LRA 2022	Pelunasan Piutang Tahun Sebelumnya	Piutang tahun 2022	LO 2022
1	Pendapatan BLUD	19.043.731.749,86	9.223.124.100,00	0,00	10.725.312.849,86

5.4.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat, dalam bentuk dana perimbangan dan transfer dana lainnya. Pendapatan Transfer - LO sebesar Rp. 721.894.899.772,00. Terjadi kenaikan bila dibandingkan dengan Pendapatan Transfer - LO Tahun 2021 sebesar Rp. 6.220.158.885,99 atau 0,87%. Rincian pendapatan transfer - LO disajikan dalam 5.4.14 tabel berikut:

Tabel 5.4.14 Rincian Pendapatan Transfer - LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	Pendapatan Transfer-LO				3,44
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	658.137.147.910,00	648.635.854.984,00	9.501.292.926,00	1,46
3.	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	82.178.755.110,00	67.038.885.902,01	15.139.869.207,99	22,58
	Jumlah	**740.315.903.020,00**	**715.674.740.886,01**	**24.641.162.133,99**	**3,44**

Berdasarkan Rincian Pendapatan Transfer - LO di atas terlihat bahwa akun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO memiliki capaian realisasi di atas realisasi Tahun 2022, dengan kenaikan sebesar 1,19%.

Jika realisasi Pendapatan Transfer - LO Tahun 2022 dibandingan dengan realisasi Pendapatan Transfer menurut LRA pada periode yang sama, tidak terdapat penurunan sebagaimana disajikan pada tabel 5.4.15 berikut ini:

Tabel 5.4.15 Jenis Lain-lain Pendapatan Transfer - LO dan LRA Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
		LO	LRA	
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	658.137.147.910,00	738.180.328.516,00	(80.043.180.606,00)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	82.178.755.110,00	73.797.069.058,00	8.381.686.052,00
	Jumlah	**740.315.903.020,00**	**811.977.397.574,00**	**(71.661.494.554,00)**

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Dari Tabel tersebut dapat dilihat pendapatan transfer pemerintah pusat terdapat selisih sebesar (Rp80.043.180.606,00), yang terdiri dari, sebesar Rp82.600.289.000,00 merupakan pandapatan Dana Desa yang bukan menjadi penerimaan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah dan sebesar Rp2.557.108.394,00 merupakan penerimaan yang Pendapatan DBH Pusat yang dicatat sebagai Pendapatan pada sisi Pendapatan LO dan sebagai Aset Lainnya pada sisi neraca yang diatur pada PMK 218/PMK.07/2022 tentang Perubahan

Rincian Dana Bagi Hasil Dalam Bentuk Non Tunai Tahun 2022. Selanjutnya atas dasar Surat Kemendagri Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tahun 15 Maret 2023.

Pendapatan transfer pemerintah pusat adalah pos untuk menampung dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada Tahun Anggaran 2022, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO sebesar Rp658.137.147.910,00, terjadi kenaikan sebesar Rp9.501.292.926,00 bila dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2021 yang sebesar Rp648.635.854.984,00 atau 1,46%.

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2022 merupakan dana perimbangan yang seluruhnya berasal dari pendapatan dalam bentuk kas dan seluruhnya diterima di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai dengan 31 Desember 2022. Objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO disajikan dalam tabel 5.4.16 berikut :

Tabel 5.4.16 Objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No.	Uraian	LO Tahun 2022	LO Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bagi Hasil Pajak	32.661.484.782,00	28.074.423.464,00	4.587.061.318,00	16,34
2	Dana Alokasi Umum	436.040.756.350,00	436.265.639.071,00	(224.882.721,00)	(0,05)
3	DAK Fisik	87.680.822.078,00	79.200.603.677,00	8.480.218.401,00	10,71
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	101.754.084.700,00	79.486.417.772,00	22.267.666.928,00	28,01
5	DID	0,00	25.608.771.000,00	(25.608.771.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**658.137.147.910,00**	**648.635.854.984,00**	**9.501.292.926,00**	**(44,99)**

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa realisasi pendapatan yang mengalami kenaikan sebesar Rp9.501.292.926,00 pada Tahun 2022, apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 yaitu Bagi Hasil Pajak Rp4.587.061.318,00. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Rp8.480.218.401,00 dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp22.267.666.928,00. Namun pada Tahun 2022 Dana Alokasi Umum mengalami penurunan sebesar (Rp224.882.721,00), sementara itu untuk Dana Insentif Daerah (DID) pada Tahun 2022 Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak ada realisasi penerimaan.

Pendapatan transfer pemerintah pusat pada Tahun Anggaran 2022 merupakan Dana Perimbangan yang seluruhnya berasal dari pendapatan dalam bentuk kas dan seluruhnya diterima di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai dengan 31 Desember 2022.

Jika realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2022 dibandingan dengan realisasi Pendapatan Transfer LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp2.557.108.394,00 merupakan penerimaan yang Pendapatan DBH Pusat yang dicatat sebagai Pendapatan pada sisi Pendapatan LO yang diatur pada PMK 218/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Dalam Bentuk Non Tunai Tahun 2022. Selanjutnya atas dasar Surat Kemendagri Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tahun 15 Maret 2023sebagaimana disajikan pada tabel 5.4.17 berikut ini :

Tabel 5.4.17 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA dan LO Tahun 2022

No.	Uraian	LO Tahun 2022	LRA Tahun 2022	Selisih
1	Bagi Hasil Pajak	32.661.484.782,00	30.104.376.388,00	2.557.108.394,00
2	Dana Alokasi Umum	436.040.756.350,00	436.040.756.350,00	0,00
3	DAK Fisik	87.680.822.078,00	87.680.822.078,00	0,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	101.754.084.700,00	101.754.084.700,00	0,00
5	DID	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**658.137.147.910,00**	**655.580.039.516,00**	**2.557.108.394,00**

b) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Sementara itu untuk Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya – LO, pada tahun 2021 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi diklasifikasikan pada Objek Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sementara penjelasan yang dicacat hanya sebagai pembading untuk mengungkapkan informasi terkait Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya pada sisi LO.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya merupakan penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya.

Pada Tahun Anggaran 2022, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO sebesar Rp82.178.755.110,00, terjadi kenaikan sebesar Rp15.139.869.207,99 bila dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat Lainnya - LO Tahun 2021 sebesar Rp. 67.038.885.902,01. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO disajikan dalam tabel 5.4.18 berikut :

Tabel 5.4.18 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Lainnya – LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	14.197.647.880,00	13.469.640.490,99	728.007.389,01	5,40
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.566.987.086,00	9.407.360.447,00	1.159.626.639,00	12,33
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	34.116.147.474,00	26.412.651.868,00	7.703.495.606,00	29,17
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	121.243.098,00	91.590.760,02	29.652.337,98	32,37
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	23.176.729.572,00	17.657.642.336,00	5.519.087.236,00	31,26
	Jumlah	**82.178.755.110,00**	**67.038.885.902,01**	**15.139.869.207,99**	**22,58**

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa realisasi pendapatan yang mengalami kenaikan pada Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 dengan Jumlah total sebesar Rp15.139.869.207,99 atau 22,58%.

Jika realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO Tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Lainnya menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp. 10.194.135.901,01 atau sebesar (17,93)% sebagaimana disajikan pada tabel 5.4.19 berikut ini :

Tabel 5.4.19 Perbandingan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Lainnya–LO dan LRA Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
		LO	LRA	
1	Pajak Kendaraan Bermotor	14.197.647.880,00	10.547.692.370,00	3.649.955.510,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.566.987.086,00	10.110.878.704,00	456.108.382,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	34.116.147.474,00	30.363.130.058,00	3.753.017.416,00
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	121.243.098,00	107.792.658,00	13.450.440,00
5	Pajak Rokok	23.176.729.572,00	22.667.575.268,00	509.154.304,00
	Jumlah	**82.178.755.110,00**	**73.797.069.058,00**	**8.381.686.052,00**

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO merupakan selisih penerimaan yang paling besar apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pemerintah Daerah Lainnya - LRA. Rincian perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya antara LO dan LRA tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel 5.4.20 di bawah ini:

Table 5.4.20 Rincian Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Daerah Lainnya antara LO dan LRA Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	LRA 2022	Pelunasan Piutang Tahun Sebelumnya	Piutang Tahun 2022	LO 2022
1	Pajak Kendaraan Bermotor	10.547.692.370,00	7.332.796.979,00	10.982.752.489,00	14.197.647.880,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.110.878.704,00	4.915.639.651,00	5.371.748.033,00	10.566.987.086,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.363.130.058,00	14.449.526.898,00	18.202.544.314,00	34.116.147.474,00
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	107.792.658,00	46.985.133,00	60.435.573,00	121.243.098,00
5	Pajak Rokok	22.667.575.268,00	3861037686	4.370.191.990,00	23.176.729.572,00
	Jumlah	**73.797.069.058,00**	**30.605.986.347,00**	**38.987.672.399,00**	**82.178.755.110,00**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Daerah Lainnya - LO sebesar Rp82.178.755.110,00. Jumlah ini terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LRA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp73.797.069.058,00 kemudian terdapat pengurangan atas pelunasan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp30.605.986.347,00 dan terdapat penambahan dari Pendapatan LO atas piutang pajak bagi hasil dari provinsi tahun 2021 sebesar Rp38.987.672.399,00.

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya. Pada Tahun Anggaran 2022, Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO sebesar Rp0,00. Terjadi penurunan bila dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp36.257.373.000,00 atau -100%.

Tabel 5.4.21 Objek Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Hibah-LO	17.198.159.263,00	9.613.770.253,00	7.584.389.010,00	78,89
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	36.257.373.000,00	(36.257.373.000,00)	(100)
	Jumlah	**17.198.159.263,00**	**45.871.143.253,00**	**(28.672.983.990,00)**	**(62,51)**

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami penurunan sebesar (Rp28.672.983.990,00) atau (62,51%) yang berupa Pendapatan Hibah - LO sebesar Rp17.198.159.263,00 dan terdapat penurunan pada Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO sebesar (Rp. 36.257.373.000,00).

a) Pendapatan Hibah

Jika realisasi Pendapatan Hibah - LO Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp14.666.159.263,00 atau 85,28% sebagaimana disajikan pada tabel 5.4.22 berikut ini:

Tabel 5.4.22 Pendapatan Hibah Tahun Anggaran antara LO dengan LRA Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
		LO	LRA	
	Pendapatan Hibah	17.198.159.263,00	2.532.000.000,00	14.666.159.263,00
	Jumlah	17.198.159.263,00	2.532.000.000,00	14.666.159.263,00

Berdasarakan Tabel di atas terlihat bahwa terdapat selisih antara Pendapatan Hibah - LO Tahun 2022 dibandingan dengan realisasi Pendapatan Hibah menurut LRA pada periode yang sama sebesar Rp14.666.159.263,00. Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Hibah Alat Antropometri dari Kementerian Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp675.935.000,00 ;
2. Hibah Aset Dari Kementerian Pusat pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan PertanahanTahun 2022 sebesar Rp13.787.589.363,00 berupa:
    1. Aset Flat/Rumah Susun sebesar Rp12.793.160.000,00
    2. Aset Mebel sebesar Rp834.730.491,00
    3. Aset Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Rp159.698.872,00
3. Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri-LO merupakan hibah Aset pada Dinas Kesehatan.

5.4.2 Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban, yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban lain-lain, dan beban transfer.

Pada Tahun Anggaran 2022, Jumlah Beban-LO Tahun 2022 sebesar Rp800.556.253.726,34 terjadi penurunan sebesar (Rp87.552.444.965,03) apabila dibandingkan dengan Beban-LO Tahun 2021 yang sebesar Rp888.108.698.691,37 atau (9,86%). Rincian Beban-LO Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada table 5.4.23 berikut ini:

Tabel 5.4.23 Rincian Beban - LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	318.218.205.912,00	317.209.715.946,00	1.008.489.966,00	0,32
2	Beban Barang dan Jasa	214.375.360.471,53	201.509.667.610,97	12.865.692.860,56	6,38
3	Beban Bunga	9.405.605.330,31	8.935.494.607,65	470.110.722,66	5,26
4	Beban Hibah	20.325.623.123,95	16.406.942.588,00	3.918.680.535,95	23,88
5	Beban Bantuan Sosial	2.354.480.000,00	8.662.300.000,00	(6.307.820.000,00)	(72,82)
6	Beban Penyisihan Piutang	777.285.625,28	118.069.559,79	659.216.065,49	558,33
7	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	28.806.358.481,00	28.194.515.530,12	611.842.950,88	2,17
8	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	27.378.494.783,00	24.290.526.557,00	3.087.968.226,00	12,71
9	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	128.056.166.479,00	233.453.212.299,84	(105.397.045.820,84)	(45,15)
10	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	200.582.354,33	44.984.314,32	155.598.040,01	345,89
11	Beban Bagi Hasil	4.558.570.750,94	2.817.554.948,68	1.741.015.802,26	61,79
12	Beban Bantuan Keuangan	46.099.520.415,00	46.465.714.729,00	(366.194.314,00)	(0,79)
	Jumlah	**800.556.253.726,34**	**888.108.698.691,37**	**(87.552.444.965,03)**	**(9,86)**

Jika realisasi Beban Operasional - LO Tahun 2022 dibandingan dengan realisasi Belanja Daerah menurut LRA pada akun belanja operasi dan belanja transfer, di periode yang sama terdapat selisih sebesar, Rp5.576.411.024,63. Sementara perbandingan data pada Laporan Operasional yang tidak dapat dibandingkan ialah Beban Penyisihan Piutang, Beban Penyusutan dan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud, serta belanja Bantuan keuangans berupa Dana Desa sebagaimana disajikan pada tabel 5.4.24 berikut ini:

Tabel 5.4.24 Perbandingan Beban-LO dan Belanja LRA Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
		LO	LRA	
1	Beban Pegawai	318.218.205.912,00	326.272.576.092,00	(8.054.370.180,00)
2	Beban Barang dan Jasa	214.375.360.471,53	208.016.628.415,15	6.358.732.056,38
3	Beban Bunga	9.405.605.330,31	9.266.529.386,00	139.075.944,31
4	Beban Hibah	20325623124	17988882842	2.336.740.282,00
5	Beban Bantuan Sosial	2.354.480.000,00	2.354.480.000,00	0,00
6	Beban Bagi Hasil	4.558.570.750,94	0,00	4.558.570.750,94
7	Beban Bantuan Keuangan	46.099.520.415,00	128.462.147.244,00	(82.362.626.829,00)
	Jumlah	**615.337.366.003,73**	**692.361.243.979,15**	**(77.023.877.975,37)**

a) Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp318.218.205.912,00. Terjadi kenaikan apabila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2021 sebesar Rp1.248.773.489,00 atau 0,39%. Perbandingan Beban Pegawai - LO Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 5.4.25 berikut ini:

Tabel 5.4.25 Beban Pegawai-LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	318.218.205.912,00	317.209.715.946,00	1.248.773.489,00	0,39
	Jumlah	**318.218.205.912,00**	**317.209.715.946,00**	**1.248.773.489,00**	**0,39**

Jika realisasi Beban Pegawai Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar (Rp.8.054.370.180) atau sebesar (2,53%) sebagaimana disajikan pada tabel 5.4.26 berikut ini:

Tabel 5.4.26 Perbandingan Beban Pegawai-LO dan Belanja Pegawai LRA Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
		LO	LRA	
1	Beban Pegawai	318.218.205.912,00	326.272.576.092,00	(8.054.370.180,00)
	Jumlah	**318.218.205.912,00**	**326.272.576.092,00**	**(8.054.370.180,00)**

Pada Tabel di atas terlihat bahwa Beban Pegawai - LO lebih besar di bandingkan dengan Belanja Pegawai LRA. Rincian Perhitungan Beban Pegawai antara LO dan LRA Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 5.4.26 di bawah ini :

Beban Pegawai - LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp318.218.205.912,00. Jumlah ini terdiri dari Belanja Pegawai - LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp326.272.576.092,00, kemudian terdapat pembayaran hutang sertifikasi guru tahun 2021 sebesar Rp8.065.520.180,00 dan penambahan atas utang beban pegawai BLUD Pasar Pulung sebesar Rp11.150.000,00.

Tabel 5.4.27 Rincian Perhitungan Beban Pegawai antara LO dan LRA Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	LRA 2022	Pembayaran Utang Pegawai	Utang Gaji Pegawai 2022	LO 2022
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	197.411.042.849,00	0,00	0,00	197.411.042.849,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	39.717.112.165,00	0,00	0,00	39.717.112.165,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	64.288.798.984,00	8.065.520.180,00	0,00	56.223.278.804,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	10.397.812.352,00	0,00	0,00	10.397.812.352,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.039.271.642,00	0,00	0,00	1.039.271.642,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	0,00	0,00	510.880.000,00
7	Beban Pegawai BOS	12.379.496.100,00	0,00	0,00	12.379.496.100,00
8	Belanja Pegawai BLUD	528.162.000,00	0,00	11.150.000,00	539.312.000,00
	Jumlah	**326.272.576.092,00**	**8.065.520.180,00**	**11.150.000,00**	**318.218.205.912,00**

b) Beban Barang Jasa

Jumlah Beban Barang Jasa Tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp214.375.360.471,53. Terjadi kenaikan apabila dibandingkan dengan Beban Barang Jasa Tahun 2021 sebesar Rp12.865.692.860,56 atau 6,38%. Perbandingan Beban Barang Jasa - LO Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 5.4.28 berikut ini:

Tabel 5.4.28 Beban Barang Jasa-LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Barang dan Jasa	214.375.360.471,53	201.509.667.610,97	12.865.692.860,56	6,38
	Jumlah	**214.375.360.471,53**	**201.509.667.610,97**	**12.865.692.860,56**	**6,38**

Jika realisasi Beban Barang Jasa Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang Jasa menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp6.358.732.056,38 atau sebesar (3,05%) sebagaimana disajikan pada tabel 5.3.30 berikut ini :

Rincian Beban-beban per 31 Desember 2022 sama dengan Belanja di LRA. Beban-beban tersebut antara lain: Beban Beban Barang Tak Habis Pakai, Beban Iuran Jaminan/Asuransi, Beban Sewa Peralatan dan Mesin, Beban Sewa Gedung dan Bangunan, Beban Sewa Aset Tetap Lainnya, eban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dan Beban Barang dan Jasa BOS.

Tabel 5.4.29 Beban Barang Jasa LO dan LRATahun Anggaran 2022

No	Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
		LO	LRA	
1	Beban Barang Pakai Habis	47.193.326.930,35	43.439.099.850,10	3.754.227.080,25
2	Beban Jasa Kantor	47.053.678.130,33	47.838.398.177,00	(784.720.046,67)
3	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	7.556.549.140,00	7.556.549.140,00	-
4	Beban Sewa Tanah	130.000.000,00	130.000.000,00	-
5	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	7.623.877.380,99	7.648.510.900,00	(24.633.519,01)
6	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.985.923.661,67	1.985.924.495,00	(833,33)
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	13.500.000,00	13.500.000,00	-
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	7.083.876.630,00	9.149.979.480,00	(2.066.102.850,00)
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.236.176.625,00	3.236.176.625,00	-
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.932.633.960,00	2.932.633.960,00	-
11	Beban Pemeliharaan Tanah	-	9.928.000,00	(9.928.000,00)
12	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.675.562.486,00	2.643.702.128,00	31.860.358,00
13	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.500.117.684,00	3.704.938.366,00	(204.820.682,00)
14	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.108.267.417,00	19.108.267.417,00	-
15	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	-
16	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.324.962.738,00	21.324.962.738,00	-
17	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	5.960.000,00	5.960.000,00	-
18	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	976.335.340,00	976.125.340,00	210.000,00
19	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	174.990.000,00	174.990.000,00	-
20	Beban Barang dan Jasa BOS	20.298.065.100,00	19.753.620.300,00	544.444.800,00
21	Beban Barang dan Jasa BLUD	21.481.557.248,19	16.363.361.499,05	5.118.195.749,14
	Jumlah	**214.375.360.471,53**	**208.016.628.415,15**	**6.358.732.056,38**

Tabel 5.4.30 Tabel Perhitungan Belanja Barang Jasa LO

No	Uraian	LRA 2022	Penambahan						Pengurangan						LO 2022
			Persediaan awal	Dropoff	Belanja Modal Menjadi Beban Barang dan Jasa	Hibah	Utang Beban 2022	Retensi2021	Persediaan akhir 2021	Koreksi	Pembayaran Utang Beban Tahun Lalu	Beban Barang Jasa Jadi Aset	Retensi yang telah dibayar	Beban asa dibayar dimuka yang belum jatuh tempo	
1	Beban Barang Pakai Habis	43.439.099.850,10	8.177.483.074,00		6.109.300.425,19				10.006.257.755,94		7.011.000,00	519.287.663,00			47.193.326.930,35
2	Beban Jasa Kantor	47.838.398.177,00					8.687.313.808,19			(31.422.991,69)	9.503.456.846,55				47.053.678.130,33
3	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	7.556.549.140,00													7.556.549.140,00
4	Beban Sewa Tanah	130.000.000,00													130.000.000,00
5	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	7.648.510.900,00									24.633.519,01				7.623.877.380,99
6	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.985.924.495,00								833,33	-				1.985.923.661,67
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	13.500.000,00													13.500.000,00
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	9.149.979.480,00									2.066.102.850,00				7.083.876.630,00
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.236.176.625,00													3.236.176.625,00
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.932.633.960,00													2.932.633.960,00
11	Beban Pemeliharaan Tanah	9.928.000,00									9.928.000,00				-
12	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.643.702.128,00								(31.860.358,00)					2.675.562.486,00
13	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.704.938.366,00									204.820.682,00				3.500.117.684,00
14	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.108.267.417,00													19.108.267.417,00
15	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00													20.000.000,00
16	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.324.962.738,00													21.324.962.738,00

17	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	5.960.000,00													5.960.000,00
18	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	976.125.340,00	210.000,00												976.335.340,00
19	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	174.990.000,00													174.990.000,00
20	Beban Barang dan Jasa BOS	19.753.620.300,00			544.444.800,00										20.298.065.100,00
12	Beban Barang dan Jasa BLUD	16.363.361.499,05					44.568.944,00			(5.073.626.805,14)					21.481.557.248,19
	Jumlah	**208.016.628.415,15**	**8.177.693.074,00**	**-**	**6.653.745.225,19**	**-**	**8.731.882.752,19**	**-**	**10.006.257.755,94**	**(5.136.909.321,50)**	**11.815.952.897,56**	**519.287.663,00**	**-**	**-**	**214.375.360.471,53**

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Rincian Beban-beban per 31 Desember 2022 sama dengan Belanja di LRA. Beban-beban tersebut antara lain : Beban Barang Tak Habis Pakai, Beban Iuran Jaminan/Asuransi, Beban Sewa Peralatan dan Mesin, Beban Sewa Gedung dan Bangunan, Beban Sewa Aset Tetap Lainnya, Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dan Beban Barang dan Jasa BOS. Sedangkan Beban-beban yang mengalami penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) Beban Bahan Pakai Habis

Beban Bahan Pakai Habis per 31 Desember 2022 sebesar Rp47.193.326.930,35. Jumlah ini terdiri dari Belanja Barang dan Perlengkapan (supplies)-LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp43.439.099.850,10, kemudian terdapat penambahan atas Belanja Modal Menjadi Beban Barang dan Jasa sebesar Rp6.109.300.425,19 lalu dikurangi dengan Persediaan akhir 2022 sebesar Rp10.006.257.755,94 dan Pembayaran Utang Beban Tahun Lalu sebesar Rp7.011.000,00 dan Beban Barang Jasa Jadi Aset sebesar Rp519.287.663,

(2) Beban jasa Kantor

Beban Jasa Kantor per 31 Desember 2022 sebesar Rp47.053.678.130,33. Jumlah ini terdiri dari Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp47.838.398.177,00, kemudian terdapat penambahan atas Utang Beban Tahun 2022 sebesar Rp8.687.313.808,19 dan pengurangan sebesar (Rp31.422.991,69) atas koreksi dan merupakan Pembayaran Utang Beban Tahun Lalu maka saldo Beban Jasa Kantor sebesar Rp9.503.456.846,55.

(3) Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Beban Jasa Konsultansi Konstruksi per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.623.877.380,99. Jumlah ini terdiri dari Belanja Beban Jasa Kantor - LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.648.510.900,00, kemudian terdapat pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Tahun Lalu sebesar Rp24.633.519,0/

(4) Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.985.923.661,67. Jumlah ini terdiri dari Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.985.924.495,00, kemudian terdapat pengurangan atas Koreksi sebesar Rp833,33,

(5) Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

Beban Pemeliharaan Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.083.876.630,00. Jumlah ini terdiri dari Pemeliharaan Tanah - LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.149.979.480,00, pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Tahun Lalu sebesar Rp2.066.102.850,00.

(6) Beban Pemeliharaan Tanah

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesarnol rupiah. Jumlah ini terdiri dari Belanja PPemeliharaan Tanah - LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.928.000,00, terdapat pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Tahun Lalu sebesar Rp204.820.682,00.

(7) Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp976.335.340,00. Jumlah ini terdiri dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp976.125.340,00, kemudian terdapat penambahan Persediaan awal sebesar Rp210.000,00.

(8) Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.298.065.100,00. Jumlah ini terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOS - LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp19.753.620.300,00, kemudian terdapat penambahan akibat Belanja Modal Menjadi Beban Barang dan Jasa sebesar Rp544.444.800,00.

(9) Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.481.557.248,19. Jumlah ini terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BLUD - LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.363.361.499,05, kemudian terdapat penambahan akibat Utang Beban 2022 puskesmas dan RSUD sebesar Rp44.568.944,00 dan drop off obat ke semua puskes yang tersebar sebesar Rp5.225.267.085,14 serta terdapat koreksi atas persediaan pada pueskemas Dwikorajaya sebesar Rp151.640.280,00.

c) Beban Bunga

Jumlah Beban Bunga Tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp9.405.605.330,31 terjadi kenaikan apabila dibandingkan dengan Beban Bunga tahun 2021 sebesar Rp470.110.722,66. Perbandingan Beban Bunga - LO Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 5.4.31 berikut ini:

Tabel 5.4.31 Perbandingan Beban Bunga-LO Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bunga	9.405.605.330,31	8.935.494.607,65	470.110.722,66	5,26
	Jumlah	**9.405.605.330,31**	**8.935.494.607,65**	**470.110.722,66**	**5,26**

Terdapat penurunan Beban Bunga dari perbandingan Beban Bunga Tahun 2022 atas utang bunga pinjaman kepada PT. SMI, hal ini disebabkan metode perhitungan beban bunga dihitung berdasarkan sisa nilai pokok utang yang dibayarkan.

Jika realisasi Beban Bunga Tahun 2022 dibandingan dengan realisasi Belanja Bunga menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp139.075.944,31 sebagaimana disajikan pada tabel 5.4.32 berikut ini:

Tabel 5.4.32 Perbandingan Beban Bunga-LO dan Belanja Bunga LRATahun Anggaran 2022

No	Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
		LO	LRA	
1	Beban Bunga	9.405.605.330,31	9.266.529.386,00	139.075.944,31
	Jumlah	**9.405.605.330,31**	**9.266.529.386,00**	**139.075.944,31**

Pada Tabel di atas terlihat bahwa Beban Bunga - LO lebih besar di bandingkan dengan Belanja Bunga LRA. Rincian Perhitungan Beban Bunga antara LO dan LRA Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 5.3.33 di bawah ini :

Tabel 5.3.33 Rincian Perhitungan Beban Bunga antara LO dan LRA Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	LRA 2021	Penambahan Pengurangan		LO 2022
			Utang Bunga Tahun 2021	Koreksi	
1	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	9.266.529.386,00	139.075.944,31	0,00	9.405.605.330,31
	Jumlah	**9.266.529.386,00**	**139.075.944,31**	**0,00**	**9.405.605.330,31**

Dari taber tersebut diatas dapat dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat masih memeiliki hutang atas Bunga Pinjaman PEN tahun 2021 sebesar Rp 139.075.944,31.

d) Beban Hibah

Jumlah Beban Hibah direalisasikan sebesar Rp20.325.623.123,95 terjadi kenaikan apabila dibandingkan dengan Beban Hibah tahun 2021 sebesar Rp3.918.680.535,95 atau 23,88%. Perbandingan Beban Hibah - LO Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 5.4.34 berikut ini:

Tabel 5.4.34 Perbandingan Beban Hibah - LO Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Hibah	20.325.623.123,95	16.406.942.588,00	3.918.680.535,95	23,88
	Jumlah	**20.325.623.123,95**	**16.406.942.588,00**	**3.918.680.535,95**	**23,88**

Terdapat kenaikan yang signifikan dari perbandingan Beban Hibah Tahun 2021 atas beban hibah Tahun 2022, jika realisasi Beban Hibah Tahun 2022 dibandingan dengan realisasi Belanja Hibah menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp2.336.740.282 atau sebesar 11,50% sebagaimana disajikan pada tabel 5.4.35 berikut ini:

Tabel 5.4.35 Perbandingan Beban Hibah -LO dan Belanja Hibah LRA Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
		LO	LRA	
1	Beban Hibah	20.325.623.123,95	17.988.882.841,95	2.336.740.282,00
	Jumlah	**20.325.623.123,95**	**17.988.882.841,95**	**2.336.740.282,00**

Pada Tabel di atas terlihat bahwa Beban Hibah - LO lebih besar dibandingkan dengan Belanja Hibah LRA.

Terdapat selsih atas Beban Hibah dengan Belaja Hibah LRA sebesar Rp2.336.740.282,00 yang terdiri dari:

- Hibah aset tanah dan taman ke polres Tulang Bawang Barat tahun 2022 sebesar Rp 19.895.000,00
- Hibah aset kendaraan bermotor beroda dua ke tiyuh sebesar Rp18.380.952,00
- Hibah Aset ke sekolah Swasta Sebesar Rp2.470.699.630,00
- Pembayaran Utang Belanja Hibah Barang sebesar (Rp172.235.300,00) dan

e) Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp2.354.480.000,00 terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial tahun 2021 sebesar (Rp6.307.820.000,00) atau (72,82%). Perbandingan Beban Bantuan Sosial - LO Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 5.4.36 berikut ini:

Tabel 5.4.36 Perbandingan Beban Bantuan Sosial - LO Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bantuan Sosial	2.354.480.000,00	8.662.300.000,00	(6.307.820.000,00)	(72,82)
	Jumlah	**2.354.480.000,00**	**8.662.300.000,00**	**(6.307.820.000,00)**	**(72,82)**

Jika realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dibandingan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial menurut LRA pada periode yang sama, tidak ada penambahan maupun pengurangan sehingga nilainya sama antara Belanja Bantuan Sosial - LRA dan Beban Bantuan Sosial - LO sebagaimana disajikan pada tabel 5.4.37 berikut ini:

Tabel 5.4.37 Perbandingan Beban Bantuan Sosial -LO dan Belanja Bantuan Sosial LRA Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
		LO	LRA	
1	Beban Bantuan Sosial	2.354.480.000,00	2.354.480.000,00	0,00
	Jumlah	**2.354.480.000,00**	**2.354.480.000,00**	**0,00**

f) Beban Penyisihan Piutang

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp777.285.625,28 terjadi kenaikan apabila dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2021 sebesar Rp659.216.065,49 atau 558,33%, beban peniyisihan piutang pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan disebabkan karena terdapat penyisihan piutang lainnya pada Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya 2022 sedangkan pada tahun 2022 hanya melakukan penyesuaian piutang berdasarkan penyisihan piutang tahun sebelumnya. Penyisihan piutang pada Piutang dana bergulir belum dicatat penyisihannya

pada tahun 2022. Perbandingan Beban Penyisihan Piutang - LO Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada 5.4.38 tabel berikut ini:

Tabel 5.4.38 Perbandingan Beban Penyisihan Piutang - LO Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyisihan Piutang	777.285.625,28	118.069.559,79	659.216.065,49	558,33
	Jumlah	**777.285.625,28**	**118.069.559,79**	**659.216.065,49**	**558,33**

Rincian Beban Penyisihan Piutang disajikan pada tabel 5.4.38 sebagai berikut:

Tabel 5.4.39 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	0,00	14.205,13
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran	50.248.815,00	17.163,36
6	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	1.946.914,00	9.734,57
7	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	13.708.000,00	62.330,00
8	Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LO	823.270,67	533.598,11
9	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2.611.000,00	31.055,00
10	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	14.005.250,00	(17,89)
11	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	509.252.313,00	2.759.903,96
12	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.183.256,00	0,00
13	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	1.473.039,50	45.931.180,50
14	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak	83.033.767,11	68.710.407,05
	Jumlah	**777.285.625,28**	**118.069.559,79**

g) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp184.441.602.097,33 terjadi kenaikan apabila dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2022 sebesar (Rp101.541.636.603,95) Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 5.4.40 berikut ini:

Tabel 5.4.40 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Beban Penyusutan	**184.241.019.743,00**	**285.938.254.386,96**
1	Beban Penyusutan Peralatan dan mesin	28.806.358.481,00	28.194.515.530,12
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	27.378.494.783,00	24.290.526.557,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	128.056.166.479,00	233.453.212.299,84
	Beban Amortisasi	**200.582.354,33**	**285.938.254.386,96**
1	Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud	200.582.354,33	44.984.314,32
	Jumlah	**184.441.602.097,33**	**285.983.238.701,28**

Berdasarkan Tabel di atas terdapat penurunan dari perbandingan beban penyusutan aset lainnya Tahun 2022 dan Tahun 2021, Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp155.598.040,01.

h) Beban Transfer Bagi Hasil

Jumlah Beban Transfer Bagi Hasil Tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp50.658.091.165,94 terjadi kenaikan apabila dibandingkan dengan Beban Bantuan Transfer Bagi Hasil tahun 2021 sebesar Rp1.374.821.488,26 atau 2,79%. Perbandingan Beban Transfer Bagi Hasil - LO Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 5.4.41 berikut ini:

Tabel 5.4.41 Perbandingan Beban Transfer Bagi Hasil - LO Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bagi Hasil	50.658.091.165,94	49.283.269.677,68	1.374.821.488,26	2,79
	Jumlah	**50.658.091.165,94**	**49.283.269.677,68**	**1.374.821.488,26**	**2,79**

Berdasarkan Tabel di atas terdapat penurunan dari perbandingan Beban Beban Transfer Bagi Hasil Tahun 2022 dan Tahun 2021.

Rincian Beban Transfer disajikan pada tabel 5.4.42 sebagai berikut:

Tabel 5.4.42 Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.218.009.346,64	1.956.431.663,68	2.261.577.682,96	115,60
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	340.561.404,30	861.123.285,00	(520.561.880,70)	(60,45)
	Jumlah	**4.558.570.750,94**	**2.817.554.948,68**	**1.741.015.802,26**	**61,79**

Terdapat kenaikan dari perbandingan Beban Transfer Bagi Hasil Tahun 2022 dan Tahun 2021 atas beban Transfer Bagi Hasil Tahun 2022 sebesar Rp1.741.015.802,26.

Jika realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2022 dibandingan dengan realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah menurut LRA pada periode yang sama, terdapat perbedaan sebesar Rp4.558.570.750,94 sebagaimana disajikan pada tabel 5.4.44 berikut ini:

Tabel 5.4.44 Perbandingan Beban Bantuan Sosial -LO dan Belanja Bantuan Sosial LRA Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Realisasi Menurut		Selisih
		LO	LRA	
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.218.009.346,64	0,00	4.218.009.346,64
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	340.561.404,30	0,00	340.561.404,30
	Jumlah	**4.558.570.750,94**	**0,00**	**4.558.570.750,94**

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui Pemerintah Kabpaten Tulang Bawang Barat memiki hutang Bagi Hasil Kepada Desa sebesar Rp4.558.570.750,94 denga rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.45 Hutang Bagi Hasil Pajak

Triwulan	2021	2022
Trieulan 1	276.059.178,11	303.261.721,63
Trieulan 2	274.892.831,00	342.406.806,00
Trieulan 3	499.058.092,99	535.050.128,09
Trieulan 4	937.486.777,06	1.049.793.811,76
Jumlah	**1.987.496.879,16**	**2.230.512.467,48**
	Total	**4.218.009.346,64**

Tabel 5.4.46 Hutang Bagi Hasil Retribusi

Trieulan 1	2021	2022
Trieulan 2	33.163.615,30	39.283.768,10
Trieulan 3	31.995.498,50	39.464.958,70
Trieulan 4	48.145.912,00	53.490.506,60
Jumlah	**164.938.475,90**	**175.622.928,40**
	Total	**340.561.404,30**

i) Beban Bantuan Keuangan

Jumlah Beban Bantuan Keuangan direalisasikan sebesar Rp46.099.520.415,00 terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan Beban Bantuan Keuangan tahun 2021 sebesar (Rp366.194.314,00) atau (0,79%). Perbandingan Beban Bantuan Keuangan - LO Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 5.4.47 berikut ini:

Tabel 5.4.47 Perbandingan Beban Bantuan Keuangan - LO Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bantuan Keuangan	46.099.520.415,00	46.465.714.729,00	(366.194.314,00)	(0,79)
	Jumlah	**46.099.520.415,00**	**46.465.714.729,00**	**(366.194.314,00)**	**(0,79)**

Berdasarkan Tabel di atas terdapat penurunan dari perbandingan Beban Bantuan Keuangan Tahun 2022 dan Tahun 2021. Jumlah Beban Transfer Bantuan Bantuan Keuangan direalisasikan sebesar Rp46.099.520.415,00 terjadi penurunan sebesar (Rp366.194.314,00) apabila dibandingkan dengan Beban Bantuan Bantuan Keunagan tahun 2021 sebesar Rp46.465.714.729,00 atau (0,79%).

Tabel 5.4.48 Rincian Beban Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	303.109.344,00	-	303.109.344,00	(100,00)
2	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	45.796.411.071,00	44.965.714.729,00	830.696.342,00	1,85
3	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	-	1.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**46.099.520.415,00**	**46.465.714.729,00**	**(366.194.314,00)**	**(1,30)**

Jumlah Beban Transfer Bantuan Bantuan Keuangan direalisasikan sebesar Rp46.099.520.415,00 terjadi penurunan sebesar (Rp603.856.485,00) apabila dibandingkan dengan Beban Bantuan Bantuan Keunagan tahun 2020 sebesar Rp46.465.714.729,00 atau (1,30%) Perbandingan Beban Bantuan Keuangan - LO dan LRA Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 5.4.49 di bawah ini:

Tabel 5.4.49 Perbandingan Beban Bantuan Keuangan - LO dan Belanja Bantuan Keuangan LRA Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	LRA 2022	LO 2022	Selisih
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	303.109.344,00	303.109.344,00	-
2	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	128.159.037.900,00	45.796.411.071,00	82.362.626.829,00
	Jumlah	**128.462.147.244,00**	**46.099.520.415,00**	**82.362.626.829,00**

Pada Tabel di atas terlihat bahwa Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terdapat perbedaan di bandingkan dengan Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa merupakan belanja Trsanfer Dana Desa Tahun 2022 sebsesar Rp82.600.289.000,00 yang bukan merupakan Beban Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan terdapat Hutang Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp237.662.171,00 berupa :

1. Kurang salur ADD Tahun 2021 sebesar Rp20.408.971,00 dan
2. Hutang ADD Tahun 2022 sebesar Rp217.253.200,00

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

Nilai Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional selama Periode Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp796.972.305,83. Nilai tersebut diperoleh dari Nilai Pendapatan LO sebesar Rp801.353.226.032,17 dikurangi Beban LO sebesar Rp800.556.253.726,34.

KEGIATAN NON OPERASIONAL

5.4.3 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

a) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya selama periode Tahun 2022 sebesar Rp185.522.400,51.

5.4.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran; b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan c) Kejadian di luar kendali Pemerintah Daerah. Pada tahun 2022 terdapat pos luar biasa sebesar Rp66.000.000,00.

Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 diperoleh Defisit Laporan Operasional sebesar Rp916.494.706,34.

5.5 Penjelasan Pos –Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas bertujuan memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat selama Tahun Anggaran 2022 dibandingkan dengan ekuitas Tahun 2021. Komponen Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit Laporan Operasional, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.

5.5.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 sebesar Rp1.724.672.884.954,37. Nilai ini merupakan nilai Ekuitas Akhir pada Neraca audited Tahun 2021.

5.5.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 adalah sebesar Rp916.494.706,34 diperoleh dari akumulasi Surplus/Defisit-LO pada Laporan Operasional (LO) yang terdiri dari surplus pada kegiatan operasional sebesar Rp796.972.305,83 dan kegiatan non operasional sebesar Rp185.522.400,51 serta pos luar biasa sebesar (Rp66.000.000,00).

5.5.3 Dampak Kumulatif Perubahan Mendasar

Pada Tahun 2022 terdapat koreksi dan penyesuaian yang terjadi sebagai dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada penyajian kembali saldo awal aset dan kewajiban per 1 Januari 2022, sehingga atas selisih saldo awal aset dan kewajiban tersebut dilakukan namun pada Tahun 2022 tidak terdapat saldo terkoreksi terhadap nilai ekuitas awal sehingga tidak ada dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) audited Tahun 2021.

5.5.4 Koreksi Ekuitas

Koreksi ekuitas lainnya merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas sepanjang Tahun 2022. Nilai koreksi yang mengurangi ekuitas lainnya pada Tahun 2022 sebesar (Rp5.674.234.873,16) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.1 Koreksi Ekuitas Per 31 Desember 2022:

No	Uraian	Nilai
1	Koreksi Nilai Persediaan	6.475.972,00
2	Koreksi Ekuitas Lainnya	2.701.167.215,17
3	Koreksi ekuitas - Kas	(35.863.746.499,77)
4	Koreksi ekuitas - Penyisihan Piutang	544.480.460,17
5	Koreksi ekuitas - Aset Tetap	33.862.094.008,48
6	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(21.556.595.999,46)
7	Koreksi ekuitas -Investasi Jangka Panjang	19.472.434,82
8	Koreksi ekuitas - Aset Lainnya	192.468.000,00
9	Koreksi ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek	8.905.694.291,43
10	Koreksi ekuitas - Mutasi Aset Tetap antar OPD	5.597.088.246,00
11	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(82.833.002,00)
Total		**(5.674.234.873,16)**

5.5.4.1 Koreksi Nilai Persediaan

Penyesuaian Nilai persediaan adalah koreksi otomatis akibat penggunaan metode penilaian persediaan harga perolehan terakhir (yang biasanya muncul apabila pada bulan tersebut terjadi perolehan suatu persediaan sebanyak beberapa kali dengan nilai perolehan yang berbeda-beda), transaksi reklasifikasi persediaan, dan koreksi keluar-masuk persediaan. Koreksi Nilai Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.2 Koreksi Nilai Persediaan Per 31 Desember 2022:

No	Tanggal.	No Bukti	Uraian	Nilai (Rp)
1	31/12/2022	013/JP/KOREKSIOBAT/DINKES/2022	Koreksi Ekuitas Belanja Bahan Obat-Obatan 2021 Karena Opname	7.011.000
2	31/12/2022	07/JP/DROPOFF/OBAT/MD/2022	Mencatat Drop Off Obat Dari Dinas Kesehatan Tahuh 2022	509.173.310
3	31/12/2022	07/JP/PENGEMBALIANOBAT/DINKES/TBB/2022	Mencatat Penerimaaan Obat Dari Puskesmas Tahun 2022	58.270.366
4	31/12/2022	07/JP/PENGEMBALIANOBAT/KH/TBB/2022	Mencatat Pengembalian Obat Yang Dilarang Beredar Ke Dinas Kesehatan (R/K Ppkd)	(7.531.270)

5	31/12/2022	08/JP/DROPOFF/OBAT/KH/TBB/2022	Mencatat Drop Off Obat Dari Dinas Kesehatan Tahuh 2022	463.877.115
6	31/12/2022	08/JP/DROPOFF/OBAT/MA/2022	Mencatat Drop Off Obat Dari Dinas Kesehatan Tahuh 2022	528.355.592
7	31/12/2022	08/JP/DROPOFF/OBAT/TK/2022	Mencatat Drop Off Obat Dari Dinas Kesehatan Tahun 2022	404.171.936
8	31/12/2022	08/JP/DROPOFF/OBAT/TM/2022	Jurnal Drop Off Obat Dari Dinas Kesehatan Tahun 2022	464.625.021
9	31/12/2022	08/JP/PENGEMBALIANOBAT/MD/ 20222	Mencatat Pengembalian Obat Ke Dinas Kesehatan	(2.000)
10	31/12/2022	09/JP/DROPOFF/OBAT/DJ/TBB/2022	Mencatat Drop Off Obat Dari Dinas Kesehatan Tahuh 2022	199.554.856
11	31/12/2022	09/JP/DROPOFF/OBAT/DM/2022	Jurnal Drop Off Obat Dari Dinas Kesehatan Tahun 2022	421.945.503
12	31/12/2022	09/JP/DROPOFF/OBAT/GTM/2022	Jurnal Drop Off Obat Dari Dinas Kesehatan Tahun 2022	525.175.866
13	31/12/2022	09/JP/DROPOFF/OBAT/IJ/TBB/2022	Mencatat Drop Off Obat Dari Dinas Kesehatan Tahuh 2022	385.462.906
14	31/12/2022	09/JP/DROPOFF/OBAT/KBJ/2022	Mencatat Drop Off Obat Dari Dinas Kesehatan Tahuhn 2022	499.008.804
15	31/12/2022	09/JP/DROPOFF/OBAT/MD/2022	Mencatat Drop Off Obat Dari Dinas Kesehatan Tahun 2022	373.336.021
16	31/12/2022	09/JP/DROPOFF/OBAT/MK/2022	Jurnal Drop Off Obat Dari Dinas Kesehatan Tahun 2022	266.200.420
17	31/12/2022	09/JP/DROPOFF/OBAT/PD/2022	Mencatat Drop Off Obat Dari Dinas Kesehatan Tahuh 2022	467.016.012
18	31/12/2022	09/JP/PENGEMBALIANOBAT/GTM/ 2022	Mencatat Pengembalian Obat Ke Dinas Kesehatan	(155.400)
19	31/12/2022	09/JP/PENGEMBALIANOBAT/MA/ 2022	Mencatat Pengembalian Obat Ke Dinas Kesehatan	(1.363.378)
20	31/12/2022	09/JP/PENGEMBALIANOBAT/TK/ 2022	Mencatat Pengembalian Obat Ke Dinas Kesehatan	(1.074.300)
21	31/12/2022	09/JP/PENGEMBALIANOBAT/TM/ 2022	Mencatat Pengembalian Obat Ke Dinas Kesehatan	(6.010.153)
22	31/12/2022	10/JP/DROPOFF/OBAT/CM/2022	Jurnal Drop Off Obat Dari Dinas Kesehatan Tahun 2022	339.561.222
23	31/12/2022	10/JP/PENGEMBALIANOBAT/DJ/TBB/2022	Mencatat Pengembalian Obat Yang Dilarang Beredar Ke Dinas Kesehatan	(9.748.252)
24	31/12/2022	10/JP/PENGEMBALIANOBAT/DM/ 2022	Mencatat Pengembalian Obat Ke Dinas Kesehatan	(2.684.760)
25	31/12/2022	10/JP/PENGEMBALIANOBAT/IJ/ 2022	Mencatat Pengembalian Obat Yang Dilarang Beredar Ke Dinas Kesehatan	(1.048.760)
26	31/12/2022	10/JP/PENGEMBALIANOBAT/KBJ/ 2022	Mencatat Pengembalian Obat Ke Dinas Kesehatan	(1.583.788)
27	31/12/2022	10/JP/PENGEMBALIANOBAT/MD/ 2022	Mencatat Pengembalian Obat Ke Dinas Kesehatan	(1.027.000)
28	31/12/2022	10/JP/PENGEMBALIANOBAT/MK/ 2022	Mencatat Pengembalian Obat Ke Dinas Kesehatan	(1.200.289)
29	31/12/2022	10/JP/PENGEMBALIANOBAT/PD/ 2022	Mencatat Pengembalian Obat Ke Dinas Kesehatan	(16.816.200)
30	31/12/2022	11/JP/PENGEMBALIANOBAT/CM/ 2022	Mencatat Pengembalian Obat Ke Dinas Kesehatan	(3.538.554)
31	31/12/2022	13/JP/DROPOFF/OBAT/PJ/TBB/2022	Mencatat Drop Off Obat Dari Dinas Kesehatan Tahuh 2022	611.223.808
32	31/12/2022	14/JP/PENGEMBALIANOBAT/PJ/TBB/2022	Mencatat Pengembalian Obat Yang Dilarang Beredar Ke Dinas Kesehatan	(3.165.000)
33	31/12/2022	17/JP/DROPOFF/SJ/TBB/2022	Jurnal Drop Off Obat Dari Dinas Kesehatan Tahun 2022	542.736.501
34	31/12/2022	18/JP/DROPOFF/SJ/TBB/2022	Jurnal Pengembalian Obat Ke Dinkes	(1.856.290)
35	31/12/2022	20/JP/DROPOFF/OBAT/DINKES/2022	Jurnal Penyesuian Drop Off Obat Ke Puskesmas	(7.001.424.893)
Total				**6.475.972**

5.5.4.2 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.3 Koreksi Ekuitas Lainnya Per 31 Desember 2022:

No	Tanggal.	No Bukti	Uraian	Nilai (Rp)
1	03/01/2022		Koreksi Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2021	39.486.711
2	31/12/2022	06/JB/HUTANGPAJAKRANDIS/KH/TBB/2022	Mencatat Koreksi Hutang Pajak Randis Tahun 2021	10.752.667
3	31/12/2022	10/JP/HIBAHASET/DLH/2022	Hibah Aset Excavator Dan Instalasi Pengolahan Sampah Organik Dari Dari Kementerian Pupr	1.157.288.000
4	31/12/2022	10/JP/HIBAHASET/DLH/2022	Hibah Aset Excavator Dan Instalasi Pengolahan Sampah Organik Dari Dari Kementerian Pupr	4.981.354.000
5	31/12/2022	100/JP/PENYERTAAMIDALBPRS/SKPKD/TUBABA/2022	Jurnal Penyesuaian Penyertaaan Modal Tahun 2022	1.102.519.788
6	31/12/2022	11/JP/AKUMULASIPENYUSUTANASETHIBAH/DLH/2022	Jurnal Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Hibah Dlh	(935.474.467)
7	31/12/2022	11/JP/AKUMULASIPENYUSUTANASETHIBAH/DLH/2022	Jurnal Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Hibah Dlh	(4.026.594.483)
8	31/12/2022	12/JP/HIBAH.ASET/DPMPPST/TBB/2022	Mencatat Jurnal Hibah Aset Tanah Dari Masyarakat	122.715.000
9	31/12/2022	22/JP/HIBAH.ASET/BATUPUTIH/TBB/2022	Mencatat Jurnal Hibah Aset Tanah Unutk Bangunan Tempat Kerja	127.620.000
10	31/12/2022	22/JP/HIBAH.ASET/KEC.GUNTER/TBB/2022	Mencatat Jurnal Hibah Aset Tanah Dari Masyarakat	121.500.000
Total				**2.701.167.216**

5.5.4.3 Koreksi Ekuitas – Kas

Koreksi Ekuitas – Kas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.4 Koreksi Ekuitas – Kas Per 31 Desember 2022:

No	Tanggal.	No Bukti	Uraian	Nilai (Rp)
1	31/01/2022	900/01/KOREKSILIPLA/TUBABA/2022	Mencatat Koreksi Silpa Tahun 2022 Pada Bank Bni	(60.000)
2	31/12/2022	01/KOREKSISILPA/MA/TBB/2022	Mencatat Koreksi Silpa Tahun Sebelumnya Sebesar Rp 0,23	0,23
3	31/12/2022	05/JP/MUTASIKAS/BPKAD/SKPKD/TUBABA/2022	Junarl Mutasi Kas Paud Ke Dinas Pendidikan SKPKD	4.337.475.000
4	31/12/2022	05/JP/MUTASIKAS/BPKAD/TUBABA/2022	Jurnal Penyesuaian Mutasi Kas Lainnya Pendapatan Paud Dan Kesetaraan Ke Dinas Pendidikan	(4.337.475.000)
5	31/12/2022	05/MUTASIKASLAINNYA/DISDIK/2022	Jurnal Penyesuaian Mutasi Kas Lainnya Belanja Paud Dan Kesetaraan Tahun 2022 Dari BPKAD	4.337.475.000
6	31/12/2022	05/MUTASIKASLAINNYA/DISDIK/SKPKSD/2022	Jurnal Penyesuaian Mutasi Kas Lainnya Belanja Paud Dan Kesetaraan Tahun 2022 Dari Bpkad SKPKd	(4.337.475.000)
7	31/12/2022	06/JP/MUTASIKASBOS/	Jurnal Mutasi Kas Bos Ke Dinas	(35.863.746.500)

		BPKAD/SKPD/TUBABA/2022	Pendidikan (SKPD)	
8	31/12/2022	06/JP/MUTASIKASBOS/BPKAD/SKPKD/TUBABA/2022	Jurnal Mutasi Kas Bos Ke Dinas Pendidikan (SKPKD)	35.863.746.500
9	31/12/2022	06/JP/MUTASIKASBOS/DISDIK/SKPKD/TUBABA/2022	Jurnal Mutasi Kas Bos Dari Bpkad (SKPKD)	(35.863.746.500)
10	31/12/2022	10/JK/BPK/BKAD/2022	Koreksi Atas Koreksi Silpa Tahun 2021 - Koreksi Ekuitas	60.000,00
Total				**(35.863.746.499,77)**

5.5.4.4 Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang :

Tabel 5.5.5 Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2022:

No	Tanggal.	No Bukti	Uraian	Nilai (Rp)
1	03/01/2022	02/JB/PENYISIHANPIUTANG/MD/2022	Jurnal Penyesuaian Penyihan Piutang Blud Tahun 2021	19.850,00
2	03/01/2022	04/JB/PENYISIHANPIUTANGPENDAPATAN/TK/2022	Mencatat Penyesuaian Penyiisihan Piutang Blud Tahun 2021	8.000,00
3	31/12/2022	02/JP/PENYISHANPIUTANGDANABERGULIR/TUBABA/2022	Jurnal Penyesiauan Penyisihan Piutang Dana Bergulir	457.665.000,00
4	31/12/2022	02/JP/PENYISIHANPIUTANG/CM/2022	Jurnal Penyesuian Penyisihan Piutang Tahun 2022	13.000,00
5	31/12/2022	02/JP/PENYISIHANPIUTANG/DM/2022	Jurnal Penyesuian Penyisihan Piutang Tahun 2022	35.655,00
6	31/12/2022	02/JP/PENYISIHANPIUTANG/MA/2022	Jurnal Penyesuian Penyisihan Piutang Tahun 2022	87.085,50
7	31/12/2022	02/JP/PENYISIHANPIUTANG/RSUD/2022	Jurnal Penyesuian Penyisihan Piutang Tahun 2022	44.265.773,50
8	31/12/2022	02/JP/PENYISIHANPIUTANGDBH/BPKAD/2022	Jurnal Penyesuaian Penysihan Piutang Dbh Provinsi 2022	41.125.336,85
9	31/12/2022	02/JP/PENYISIHANPIUTANGPENDAPATAN/PJ/TBB/2022	Mencatat Penyesuaian Penyiisihan Piutang Blud Tahun 2022	46.760,00
10	31/12/2022	15/JP/PENYISIHANPIUTANGPAJAKHOTEL/BPPRD/2022	Jurnal Penyesuaian Penyisihan Piutang Pajak Hotel	7.321,95
11	31/12/2022	16/JP/PENYISIHANPIUTANGPAJAKRESTO/BPPRD/2022	Jurnal Penyesuaian Penyisihan Piutang Pajak Restoran Tahun 2022	205.820,45
12	31/12/2022	17/JP/PENYISIHANPIUTANGPAJAKPAMERAN/BPPRD/2022	Jurnal Penyisihan Piutang Pajak Hiburan Tahun 2022	9.734,57
13	31/12/2022	18/JP/PENYISIHANPIUTANGPAJAKREKLAME/BPPRD/2022	Jurnal Penyisihan Piutang Pajak Reklame Tahun 2022	65.801,00
14	31/12/2022	22/JP/PENYISIHANPIUTANGPAJAKPARKIR/BPPRD/2022	Jurnal Penyisihan Piutang Pajak Parkir Tahun 2022	33.805,00
15	31/12/2022	23/JB/PENYISIHANPIUTANGPAJAKAIRTANAH/BPPRD/2022	Jurnal Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2022	168.248,96
16	31/12/2022	24/JP/PENYISIHANPIUTANGPBBP2/BPPRD/2022	JURNAL Penyisihan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) TAHUN 2022	723.267,39
Total				**544.480.460,17**

5.5.4.5 Koreksi Ekuitas – Aset Tetap

Koreksi Ekuitas – Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.6 Koreksi Ekuitas – Aset Tetap Per 31 Desember 2022:

No	Tanggal.	No Bukti	Uraian	Nilai (Rp)
1	31/03/2022	01/JP/M.ASETMASUK/KEC.W.KENANGA/TBB/2022	Mencatat Mutasi Aset Masuk Kendaraan Bermotor Beroda Dua Dari Bpprd Th 2022	13.400.000
2	31/03/2022	02/JP/M.ASETKELUAR/KEC.W.KENANGA/TBB/2022	Mencatat Mutasi Aset Kendaraan Bermotor Penumpang Ke Ke Seretariat Daerah (Bag. Umum) Th 2022	(181.390.000)
3	31/12/2022	006/JP/M.ASETKELUAR/KEC.G.AGUNG/TBB/2022	Mencatat Mutasi Aset Keluar Kendaraan Bermotor Penumpang Ke Ke Bag. Kesra Dan Ke Perpus Th 2022	(283.390.000)
4	31/12/2022	007/JP/M.ASETMASUK/KEC.G.AGUNG/TBB/2022	Mencatat Mutasi Aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua Dari Bpprd Th 2022	13.400.000
5	31/12/2022	01/JP/MUTASIASET/KEC/LBKIBANG/TBB/2022	Mencatat Mutasi Aset Kendaraan Dinas Penumpang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	(163.600.000)
6	31/12/2022	01/M.ASET/KH/TBB/2022	Mencatat Mutasi Aset Dari Dinas Kesehatan Th 2022	89.708.541
7	31/12/2022	01/M.ASET/KH/TBB/2022	Mencatat Mutasi Aset Dari Dinas Kesehatan Th 2022	77.494.608
8	31/12/2022	02/JP/M.ASETMASUK/KEC.LBKIBANG/TBB/2022	Mencatat Mutasi Aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua Dari Bpprd Th 2022	13.400.000
9	31/12/2022	02/JP/M.ASETMASUK/KEC.LBKIBANG/TBB/2022	Mencatat Mutasi Aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua Dari Bpprd Th 2022	10.000.000
10	31/12/2022	02/JP/MUTASIASET/MD/2022	Mencatat Mutasi Aset Dari Dinas Kesehatan Tahun 2022	600.000.000
11	31/12/2022	02/JP/MUTASIASET/MD/2022	Mencatat Mutasi Aset Dari Dinas Kesehatan Tahun 2022	67.807.782
12	31/12/2022	02/JP/MUTASIASETMASUK/TK/2022	Mencatat Mutasi Aset Dari Dinas Kesehatan Tahun 2022	48.434.130
13	31/12/2022	04/JP/MUTASIASET/IJ/ 2022	Mencatat Mutasi Aset Dari Dinas Kesehatan Tahun 2022	48.434.126
14	31/12/2022	04/JP/MUTASIASET/MA/2022	Mencatat Mutasi Aset Dari Dinas Kesehatan Tahun 2022	89.708.541
15	31/12/2022	04/JP/MUTASIASET/MA/2022	Mencatat Mutasi Aset Dari Dinas Kesehatan Tahun 2022	77.494.608
16	31/12/2022	04/JP/MUTASIASET/SJ/2022	Mencatat Mutasi Aset Dari Dinas Kesehatan Tahun 2022	89.708.545
17	31/12/2022	04/JP/MUTASIASET/SJ/2022	Mencatat Mutasi Aset Dari Dinas Kesehatan Tahun 2022	116.241.912
18	31/12/2022	04/JP/MUTASIASETEMASUK/SETDA/2022	Jurnal Mutasi Aset Masuk Dari Skpd Lain Tahun 2022 Setda	3.404.970.000
19	31/12/2022	04/JP/MUTASIASETEMASUK/SETDA/2022	Jurnal Mutasi Aset Masuk Dari Skpd Lain Tahun 2022 Setda	297.700.000
20	31/12/2022	04/JP/MUTASIASETEMASUK/SETDA/2022	Jurnal Mutasi Aset Masuk Dari Skpd Lain Tahun 2022 Setda	44.075.000
21	31/12/2022	04/JP/MUTASIASETKELUAR/PERKIMTA/2022	Jurnal Muatsi Aset Keluar Perkimta Tahun 2022	(326.499.000)
22	31/12/2022	04/JP/MUTASIASETKELUAR/PERKIMTA/2022	Jurnal Muatsi Aset Keluar Perkimta Tahun 2022	(29.868.000)
23	31/12/2022	04/JP/MUTASIASETMASUK/GTM/2022	Mencatat Mutasi Aset Dari Dinas Kesehatan Tahun 2022	96.868.260
24	31/12/2022	04/JP/MUTASIASETMASUK/KBJ/2	Mencatat Mutasi Aset Dari Dinas	89.708.541

		022	Kesehatan Tahun 2022	
25	31/12/2022	04/JP/MUTASIASETMASUK/KBJ/2022	Mencatat Mutasi Aset Dari Dinas Kesehatan Tahun 2022	106.555.086
26	31/12/2022	04/JP/MUTASIASETMASUK/MD/2022	Mencatat Mutasi Aset Dari Dinas Kesehatan Tahun 2022	87.181.434
27	31/12/2022	04/JP/MUTASIASETMASUK/TM/2022	Mencatat Mutasi Aset Dari Dinas Kesehatan Tahun 2022	89.708.541
28	31/12/2022	04/JP/MUTASIASETMASUK/TM/2022	Mencatat Mutasi Aset Dari Dinas Kesehatan Tahun 2022	96.868.260
29	31/12/2022	05/JP/MUTASIASET/CM/2022	Mencatat Mutasi Aset Dari Dinas Kesehatan Tahun 2022	164.676.042
30	31/12/2022	05/JP/MUTASIASET/PD/2022	Mencatat Mutasi Aset Dari Dinas Kesehatan Tahun 2022	89.708.541
31	31/12/2022	05/JP/MUTASIASET/PD/2022	Mencatat Mutasi Aset Dari Dinas Kesehatan Tahun 2022	58.120.956
32	31/12/2022	05/JP/MUTASIASET/PJ/TBB/2022	Mencatat Mutasi Aset Dari Dinas Kesehatan Tahun 2022	174.362.868
33	31/12/2022	05/JP/MUTASIASETMASUK/DM/2022	Mencatat Mutasi Aset Dari Dinas Kesehatan Tahun 2022	87.181.434
34	31/12/2022	05/JP/MUTASIASETMASUK/MK/2022	Mencatat Mutasi Aset Dari Dinas Kesehatan Tahun 2022	87.181.434
35	31/12/2022	05/JP/MUTASIASETMASUK/PERKIMTA/2022	Jurnal Mutas Aset Masuk Perkimta Tahun 2022	695.694.000
36	31/12/2022	05/JP/MUTASIASETMASUK/PERKIMTA/2022	Jurnal Mutas Aset Masuk Perkimta Tahun 2022	183.060.000
37	31/12/2022	05/JP/MUTASIASETMASUK/PERKIMTA/2022	Jurnal Mutas Aset Masuk Perkimta Tahun 2022	33.000.000
38	31/12/2022	06/JP/M.ASETMASUK/DLH/2022	Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	177.850.000
39	31/12/2022	06/JP/M.ASETMASUK/DLH/2022	Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	167.750.000
40	31/12/2022	06/JP/M.ASETMASUK/DLH/2022	Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	16.207.850
41	31/12/2022	06/JP/M.ASETMASUK/DLH/2022	Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	29.868.000
42	31/12/2022	06/JP/M.ASETMASUK/DLH/2022	Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	595.499.000
43	31/12/2022	06/JP/M.ASETMASUK/DLH/2022	Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	187.362.000
44	31/12/2022	06/JP/M.ASETMASUK/DLH/2022	Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	82.833.000
45	31/12/2022	06/JP/M.ASETMASUK/DLH/2022	Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	93.658.000
46	31/12/2022	06/JP/M.ASETMASUK/DLH/2022	Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	220.132.027
47	31/12/2022	06/JP/MUTASIASET/DJ/TBB/2022	Mencatat Mutasi Aset Dari Dinas Kesehatan Tahun 2022	96.868.260
48	31/12/2022	06/JP/MUTASIKASBOS/DISDIK/SKPD/TUBABA/2022	Jurnal Mutasi Kas Bos Dari Bpkad (Skpd)	35.863.746.500
49	31/12/2022	07/JP/M.ASETKELUAR/DLH/2022	Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(599.170.000)
50	31/12/2022	08/JP/M.ASETKELUAR/DINSOS/TBB/2022	Mencatat Mutasi Aset Keluar Dinas Sosial Tahun 2022	(168.410.000)
51	31/12/2022	08/JP/M.ASETKELUAR/DINSOS/TBB/2022	Mencatat Mutasi Aset Keluar Dinas Sosial Tahun 2022	(10.000.000)
52	31/12/2022	08/JP/MUTASIASETMASUK/INSPEKTORAT/2022	Jurnal Mutasi Aset Masuk Inspektorat Tahun 2022	1.310.900.000
53	31/12/2022	08/JP/MUTASIASETMASUK/INSPEKTORAT/2022	Jurnal Mutasi Aset Masuk Inspektorat Tahun 2022	16.200.000
54	31/12/2022	09/JP/M.ASETMASUK/DINSOS/TBB/2022	Jurnal Mutasi Aset Masuk	181.390.000
55	31/12/2022	09/JP/M.ASETMASUK/KESBANG/2022	Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	200.000.000
56	31/12/2022	09/JP/M.ASETMASUK/KESBANG/2022	Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	18.011.250
57	31/12/2022	09/JP/MUTASIASETKELUAR/INSPEKTORAT/2022	Jurnal Mutasi Aset Keluat Inspektorat Tahun 2022	(448.600.000)
58	31/12/2022	09/JP/MUTASIASETKELUAR/INSPEKTORAT/2022	Jurnal Mutasi Aset Keluat Inspektorat Tahun 2022	(163.600.000)
59	31/12/2022	09/JP/MUTASIASETMASUK/PERIKANAN/TBB/2022	Mencatat Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	181.390.000
60	31/12/2022	09/JP/MUTASIASETMASUK/PERIKANAN/TBB/2022	Mencatat Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	70.592.403

61	31/12/2022	09/M.ASETMASUK/KOMNFO/2022	Mencatat Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	524.190.000
62	31/12/2022	09/M.ASETMASUK/KOMNFO/2022	Mencatat Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	43.200.500
63	31/12/2022	09/M.ASETMASUK/KOMNFO/2022	Mencatat Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	5.822.234.789
64	31/12/2022	10/JP/M.ASETKELUAR/KESBANG/2022	Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(32.920.000)
65	31/12/2022	10/JP/MUTASIASET.KELUAR/BATUPUTIH/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(13.520.000)
66	31/12/2022	10/JP/MUTASIASET.KELUAR/DISPORA/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(168.410.000)
67	31/12/2022	10/JP/MUTASIASET.KELUAR/KEC.TBT/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	132.665.000
68	31/12/2022	10/JP/MUTASIASET.KELUAR/KEC.TBT/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	181.390.000
69	31/12/2022	10/JP/MUTASIASET.KELUAR/KEC.TBT/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	16.050.000
70	31/12/2022	10/JP/MUTASIASET.KELUAR/KOPERINDAG/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(168.410.000)
71	31/12/2022	10/JP/MUTASIASET.KELUAR/KOPERINDAG/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(2.500.000)
72	31/12/2022	10/JP/MUTASIASET.KELUAR/NAKERTRANS/TBB/2022	10/Jp/Mutasiaset.Keluar/Nakertrans/Tbb/2022	(16.350.000)
73	31/12/2022	10/JP/MUTASIASET.MASUK/BATUPUTIH/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	45.500.000
74	31/12/2022	10/JP/MUTASIASET.MASUK/DAMKAR/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	16.050.000
75	31/12/2022	10/JP/MUTASIASET.MASUK/DISPORA/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	168.410.000
76	31/12/2022	10/JP/MUTASIASET.MASUK/DISPORA/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	18.800.000
77	31/12/2022	10/JP/MUTASIASET.MASUK/DISPORA/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	1.362.668.728
78	31/12/2022	10/JP/MUTASIASET.MASUK/DISPORA/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	103.424.240
79	31/12/2022	10/JP/MUTASIASET.MASUK/DPMPPST/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	332.010.000
80	31/12/2022	10/JP/MUTASIASET.MASUK/DPMPPST/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	3.398.561.446
81	31/12/2022	10/JP/MUTASIASET.MASUK/DPMPPST/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	297.160.000
82	31/12/2022	10/JP/MUTASIASET.MASUK/KEC.TBT/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	(26.738.095)
83	31/12/2022	10/JP/MUTASIASET.MASUK/NAKERTRANS/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	200.000.000
84	31/12/2022	10/JP/MUTASIASET.MASUK/NAKERTRANS/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	27.637.000
85	31/12/2022	10/JP/MUTASIASETKELUAR/PERIKANAN/TBB/2022	Mencatat Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(19.588.100)
86	31/12/2022	10/JP/MUTASIASETKELUAR/PERIKANAN/TBB/2022	Mencatat Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(187.362.000)
87	31/12/2022	10/JP/MUTASIASETKELUAR/PERIKANAN/TBB/2022	Mencatat Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(82.833.002)
88	31/12/2022	10/JP/MUTASIASETKELUAR/PERIKANAN/TBB/2022	Mencatat Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(93.658.000)
89	31/12/2022	10/JP/MUTASIASETKELUAR/PERIKANAN/TBB/2022	Mencatat Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(220.132.027)
90	31/12/2022	10/JP/MUTASIASETMASUK/DISDIK/2022	Jurnal Mutasi Aset Masuk Dari Opd Lian Disdik 2022	181.390.000
91	31/12/2022	10/JP/MUTASIASETMASUK/DISDIK/2022	Jurnal Mutasi Aset Masuk Dari Opd Lian Disdik 2022	338.430.000
92	31/12/2022	10/JP/MUTASIASETMASUK/DISD	Jurnal Mutasi Aset Masuk Dari Opd	333.623.700

		IK/2022	Lian Disdik 2022	
93	31/12/2022	100/JP/KOREKSI-ASET/PUPR/2022	Jurnah Koreksi Aset PUPR	7,14
94	31/12/2022	11/JP/KOREKSIASET/DJ/TBB/2022	Koreksi Aset	(1)
95	31/12/2022	11/JP/KOREKSIASET/MD/2022	Jurnal Koreksi Aset Tahun 2022	350.000
96	31/12/2022	11/JP/MUTASI.ASET.MASUK/BPKAD/2022	Jurnal Mutasi Aset Masuk Bpkas Dari Skpd Lain Tahun 2022	2.067.475.000
97	31/12/2022	11/JP/MUTASI.ASET.MASUK/BPKAD/2022	Jurnal Mutasi Aset Masuk Bpkas Dari Skpd Lain Tahun 2022	130.538.350
98	31/12/2022	11/JP/MUTASIASETKELUAR/MA/2022	Jurnal Mutasi Aset Keluar Ke Puskesmas Sukajaya Tahun 2022	(169.502.461)
99	31/12/2022	12/JP/HIBAH.ASET/KEC.TBT/TBB/2022	Mencatat Jurnal Hibah Aset Tanah Dari Tulang Bawang Ke Dishub Tahun 2009	127.600.000
100	31/12/2022	13/JP/HIBAH.ASET/DAMKAR/TBB/2022	Mencatat Jurnal Hibah Aset Mobil Damkar Dari Provinsi	72.000.000
101	31/12/2022	13/JP/HIBAH.ASET/DAMKAR/TBB/2022	Mencatat Jurnal Hibah Aset Mobil Damkar Dari Provinsi	821.750.000
102	31/12/2022	13/JP/MUTASI.AESET.KELUAR/BPKAD/2022	Jurnal Mutasi Aset Keluar Dari Bpkad Ke Skpd Lain Tahun 2022	(269.000.000)
103	31/12/2022	13/JP/MUTASI.AESET.KELUAR/BPKAD/2022	Jurnal Mutasi Aset Keluar Dari Bpkad Ke Skpd Lain Tahun 2022	(749.000.000)
104	31/12/2022	14/JP/KOREKSIASET/SETDA/2022	Jurnal Koreksi Kurang Catat Aset Setda	16.350.000,00
105	31/12/2022	14/JP/KURANGCATATASET/DINKES/2022	Jurnal Kurang Saji Aset Tetap Tahun Sebelumnya Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	270.480.000
106	31/12/2022	14/JP/LEBIHCATAT.ASET/2021/PENDIDIKAN/DISDIK/2022	Jurnal Koreksi Lebih Catat Aset Bangunan Pendidikan Akibat Lebih Catat Hutang Retensi Tahun 2021	(17.000)
107	31/12/2022	14/JP/MUTASIAKUMULASIPENYUSUTANKELUA/KEC.TBT/2022	Jurnal Akumulasi Penyusutan Keluar 2022	(127.600.000)
108	31/12/2022	14/JP/MUTASIAKUMULASIPENYUSUTANKELUA/KEC.TBT/2022	Jurnal Akumulasi Penyusutan Keluar 2022	(132.665.000)
109	31/12/2022	14/JP/MUTASIAKUMULASIPENYUSUTANKELUA/KEC.TBT/2022	Jurnal Akumulasi Penyusutan Keluar 2022	(181.390.000)
110	31/12/2022	14/JP/MUTASIAKUMULASIPENYUSUTANKELUA/KEC.TBT/2022	Jurnal Akumulasi Penyusutan Keluar 2022	(16.050.000)
111	31/12/2022	14/JP/MUTASIASETMASUK/SJ/TBB/2022	Jurnal Mutasi Aset Bangunan Kesehatan Dari Puskes Panaragan Jaya	169.502.461
112	31/12/2022	15/JP/MUTASIASET.KELUAR/SETWAN/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(965.290.000)
113	31/12/2022	15/JP/MUTASIASET.KELUAR/SETWAN/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(1.852.804.000)
114	31/12/2022	15/JP/MUTASIASET.MASUK/SETWAN/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	512.870.000
115	31/12/2022	15/JP/MUTASIASET.MASUK/SETWAN/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	362.519.750
116	31/12/2022	16/JP/M.AK.PENY.KELUAR/PERIKANAN/TBB/2022	Mencatat Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Keluar	19.588.100
117	31/12/2022	16/JP/M.AK.PENY.KELUAR/PERIKANAN/TBB/2022	Mencatat Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Keluar	27.167.490
118	31/12/2022	16/JP/M.AK.PENY.KELUAR/PERIKANAN/TBB/2022	Mencatat Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Keluar	22.318.892
119	31/12/2022	16/JP/M.AK.PENY.KELUAR/PERIKANAN/TBB/2022	Mencatat Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Keluar	13.268.217
120	31/12/2022	16/JP/M.AK.PENY.KELUAR/PERIKANAN/TBB/2022	Mencatat Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Keluar	66.651.086
121	31/12/2022	18/JP/MUTASIASETKELUAR/DINKES/2022	Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(438.890.000)
122	31/12/2022	18/JP/MUTASIASETKELUAR/DINKES/2022	Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(15.000.000)
123	31/12/2022	18/JP/MUTASIASETKELUAR/DINKES/2022	Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(600.000.000)
124	31/12/2022	18/JP/MUTASIASETKELUAR/DINKES/2022	Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(538.251.250)

125	31/12/2022	18/JP/MUTASIASETKELUAR/DINKES/2022	Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(1.491.771.200)
126	31/12/2022	20/JP/KOREKSI/SETDA/2022	Mutasi Keluar Dari Setda Ke Opd	(2.062.243.000)
127	31/12/2022	20/JP/KOREKSI/SETDA/2022	Mutasi Keluar Dari Setda Ke Opd	(2.664.040.000)
128	31/12/2022	20/JP/KOREKSI/SETDA/2022	Mutasi Keluar Dari Setda Ke Opd	(1.079.460.650)
129	31/12/2022	20/JP/KOREKSI/SETDA/2022	Mutasi Keluar Dari Setda Ke Opd	(650.080.550)
130	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.KELUAR/BAPPEDA/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(619.340.000)
131	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.KELUAR/BAPPEDA/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(249.400.000)
132	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.KELUAR/BAPPEDA/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(32.295.000)
133	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.KELUAR/BKD/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(16.050.000)
134	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.KELUAR/BKP/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(163.600.000)
135	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.KELUAR/BKP/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(14.702.500)
136	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.KELUAR/BPBD/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(16.200.000)
137	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.KELUAR/BPPRD/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(134.050.000)
138	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.KELUAR/DISHUB/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(171.400.000)
139	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.KELUAR/DISHUB/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(16.200.000)
140	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.KELUAR/DPMT/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(168.410.000)
141	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.KELUAR/KEC.GUNTER/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(181.390.000)
142	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.KELUAR/KEC.GUNTER/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(32.100.000)
143	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.KELUAR/KEC.PDEWA/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(163.600.000)
144	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.KELUAR/KEC.TBU/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(102.000.000)
145	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.KELUAR/KEC.TBU/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(163.600.000)
146	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.KELUAR/PERTANIAN/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(168.410.000)
147	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.KELUAR/PERTANIAN/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(71.144.403)
148	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.KELUAR/TBT/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(127.600.000)
149	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.KELUAR/TMJJ/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(181.390.000)
150	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.KELUAR/TMJJ/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(16.050.000)
151	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.MASUK/ /TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	211.500.000
152	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.MASUK/ /TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	599.170.000
153	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.MASUK/BAPPEDA/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	280.190.000
154	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.MASUK/BKD/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	495.610.000
155	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.MASUK/BKD/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	16.050.000
156	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.MASUK/BKP/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	13.520.000
157	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.MASUK/DISHUB/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	127.600.000
158	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.MASUK/DISH	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk	344.990.000

		UB/TBB/2022	Tahun 2022	
159	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.MASUK/DISHUB/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	270.543.000
160	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.MASUK/DISHUB/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	3.632.993.204
161	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.MASUK/DISHUB/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	417.927.118
162	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.MASUK/DPAD/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	181.390.000
163	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.MASUK/DPMT/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	168.410.000
164	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.MASUK/DUKCAPIL/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	163.600.000
165	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.MASUK/DUKCAPIL/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	12.700.000
166	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.MASUK/DUKCAPIL/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	3.036.975.527
167	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.MASUK/KEC.GUNTER/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	13.400.000
168	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.MASUK/KEC.PDEWA/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	13.400.000
169	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.MASUK/KEC.TBU/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	13.400.000
170	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.MASUK/KOPERINDAG/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	106.028.382.810
171	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.MASUK/PERTANIAN/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	168.410.000
172	31/12/2022	20/JP/MUTASIASET.MASUK/TMJJ/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	13.400.000
173	31/12/2022	21/JP/MUTASIASET.KELUAR/ /TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Keluar Tahun 2022	(50.737.000)
174	31/12/2022	21/JP/MUTASIASET.MASUK/ /TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Aset Masuk Tahun 2022	47.225.100
175	31/12/2022	22/JP/HIBAH.ASET/DISHUB/TBB/2022	Mencatat Jurnal Hibah Aset Tanah Dari Tulang Bawang Dan Kendaraan Bermotor Penumpang Dari Dirjen Perhubungan	620.160.000
176	31/12/2022	22/JP/HIBAH.ASET/DISHUB/TBB/2022	Mencatat Jurnal Hibah Aset Tanah Dari Tulang Bawang Dan Kendaraan Bermotor Penumpang Dari Dirjen Perhubungan	293.700.000
177	31/12/2022	22/JP/MUTASI.ASETMASUK /TBB/2022	Jurnal Mutasi Aset Masuk Dari Dinkes	15.000.000
178	31/12/2022	25/JP/M.AK.PENY.MASUK/BPPRD /2022	Jurnal Mutasi Akumulasi Penyusutan Masuk Tahun 2022	(177.850.000)
179	31/12/2022	25/JP/M.AK.PENY.MASUK/BPPRD /2022	Jurnal Mutasi Akumulasi Penyusutan Masuk Tahun 2022	(16.050.000)
180	31/12/2022	26/JP/MUTASIASET/PERTANIAN/TBB/2022	Mencatat Aset Bangunan Gedung Kantor	(0,66)
181	31/12/2022	30/JP/KOREKSI/KEC.LBKB/TUBABA/2022	Mencatat Koreksi Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kantor Th 2022	(4)
182	31/12/2022	31/JP/PENYESUAIAN/KEC.TMJJR/TUBABA/2022	Mencatat Jurnal Penyesuaian Koreksi Penyusutan Kendaraan Penumpang Thn 2022	181.390.000
183	31/12/2022	32/JP/KOREKSIASETKELUAR/PUPR/2022	Jurbal Penyesuaian Lebih Cata Aset Yang Dikoreksi Tahun 2022	(71.473.400)
184	31/12/2022	32/JP/KOREKSIASETKELUAR/PUPR/2022	Jurbal Penyesuaian Lebih Cata Aset Yang Dikoreksi Tahun 2022	(1.271.878.000)
185	31/12/2022	32/JP/KOREKSIASETKELUAR/PUPR/2022	Jurbal Penyesuaian Lebih Cata Aset Yang Dikoreksi Tahun 2022	(1.151.135.000)
186	31/12/2022	32/JP/PENYESUAIAN/KEC.TMJJR/TUBABA/2022	Mencatat Penyesuaian Akumulasi Kendaraan Bermotor Roda Dua	(10.688.095)

187	31/12/2022	324/JP/MUTASIPENYUSUTANMASUK/DISDIK/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Penyusutan Masuk Disdik 2022	(181.390.000)
188	31/12/2022	324/JP/MUTASIPENYUSUTANMASUK/DISDIK/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Penyusutan Masuk Disdik 2022	(333.623.700)
189	31/12/2022	324/JP/MUTASIPENYUSUTANMASUK/DISDIK/TBB/2022	Mencatat Jurnal Mutasi Penyusutan Masuk Disdik 2022	(338.430.000)
190	31/12/2022	34/JP/MUTASIASETKELUAR/PUPR/2022	Jurnal Mutasi Aset Keluar Dari Pupr Tahun 2022	(297.700.000)
191	31/12/2022	34/JP/MUTASIASETKELUAR/PUPR/2022	Jurnal Mutasi Aset Keluar Dari Pupr Tahun 2022	(18.800.000)
192	31/12/2022	34/JP/MUTASIASETKELUAR/PUPR/2022	Jurnal Mutasi Aset Keluar Dari Pupr Tahun 2022	(17.592.910.008)
193	31/12/2022	34/JP/MUTASIASETKELUAR/PUPR/2022	Jurnal Mutasi Aset Keluar Dari Pupr Tahun 2022	(1.362.668.728)
194	31/12/2022	34/JP/MUTASIASETKELUAR/PUPR/2022	Jurnal Mutasi Aset Keluar Dari Pupr Tahun 2022	(106.028.382.810)
195	31/12/2022	34/JP/MUTASIASETKELUAR/PUPR/2022	Jurnal Mutasi Aset Keluar Dari Pupr Tahun 2022	(103.424.240)
196	31/12/2022	34/JP/MUTASIASETKELUAR/PUPR/2022	Jurnal Mutasi Aset Keluar Dari Pupr Tahun 2022	(3.632.993.208)
197	31/12/2022	34/JP/MUTASIASETKELUAR/PUPR/2022	Jurnal Mutasi Aset Keluar Dari Pupr Tahun 2022	(417.927.118)
198	31/12/2022	35/JP/MUTASIASETMASUK/PUPR/2022	Jurnal Mutasi Aset Masuk Pupr Tahun 2022	261.830.000
199	31/12/2022	35/JP/MUTASIASETMASUK/PUPR/2022	Jurnal Mutasi Aset Masuk Pupr Tahun 2022	378.510.900
200	31/12/2022	35/JP/MUTASIASETMASUK/PUPR/2022	Jurnal Mutasi Aset Masuk Pupr Tahun 2022	124.606.400
201	31/12/2022	36/JP/KURANGCATATASET/PUPR/2022	Jurnal Penyesuian Kurang Catat Aset Tetap Pupr	131.495.804
202	31/12/2022	36/JP/KURANGCATATASET/PUPR/2022	Jurnal Penyesuian Kurang Catat Aset Tetap Pupr	6.884.460
203	31/12/2022	01/JK/BPK/DINKES/2022	Koreksi Kurang saji Aset peralatan Mesin pada Dinas Kesehatan berupa Petalatan Jaringan yang merupakan Aset Ekstrakuntabel Modem namun tercatat sebagai Aset Intrakuntabel	350.000,00
204	31/12/2022	01/JK/BPK/DPMPPTSP/TBB/2022	Koreksi Kurang sebesar (Rp 297.160.000,00) yang merupakan kelebihan Saji mutasi aset Bangunan Gedung Kantor dari Dinas PUPR	(297.160.000,00)
205	31/12/2022	01/JK/BPK/KOPERINDAG/TBB/2022	Koreksi Kurang saji Aset Tanah pasar Pulung dan Pasar Mulya Asri yang berasal dari Tiyuh	4.155.600.000,00
Total				**33.862.094.008,48**

5.5.4.6 Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.7 Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tetap Per 31 Desember 2022:

No	No Bukti	Uraian	Debet	Kredit
1	01/JK/BPK/CAPIL/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	1,00
2	01/JK/BPK/D.PERIKANAN/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	39.800.000,00
3	01/JK/BPK/D.PERTANIAN/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	4,00
4	01/JK/BPK/D.PERTANIAN/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	2,00
5	01/JK/BPK/D.PERTANIAN/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	2,00
6	01/JK/BPK/D.PERTANIAN/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	2,00
7	01/JK/BPK/DAMKAR/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	791.450.000,00
8	01/JK/BPK/DAMKAR/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	6.458.333,00
9	01/JK/BPK/DAMKAR/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	3.392.098,00
10	01/JK/BPK/DAMKAR/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	2.000.000,00
11	01/JK/BPK/DAMKAR/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	16.666.667,00
12	01/JK/BPK/DISHUB/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	3,00
13	01/JK/BPK/DKP/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	4,00	-
14	01/JK/BPK/DM/2022	Koreksi kurang catat Koreksi lebih catat atas saldo awal Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Domestik	6.662.138,00	-
15	01/JK/BPK/DPPKB/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	12,00	-
16	01/JK/BPK/DPPKB/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	11,00	-
17	01/JK/BPK/KEC.TUMIJAJAR/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	26.039.285,00	-
18	01/JK/BPK/KR/2022	Koreksi kurang catat atas Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua tahun 2022	-	1,00
19	01/JK/BPK/MB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	42.721.224,00	-
20	01/JK/BPK/P.MARGODADI/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	1,00
21	01/JK/BPK/P.MARGODADI/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	1,00
22	01/JK/BPK/P.MARGODADI/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	218.465.985,00
23	01/JK/BPK/P.MARGODADI/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	55.804.487,00
24	01/JK/BPK/P.TOTOKATON/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	1,00	-
25	01/JK/BPK/P.TOTOKATON/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	218.465.985,00	-
26	01/JK/BPK/P.TOTOKATON/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	55.804.487,00	-
27	01/JK/BPK/PERKIMTA/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	277.524.150,00
28	01/JK/BPK/PERKIMTA/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	23.112.143,00
29	01/JK/BPK/PERKIMTA/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	123.020,00
30	01/JK/BPK/PERKIMTA/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	341.980,00
31	01/JK/BPK/PERKIMTA/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	2,00
32	01/JK/BPK/PUPR/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	26.700.952.503,00	-
33	01/JK/BPK/PUPR/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	1,00	-

34	01/JK/BPK/RSUD/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	1,00
35	01/JK/BPK/RSUD/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	6.646.838,00
36	01/JK/BPK/SETWAN/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	350.000,00
37	01/KOREKSIAKUMULASI/MA/TBB/2022	KOREKSI AKUMUALSI PENYUSUTAN	-	1,00
38	01/KOREKSIAKUMULASI/MA/TBB/2022	KOREKSI AKUMUALSI PENYUSUTAN	-	1,00
39	01/KOREKSIAKUMULASI/MA/TBB/2022	KOREKSI AKUMUALSI PENYUSUTAN	-	354.072.170,00
40	02/JK/BPK/D.PERIKANAN/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	13.543.528,00	-
41	02/JK/BPK/D.PERTANIAN/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	6,00	-
42	02/JK/BPK/DAMKAR/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	42.000.000,00	-
43	02/JK/BPK/DAMKAR/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	706.649.569,26	-
44	02/JK/BPK/DAMKAR/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	11.000.000,00	-
45	02/JK/BPK/DINKES/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	3.000,00
46	02/JK/BPK/DINKES/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	5.600.000,00
47	02/JK/BPK/DINKES/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	5.529.514,00
48	02/JK/BPK/DINKES/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	2.891.251,00
49	02/JK/BPK/DISDIK/2022	Koreksi Kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	4.806.299,88
50	02/JK/BPK/DISHUB/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	13.000.000,00	-
51	02/JK/BPK/DISHUB/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	3,00	-
52	02/JK/BPK/DISHUB/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	36,00	-
53	02/JK/BPK/DISHUB/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	1,00	-
54	02/JK/BPK/DKP/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	163.600.000,00
55	02/JK/BPK/DKP/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	15.024.405,00
56	02/JK/BPK/DLH/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	50.000,00
57	02/JK/BPK/DLH/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	60.514.110,00
58	02/JK/BPK/DLH/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	73.988.823,00
59	02/JK/BPK/DLH/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	1,00
60	02/JK/BPK/DM/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	140.000,00	-
61	02/JK/BPK/DPMPPTSP/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	449.703.210,00	-
62	02/JK/BPK/KOPERINDAG/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	883.569.857,00	-
63	02/JK/BPK/P.CANDRAMUKTI/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	1,00
64	02/JK/BPK/P.CANDRAMUKTI/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	20.409.001,00
65	02/JK/BPK/P.CANDRAMUKTI/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	1.033.333,00
66	02/JK/BPK/P.CANDRAMUKTI/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	1.857.977,00
67	02/JK/BPK/P.CANDRAMUKTI/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	3.734.042,00
68	02/JK/BPK/RSUD/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	1,00	-
69	02/JK/BPK/RSUD/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	180.000,00	-
70	02/JK/BPK/RSUD/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	66.491.534,00	-
71	02/JK/BPK/RSUD/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	601.350,00	-
72	02/JK/BPK/SETDA/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	89.000.003,00
73	02/JK/BPK/SETDA/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	36.628.572,00

74	02/JK/BPK/SETDA/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	4,00
75	02/JK/BPK/SJ/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	1,00	-
76	02/JP/PENYUSUTANMUTASI/ DM/2022	MUTASI PENYUSUTAN KOREKSI	1.480.003,00	-
77	02/JP/PENYUSUTANMUTASI/ DM/2022	MUTASI PENYUSUTAN KOREKSI	456.069.543,00	-
78	02/JP/PENYUSUTANMUTASI/ DM/2022	MUTASI PENYUSUTAN KOREKSI	14.066.249,00	-
79	02/JP/PENYUSUTANMUTASI/ DM/2022	MUTASI PENYUSUTAN KOREKSI	1.734.751,00	-
80	02/JP/PENYUSUTANMUTASI/ DM/2022	MUTASI PENYUSUTAN KOREKSI	6.662.138,00	-
81	03/JK/BPK/BPPRD/TBB/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	11.287.000,00
82	03/JK/BPK/DINKES/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	585.714.286,00	-
83	03/JK/BPK/DINKES/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	655.300.000,00	-
84	03/JK/BPK/DINKES/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	5.600.000,00	-
85	03/JK/BPK/DINKES/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	4.722.223,00	-
86	03/JK/BPK/DINKES/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	566.684.140,00	-
87	03/JK/BPK/DINKES/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	6.372.878,00	-
88	03/JK/BPK/DINKES/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	1.320.174.434,00	-
89	03/JK/BPK/DINKES/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	1,00	-
90	03/JK/BPK/DINKES/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	1,00	-
91	03/JK/BPK/DINKES/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	156.325.101,00	-
92	03/JK/BPK/DINKES/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	1,00	-
93	03/JK/BPK/DINKES/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	87.896.589,00	-
94	03/JK/BPK/DLH/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	39.990.652,00	-
95	03/JK/BPK/DLH/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	1,00	-
96	03/JK/BPK/P.CANDRAMUKTI/ TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	16.684.000,00	-
97	03/JK/BPK/P.CANDRAMUKTI/ TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	4.758.333,00	-
98	03/JK/BPK/P.CANDRAMUKTI/ TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	5.601.063,00	-
99	03/JK/BPK/SETDA/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	20.551.451,00	-
100	03/JK/BPK/SETDA/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	2,00	-
101	03/JK/BPK/SETDA/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	1,00	-
102	03/JK/BPK/SETDA/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	1,00	-
103	03/JK/BPK/SETDA/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	1,00	-
104	04/JK/BPK/BPPRD/TBB/2022	Koreksi kurang catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	800.000,00	-
105	09/JP/MUTASIAKUMULASIPE NY.MASUK/TUBABA/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK TAHUN 2022	10.688.095,00	-
106	10/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DPAD/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP TAHUN 2022	5.300.000,00	-
107	10/JP/KOREKSYUSUTAN/KH/ TBB/2022	JURNAL KOREKSI SALDO AWAL PENYSUTAN TAHUN 2022	377.777,00	-
108	10/JP/KOREKSYUSUTAN/KH/ TBB/2022	JURNAL KOREKSI SALDO AWAL PENYSUTAN TAHUN 2022	203.185.456,00	-
109	10/JP/KOREKSYUSUTAN/KH/ TBB/2022	JURNAL KOREKSI SALDO AWAL PENYSUTAN TAHUN 2022	9.152.406,00	-
110	10/JP/KOREKSYUSUTAN/KH/ TBB/2022	JURNAL KOREKSI SALDO AWAL PENYSUTAN TAHUN 2022	14.649.431,00	-
111	10/JP/MUTASIPENYUSUTAN/ BPBD/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP TAHUN 2022	-	16.200.000,00
112	10/JP/MUTASIPENYUSUTAN/ DAMKAR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP TAHUN 2022	807.500.000,00	-
113	10/JP/MUTASIPENYUSUTAN/ DAMKAR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP TAHUN 2022	6.458.333,00	-

114	10/JP/MUTASIPENYUSUTAN/ DAMKAR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP TAHUN 2022	3.392.098,00	-
115	10/JP/MUTASIPENYUSUTAN/ DAMKAR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP TAHUN 2022	2.000.000,00	-
116	10/JP/MUTASIPENYUSUTAN/ DAMKAR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP TAHUN 2022	5.666.667,00	-
117	10/JP/MUTASIPENYUSUTAN/ DINSOS/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP TAHUN 2022	-	168.410.000,00
118	10/JP/MUTASIPENYUSUTAN/ DINSOS/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP TAHUN 2022	-	9.583.333,00
119	10/JP/MUTASIPENYUSUTAN/ DKP/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP TAHUN 2022	163.600.000,00	-
120	10/JP/MUTASIPENYUSUTAN/ DKP/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP TAHUN 2022	14.702.500,00	-
121	10/JP/MUTASIPENYUSUTAN/ KOPERINDAG/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP TAHUN 2022	-	168.410.000,00
122	10/JP/MUTASIPENYUSUTAN/ TUMIJAJAR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP TAHUN 2022	-	16.050.000,00
123	10/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/GUNTER/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP KELUAR TAHUN 2022	-	181.390.000,00
124	10/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/GUNTER/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP KELUAR TAHUN 2022	-	32.100.000,00
125	10/JP/MUTASIPENYUSUTAN MASUK/PERKIMTA/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP MASUK TAHUN 2022	695.694.000,00	-
126	10/JP/MUTASIPENYUSUTAN MASUK/PERKIMTA/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP MASUK TAHUN 2022	183.060.000,00	-
127	10/JP/MUTASIPENYUSUTAN MASUK/PERKIMTA/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP MASUK TAHUN 2022	31.428.571,00	-
128	101/JP/KOREKSI-PENYUSUTANASET/PUPR/2022	Jurnal koreksi Akumulasi Penyusutan aset PUPR	-	300.000,00
129	101/JP/KOREKSI-PENYUSUTANASET/PUPR/2022	Jurnal koreksi Akumulasi Penyusutan aset PUPR	-	783.340.339,00
130	11/JP/KOREKSIPEMYSUSTAN /KOPERINDAG/TBB/2022	JURNAL KOREKSI PENYSUTAN KOPERINDAG	2,00	-
131	11/JP/KOREKSIPEMYSUSTAN /KOPERINDAG/TBB/2022	JURNAL KOREKSI PENYSUTAN KOPERINDAG	4,00	-
132	11/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /TK/ 2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	1,00
133	11/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /TK/ 2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	2.620.582,00
134	11/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /TK/ 2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	226.176.881,00
135	11/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /TK/ 2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	59.646.767,00
136	11/JP/M.AK.PENY.MASUK/BPKAD/TUBABA/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK TAHUN 2022	2.067.475.000,00	-
137	11/JP/M.AK.PENY.MASUK/BPKAD/TUBABA/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK TAHUN 2022	130.538.350,00	-
138	11/JP/M.AK.PENY.MASUK/PERIKANAN/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK TAHUN 2022	181.390.000,00	-
139	11/JP/M.AK.PENY.MASUK/PERIKANAN/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK TAHUN 2022	70.592.403,00	-
140	11/JP/M.AK.PENYUSUTANMASUK/BATU PUTIH/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK TAHUN 2022	42.788.095,00	-
141	11/JP/MUTASIAKUMULASIPENY.KELUAR/TUBABA/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR TAHUN 2022	-	181.390.000,00
142	11/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/NAKERTRANS/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR DISNAKERTRANS 2022	-	16.350.000,00
143	11/JP/MUTASIPENYUSUTAN MASUK/DINSOS/2022	JURNAL MUTASI PENYSUSTAN MASUK TAHUN 2022	181.390.000,00	-
144	11/JP/MUTASIPENYUSUTAN MASUK/DPPKB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK DPPKB 2022	15.000.000,00	-
145	11/JP/MUTASIPENYUSUTAN MASUK/GUNTER/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYSUTAN ASET MASUK 2022	13.400.000,00	-
146	12/JP/KOREKSI.PENYUSUTAN/DINSOS/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN KOMPUTER DINSOSO 2022	2.500.000,00	-
147	12/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DJ/TBB/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN	-	1,00

148	12/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DJ/TBB/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN	-	146.305.590,00
149	12/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DJ/TBB/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN	-	18.961.158,00
150	12/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DJ/TBB/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN	-	1.164.033,00
151	12/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /MD/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN ASET	-	1,00
152	12/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /MD/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN ASET	-	1,00
153	12/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /MD/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN ASET	-	295.379.286,00
154	12/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /MD/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN ASET	-	64.543.653,00
155	12/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /OBAT/GTM/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	1,00
156	12/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /OBAT/GTM/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	1,00
157	12/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /OBAT/GTM/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	2.620.582,00
158	12/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /OBAT/GTM/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	456.999.609,00
159	12/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /OBAT/GTM/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	89.488.203,00
160	12/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /TM/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	1,00
161	12/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /TM/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	1,00
162	12/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /TM/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	456.184.034,00
163	12/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /TM/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	7.529.333,00
164	12/JP/KOREKSIPENYUSUTAN MASUK/GUNTER/2022	JURNAL KOREKSI PENYSUSTAN RODA DUA GUNTER	-	2.711.905,00
165	12/JP/KOREKSIPENYUSUTAN MASUK/GUNTER/2022	JURNAL KOREKSI PENYSUSTAN RODA DUA GUNTER	-	1,00
166	12/JP/M.AK.PENY.KELUAR/B PKAD/TUBABA/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR TAHUN 2022	-	269.000.000,00
167	12/JP/M.AK.PENY.KELUAR/B PKAD/TUBABA/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR TAHUN 2022	-	749.000.000,00
168	12/JP/M.AK.PENYUSUTANKE LUAR/BATU PUTIH/2022	JUIRNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR TAHUN 2022	-	13.198.095,00
169	12/JP/MUTASI.PENYUSUTAN I.MASUK/BPKAD/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYSUUTAN ASET TETAP DARI SKPD LAIN KE BPKAD	2.067.475.000,00	-
170	12/JP/MUTASI.PENYUSUTAN I.MASUK/BPKAD/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYSUUTAN ASET TETAP DARI SKPD LAIN KE BPKAD	130.538.350,00	-
171	12/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUARDLH/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN K KELUAR LINGKUNGAN HIDUP 2022	-	599.170.000,00
172	12/JP/MUTASIPENYUSUTAN MASUK/NAKERTRANS/TBB/ 2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK 2022	200.000.000,00	-
173	12/JP/MUTASIPENYUSUTAN MASUK/NAKERTRANS/TBB/ 2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK 2022	27.637.000,00	-
174	13/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /MD/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	34.544.791,00
175	13/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /MK/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	1,00
176	13/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /MK/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	2.620.582,00
177	13/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /MK/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	207.230.501,00
178	13/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /MK/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	25.484.290,00
179	13/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /TK/2022	KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	1,00
180	13/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /TK/2022	KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	1,00
181	13/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /TK/2022	KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	218.465.985,00

182	13/JP/KOREKSIPENYUSUTAN/TK/2022	KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	55.804.487,00
183	13/JP/M.AK.PENYUSUTANKEL/KESBANGPOL/TUBABA/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR TAHUN 2022	-	32.920.000,00
184	13/JP/M.AK.PENYUSUTANMASUK/KESBANGPOL/TUBABA/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KESBANGPOL TAHUN 2022	200.000.000,00	-
185	13/JP/M.AK.PENYUSUTANMASUK/KESBANGPOL/TUBABA/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KESBANGPOL TAHUN 2022	13.079.598,00	-
186	13/JP/MUTASIPENYUSUTAN MASUK/BPMTSP/TUBABA/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK BPMTSP 2022	332.010.000,00	-
187	13/JP/MUTASIPENYUSUTAN MASUK/DLH/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK LINGKUNGAN HIDUP 2022	177.850.000,00	-
188	13/JP/MUTASIPENYUSUTAN MASUK/DLH/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK LINGKUNGAN HIDUP 2022	167.750.000,00	-
189	13/JP/MUTASIPENYUSUTAN MASUK/DLH/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK LINGKUNGAN HIDUP 2022	115.757.850,00	-
190	13/JP/MUTASIPENYUSUTAN MASUK/DLH/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK LINGKUNGAN HIDUP 2022	23.112.143,00	-
191	13/JP/MUTASIPENYUSUTAN MASUK/DLH/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK LINGKUNGAN HIDUP 2022	595.499.000,00	-
192	13/JP/MUTASIPENYUSUTAN MASUK/KEC.GA/TUBABA 2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK KEC. GUNUNG AGUNG 2022	10.688.095,00	-
193	14/JP/KOREKSIPEMYSUSTAN/KOPERINDAG/TBB/2022	JERNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN KOPERINDAG	-	933.333,00
194	14/JP/KOREKSIPENYUSUTAN/KBJ/2022	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	1,00
195	14/JP/KOREKSIPENYUSUTAN/KBJ/2022	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	865.333,00
196	14/JP/KOREKSIPENYUSUTAN/KBJ/2022	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	845.000,00
197	14/JP/KOREKSIPENYUSUTAN/KBJ/2022	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	5.640.000,00
198	14/JP/KOREKSIPENYUSUTAN/KBJ/2022	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	388.012.730,00
199	14/JP/KOREKSIPENYUSUTAN/KBJ/2022	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	18.976.521,00
200	14/JP/M.AK.PENY.KELUAR/INSPEKTORAT/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	448.600.000,00
201	14/JP/M.AK.PENY.KELUAR/INSPEKTORAT/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	163.600.000,00
202	14/JP/M.AK.PENY.MASUK/INSPEKTORAT/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYSUTAN MASUK TAHUN 2022	1.310.900.000,00	-
203	14/JP/M.AK.PENY.MASUK/INSPEKTORAT/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYSUTAN MASUK TAHUN 2022	16.200.000,00	-
204	14/JP/MUTASI.PENYUSUTAN.KELUAR/BPKAD/2022	JURNAL MUTASI AKUMUALSI PENYUSUTAN ASET KELUAR	269.000.000,00	-
205	14/JP/MUTASI.PENYUSUTAN.KELUAR/BPKAD/2022	JURNAL MUTASI AKUMUALSI PENYUSUTAN ASET KELUAR	749.000.000,00	-
206	14/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/KEC.GA/TUBABA 2022	JURNAL AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR KEC. GUNUNG AGUNG TAHUN 2022	-	283.390.000,00
207	144854/DINASPU/KOR_AKM_PENYUSUTAN/2023	KOREKSI AKUM PENYUSUTAN DINAS PU	-	26.700.952.503,00
208	144854/DINASPU/KOR_AKM_PENYUSUTAN/2023	KOREKSI AKUM PENYUSUTAN DINAS PU	-	1,00
209	144854/DINASPU/KOR_AKM_PENYUSUTAN/2023	KOREKSI AKUM PENYUSUTAN DINAS PU	-	261.830.000,00
210	144854/DINASPU/KOR_AKM_PENYUSUTAN/2023	KOREKSI AKUM PENYUSUTAN DINAS PU	-	378.510.900,00
211	144854/DINASPU/KOR_AKM_PENYUSUTAN/2023	KOREKSI AKUM PENYUSUTAN DINAS PU	-	124.606.400,00
212	144854/DINASPU/KOR_AKM_PENYUSUTAN/2023	KOREKSI AKUM PENYUSUTAN DINAS PU	-	2.281.333,00
213	144854/DINASPU/KOR_AKM_PENYUSUTAN/2023	KOREKSI AKUM PENYUSUTAN DINAS PU	-	1,00

214	15/JP/AM.AK.PENY.MASUK/ DISPORA/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK TAHUN 2022	168.410.000,00	-
215	15/JP/AM.AK.PENY.MASUK/ DISPORA/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK TAHUN 2022	18.800.000,00	-
216	15/JP/AM.AK.PENY.MASUK/ DISPORA/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK TAHUN 2022	247.938.301,00	-
217	15/JP/AM.AK.PENY.MASUK/ DISPORA/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK TAHUN 2022	19.133.484,00	-
218	15/JP/M.AK.PENY.MASUK/K OMINFO/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK TAHUN 2022	524.190.000,00	-
219	15/JP/M.AK.PENY.MASUK/K OMINFO/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK TAHUN 2022	43.200.500,00	-
220	15/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/MA/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUSKES MULYA ASRI 2022	-	169.502.461,00
221	15/JP/MUTASIPENYUSUTAN MASUK/DLH/2022	MENCATAT AKUMULASI ANGKUTAN BARANG TAK BERMOTOR DLH	-	99.500.000,00
222	16/JP/AM.AK.PENY.KELUAR/ DISPORA/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR TAHUN 2022	-	168.410.000,00
223	16/JP/KOREKSIPENYSUSUTA NASET/PERKIMTA/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN ASET BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	11.616.348,00	-
224	16/JP/KOREKSIPENYSUSUTA NASET/PERKIMTA/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN ASET BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	1.134.839,00	-
225	16/JP/KOREKSIPENYSUSUTA NASET/PERKIMTA/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN ASET BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	372.529,00	-
226	16/JP/M.AK.PENY.MASUK/SE TWAN/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK TAHUN 2022	354.124.524,00	-
227	16/JP/M.AK.PENY.MASUK/SE TWAN/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK TAHUN 2022	362.519.750,00	-
228	16/JP/MUTASIPENYUSUTAN/ DLH/2022	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN POS JAGA	27.167.490,00	-
229	17/JP/KOREKSIPENYUSUSTA N/DLH/TUBABA/2022	MENCATAT KOREKSI EKUITAS AKUMULASI PENYUSUTAN	-	1,00
230	17/JP/KOREKSIPENYUSUSTA N/DLH/TUBABA/2022	MENCATAT KOREKSI EKUITAS AKUMULASI PENYUSUTAN	-	1,00
231	17/JP/M.AK.PENY.KELUAR/S ETDA/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR TAHUN 2022	-	2.062.243.000,00
232	17/JP/M.AK.PENY.KELUAR/S ETDA/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR TAHUN 2022	-	2.382.449.167,00
233	18/JP/KORKEISPEMYUSUTA NASET/SEKWAN/2022	JURNAL KORKSI PENYSUTAN ASET	-	73.267.143,00
234	18/JP/KORKEISPEMYUSUTA NASET/SEKWAN/2022	JURNAL KORKSI PENYSUTAN ASET	-	1.824.263.287,00
235	19/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /PERIKANAN/2022	KOREKSI PENYUSUTAN	-	1,00
236	19/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /PERIKANAN/2022	KOREKSI PENYUSUTAN	-	2,00
237	19/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /PERIKANAN/2022	KOREKSI PENYUSUTAN	-	359.965.000,00
238	19/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /PERIKANAN/2022	KOREKSI PENYUSUTAN	-	1,00
239	19/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /PERIKANAN/2022	KOREKSI PENYUSUTAN	-	160.194.510,00
240	19/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /PERIKANAN/2022	KOREKSI PENYUSUTAN	-	132.958.793,00
241	19/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /PERIKANAN/2022	KOREKSI PENYUSUTAN	-	1.805.321,00
242	19/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /PERIKANAN/2022	KOREKSI PENYUSUTAN	-	18.908.789,00
243	19/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /PERIKANAN/2022	KOREKSI PENYUSUTAN	-	1,00
244	19/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /PERIKANAN/2022	KOREKSI PENYUSUTAN	-	2,00
245	19/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/DINKES/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUARDINKES 2022	-	438.890.000,00
246	19/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/DINKES/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUARDINKES 2022	-	15.000.000,00
247	19/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/DINKES/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUARDINKES 2022	-	600.000.000,00
248	19/JP/MUTASIPENYUSUTAN MASUK/SJ/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK PUSKES SUKAJAYA 2022	34.182.997,00	-

249	19/JP/MUUTASIPENUSUTAN KELUR/SETWAN/2022	JURNAL MUTASI PENYSUTAN KELUAR KE SETDA	-	965.290.000,00
250	20/JK/BPK/BPKAD/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	269.000.000,00
251	20/JK/BPK/BPKAD/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	2.866.053.214,00
252	20/JK/BPK/BPKAD/2022	Koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan	-	132.626.029,00
253	20/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /JP/SJ/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	16.340.923,00	-
254	20/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /JP/SJ/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	251.354.250,00	-
255	20/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /JP/SJ/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	175.502.718,00	-
256	20/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /JP/SJ/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	25.197.401,00	-
257	20/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /JP/SJ/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	510.000,00	-
258	20/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /JP/SJ/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	300.000,00	-
259	20/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /JP/SJ/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	20.778.234,00	-
260	20/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /JP/SJ/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	23.338.333,00	-
261	20/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /JP/SJ/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	3.533.334,00	-
262	20/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /JP/SJ/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	958.800,00	-
263	20/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /JP/SJ/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	10.999.944,00	-
264	20/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /JP/SJ/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	1.662.728,00	-
265	20/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /JP/SJ/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	728.270,00	-
266	20/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /JP/SJ/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	489.656.240,00	-
267	20/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /JP/SJ/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	169.170,00	-
268	20/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /JP/SJ/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	43.740,00	-
269	20/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /JP/SJ/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	27.930.000,00	-
270	20/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /JP/SJ/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	115.550.833,00	-
271	20/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /JP/SJ/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	20.485.314,00	-
272	20/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /JP/SJ/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	477.448.827,00	-
273	20/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /PERIKANAN/2022	KOREKSI PENYUSUTAN	1,00	-
274	20/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /PERIKANAN/2022	KOREKSI PENYUSUTAN	13.116.909,00	-
275	20/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /PERIKANAN/2022	KOREKSI PENYUSUTAN	6,00	-
276	21/JP/KOREKISIPENYUSUTA N/BPPRD/TBB/2022/	JRANL KOREKSI PENYUSUTAN	3,00	-
277	21/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /JP/SJ/TBB/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	55.856.735,00
278	21/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /PJ/TBB/2022	KOREKSI PENYUSUTAN	-	1,00
279	21/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /PJ/TBB/2022	KOREKSI PENYUSUTAN	-	1.888.890,00
280	21/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /PJ/TBB/2022	KOREKSI PENYUSUTAN	-	212.024.223,00
281	21/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /PJ/TBB/2022	KOREKSI PENYUSUTAN	-	2.549.152,00
282	21/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /PJ/TBB/2022	KOREKSI PENYUSUTAN	-	272.791.173,00
283	21/JP/M.AK.PENY.MASUK/BA PPEDA/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK TAHUN 2022	280.190.000,00	-
284	21/JP/M.AK.PENY.MASUK/BK D/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK TAHUN 2022	495.610.000,00	-

285	21/JP/M.AK.PENY.MASUK/BKD/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK TAHUN 2022	16.050.000,00	-
286	21/JP/M.AK.PENY.MASUK/DPMT/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK TAHUN 2022	168.410.000,00	-
287	21/JP/M.AK.PENY.MASUK/PERTANIAN/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYSUTAN MASUK TAHUN 2022	168.410.000,00	-
288	21/JP/MUTASI.AK.PENY.MASUK/KEC.LKB/TBB/2022	JURNAL AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK LAMBU KIBANG TAHUN 2022	13.400.000,00	-
289	21/JP/MUTASI.AK.PENY.MASUK/KEC.PDEWA/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK TAHUN 2022	10.688.095,00	-
290	21/JP/MUTASIAKUMULASIPENY.KELUAR/KEC.TBU/TBB/2022	JURBAL AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR TAHUN 2022	-	102.000.000,00
291	21/JP/MUTASIAKUMULASIPENY.KELUAR/KEC.TBU/TBB/2022	JURBAL AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR TAHUN 2022	-	163.600.000,00
292	21/JP/MUTASIPENYUSUTAN MASUK/BKP/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK KETAHANAN PANGAN 2022	13.520.000,00	-
293	21/JP/MUTASIPENYUSUTAN MASUK/PETERNAKAN/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK PETERNAKAN 2022	47.225.100,00	-
294	22/JP/KOREKSIAKUMULASI PENYUSUTAN/CM/2022	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN	-	167.648.733,00
295	22/JP/KOREKSIAKUMULASI PENYUSUTAN/CM/2022	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN	-	16.733.783,00
296	22/JP/KOREKSIPENYSUTAN/ PETERNAKAN/TBB/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN PETERNAKAN TAHUN 2022	-	3,00
297	22/JP/KOREKSIPENYSUTAN/ TBU/2022	JURNAL KOREKSI PENYSUTAN KENDARAAN DINAS RODA DUA KEC. TBU 2022	-	2.711.905,00
298	22/JP/KOREKSIPENYSUTAN/ TBU/2022	JURNAL KOREKSI PENYSUTAN KENDARAAN DINAS RODA DUA KEC. TBU 2022	-	1,00
299	22/JP/KOREKSIPENYUSTANA SET/DINKES/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYSUTAN TAHUN SEBELUMNYA DINKES	-	2,00
300	22/JP/KOREKSIPENYUSTANA SET/DINKES/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYSUTAN TAHUN SEBELUMNYA DINKES	-	19.000.000,00
301	22/JP/KOREKSIPENYUSTANA SET/DINKES/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYSUTAN TAHUN SEBELUMNYA DINKES	-	160.537.127,00
302	22/JP/KOREKSIPENYUSTANA SET/DINKES/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYSUTAN TAHUN SEBELUMNYA DINKES	-	175.502.718,00
303	22/JP/KOREKSIPENYUSTANA SET/DINKES/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYSUTAN TAHUN SEBELUMNYA DINKES	-	1.125.000,00
304	22/JP/KOREKSIPENYUSTANA SET/DINKES/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYSUTAN TAHUN SEBELUMNYA DINKES	-	40.981.401,00
305	22/JP/KOREKSIPENYUSTANA SET/DINKES/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYSUTAN TAHUN SEBELUMNYA DINKES	-	4.855.000,00
306	22/JP/KOREKSIPENYUSTANA SET/DINKES/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYSUTAN TAHUN SEBELUMNYA DINKES	-	280.000,00
307	22/JP/KOREKSIPENYUSTANA SET/DINKES/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYSUTAN TAHUN SEBELUMNYA DINKES	-	15.144.934,00
308	22/JP/KOREKSIPENYUSTANA SET/DINKES/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYSUTAN TAHUN SEBELUMNYA DINKES	-	17.498.333,00
309	22/JP/KOREKSIPENYUSTANA SET/DINKES/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYSUTAN TAHUN SEBELUMNYA DINKES	-	3.533.334,00
310	22/JP/KOREKSIPENYUSTANA SET/DINKES/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYSUTAN TAHUN SEBELUMNYA DINKES	-	955.800,00
311	22/JP/KOREKSIPENYUSTANA SET/DINKES/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYSUTAN TAHUN SEBELUMNYA DINKES	-	10.999.944,00
312	22/JP/KOREKSIPENYUSTANA SET/DINKES/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYSUTAN TAHUN SEBELUMNYA DINKES	-	142.764.167,00
313	22/JP/KOREKSIPENYUSTANA SET/DINKES/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYSUTAN TAHUN SEBELUMNYA DINKES	-	12.880.000,00
314	22/JP/KOREKSIPENYUSTANA SET/DINKES/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYSUTAN TAHUN SEBELUMNYA DINKES	-	140.000,00
315	22/JP/KOREKSIPENYUSTANA SET/DINKES/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYSUTAN TAHUN SEBELUMNYA DINKES	-	1.512.000,00
316	22/JP/KOREKSIPENYUSTANA SET/DINKES/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYSUTAN TAHUN SEBELUMNYA DINKES	-	628.229.071,00
317	22/JP/KOREKSIPENYUSTANA SET/DINKES/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYSUTAN TAHUN SEBELUMNYA DINKES	-	728.153.000,00
318	22/JP/KOREKSIPENYUSTANA SET/DINKES/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYSUTAN TAHUN SEBELUMNYA DINKES	-	169.170,00

319	22/JP/KOREKSIPENYUSTANASET/DINKES/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYSUTAN TAHUN SEBELUMNYA DINKES	-	43.740,00
320	22/JP/KOREKSIPENYUSTANASET/DINKES/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYSUTAN TAHUN SEBELUMNYA DINKES	-	27.930.000,00
321	22/JP/KOREKSIPENYUSTANASET/DINKES/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYSUTAN TAHUN SEBELUMNYA DINKES	-	96.264.133,00
322	22/JP/KOREKSIPENYUSTANASET/DINKES/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYSUTAN TAHUN SEBELUMNYA DINKES	-	20.485.314,00
323	22/JP/M.AK.PENY.KELUAR/BAPPEDA/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR TAHUN 2020	-	619.340.000,00
324	22/JP/M.AK.PENY.KELUAR/BAPPEDA/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR TAHUN 2020	-	249.400.000,00
325	22/JP/M.AK.PENY.KELUAR/BAPPEDA/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR TAHUN 2020	-	32.295.000,00
326	22/JP/M.AK.PENY.KELUAR/BKD/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR TAHUN 2022	-	16.050.000,00
327	22/JP/M.AK.PENY.KELUAR/DPMT/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR TAHUN 2022	-	168.410.000,00
328	22/JP/M.AK.PENY.KELUAR/PERTANIAN/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR TAHUN 2022	-	168.410.000,00
329	22/JP/M.AK.PENY.KELUAR/PERTANIAN/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR TAHUN 2022	-	71.144.403,00
330	22/JP/M.AK.PENY.MASUK/DISHUB/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK TAHUN 2022	344.990.000,00	-
331	22/JP/M.AK.PENY.MASUK/DISHUB/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK TAHUN 2022	270.543.000,00	-
332	22/JP/M.AK.PENY.MASUK/DISHUB/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK TAHUN 2022	230.089.570,00	-
333	22/JP/M.AK.PENY.MASUK/DISHUB/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK TAHUN 2022	33.085.897,00	-
334	22/JP/MUTASI.AK.PENY.KELUAR/KEC.LKB/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR LAMBU KIBANG TAHUN 2022	-	163.600.000,00
335	22/JP/MUTASI.AK.PENY.KELUAR/KEC.PDEWA/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR TAHUN 2022	-	163.600.000,00
336	22/JP/MUTASIAKUMULASIPENY.MASUK/KEC.TBU/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK TAHUN 2022	13.400.000,00	-
337	22/JP/MUTASIPEMYSUSTANASET.MASUK/POLP/TBB/2022	JURNAL MUTASI ASET MASUK KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN DAN KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	211.500.000,00	-
338	22/JP/MUTASIPEMYSUSTANASET.MASUK/POLP/TBB/2022	JURNAL MUTASI ASET MASUK KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN DAN KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	599.170.000,00	-
339	22/JP/MUTASIPENYUSUTANKELUAR/BKP/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PEYUSUTAN KELUAR KETAHANAN PANGAN 2022	-	163.600.000,00
340	22/JP/MUTASIPENYUSUTANKELUAR/BKP/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PEYUSUTAN KELUAR KETAHANAN PANGAN 2022	-	14.702.500,00
341	22/JP/MUTASIPENYUSUTANKELUAR/PETERNAKAN/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PETERNAKAN 2022	-	50.737.000,00
342	22/JP/MUTASIPENYUSUTANMASUK/DUKCAPIL/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK DUKCAPIL 2022	163.600.000,00	-
343	22/JP/MUTASIPENYUSUTANMASUK/DUKCAPIL/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK DUKCAPIL 2022	12.700.000,00	-
344	23/JP/KOREKSI-PENYUSUTAN/BKD/TBB/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	-	18.174.569,26
345	23/JP/KOREKSI.PENYUSUTAN/KEC.LKB/TBB/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN KEC. LB KIBANG TH 2022	-	2.711.905,00
346	23/JP/KOREKSI.PENYUSUTAN/KEC.LKB/TBB/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN KEC. LB KIBANG TH 2022	-	2,00
347	23/JP/KOREKSI/AK.PENY.USTAN/DISHUB/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYSUTAN DISHUB 2022	1.175.233,00	-
348	23/JP/KOREKSI/SETDA/2022	MUTASI PENYUSUTAN KELUAR	3.372.987.262,00	-
349	23/JP/KOREKSI/SETDA/2022	MUTASI PENYUSUTAN KELUAR	297.700.000,00	-
350	23/JP/KOREKSI/SETDA/2022	MUTASI PENYUSUTAN KELUAR	44.075.000,00	-
351	23/JP/KOREKSIPENYSUTAN/TBB/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) DAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	-	10.800.000,00

352	23/JP/KOREKSIPENYSUTAN /TBB/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) DAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	-	6,00
353	23/JP/KOREKSIPENYUSTAN/ BAPPEDA/TBB/202	jurnal koreksi akumulasi penysutan bappeda 2022	-	2,00
354	23/JP/KOREKSIPENYUSTAN/ BAPPEDA/TBB/202	jurnal koreksi akumulasi penysutan bappeda 2022	-	1,00
355	23/JP/KOREKSIPENYUSTAN/ BAPPEDA/TBB/202	jurnal koreksi akumulasi penysutan bappeda 2022	-	1,00
356	23/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DUKCAPIL/TBB/2022	JURNAL KOREKSI PEMYUSUTAN KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	1,00	-
357	23/JP/KORKSIPENYSUTAN/DI SPORA/TBB/2022	KOREKSI AKUMULASI PENYSUTAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	847.247,00	-
358	23/JP/KORKSIPENYSUTAN/DI SPORA/TBB/2022	KOREKSI AKUMULASI PENYSUTAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	1.671.165,00	-
359	23/JP/M.AK.PENY.KELUAR/D ISHUB/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR TAHUN 2022	-	171.400.000,00
360	23/JP/M.AK.PENY.MASUK/DP AD/TBB/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK TAHUN 2022	181.390.000,00	-
361	23/JP/PENYUTANHIBAH.ASE T/DISHUB/TBB/2022	JUTNAL KOREKSI PENYSUTAN ASET KENDARAAN DARI HIBAH Dirjen Perhubungan TAHUN 2019	104.892.856,00	-
362	24/JP/KOREKSIPENYSUTAN/ PPKB /TBB/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN PPKB	-	6,00
363	24/JP/KOREKSIPENYSUTAN/ PPKB /TBB/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN PPKB	-	6,00
364	24/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DPAD/TBB/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN ASET PERPUS TAHUN 2022	-	1,00
365	25/JP/KOREKSIPENYUSTAN/ BPPD/2022	JURNAL KOREKSI AKUMUALASI PENYSUTAN RODA DUA	35.694.136,00	-
366	25/JP/MUTASI.PENYUSUTAN /DISDIIK/TBB/2022	JURNA; MUTASI PENYUSUTAN ASET KENDARAAN UANGKUTAN BARAING DARI PBJ	338.430.000,00	-
367	25/JP/PENYUSUTAN MUTASIASET/PERTANIAN/T BB/2022	MENCATAT PENYUSUTAN MUTASI ASET	-	788.361,00
368	26/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DISDIIK/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	2,00
369	26/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DISDIIK/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	20.307.164,00
370	26/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DISDIIK/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	338.430.000,00
371	26/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DISDIIK/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	11,00
372	26/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DISDIIK/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	0,12
373	26/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DISDIIK/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	1.575.000,00
374	26/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DISDIIK/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	2.910.000,00
375	26/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DISDIIK/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	1.237.003.297,00
376	26/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DISDIIK/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	611.111,00
377	26/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DISDIIK/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	2.688.444,00
378	26/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DISDIIK/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	31,00
379	26/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DISDIIK/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	49,00
380	26/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DISDIIK/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	1.100.000,00
381	26/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DISDIIK/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	7.905.848.311,00
382	26/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DISDIIK/TBB/2022	JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	-	72,00
383	26/JP/M.AK.PENY.KELUAR/B PPRD/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR TAHUN 2022	-	134.050.000,00
384	27/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DISDIIK/TBB/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	4.806.300,00	-

385	27/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DISDIIK/TBB/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	2.910.000,00	-
386	27/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DISDIIK/TBB/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	1.575.000,00	-
387	27/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DISDIIK/TBB/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	2,00	-
388	27/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DISDIIK/TBB/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	153,00	-
389	27/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DISDIIK/TBB/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	1,00	-
390	27/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DISDIIK/TBB/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	88,00	-
391	27/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DISDIIK/TBB/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	4.499.555,00	-
392	27/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DISDIIK/TBB/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	6.716.384.749,00	-
393	27/JP/KOREKSIPENYUSUTAN /DISDIIK/TBB/2022	JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TAHUN 2022	1.567.931.834,00	-
394	30/JP/KOREKSI/KEC.GA/TUBABA/2022	MENCATAT JURNAL PENYESUAIAN KOREKSI BANGUNAN GEDUNG KANTOR THN 2022	-	2,00
395	30/JP/KOREKSI/KEC.TBT/TUBABA/2022	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN	-	5,00
396	30/JP/KOREKSI/KEC.TBT/TUBABA/2022	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN	-	1,00
397	30/JP/PENYESUAIAN/KEC.PGDW/TUBABA/2022	MENCATAT JURNAL PENYESUAIAN KOREKSI PENYUSUTAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR TH 2022	1,00	-
398	30/JP/PKMILK/TUBABA/2022	MENCATAT JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA TH 2022	-	1,00
399	31/JP/PKMILJ/TUBABA/2022	MENCATAT JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN PERALATAN JARINGAN TH 2022	-	2.620.582,00
400	31/JP/PKMPGDW/TUBABA/2022	MENCATAT KOREKSI PENYUSUTAN ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR TH 2022	-	133.334,00
401	32/JP/AKUMULASIPENYUSUTANKELUAR/SETDA/2022	MENCATAT AKUMULASI ASET KELUAR KE SETWAN, DINKES DAN PUPR	-	1.079.460.650,00
402	32/JP/PENYESUAIAN/KEC.WAYKA/TUBABA/2022	MENCATAT JURNAL PENYESUAIAN KOREKSI EKUITAS BANGUNAN GEDUNG KANTOR TH 2022	-	1,00
403	32/JP/PKMILJ/TUBABA/2022	MENCATAT JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN BANGUNAN KESEHATAN TH 2022	-	216.935.491,00
404	33/JP/AKUMULASIPENYUSUTANMUTASIKELUAR/SETDA/2022	MENCATAT MUTASI KELUAR KENDARAAN RODA DUA KE OPD	-	623.269.805,00
405	33/JP/PKMILJ/TUBABA/2022	MENCATAT JURNAL PENYESUAIAN KOREKSI PENYUSUTAN TEMPAT PERISTIRAHATAN THN 2022	-	25.598.826,00
406	33/JP/PKMPGDW/TUBABA/2022	MENCATAT JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN MEBEL THN 2022	133.334,00	-
407	34/JP/PKMPGDW/TUBABA/2022	MENCATAT JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN PERSONAL KOMPUTER 2022	166.667,00	-
408	35/JP/PKMPGDW/TUBABA/2022	MENCATAT JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN PERALATAN PERSONAL KOMPUTER TH 2022	133.334,00	-
409	36/JP/PKMPGDW/TUBABA/2022	MENCATAT JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN BANGUNAN KESEHATAN TH 2022	-	461.038.568,00
410	37/JP/PKMPGDW/TUBABA/2022	MENCATAT JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN TEMPAT PERISTIRAHATAN THN 2022	-	35.645.736,00
411	40/JP/PENYESUAIAN/KEC.TMJJR/TUBABA/2022	MENCATAT JURNAL KOREKSI PENYUSUTAN GEDUNG KANTOR THN 2022	-	3,00
412	55/JP/MUTASIPENYUSUTAN MASUK/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK PUPR 2022	261.830.000,00	-
413	55/JP/MUTASIPENYUSUTAN MASUK/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK PUPR 2022	378.510.900,00	-
414	55/JP/MUTASIPENYUSUTAN MASUK/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN MASUK PUPR 2022	124.606.400,00	-
415	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	577.892.033,00
416	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	(280.192.034,00)
417	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	(105.806.400,00)
418	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	1.610.155.919,00
419	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	(1,00)

420	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	(1,00)
421	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	412.585.809,00
422	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	701.864.065,00
423	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	2,00
424	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	(289.100,00)
425	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	1,00
426	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	(274.269.330,00)
427	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	(226.483.368,00)
428	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	3,00
429	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	(25.671.863.534,46)
430	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	3,00
431	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	(25.788.389,00)
432	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	(2,00)
433	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	(43,00)
434	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	(2,00)
435	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	(1,00)
436	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	(2,00)
437	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	(1,00)
438	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	6,00
439	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	2,00
440	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	(2,00)
441	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	(18.724.171,00)
442	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	(27.489.342,00)
443	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	3,00
444	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	5,00
445	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	6,00
446	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	(141.939.076,00)
447	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	(1,00)
448	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	(1,00)
449	56/JP/MUTASIPENYUSUTAN KELUAR/PUPR/2022	JURNAL MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KELUAR PUPR 2022	-	-
450	61/JP/KOREKSIPENYUSUTUTAN/RSUD/2022	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN	-	624.821.747,00
451	62/JP/KOREKSIPENYUSUTUTAN/RSUD/2022	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN	419.200.000,00	-
452	62/JP/KOREKSIPENYUSUTUTAN/RSUD/2022	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN	31.984.700,00	-
453	62/JP/KOREKSIPENYUSUTUTAN/RSUD/2022	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN	257.781.000,00	-
454	62/JP/KOREKSIPENYUSUTUTAN/RSUD/2022	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN	12.880.000,00	-

455	62/JP/KOREKSIPENYUSUTUTAN/RSUD/2022	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN	10.584.009,00	-
456	62/JP/KOREKSIPENYUSUTUTAN/RSUD/2022	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN	73.670.000,00	-
457	62/JP/KOREKSIPENYUSUTUTAN/RSUD/2022	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN	5.716.156,00	-
458	62/JP/KOREKSIPENYUSUTUTAN/RSUD/2022	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN	94.196.340,00	-
459	62/JP/KOREKSIPENYUSUTUTAN/RSUD/2022	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN	22.599.250,00	-
		Total	**65.415.079.889,26**	**43.858.483.889,80** **(21.556.595.999,46)**

5.5.4.7. Koreksi ekuitas -Investasi Jangka Panjang

Koreksi Koreksi ekuitas -Investasi Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.8 Koreksi Ekuitas Lainnya Per 31 Desember 2022:

No	Tanggal.	No Bukti	Uraian	Nilai (Rp)
2	31/12/2022	01/JP/KOREKSIINSPEKTORAT/TBB/2022	Jurnal koreksi inspektorat lebih catat penyertaan modal bprs tani	19.472.434,82
Total				**19.472.434,82**

5.5.4.8 Koreksi Ekuitas – Aset Tetap Lainnya

Koreksi Ekuitas – Aset Tetap Lainnya dengan rincian:

Tabel 5.5.9 Koreksi Ekuitas – Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022:

No	Tanggal.	No Bukti	Uraian	Nilai (Rp)
1	31/12/2022	22/JP/HIBAH.ASET/DISPORA/TBB/2022	Mencatat Jurnal Hibah Aset Tanah Dari Tiyuh	192.468.000,00
Total				**192.468.000,00**

5.5.4.9 Koreksi Ekuitas – Kewajiban Jangka Pendek

Koreksi Ekuitas – Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian:

Tabel 5.5.10 Koreksi Ekuitas – Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2022:

No	Tanggal.	No Bukti	Uraian	Nilai (Rp)
1	03/01/2022	03/JB/HUTANGPAJAKRANDIS/PJ/TBB/2022	Mencatat Koreksi Hutang Pajak Randis Tahun 2021	7.801.552,50
2	03/01/2022	06/JB/HUTANGPAJAK/MD/2022	Jurnal Hutang Pajak Kendaraan Dinas Tahun 2021 Yang Dibayar Pribadi	2.763.000,00
3	30/12/2022	05/JB/H.BELANJAPAJAKRANDIS/DKP/TUBABA/2022	Mencatat Hutang Belanja Pajak Kendaraan Dinas Tahun 2021	38.576.333,00
4	31/12/2022	01/JP/H.BAYRARETENSITAMAN/PERKIMTA/2022	Jurnal Peyesuaian Hutang Retnsi Taman Tahun 2021 Yang Telah Dibayar Di Tahun 2022	792
5	31/12/2022	13/JP/H.BELANJAKO	JURNAL PENYESUIAN Utang Belanja	39.658.700,00

		NSTRUKSI/PUPR/2022	Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan Dan Konstruksi TAHUN 2020 YANG TELAH DIBAYAR	
6	31/12/2022	24/JP/K.H.BELAJAJALAN/PUPR/2022	Jurnal Penyesuaian Hutang Belanja Modal Jlan Tahun 2021 Yang Kurang Saji.	(255.064.103,00)
7	31/12/2022	26/JP/K.H.BELANJAJALANDESA/PUPR/2022	Jurnal Penyesuaian Lebih Saji Hutang Belanja Modal Jalan Desa 2021	39.726.800,00
8	31/12/2022	28/JP/K.H.BELANJAJEMBATAN/PUPR/2022	JURNAL PENYESUAIAN LEBOH SAJI Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan Pada Jalan Kabupaten TAHUN 2021 PUPR	115.656.200,00
9	31/12/2022	29/JP/K.H.BPEMELIHATAAN2TANAH/PUPR/2022	Jurnal Penyesuain Pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Parkir Tahun 2022	19.860.000,00
10	31/12/2022	367/KOREKSIHUTANGBUNGA/LKBB/2021	Jurnal Koreksi Atas Hitang Bunga Tahun 2021 Akibat Kesalahan Metode Pengitungan Akuntansi	8.896.715.016,93
Total				**8.905.694.291,43**

5.5.4.10 Koreksi ekuitas - Mutasi Aset Tetap antar OPD

Koreksi ekuitas - Mutasi Aset Tetap antar OPD dengan rincian:

Tabel 5.5.11 Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Per 31 Desember 2022:

No	Tanggal.	No Bukti	Uraian	Nilai (Rp)
1	31/12/2022	01/JK/BPK/SETDA/TBB/2022	Koreksi Kurang Aset Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan yang berasal dari Kecamatan Timujajar namun belum dilakukan pencatatatan Mutasi Aset keluar berupa Aset Kendaraan Dinas Bermotor	89.000.000,00
2	31/12/2022	02/JK/BPK/BPPRD/TBB/2022	Kurang saji Mutasi Aset diterima atau masuk Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp 5.335.138.246,00 yang berasal dari Dinas PUPR namun telah dilakukan pencatatatan Mutasi Aset keluar Bangunan	(5.335.138.246,00)
3		01/JK/BPK/KEC.TBT/TBB/2022	Koreksi Kurang saji Aset Tanah pada Kecamatan Tulang Bawang Tengah berupa tanah yang berasar dari Tulang Bawang yang telah dimutasikan ke dinas Perhubungan sebagai Tanah Kantor Dinas Perhubungan	(127.600.000,00)
4		02/JK/BPK/KEC.TBT/TBB/2022	Kurang saji Mutasi Aset diterima atau masuk Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp 29.450.000,00 yang berasal dari Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah dan bagian PBJ sekretariat Daerah namun telah dilakukan pencatatatan Mutasi Aset keluar berupa Aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah sebesar Rp 13.400.000,00 dan Bagian PBJ sekretariat Daerah sebesar Rp 16.050.000,00 Perhubungan	(29.450.000,00)
5		01/JK/BPK/BPPRD/TBB/2022	Kurang saji Mutasi Aset diterima atau masuk Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dan Kendaraan Bermotor Beroda Dua yang berasal dari bagian PBJ sekretariat Daerah namun telah dilakukan	(193.900.000,00)
Total				**(5.597.088.246,00)**

5.5.4.10 Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dengan rincian:

Tabel 5.5.12 Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Per 31 Desember 2022:

No	Tanggal.	No Bukti	Uraian	Nilai (Rp)
1	31/12/2022	21/JP/KOREKSIAKUMULASIPENYUSUTAN/2022	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN	(82.833.002,00)
Total				**(82.833.002,00)**

5.5.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun anggaran 2022 dibukukan sebesar Rp1.719.915.144.787,54. Apabila diperbandingkan dengan ekuitas akhir Tahun 2021 sebesar Rp1.724.672.884.954,37 terjadi penurunan sebesar (Rp4.757.740.166,83) atau sebesar (0,28%).

5.6 Penjelasan Pos –Pos Laporan Arus Kas

Laporan arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi di kas daerah, yang dikelola oleh bendahara umum daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat selama Tahun Anggaran 2022. Penerimaan dan pengeluaran kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Rincian arus kas dari aktivitas operasi dalam Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Realisasi arus kas masuk dari aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp865.856.869.792,69, terdiri atas pada Tabel 5.6.1 berikut.

Tabel 5.6.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

No.	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	22.564.039.994,63	19.874.146.791,65
2	Penerimaan Retribusi Daerah	1.862.050.812,00	1.650.159.759,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.551.893.890,58	2.630.507.797,43
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24.369.487.521,48	22.424.197.247,35
5	Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.104.376.388,00	28.074.423.464,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	436.040.756.350,00	436.265.639.071,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	189.434.906.778,00	158.687.021.449,00
8	Penerimaan Pendapatan Hibah	2.532.000.000,00	0,00

9	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	73.797.069.058,00	56.844.750.001,00
10	Penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	25.608.771.000,00
13	Penerimaan Dana Desa	82.600.289.000,00	91.449.163.000,00
14	Penerimaan Dana BOS	0,00	36.257.373.000,00
J u m l a h		**865.856.869.792,69**	**879.766.152.580,43**

b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Realisasi arus kas keluar dari aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp692.427.243.979,10, terdiri atas pada Tabel 5.6.2 berikut.

Tabel 5.6.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

No.	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	326.272.576.092,00	309.144.195.766,00
2	Belanja Bunga	9.266.529.386,00	8.075.098.450,00
3	Pembayaran Hibah	17.988.882.841,95	15.510.369.940,00
4	Pembayaran Bantuan Sosial	2.354.480.000,00	8.662.300.000,00
5	Pembayaran Tak Terduga	66.000.000,00	967.492.415,00
6	Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa, dan Partai Politik	128.462.147.244,00	137.914.877.729,00
7	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	4.792.178.045,00
8	Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	208.016.628.415,15	208.415.433.764,00
J u m l a h		**692.427.243.979,10**	**693.481.946.109,00**

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih merupakan selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Pada Tahun Anggaran 2022 arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp173.429.625.813,59.

5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas investasi dalam Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut.

a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Realisasi arus kas masuk dari aktivitas investasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp185.522.400,00.

b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Realisasi arus kas keluar dari aktivitas investasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp148.356.337.176,00 merupakan realisasi atas belanja modal yang terdiri atas pada Tabel 5.6.3 berikut.

Tabel 5.6.3 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Perolehan Tanah	4.118.548.330,00	9.868.382.380,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	15.366.078.102,00	22.339.638.986,90
3	Perolehan Bangunan dan Gedung	43.799.267.096,00	54.926.780.517,80
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	82.571.816.348,00	153.908.661.351,70
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.500.627.300,00	2.407.548.300,00
J u m l a h		**148.356.337.176,00**	**243.451.011.536,40**

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas investasi dalam Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar (Rp148.170.814.776,00) yang merupakan selisih dari arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas investasi.

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan

Realisasi arus kas masuk dari aktivitas Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp457.665.000,00 terdiri atas pada Tabel 5.6.4 berikut.

Tabel 5.6.4 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

No.	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	52.991.340.780,00
2.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	457.665.000,00	0,00
J u m l a h		**457.665.000,00**	**52.991.340.780,00**

Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat PDN adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya. Namun Pinjaman Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2022 tidak terealisasi walaupun terdapat nilai anggaran sebesar Rp6.200.000.000,00.

Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp457.665.000,00 merupakan penerimaan kembali yang berasal dari Kelompok Tani Peternak Sapi Tunas Remaja Tahap II sebesar Rp245.000.000,00 dan Tahap III sebesar Rp212.665.000,00

b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp38.229.966.258,00 yang merupakan pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo.

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar (Rp37.772.301.258,00), yang merupakan selisih dari arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan.

5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Arus kas yang terjadi menggambarkan mutasi antar rekening kas daerah. Arus kas dari aktivitas transitoris dalam Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut.

a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Realisasi arus kas masuk dari aktivitas transitoris pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp67.486.215.011,63 terdiri atas pada Tabel 5.6.5 berikut.

Tabel 5.6.5 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1.	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	67.486.215.011,63	81.832.463.345,22
Jumlah		**67.486.215.011,63**	**81.832.463.345,22**

Rincian realisasi arus kas masuk PFK sebesar Rp67.486.215.011,63 terdiri dari Tabel 5.6.6 berikut:

Tabel 5.6.6 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

No	Keterangan	Realisasi (Rp)
1	IWP 1%	1.539.228.725,00
2	IWP 8%	10.929.795.833,00
3	BPJS Kesehatan PNS	7.206.967.693,00
4	JKK	310.679.017,00
5	JKM	909.760.457,00
6	PPh Pasal 21 Pembayaran Sekaligus JHT/Pensiun/Pesangon	11.480.200,00
7	PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	15.033.797.941,00
8	PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	816.800.494,73
9	PPh Pasal 23 Jasa	728.355.664,08
10	PPh Pasal 4 (2) Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan	74.569.050,00
12	PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	36.250.000,00
13	PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi	3.058.422.611,00
14	PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	23.877.396.522,76

15	Taperum	65.000,00
16	Lainnya	2.877.775.087,06
17	Asuransi Kesehatan (1%)	14.313.325,00
18	Asuransi Kesehatan (4%)	60.557.391,00
J u m l a h		**67.486.215.011,63**

b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Realisasi arus kas keluar dari aktivitas transitoris pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp59.367.170.771,17, terdiri atas pada Tabel 5.6.7 berikut.

Tabel 5.6.7 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1.	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	59.367.170.771,17	81.362.519.362,32
	J u m la h	**59.367.170.771,17**	**81.362.519.362,32**

Rincian realisasi arus kas keluar PFK sebesar Rp59.367.170.771,17 terdiri dari Tabel 5.6.8 berikut:

Tabel 5.6.8 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

No	Keterangan	Realisasi (Rp)
1	IWP 1%	1.539.228.725,00
2	IWP 8%	10.929.795.833,00
3	BPJS Kesehatan PNS	7.023.958.478,00
4	JKK	310.679.017,00 3
5	JKM	909.760.457,00
6	PPh Pasal 21 Pembayaran Sekaligus JHT/Pensiun/Pesangon	11.480.200,00
7	PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	12.614.491.533,00
8	PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	796.483.893,73
9	PPh Pasal 23 Jasa	682.417.891,08
10	PPh Pasal 4 (2) Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan	74.569.050,00
12	PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	36.943.694,00
13	PPh Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi	2.184.358.900,00
14	PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	19.437.139.337,64
15	Taperum	65.000,00
16	Lainnya	3.051.428.684,72
17	Asuransi Kesehatan (1%)	14.491.703,00
18	Asuransi Kesehatan (4%)	60.557.391,00
Total		**59.367.170.771,17**

Dengan demikian terdapat selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp8.119.044.240,46.

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas transitoris dalam Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp8.119.044.240,46, yang menunjukkan terdapat penerimaan PFK yang masih terutang pada tahun 2022.

5.6.5 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas selama Periode

Kenaikan/Penurunan Kas Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp4.394.445.979,95) merupakan selisih dari arus kas masuk dan arus kas keluar dari seluruh aktivitas kas di BUD dan OPD, dapat dirinci pada Tabel 5.6.9 berikut.

Tabel 5.6.9 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas selama Periode per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas selama periode	**(4.394.445.979,95)**	**(40.774.397.630,07)**
Saldo Awal Kas	**10.188.920.005,45**	**50.963.257.635,52**
Koreksi SiLPA	**(0,23)**	**60.000,00**
Terdiri dari:		
Saldo Akhir Kas	5.794.474.025,27	10.188.920.005,45
Kas Di Kas Daerah	2.656.292.153,82	7.010.912.320,04
Kas Di Bendahara BLUD	3.053.774.077,45	3.143.551.073,41
Kas Di Bendahara Pengeluaran	49.099.182,00	0,00
Kas Di Bendahara BOS	35.308.612,00	34.456.612,00
Kas Di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	**5.794.474.025,27**	**10.188.920.005,45**

Dari perhitungan atas, kenaikan/penurunan bersih kas selama periode Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar (Rp4.394.445.979,95) diperoleh dari kenaikan/penurunan arus kas bersih dari aktivitas operasi, kenaikan/penurunan arus kas bersih dari aktivitas investasi,

kenaikan/penurunan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, dan kenaikan/penurunan arus kas bersih dari aktivitas transitoris.

Terhadap saldo awal Kas di BUD tahun 2022 sebesar Rp10.188.920.005,45 diperoleh dari pembayaran PFK Tahun 2021 Rp570.501.00.

Saldo akhir kas di Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp5.794.474.025,27, yang merupakan akumulasi dari Kenaikan/penurunan bersih kas selama periode sebesar (Rp4.394.445.979,95) dan saldo awal Kas sebesar Rp10.188.920.005,45.

Adapun saldo akhir kas di Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp5.794.474.025,27 terdiri dari :

1. Kas di Kas Daerah sebesar Rp2.656.292.153,82, yang merupakan saldo akhir Kas di rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tercatat pada Laporan Keuangan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022sebagai berikut:

    a. PT. Bank Lampung (pengeluaran) dengan dengan nomor rekening 396.00.09.00001.7 sebesar Rp29.157.594,48;
    b. PT. Bank Lampung (penerimaan) dengan dengan nomor rekening 396.00.09.00002.3 sebesar Rp602.176.543,40;
    c. BRI dengan nomor rekening 0155-01-001540-30-3 sebesar Rp576.780.908,60;
    d. BNI dengan nomor rekening 0784848470 sebesar Rp1.425.596.694;
    e. Bank Mandiri dengan nomor rekening 114-000044-3344 sebesar Rp22.580.413,34.

2. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00.

3. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp49.099.182,00

4. Kas Di Bendahara BLUD sebesar Rp3.053.774.077,45 yang dapat dirinci Tabel 5.6.10 berikut.

Tabel 5.6.10 Kas Di Bendahara BLUD per 31 Desember 2022

No.	Uraian	TA 2022 (Rp)
1	Puskesmas Kartaraharja	43.837.017,23
2	Puskesmas Daya Murni	121.445.212,32
3	Puskesmas Panaragan Jaya	262.307.515,19
4	Puskesmas Mulya Asri	141.060.626,03
5	Puskesmas Candra Mukti	42.857.484,57
6	Puskesmas Pagar Dewa	34.994.398,03
7	Puskesmas Kibang Budi Jaya	110.533.264,04
8	Puskesmas Toto Mulyo	242.077.695,86
9	Puskesmas Suka Jaya	309.298.709,22
10	Puskesmas Mercu Buana	251.481.702,56
11	Puskesmas Toto Katon	22.070.733,00
12	Puskesmas Dwikora Jaya	1.187.837,17
13	Puskesmas Margodadi	8.471.783,25
14	Puskesmas Marga Kencana	1.096.350,67
15	Puskesmas Gilang Tunggal Makarta	625.350,43
16	Puskesmas Indraloka Jaya	9.784.398,65
17	Rumah Sakit Umum Daerah TUBABA	1.449.933.387,00
18	Pasar Pulung Kencana	710.612,00
	Saldo Akhir Kas FKTP	**3.053.774.077,45**

5. Kas di Bendahara BOS merupakan saldo kas yang ada pada Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2022 sebesar Rp35.308.612,00 dengan rincian Tabel 5.6.11 berikut.

Tabel 5.6.11 Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2022
1	UPT SDN 2 Tulang Bawang Tengah	51.200,00
2	UPT SDN 3 Tulang Bawang Tengah	80.000,00
3	UPT SDN 8 Tulang Bawang Tengah	270.000,00
4	UPT SDN 10 Tulang Bawang Tengah	5.000,00
5	UPT SDN 18 Tulang Bawang Tengah	40.000,00
6	UPT SDN 19 Tulang Bawang Tengah	428.000,00
7	UPT SDN 20 Tulang Bawang Tengah	17.500,00
8	UPT SDN 21 Tulang Bawang Tengah	6.000,00
9	UPT SDN 23 Tulang Bawang Tengah	220.000,00
10	UPT SDN 24 Tulang Bawang Tengah	572.900,00

11	UPT SDN 25 Tulang Bawang Tengah	1.844.000,00
12	UPT SDN 26 Tulang Bawang Tengah	100.000,00
13	UPT SDN 33 Tulang Bawang Tengah	220.000,00
14	UPT SDN 34 Tulang Bawang Tengah	40.000,00
15	UPT SDN 37 Tulang Bawang Tengah	12.000,00
16	UPT SDN 39 Tulang Bawang Tengah	458.000,00
17	UPT SDN 40 Tulang Bawang Tengah	122.000,00
18	UPT SDN 5 Tumijajar	540.000,00
19	UPT SDN 9 Tumijajar	270.000,00
20	UPT SDN 11 Tumijajar	270.000,00
21	UPT SDN 18 Tumijajar	60.000,00
22	UPT SDN 19 Tumijajar	270.000,00
23	UPT SDN 20 Tumijajar	330.000,00
24	UPT SDN 26 Tumijajar	100.000,00
25	UPT SDN 27 Tumijajar	270.000,00
26	UPT SDN 3 Tulang Bawang Udik	1.069.000,00
27	UPT SDN 7 Tulang Bawang Udik	450.000,00
28	UPT SDN 10 Tulang Bawang Udik	273.000,00
29	UPT SDN 14 Tulang Bawang Udik	270.000,00
30	UPT SDN 22 Tulang Bawang Udik	270.600,00
31	UPT SDN 1 Gunung Terang	328.000,00
32	UPT SDN 4 Gunung Terang	1.162.000,00
33	UPT SDN 6 Gunung Terang	44.000,00
34	UPT SDN 8 Gunung Terang	2.550.000,00
35	UPT SDN 9 Gunung Terang	30.000,00
36	UPT SDN 10 Gunung Terang	207.000,00
37	UPT SDN 11 Gunung Terang	900.000,00
38	UPT SDN 12 Gunung Terang	130.000,00
39	UPT SDN 1 Batu Putih	323.000,00
40	UPT SDN 4 Batu Putih	270.000,00
41	UPT SDN 6 Batu Putih	695.000,00
42	UPT SDN 8 Batu Putih	55.000,00
43	UPT SDN 9 Batu Putih	40.000,00
44	UPT SDN 3 Gunung Agung	300.000,00
45	UPT SDN 6 Gunung Agung	570.000,00
46	UPT SDN 11 Gunung Agung	12.600,00
47	UPT SDN 13 Gunung Agung	913.000,00
48	UPT SDN 14 Gunung Agung	100.000,00
49	UPT SDN 2 Lambu Kibang	270.000,00
50	UPT SDN 14 Lambu Kibang	480.000,00
51	UPT SDN 2 Way Kenanga	315.000,00
52	UPT SDN 3 Way Kenanga	262,00
53	UPT SDN 4 Way Kenanga	17.000,00
54	UPT SDN 8 Way Kenanga	270.000,00
55	UPT SDN 10 Way Kenanga	3.400,00

56	UPT SDN 12 Way Kenanga	270.000,00
57	UPT SDN 1 Pagar Dewa	436.500,00
58	UPT SDN 3 Pagar Dewa	70.000,00
59	UPT SDN 4 Pagar Dewa	100.000,00
60	UPT SMPN 1 TULANG BAWANG BARAT	462.400,00
61	UPT SMPN 4 TULANG BAWANG BARAT	780.000,00
62	UPT SMPN 22 TULANG BAWANG BARAT	11.500,00
63	UPT SMPN 24 TULANG BAWANG BARAT	10.000,00
64	UPT SMPN 6 TULANG BAWANG BARAT	1.512.000,00
65	UPT SMPN 7 TULANG BAWANG BARAT	930.000,00
66	UPT SMPN 8 TULANG BAWANG BARAT	3.235.000,00
67	UPT SMPN 11 TULANG BAWANG BARAT	2.000,00
68	UPT SMPN SATU ATAP 5 TULANG BAWANG BARAT	2.654.000,00
69	UPT SMPN 2 TULANG BAWANG BARAT	400.000,00
70	UPT SMPN 3 TULANG BAWANG BARAT	3.600.750,00
71	UPT SMPN 25 TULANG BAWANG BARAT	300.000,00
72	UPT SMPN SATU ATAP 3 TULANG BAWANG BARAT	770.000,00
73	UPT SMPN 18 TULANG BAWANG BARAT	495.000,00
74	UPT SMPN 27 TULANG BAWANG BARAT	10.000,00
75	UPT SMPN 13 TULANG BAWANG BARAT	322.000,00
76	UPT SMPN 23 TULANG BAWANG BARAT	23.000,00
	JUMLAH	**35.308.612,00**

BAB VI

INFORMASI NON KEUANGAN

2.1 6.1. Domisili dan Administratif Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Secara Geografis wilayah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak antara 104º55’ sampai dengan 105º10’ Bujur Timur dan 3º35’ sampai dengan 6º15 Lintang Selatan. Dengan letak tersebut Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan daerah beriklim tropis dengan musim hujan dan kemarau bergantian sepanjang tahun. Temperature rata-rata 25°C — 31°C, curah hujan antara 57—299 mm/tahun, dengan kelembaban rata-rata 85,2. Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan dataran rendah dengan ketinggian 39 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Tulang Bawang Barat dialiri beberapa sungai, diantaranya Sungai Way Kanan, Sungai Way Kiri, Sungai Way Pedada, Sungai Way Papan, dan Sungai Way Bawang. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah alluvial, regosol, pedzolik coklat, latosol, dan pedzolik merah kuning. Kabupaten Tulang Bawang Barat berjarak kurang lebih 135 km dari ibukota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung.

Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, serta Kecamatan Wayserdang dan Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
Sebelah Timur	:	Berbatasan dengan Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Banjar Agung, dan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Abung Surakarta dan Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Negeri Besar, Kecamatan Negara Batin, dan Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

Kabupaten Tulang Bawang Barat mempunyai daerah daratan kurang lebih adalah 1.201 km². Kabupaten Tulang Bawang Barat dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI pada tanggal 3 April 2009 di Jakarta.

Sebelum menjadi daerah otonom mandiri, wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan bagian dari Kabupaten Tulang Bawang.

Proses berdirinya Kabupaten Tulang Bawang Barat dilatarbelakangi oleh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang tinggal di bagian Barat Kabupaten Tulang Bawang, yang menginginkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan ekonomi, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah.

Keinginan yang berkembang di masyarakat tersebut lalu terkristal dan diperjuangkan melalui jalur formal, yaitu dengan menyampaikan kepada unsur eksekutif dan legislatif, berikut dengan berbagai persyaratan yang diperlukan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Berbagai langkah yang telah dilakukan dalam rangka pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat akhirnya berbuah hasil dengan disahkannya Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta diresmikannya Kabupaten Tulang Bawang oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI. Acara peresmian tanggal 3 April 2009 yang berlangsung di Gedung Depdagri Jakarta tersebut bersamaan waktunya dengan pelantikan Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat yang pertama, yaitu Syaifullah Sesunan, SH., MH.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2012, hari jadi Kabupaten Tulang Bawang Barat ditetapkan tanggal 3 April 2009. Dengan demikian setiap tanggal 3 April merupakan hari ulang tahun Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2.2 6.2. Organisasi Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dilaksanakan oleh Unit-unit Kerja yang dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

1. Dua Sekretariat, yaitu :
    1) Sekretariat Daerah Kabupaten
    2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Satu Inspektorat Daerah
3. Enam Badan, yaitu :
    1) Badan Perencana Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
    2) Badan Keuangan dan Aset Daerah
    3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
    4) Badan Pendapatan Daerah
    5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
    6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Dua Puluh Dua Dinas, yaitu :
    1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
    2) Dinas Kesehatan
    3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    4) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
    5) Dinas Sosial
    6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    7) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    8) Dinas Ketahanan Pangan
    9) Dinas Lingkungan Hidup
    10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh
    12) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    13) Dinas Perhubungan
    14) Dinas Komunikasi dan Informatika
    15) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
    16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
    17) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
    18) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
    19) Dinas Perikanan
    20) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
    21) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
    22) Dinas Pemadam Kebakaran
6. Sembilan Kecamatan, yaitu
    1) Kecamatan Tulang Bawang Tengah
    2) Kecamatan Tulang Bawang Udik
    3) Kecamatan Gunung Terang
    4) Kecamatan Gunung Agung
    5) Kecamatan Lambu Kibang
    6) Kecamatan Way Kenanga
    7) Kecamatan Tumijajar

8) Kecamatan Pagar Dewa
9) Kecamatan Batu Putih

7. Tujuh Belas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
   1) Puskesmas Kartaraharja
   2) Puskesmas Dayamurni
   3) Puskesmas Panaragan Jaya
   4) Puskesmas Mulya Asri
   5) Puskesmas Candra Mukti
   6) Puskesmas Pagar Dewa
   7) Puskesmas Kibang Budi Jaya
   8) Puskesmas Toto Mulyo
   9) Puskesmas Sukajaya
   10) Puskesmas Mercu Buana
   11) Puskesmas Toto Katon
   12) Puskesmas Dwikora
   13) Puskesmas Margodadi
   14) Puskesmas Marga Kencana
   15) Puskesmas Gilang Tunggal Makarta
   16) Puskesmas Indraloka Jaya
   17) Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat

6.3. Kepegawaian Daerah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan

manajemen aparatur sipil negara.

Kebijakan dan Manajemen ASN yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan dengan memperhatikan kekhususan daerah tertentu. Jumlah Aparatur Sipil Negara yang ada pada Kabupaten Tulang Bawang Barat hingga saat ini adalah 3418 Pegawai yang tersebar di 58 Organisasi Perangkat Daerah dan terdiri 486 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan :

GOLONGAN	CPNS		PNS		JUMLAH
	L	P	L	P	
I/a	0	0	0	0	0
I/b	0	0	0	0	0
I/c	0	0	3	2	5
I/d	0	0	3	1	4
II/a	0	0	10	4	14
II/b	0	0	17	14	31
II/c	24	94	35	106	259
II/d	0	1	20	30	51
III/a	13	47	178	333	571
III/b	16	32	99	184	331
III/c	0	1	172	265	438
III/d	0	0	267	267	534
IV/a	0	0	143	162	305
IV/b	0	0	170	184	354
IV/c	0	0	27	7	34
IV/d	0	0	1	0	1
IV/e	0	0	0	0	0
TOTAL	**53**	**175**	**1145**	**1559**	**2932**

a. Golongan I sebanyak 9 orang terdiri dari Pria sebanyak 6 orang dan Wanita sebanyak 3 orang;

b. Golongan II sebanyak 355 orang terdiri dari CPNS Pria sebanyak 24 orang, CPNS Wanita sebanyak 95 orang, PNS Pria sebanyak 82 orang dan PNS Wanita sebanyak 154 orang;
c. Golongan III sebanyak 1.874 orang terdiri dari CPNS Pria sebanyak 29 orang, CPNS Wanita sebanyak 80 orang, PNS Pria sebanyak 716 orang dan PNS Wanita sebanyak 1049 orang;
d. Golongan IV sebanyak 694 orang terdiri dari PNS Pria sebanyak 341 orang dan PNS Wanita sebanyak 353 orang;

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

JENJANG PENDIDIKAN	CPNS		PNS		JUMLAH
	L	P	L	P	
SD SEDERAJAT	0	1	10	4	15
SLTP UMUM	0	0	11	6	17
SLTA UMUM	0	0	82	77	159
SLTA KEJURUAN	0	0	40	29	69
SLTA KEGURUAN	0	0	32	88	120
DIPLOMA I	0	0	0	14	14
DIPLOMA II	0	0	122	184	306
SARJANA MUDA	0	0	0	0	0
DIPLOMA III	24	101	85	258	468
DIPLOMA IV	0	18	8	49	75
SARJANA	29	54	565	753	1401
AKTA IV PENDIDIKAN	0	0	0	0	0
SPESIALIS	0	1	2	1	4
PASCA SARJANA	0	0	188	96	284
DOKTOR	0	0	0	0	0
TOTAL	**53**	**175**	**1145**	**1559**	**2932**

a. SD Sederajat sebanyak 15 orang terdiri dari CPNS Pria sebanyak 1 orang, PNS Pria sebanyak 10 orang dan PNS

Wanita sebanyak 4 orang;

b. SLTP Umum sebanyak 17 orang terdiri dari PNS Pria sebanyak 11 orang dan PNS Wanita sebanyak 6 orang;
c. SLTA Umum sebanyak 159 orang terdiri dari PNS Pria sebanyak 82 orang dan PNS Wanita sebanyak 77 orang;
d. SLTA Kejuruan sebanyak 69 orang terdiri dari PNS Pria sebanyak 40 orang dan PNS Wanita sebanyak 29 orang;
e. SLTA Keguruan sebanyak 120 orang terdiri dari PNS Pria sebanyak 32 orang dan PNS Wanita sebanyak 88 orang;
f. DIPLOMA I sebanyak 14 orang terdiri dari PNS Wanita sebanyak 14 orang;
g. DIPLOMA II sebanyak 306 orang terdiri dari PNS Pria sebanyak 122 orang dan PNS Wanita sebanyak 184 orang;
h. DIPLOMA III sebanyak 468 orang terdiri dari CPNS Pria sebanyak 24 orang, CPNS Wanita sebanyak 101 orang, PNS Pria sebanyak 85 orang dan PNS Wanita sebanyak 258 orang;
i. DIPLOMA IV sebanyak 75 orang terdiri dari CPNS Wanita sebanyak 18, PNS Pria sebanyak 8 orang dan PNS Wanita sebanyak 49 orang;
j. Sarjana sebanyak 1401 orang terdiri dari CPNS Pria sebanyak 29 orang, CPNS Wanita sebanyak 54 orang, PNS Pria sebanyak 565 dan PNS Wanita sebanyak 753 orang;
k. Spesialis sebanyak 4 orang terdiri dari CPNS Wanita sebanyak 1 orang, PNS Pria sebanyak 2 orang dan PNS Wanita sebanyak 1 orang;
l. Pasca Sarjana sebanyak 284 orang terdiri dari PNS Pria sebanyak 188 orang dan PNS Wanita sebanyak 96 orang;

3 BAB VII
4 PENUTUP

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan (*accountability & stewardship*) dan diharapkan dapat memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2022 telah disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah berupa Laporan Keuangan Pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2022 khususnya Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, dilakukan melalui proses konversi terhadap kode rekening

anggaran. Karena Struktur APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2022 masih disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010. Terdapat perbedaan antara struktur APBD dan Laporan Realisasi Anggaran menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sedangkan struktur Laporan Operasional berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Demikian pula pada penyajian Neraca khususnya akun-akun yang terkait dengan aset tetap, juga dilakukan pemetaan dan penyesuaian rekening belanja modal terhadap klasifikasi aset tetap sesuai Laporan Barang Milik Daerah (LBMD). Karena masih terdapat perbedaan antara klasifikasi rekening belanja modal dengan akun aset tetap Barang Milik Daerah. Kode rekening belanja modal pada APBD 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sedangkan klasifikasi aset tetap pada Laporan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta terdapat perubahan Penggolongan dan perubahan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016.

Penerapan kebijakan akuntansi berbasis Akrual dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Tahun 2022 menjadi tahun keenam dalam pelaksanaanya, tentu saja masih banyak kendala yang dihadapi dalam penerapannya, salah satunya belum diimbangi dengan peningkatan pengetahuan Sumber Daya Aparatur yang ada khususnya Sumber Daya Aparatur yang bertugas sebagai penyusun Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah. Kemampuan dan pemahaman tentang basis akrual belum dimiliki secara merata pada Sumber Daya Aparatur pengelola

keuangan dan aset yang ada di satuan kerja, sehingga masih dibutuhkan pelatihan dan bimbingan secara intensif dan komprehensif dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan OPD yang menjadi bahan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dan sebagai penutup, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 ini merupakan laporan capaian kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2022 dari pelaksanaan program kegiatan selama satu tahun anggaran dalam rangka meletakkan dasar-dasar awal pembangunan daerah dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pada masa-masa yang akan datang dan perbaikan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan program kegiatan.

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Dr. ZAIDIRINA, S.E.,M.Si